



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dlaam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Banten untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Dasar penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 30 Juni 2022
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 30 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

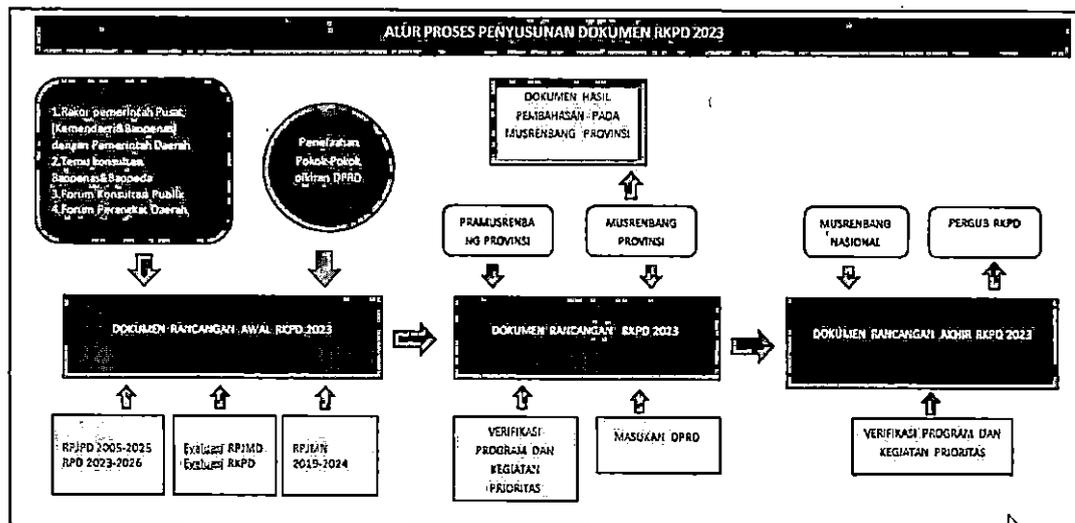
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, merupakan dokumen yang disusun dengan mengacu pada beberapa aturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadikan Pemilukada akan dilaksanakan kembali pada Tahun 2024 dan dengan berakhirnya kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy di tahun 2022 berakhir pula RPJMD 2017-2022. Melalui Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022. RKPD yang disusun saat ini menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya karena mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. RKPD merupakan acuan Pj.Gubernur dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Selain kedudukannya yang strategis tersebut, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, Penyusunan RKPD sendiri berpedoman pada RPJMD/RPD, RKP dan Pedoman umum penyusunan RKPD dengan memperhatikan pula prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.



Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD 2023
Provinsi Banten

1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

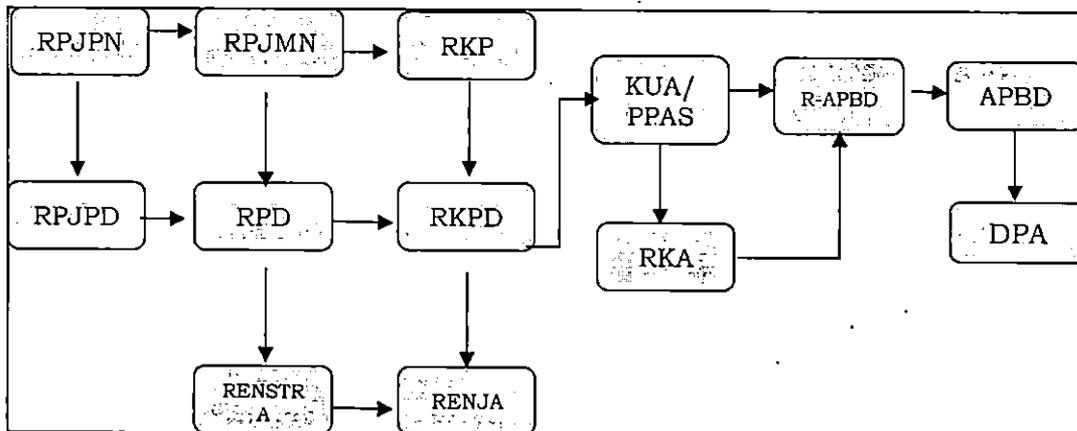
- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam gambar berikut :



Gambar 1. 2
Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjamin konsistensi perencanaan tahunan dan jangka menengah daerah RKPD tahun 2023 berpedoman pada RPD 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir, RPD 2023-2026 sendiri disusun dengan memperhatikan RPJPD dan RPJMN selanjutnya RKPD 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta penyusunan RKA Perangkat Daerah. Selain hal tersebut dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 akan menjadi acuan

penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan juga sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika RKPD Provinsi Banten Tahun 2023

Sistematika RKPD tahun 2023 disusun sebagai berikut:

1. Buku I, Narasi RKPD Tahun 2023 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2021 dan realisasi RKPD sampai dengan tahun 2021; permasalahan pembangunan daerah; dan isu strategis pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah; serta Arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di tahun 2023.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

2. Buku II, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021, terdiri dari: a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar c. Urusan Pilihan d. Fungsi Lainnya.
3. Buku III, Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

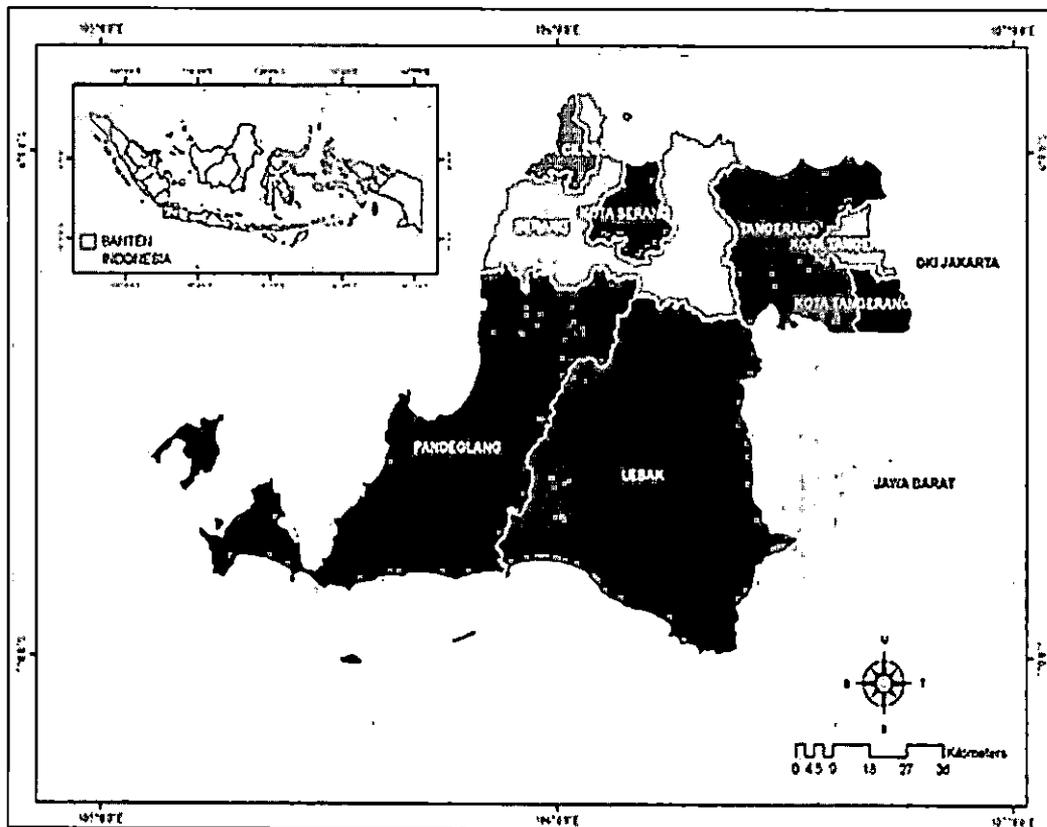
2.1.1.1 Kondisi Geografi

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 8.651,20 km² yang tertulis pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada tahun 2019, terdapat pembaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km².

Provinsi Banten tercatat memiliki 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang. Provinsi Banten kemudian mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk dua Kota baru, yakni Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU. Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU. Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

Dari sisi astronomis, wilayah Provinsi Banten berada pada batas 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50"-07°01'01" Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Banten juga terletak di dekat Selat Sunda yang merupakan lintasan perdagangan nasional dan internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga menjadikan posisi wilayah Provinsi Banten menjadi sangat strategis. Selain itu, Provinsi Banten terletak di ujung Barat Pulau Jawa (berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Negara, DKI Jakarta) sehingga menambah posisi geostrategis Provinsi Banten sebagai pintu gerbang jalur perdagangan Pulau Jawa dan Sumatera hingga bagian penting dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Provinsi Banten juga berpotensi sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial dengan sumber daya laut yang kaya. Adapun wilayah Provinsi Banten memiliki empat perbatasan yaitu:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. 1
Peta Wilayah Provinsi Banten
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dari sisi topografi, secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0-200 mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan rincian letak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Dilain sisi, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl serta daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang ditunjang oleh adanya puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Morfologi atau bentuk raut permukaan wilayah memiliki keterkaitan dengan kondisi topografi wilayah itu sendiri. Secara umum, morfologi wilayah Provinsi Banten dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama ialah morfologi dataran rendah yang

pada umumnya dapat ditemukan di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian kurang dari 50 mdpl sampai wilayah pantai yang memiliki ketinggian 0-1 mdpl.

Selanjutnya kelompok kedua ialah morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang yang sebagian besar dapat ditemukan di daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan ketinggian minimum 50 mdpl. Di Provinsi Banten bagian utara, tepatnya di Kota Cilegon, dapat ditemukan wilayah puncak Gunung Gede dengan ketinggian maksimum 553 mdpl, sedangkan daerah perbukitan di Kabupaten Serang dapat ditemukan di wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung. Wilayah perbukitan juga dapat ditemukan di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Lebak, lebih tepatnya di wilayah timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi. Wilayah ini memiliki karakteristik litologi yang berbentuk satuan sedimen tua dan terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku diorite, granit, granodiorit dan andesit. Pada daerah di sekitar terobosan batuan baku tersebut kerap terjadi sebuah proses remineralisasi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti cebakan bijih timah dan tembaga. Kelompok terakhir merupakan morfologi perbukitan terjal yang dapat ditemukan di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.

Pada wilayah Provinsi Banten, Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang banyak dijumpai potensi sumber daya air karena sebagian besar wilayahnya meliputi kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Secara lebih rinci, Provinsi Banten memiliki enam pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu:

- DAS Ujung Kulon yang meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);
- DAS Cibaliung-Cibareno yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian yang meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;

- DAS Rawadano yang meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada yang meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang; dan
- DAS Cisadane-Ciliwung yang meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Untuk tata air permukaan, wilayah Provinsi Banten sangat bergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Sampai saat ini, terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, dengan sifat lintas kabupaten/kota, yakni CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas provinsi meliputi CABT Serang-Tangerang dan CABT Jakarta. Potensi dari masing-masing satuan cekungan air bawah tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan

CABT Labuan Sebagian besar (± 93 persen) mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (± 7 persen) dengan luas sebesar ± 797 km². Adapun cekungan air bawah tanah memiliki perbatasan yakni dibagian barat adalah Selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena adanya perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sebesar ± 515 juta m³/tahun. Adapun pada tipe air bawah tanah yang terletak pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhan yang terletak mulai elevasi di atas 75 mdpl hingga daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang;

b. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano

CABT Rawadano meliputi wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km². Adapun cekungan satuan air bawah tanah ini memiliki batas satuan dibagian utara, timur dan selatan yang berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatu (420 m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule

(259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Asepun (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedangkan perbatasan di bagian barat ialah Selat Sunda.

Berdasarkan hasil perhitungan imbuhan air bawah tanah, ditemukan bahwa intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan Rawadano berjumlah ± 180 juta m^3 /tahun, dimana diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawadano sekitar ± 79 m^3 /tahun. Di lain sisi, air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer vulkanik purna danau dapat dijumpai di sejumlah 115 lokasi dengan total debit mencapai ± 2.185 m^3 /tahun. Sementara itu, pada unit akuifer vulkanik danau pada 89 lokasi, tercatat mencapai debit 367 m^3 /tahun. Secara keseluruhan, total debit dari mata air ialah sebesar ± 2.552 m^3 /tahun;

- c. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang-Cilegon
- Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang-Tangerang dimana dari sisi administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan cakupan luas wilayah berkisar 1.200 km^2 . Cekungan ini memiliki batas-batas satuan yakni di bagian utara ialah laut Jawa, bagian timur ialah Kali Ciujung, bagian barat ialah Selat Sunda, sedangkan bagian selatan merupakan batas tanpa aliran.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca air, ditemukan bahwa jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar ± 518 juta m^3 /tahun, sedangkan jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar ± 13 m^3 /tahun, dimana aliran ini berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya dengan elevasi mulai sekitar 50 mdpl;

- d. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang
- Secara administratif, satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas wilayah berkisar 1.850 km^2 . Adapun sub cekungan ini memiliki perbatasan yakni di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian barat adalah

Kali Ciujung, serta bagian Selatan yang merupakan kontak dengan lapisan nir akuifer. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa jumlah imbuan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang berkisar ± 311 juta m^3 /tahun, sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung berkisar $\pm 0,9$ juta m^3 /tahun.

Dari sisi iklim, wilayah Provinsi Banten sangat dipengaruhi oleh Gelombang La Nina atau El Nino serta Angin Monson (*Monsoon Trade*). Pada saat musim penghujan, (bulan November-Maret) cuaca di Provinsi Banten umumnya didominasi oleh angin Barat (berhembus dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang juga bergabung dengan angin dari Asia yakni melewati Laut Cina Selatan. Sedangkan pada bulan Agustus, umumnya cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan kekeringan yang keras (terlebih lagi apabila sedang berlangsung El Nino) di Provinsi Banten terutama di wilayah bagian pantai Utara. Adapun temperatur di daerah pantai dan perbukitan memiliki kisaran antara 22°C - 32°C , sedangkan suhu di daerah pegunungan dengan ketinggian antara 400-1.350 mdpl mencapai antara 18°C - 29°C .

Pada musim penghujan (bulan September-Mei), Provinsi Banten tercatat memiliki curah hujan tertinggi sebesar 2.712-3.670 mm yang mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat. Sedangkan pada bulan yang sama tercatat bahwa curah 335-453 mm mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang.

Sedangkan pada musim kemarau (bulan April-Desember), curah hujan tertinggi tercatat sebesar 615-833 mm mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Adapun curah hujan terendah pada musim kemarau tercatat sebesar 360-486 mm pada bulan Juni-September dengan luas cakupan sebesar 50 persen luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15 persen luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

Untuk kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten dikelompokkan menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- a. Dataran dengan tingkat kemiringan lahan antara 0-15 persen sebagian besar ditemukan di daerah Utara Provinsi Banten, dimana lahan ini menjadi sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dataran dengan tingkat kemiringan ini tidak memerlukan banyak perlakuan khusus pada saat proses prakonstruksi lahan yang akan dibangun. Lahan dengan kemiringan ini umumnya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, yakni sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yakni di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang hingga Kabupaten Lebak;
- b. Perbukitan dengan tingkat kemiringan < 15 persen dengan tekstur bergelombang rendah-sedang (landai-sedang) sebagian besar dapat ditemukan di bagian utara yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang;
- c. Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25 persen) dapat ditemui di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang;
- d. Perbedaan kondisi alamiah tersebut turut memiliki pengaruh terhadap adanya ketimpangan pembangunan yang semakin signifikan, dimana wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar dibandingkan dengan wilayah sebelah Selatan.

Untuk sumber daya tanah secara geografis wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi dua tipe tanah yakni kelompok tipe tanah sisa atau residu dan kelompok tipe tanah hasil angkutan. Distribusi dari masing-masing tipe tanah ini secara umum dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain ialah: 1. Aluvial pantai dan sungai; 2. Latosol; 3. Podsolik merah kuning; 4. Regosol; 5. Andosol; 6. Brown forest; dan 7. Glei.

Untuk struktur geologi, Provinsi Banten terdiri dari formasi batuan dengan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter

dimana tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200-800 meter. Formasi dengan satuan tertua ialah formasi Bojongmanik yang diperkirakan berusia Miosen akhir, dengan batuan yang terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasiran, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, yang dimana umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya ditemukan Formasi Cipacar yang terdiri dari tuff batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, yang dimana umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini ialah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasiran, lempung pasiran, batu gamping kokina dan tuff.

Untuk wilayah Provinsi Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan *alluvium* yang diperkirakan berumur mulai Miosen awal hingga Resen. Adapun satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen dan terdiri dari tiga anggota yakni Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Cicaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Untuk batuan Gunung Api, dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesiot hingga basal. Tuff Cikasungka diperkirakan berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada peta lembar Leuwidamar tersaji singkapan batuan metamorf yang diperkirakan berumur Ologo Miosen dan terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa diperkirakan berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit diperkirakan berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar. Batuan endapan termuda ialah aluvium serta endapan pantai yang dapat berupa kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Pada tahun 2019, terdapat pembaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten

memiliki luas 9.662,92 km² dengan wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) wilayah kabupaten dan 4 (empat) kota dengan rincian luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Rincian jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Kabupaten					
1	Pandeglang	2.746,89	35	326	13
2	Lebak	3.426,56	28	340	5
3	Tangerang	1.011,86	29	246	28
4	Serang	1.734,28	29	326	-
Kota					
5	Tangerang	153,93	13	-	104
6	Cilegon	175,50	8	-	43
7	Serang	266,71	6	-	66
8	Tangerang Selatan	147,19	7	-	54
PROVINSI BANTEN		9.662,92	155	1.238	313

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) wilayah administrasi dengan rincian 4 (empat) pemerintah kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 1.238 (satu ribu dua ratus tiga puluh delapan) desa dan 313 (tiga ratus tiga belas) kelurahan. Secara keseluruhan, luas Provinsi Banten adalah 9.662,92 km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi). Pemerintah kabupaten terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Sedangkan pemerintah kota terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa dan 13 (tiga belas) kelurahan dengan total luas wilayah sebesar 2.746,89 km² (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan kilometer persegi).

Pemerintah Kabupaten Lebak terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan, 340 (tiga ratus empat puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan dengan luas wilayah 3.426,56 km² (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima puluh enam kilometer persegi) dan merupakan wilayah paling luas di Provinsi Banten.

Pemerintah Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 246 (dua ratus empat puluh enam) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah 1.011,86 km² (satu ribu sebelas koma delapan puluh enam kilometer persegi).

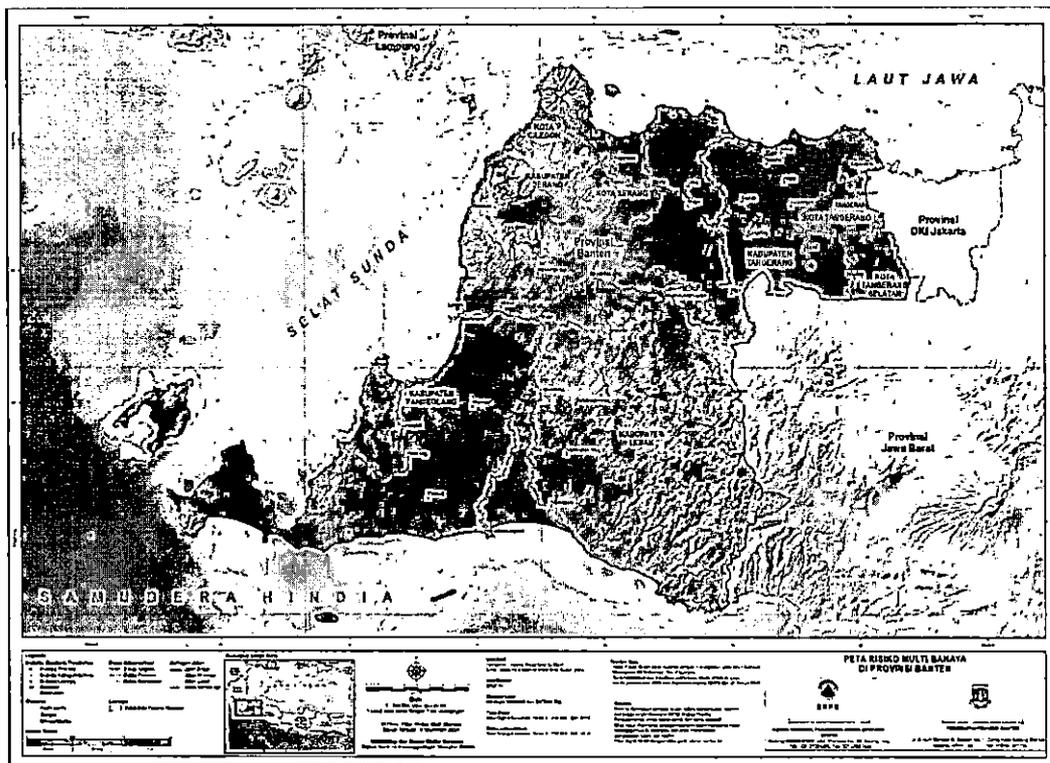
Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 326 (tiga ratus dua puluh enam) desa, dan tidak memiliki kelurahan dengan luas wilayah 1.734,28 km² (satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh delapan kilometer persegi).

Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 104 (seratus empat) kelurahan dengan luas wilayah 153,93 km² (seratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga kilometer persegi).

Pemerintah Kota Cilegon terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan dengan luas wilayah 175,50 km² (seratus tujuh puluh lima koma lima puluh kilometer persegi).

Pemerintah Kota Serang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 66 (enam puluh enam) kelurahan dan tidak memiliki desa, dengan luas wilayah 266,71 km² (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu kilometer persegi).

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 54 (lima puluh empat) kelurahan dengan luas wilayah 147,19 km² (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh satu kilometer persegi).



Gambar 2. 2
 Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Banten
 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016 s.d. 2020

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan kondisi wilayahnya rentan dan berpotensi terhadap bencana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 kawasan rawan bencana tersebut meliputi rawan banjir, rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung, rawan tanah longsor, rawan kekeringan dan rawan gagal teknologi. Sedangkan potensi rawan bencana yang disebabkan nonalam/sosial selain gagal teknologi adalah gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial dan teror yang frekuensinya masih relatif kecil.

Potensi bencana Provinsi Banten dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Rangkuman kelas indeks bahaya keseluruhan bencana yang berpotensi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Potensi Luas Bahaya Bencana di Provinsi Banten Tahun 2021

NO	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Banjir	267.980	Sedang
2	Banjir Bandang	36.622	Rendah
3	Covid-19	966.292	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	854.445	Sedang
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	966.292	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	106.833	Tinggi
7	Gempabumi	966.292	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	407.736	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	30.387	Tinggi
10	Kekeringan	966.292	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Karang	9.120	Tinggi
12	Letusan Gunungapi Pulosari	8.881	Tinggi
13	Likuifaksi	198.533	Tinggi
14	Multi Bahaya	966.292	Tinggi
15	Tanah Longsor	324.095	Tinggi
16	Tsunami	19.556	Tinggi

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di atas menggambarkan potensi luas bencana di Provinsi Banten rata-rata berada pada kelas tinggi. Bencana Covid-19, epidemi dan wabah penyakit, gempabumi, kekeringan dan multi bahaya merupakan wilayah bencana terluas yang mengintai di wilayah Banten. Dari 16 jenis bencana, yang termasuk kelas bencana tinggi tercatat ada 11 bencana. Potensi ancaman bencana dari pengkajian kelas indeks sampai pada tingkat kabupaten/kota dijabarkan untuk setiap bencana, seperti berikut ini:

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Bencana banjir termasuk bencana yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah bagiannya, termasuk Provinsi Banten. Bencana tersebut dapat berpotensi terjadi beberapa wilayah didukung oleh kondisi wilayah yang rentan.

Perhitungan potensi bahaya banjir dilihat berdasarkan parameter-parameter standar ukur, yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	4.619	Sedang
2	Kota Serang	12.570	Sedang
3	Kota Tangerang	12.851	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	5.499	Sedang
5	Kabupaten Lebak	31.534	Sedang
6	Kabupaten Pandeglang	58.681	Sedang
7	Kabupaten Serang	74.898	Sedang
8	Kabupaten Tangerang	67.327	Sedang
PROVINSI BANTEN		267.980	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir Provinsi Banten memiliki 267.980 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir adalah tinggi dengan luasan paling besar adalah Kabupaten Pandeglang disusul Kabupaten Tangerang.

b. Kekeringan

Perhitungan potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Dalam pedoman tersebut, dimuat parameter sebagai alat ukur untuk setiap bencana. Parameter untuk bahaya meteorologi (Indeks Presipitasi Terstandarisasi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten seperti tabel berikut.

Tabel 2. 4
Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Tinggi
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Lebak	342.656	Tinggi
6	Pandeglang	274.689	Tinggi
7	Serang	173.428	Tinggi
8	Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		966.292	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kekeringan Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya dengan luasan terluas bahaya kekeringan adalah Kabupaten Lebak. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kekeringan adalah sedang.

c. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Oleh karena itu, perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter di atas, diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5
Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	13.667	Sedang
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Lebak	279.216	Sedang
6	Pandeglang	253.606	Sedang
7	Serang	149.987	Sedang
8	Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		854.445	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya cuaca ekstrim Provinsi Banten memiliki 854.445 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya cuaca ekstrim adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

d. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi.

Dalam pengkajian indeks bahaya, bencana tanah longsor dapat dilihat berpotensi berdasarkan Parameter Zona Kerentanan Gerakan Tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (di atas 15 persen). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka

diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	4.372	Tinggi
2	Kota Serang	2.133	Tinggi
3	Lebak	219.866	Tinggi
4	Pandeglang	59.538	Tinggi
5	Serang	38.186	Tinggi
PROVINSI BANTEN		324.095	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tanah longsor Provinsi Banten memiliki 324.095 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tanah longsor adalah tinggi dan wilayah paling besar potensinya adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota terdampak.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi umumnya terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Perhitungan potensi bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dilihat berdasarkan parameter tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	2.618	Tinggi
2	Kota Serang	6.578	Tinggi
3	Lebak	10.912	Tinggi
4	Pandeglang	33.908	Tinggi
5	Serang	27.638	Tinggi
6	Tangerang	25.178	Tinggi
PROVINSI BANTEN		106.833	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gelombang esktrim dan abrasi Provinsi Banten memiliki 106.833 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gelombang esktrim dan abrasi adalah tinggi dimana Pandeglang yang memiliki wilayah terluas sebesar 33.908 Ha. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota terdampak.

f. Gempa Bumi

Bencana gempa bumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Perhitungan potensi bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian risiko bencana, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, intensitas guncangan di permukaan. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Tinggi
2	Kota Serang	26.671	Tinggi
3	Kota Tangerang	15.393	Tinggi
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Tinggi
5	Lebak	342.656	Tinggi
6	Pandeglang	274.689	Tinggi
7	Serang	173.428	Tinggi
8	Tangerang	101.186	Tinggi
PROVINSI BANTEN		966.292	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gempa bumi Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya dimana seluruh wilayah termasuk kategori tinggi dan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak yang memiliki luasan paling besar untuk terdampak gempa bumi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota.

g. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kondisi daerah Provinsi Banten, maka berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	3.540	Tinggi
2	Kota Serang	3.100	Rendah
3	Kota Tangerang Selatan	68	Rendah
4	Lebak	203.912	Tinggi
5	Pandeglang	152.270	Tinggi
6	Serang	44.674	Tinggi
7	Tangerang	172	Sedang
PROVINSI BANTEN		407.736	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Banten memiliki 407.736 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota.

h. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan bencana baru dalam pengkajian risiko bencana. Penambahan pengkajian bencana banjir bandang disesuaikan dengan kerangka acuan kerja dari BNPB. Dalam pengkajian potensi bahaya, parameter bahaya banjir bandang dikaji berdasarkan parameter sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki kelas tinggi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Serang	390	Rendah
2	Kota Tangerang	65	Rendah
3	Kota Tangerang Selatan	250	Rendah
4	Lebak	16.255	Rendah
5	Pandeglang	9.561	Rendah
6	Serang	9.800	Rendah
7	Tangerang	301	Rendah
PROVINSI BANTEN		36.622	RENDAH

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir bandang Provinsi Banten memiliki 36.622 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir bandang adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

i. **Epidemi dan Wabah Penyakit**

Perhitungan potensi bahaya bencana epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Berdasarkan aturan tersebut, disusun pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter-parameter sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut adalah kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk. Namun, laporan ini belum menghitung potensi luas bahaya dari Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 11
Potensi Luas Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	17.550	Sedang
2	Kota Serang	26.671	Sedang
3	Kota Tangerang	15.393	Sedang
4	Kota Tangerang Selatan	14.719	Sedang
5	Lebak	342.656	Sedang
6	Pandeglang	274.689	Sedang
7	Serang	173.428	Sedang
8	Tangerang	101.186	Sedang
PROVINSI BANTEN		966.292	SEDANG

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya epidemik dan wabah penyakit Provinsi Banten memiliki 966.292 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya epidemik dan wabah penyakit adalah rendah. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh Kabupaten/Kota.

Sejak akhir Tahun 2019, dunia dilanda Pandemi COVID-19 yang dimulai dari wilayah Wuhan, Tiongkok. Hingga tahun ini, pandemi masih melanda berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Tollefson (2020) dalam tulisannya yang berjudul *'Why deforestation and extinctions make pandemics more likely'* pada jurnal *nature* menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kerusakan lingkungan dan potensi wabah baru. Kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, dan perdagangan satwa langka dapat meningkatkan risiko berpindahnya patogen (bakteri, virus, dan sejenisnya) dari hewan ke manusia. Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan lokasi ibu kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bahkan, bandara internasional Soekarno-Hatta secara de facto berada di Provinsi Banten. Oleh karenanya, Provinsi Banten memiliki risiko yang cukup tinggi dari potensi terpapar wabah yang terjadi di wilayah atau negara lain.

j. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Perhitungan potensi bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan

parameter kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12
Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	1.534	Tinggi
2	Kota Serang	194	Tinggi
3	Kota Tangerang	1.273	Rendah
4	Kota Tangerang Selatan	211	Rendah
5	Lebak	72	Rendah
6	Pandeglang	10	Sedang
7	Serang	19.312	Tinggi
8	Tangerang	7.781	Tinggi
PROVINSI BANTEN:		30.387	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kegagalan teknologi Provinsi Banten memiliki 30.387 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kegagalan teknologi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

k. Tsunami

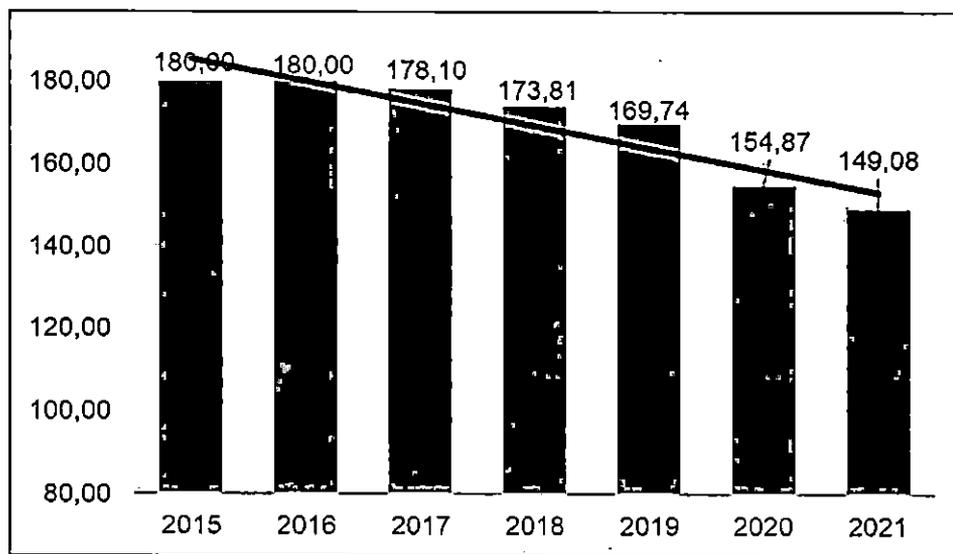
Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempabumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitudo lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut atau jatuhnya meteor ke laut. Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter adalah ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng dan kekasaran permukaan. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 13
Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Kota Cilegon	877	Tinggi
2	Kota Serang	235	Rendah
3	Lebak	3.002	Tinggi
4	Pandeglang	11.116	Tinggi
5	Serang	3.229	Tinggi
6	Tangerang	1.097	Rendah
PROVINSI BANTEN		19.556	TINGGI

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tsunami Provinsi Banten memiliki 19.556 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tsunami adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.



Gambar 2. 3
Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten 2015-2021 (Indeks)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Indeks Risiko Bencana Provinsi Banten juga terlihat mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 178,10 indeks hingga 2021 menjadi 149,08 indeks turun sebesar 29,02 indeks. Hal ini menandakan bahwa kerentanan terhadap risiko kebencanaan di Provinsi Banten semakin berkurang dan literasi sosial kebencanaan terus mengalami peningkatan namun masih perlu perhatian karena masih pada nilai berisiko tinggi.

Adapun indeks risiko bencana pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang paling besar indeks risiko bencana adalah wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, serta wilayah paling rendah indeks risiko bencana adalah Kota Tangerang Selatan, tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 14
Data Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2021 (Indeks)

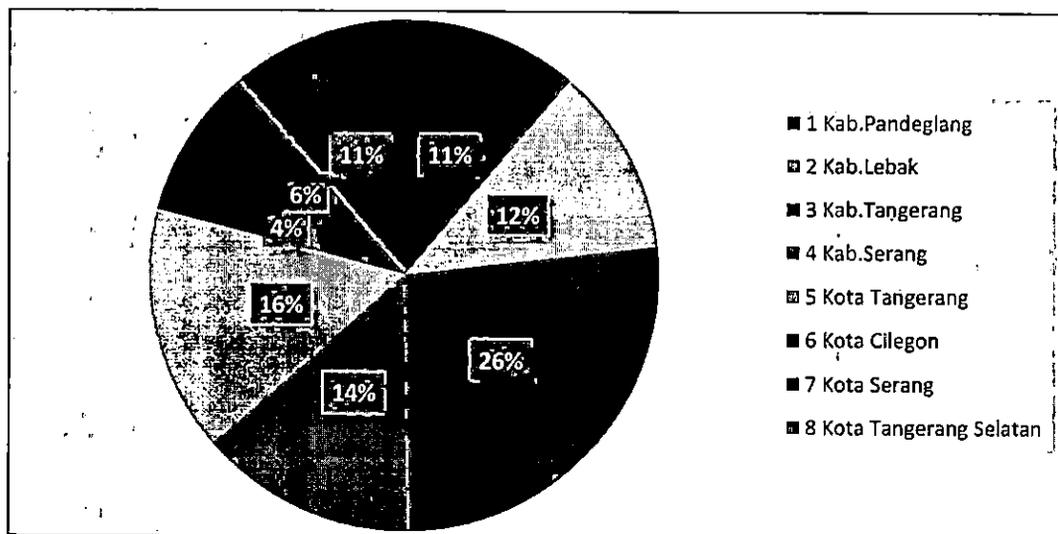
NO	IRB KAB/KOTA DI BANTEN	TAHUN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	215,20	215,20	215,20	215,20	215,20	177,46	177,46
2	Kabupaten Lebak	215,20	215,20	215,20	215,20	215,20	182,04	182,04
3	Kabupaten Serang	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	203,20	176,14
4	Kabupaten Tangerang	200,80	200,80	185,63	185,63	170,15	146,93	146,93
5	Kota Serang	184,80	184,80	184,80	168,56	168,56	168,56	168,56
6	Kota Cilegon	182,40	182,40	182,40	164,32	147,21	128,15	121,23
7	Kota Tangerang	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	132,80
8	Kota Tangerang Selatan	102,40	102,40	102,40	102,40	102,40	96,61	87,44
PROVINSI BANTEN		180,00	180,00	178,10	173,81	169,74	154,87	149,08

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

2.1.1.2 Kondisi Demografi

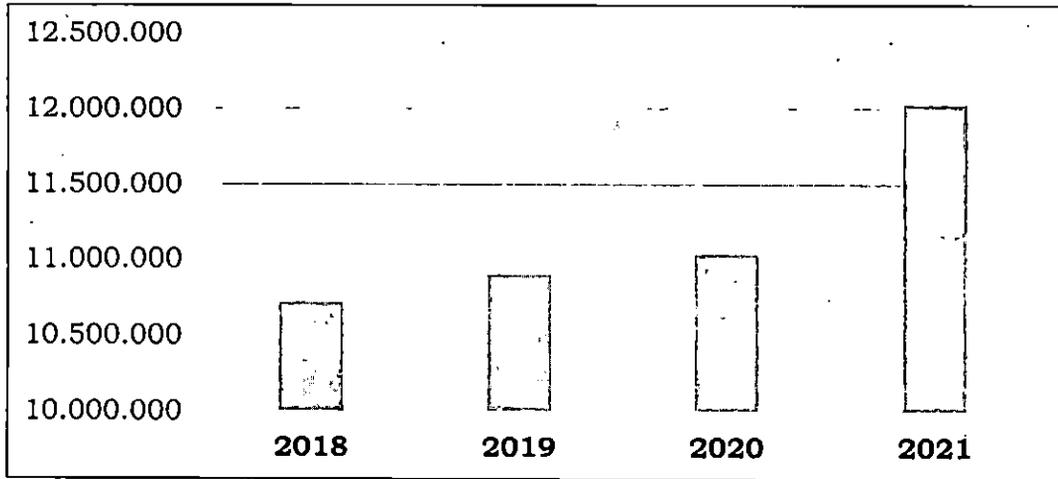
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Di Provinsi Banten bersama Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 semester I jumlah penduduk di Provinsi Banten tercatat 11.788.728 jiwa dan pada semester II pada tahun 2021 tercatat 12.030.892 jiwa terjadi penambahan jumlah penduduk sejumlah 242.164 jiwa atau terjadi selisih penambahan jumlah penduduk sebesar 2,01 persen antar semester tahun 2021.

Jika dilihat pula penambahan jumlah penduduk paling banyak terjadi di Kabupaten Lebak dengan penambahan 38.967 jiwa atau 2,70 persen dan kedua di Kota Serang sebanyak 44.684 jiwa atau 2,68 persen. Selanjutnya, penambahan penduduk paling rendah adalah Kota Tangerang 10.758 jiwa atau 0,58 persen.



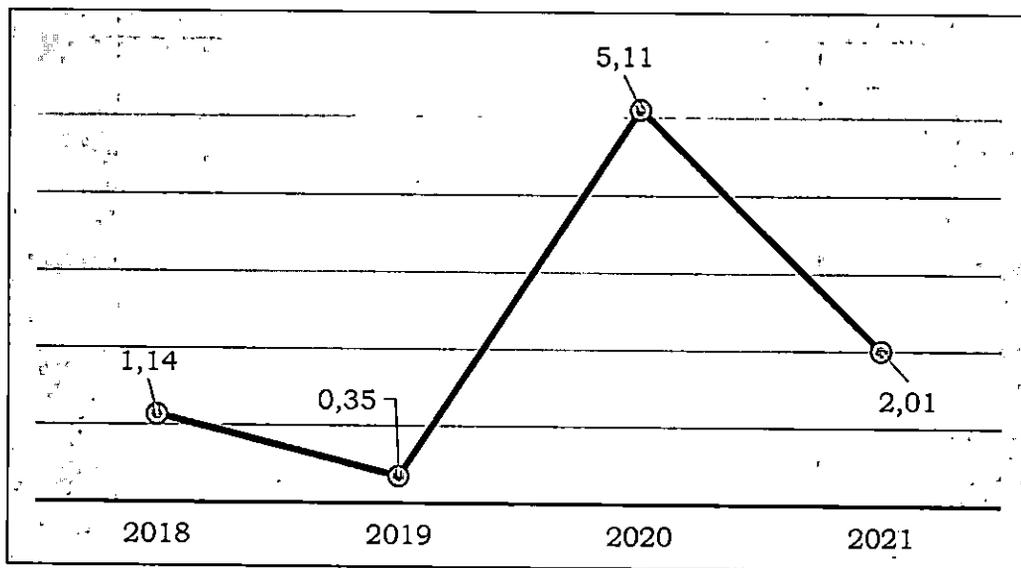
Gambar 2. 4
Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Menurut data Tahun 2021, Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang tersebar pada 8 (delapan) kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tangerang, adapun rincian jumlah penduduk kabupaten/kota sebagai berikut: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.441.291 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.349.112 (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua belas) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.668.093 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh tiga) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.185.552 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 1.864.220 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh) jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 452.991 (empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 702.228 (tujuh ratus dua ribu dua ratus dua puluh delapan) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.367.405 (satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus lima) jiwa.



Gambar 2. 5
 Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Jiwa)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Gambar di atas menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Banten dari Tahun 2018 sampai dengan 2021, dimana terjadi kenaikan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Kenaikan Jumlah penduduk ini dilihat dari selisih jumlah penduduk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara lebih rinci yaitu dari 2018 ke 2019 terjadi penambahan sebesar 184.098 jiwa, dari tahun 2019 ke 2020 terjadi penambahan sebesar 136.051 jiwa, dan tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penambahan penduduk sebesar 988.369 jiwa.



Gambar 2. 6
 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Persen)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan penduduk 1,14 persen artinya pada tahun 2018 setiap

100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah 1,14 jiwa dari kelahiran dan migrasi penduduk dari luar Banten. Kemudian tahun 2019 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk 0,35 persen dan tahun 2020 terjadi kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,11 persen dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali sebesar 2,01 persen.

Penambahan jumlah penduduk ini akan ditandai dengan adanya bonus demografi tentu dapat menjadi kesempatan dan tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Bonus demografi yang dimiliki dapat ditunjang dengan kenaikan cakupan pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat di Provinsi Banten (pendidikan dapat diakses secara merata dengan kualitas yang mumpuni) serta peningkatan kesempatan bekerja dengan membuka lowongan pekerjaan di Provinsi Banten.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

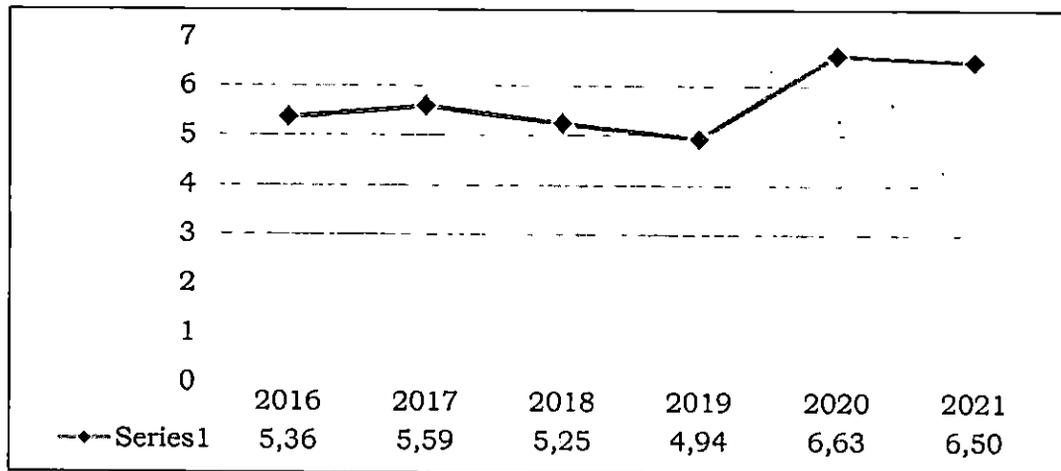
Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

2.1.2.1 Kondisi Kemiskinan

a. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2021 sebesar 6,50 persen, menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2021 dan juga menurun 0,13 persen poin terhadap

September 2020, Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 852,28 ribu orang, menurun 15,00 ribu orang terhadap Maret 2021 dan menurun 5,36 ribu orang terhadap September 2020.



Gambar 2. 7
 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten Bulan September
 Tahun 2016-2021 (Persen)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 5,93 persen, naik menjadi 6,04 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 8,49 persen, turun menjadi 7,72 persen pada September 2021. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan naik sebanyak 23,7 ribu orang (dari 552,96 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 576,62 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 38,6 ribu orang (dari 314,27 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 275,66 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp 547.483,- kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 395.258,- (72,20 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 152.225,- (27,80 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,89 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.677.192,- rumah tangga miskin/bulan.

Kenaikan persentase kemiskinan di Provinsi Banten juga dirasakan oleh daerah lainnya di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan rata-rata persentase kemiskinan nasional, persentase

penduduk miskin nasional terhadap total penduduk tahun 2021 tercatat sebesar 9,71 persen. Angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan persentase kemiskinan di Provinsi Banten 6,5 persen.

Tabel 2. 15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2020-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)		PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (PERSEN)	
		2020	2021	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	120,44	131,43	9,92	10,72
2	Kabupaten Lebak	120,83	134,75	9,24	10,29
3	Kabupaten Tangerang	242,16	272,35	6,23	7,12
4	Kabupaten Serang	74,80	83,09	4,94	5,49
5	Kota Tangerang	118,22	134,24	5,22	5,93
6	Kota Cilegon	16,31	18,89	3,69	4,24
7	Kota Serang	42,24	47,91	6,06	6,79
8	Kota Tangerang Selatan	40,99	44,57	2,29	2,57
PROVINSI BANTEN		775,99	867,23	5,92	6,66

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dalam nilai nominal, persentase kemiskinan di tahun 2021 yang sebesar 6,66 persen setara dengan 867,23 ribu penduduk yang termasuk ke dalam penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin terbanyak didapatkan di Kabupaten Tangerang sementara jumlah penduduk miskin terendah tercatat di Kota Cilegon. Namun apabila dilihat berdasarkan persentase kemiskinan yang sudah direlatifkan terhadap jumlah penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota, angka kemiskinan paling tinggi berlangsung di Kabupaten Pandeglang dan angka kemiskinan terendah berada di Kota Tangerang Selatan.

Pada 2022 terdapat arahan Presiden terkait masalah kemiskinan dengan dikeluarkannya Surat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dimana BPS mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai mereka yang hidup di bawah US\$ 1,9 PPP per hari (World Bank). Adapun kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sebesar 2,67% atau 348,45 ribu jiwa.

b. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari

kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2021–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 sebesar 1,197, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 1,088. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami peningkatan dari 0,265 menjadi 0,343 (lihat Tabel 2.16).

Tabel 2. 16
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah September 2020-September 2021

TAHUN	PERKOTAAN	PERDESAAN	TOTAL
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
September 2020	0,980	1,543	1,141
Maret 2021	0,977	1,369	1,088
September 2021	1,137	1,358	1,197
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
September 2020	0,301	0,455	0,345
Maret 2021	0,243	0,321	0,265
September 2021	0,324	0,393	0,343

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,137, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,358. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,324, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,393.

c. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 2.17 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2020 sampai dengan September 2021.

Garis Kemiskinan pada September 2021 adalah sebesar Rp547.483,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,23 persen. Sementara jika dibandingkan September 2020, terjadi kenaikan sebesar 6,28 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada tabel bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada September 2021 sebesar 72,20 persen.

Tabel 2. 17
Perkembangan Garis Kemiskinan September 2020-September 2021

DAERAH/TAHUN	GARIS KEMISKINAN (RP/KAPITA/BULAN)		
	MAKANAN	BUKAN MAKANAN	TOTAL
Perkotaan			
Sep-20	376.950	155.147	532.096
Mar-21	390.893	158.218	549.111
Sep-21	405.526	161.474	567.000
Perubahan Sep'20- Sep'21(%)	7,58	4,08	6,56
Perubahan Mar'21- Sep'21(%)	3,74	2,06	3,26
Perdesaan			
Sep-20	355.550	118.937	474.487
Mar-21	364.081	121.444	485.525
Sep-21	369.466	127.748	497.213
Perubahan Sep'20- Sep'21(%)	3,91	7,41	4,79
Perubahan Mar'21- Sep'21(%)	1,48	5,19	2,41
Total			
Sep-20	370.293	144.818	515.110
Mar-21	382.584	147.779	530.363
Sep-21	395.258	152.225	547.483
Perubahan Sep'20- Sep'21(%)	6,74	5,11	6,28
Perubahan Mar'21- Sep'21(%)	3,31	3,01	3,23

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada September 2021, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan (GK), baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 16,69 persen di perkotaan dan 20,38 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan

sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (GK) (16,18 persen di perkotaan dan 14,26 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,40 persen di perkotaan dan 3,04 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,38 persen di perkotaan dan 2,95 persen di perdesaan), Roti (2,79 persen di perkotaan dan 2,30 di perdesaan), mie instan (2,51 persen di perkotaan dan 2,36 di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instan (sachet) (2,23 persen di perKotaan dan 3,51 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada Garis Kemiskinan (GK) perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

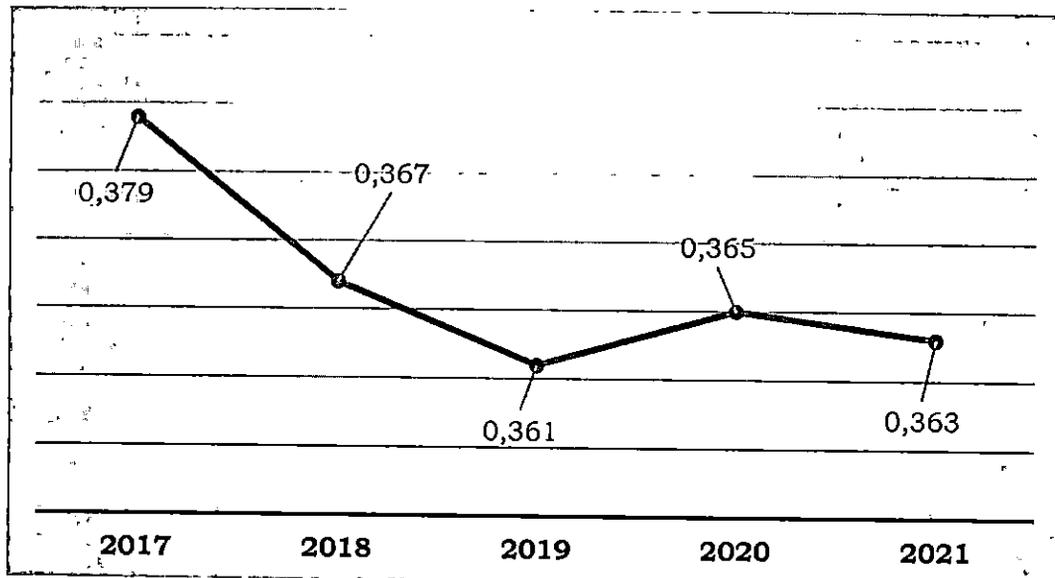
Tabel 2. 18
Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin
Maret 2021-September 2021

TAHUN	GARIS KEMISKINAN PER KAPITA (RP/KAPITA/BULAN)	RATA-RATA ANGGOTA RUMAH TANGGA MISKIN	GARIS KEMISKINAN RUMAH TANGGA MISKIN (RP/RUMAH TANGGA/BULAN)
Maret 2021	530.363	4,98	2.641.208
September 2021	547.483	4,89	2.677.192
Perubahan September 2020- Maret 2021 (%)	3,23	-1,81	1,36

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Indeks Gini

Secara umum Indeks Gini Provinsi Banten pada rentang waktu 2017-2020 berhasil melebihi angka yang ditargetkan dan cenderung turun setiap tahun. Hal ini menunjukkan terjadi pemerataan pendapatan penduduk di Provinsi Banten pada periode Tahun 2017-2021. Meskipun banyak indikator yang terimbas akibat adanya Pandemi COVID-19, Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2021 dan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,365.



Gambar 2. 8
Indeks Gini Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Nilai)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di suatu wilayah ialah *Gini Ratio* (Rasio Gini). Indikator ini digunakan untuk mengukur tolak ukur ketimpangan ekonomi di suatu wilayah menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan rasio gini berkisar antara nol dan satu. Semakin tinggi rasio gini atau semakin mendekati angka satu menggambarkan semakin parah ketimpangan di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Berdasarkan data BPS, rasio gini Provinsi Banten mengalami tren penurunan sepanjang Tahun 2017-2021. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,363. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,365. Kinerja ketimpangan yang membaik dapat disebabkan oleh kenaikan pesat pengeluaran per kapita kelompok menengah bawah dan menengah Provinsi Banten di tengah Pandemi COVID-19.

Ketimpangan Provinsi Banten yang membaik di tengah pandemi merupakan kondisi di atas rata-rata karena secara nasional, ketimpangan justru meningkat dengan rasio gini Indonesia naik sekitar 0,01 menjadi 0,40.

e. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan indikator makro ekonomi yang cukup dikenal untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar bagian wilayah atau daerah di suatu wilayah dan periode tertentu. Indeks ini dihitung menggunakan angka PDRB per kapita di masing-masing bagian wilayah yang dikaitkan dengan proporsi penduduknya terhadap jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hasil perhitungan dari indeks bernilai antara nol sampai dengan satu. Semakin mendekati nilai satu indeks menggambarkan bahwa distribusi pendapatan antar bagian wilayah semakin timpang. Sebaliknya, nilai indeks nol dapat menjadi indikasi bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar bagian wilayah cukup rendah.

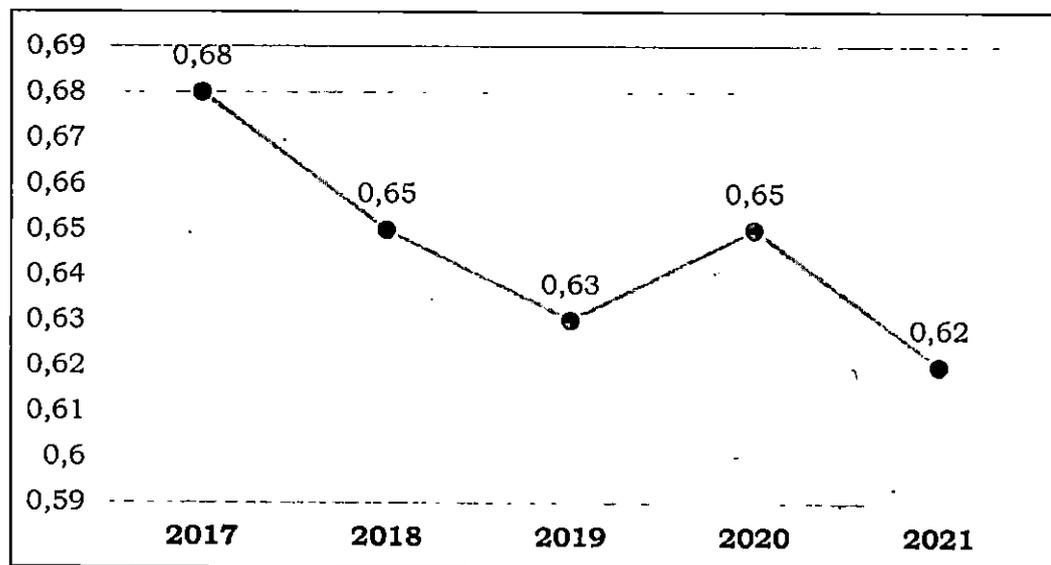
Tabel 2. 19
Analisis Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2021

KABUPATEN/ KOTA PDRB	PDRB PER KAPITA/ TAHUN	PENDUDUK	PROPORSI PENDUDUK	[(PDRB PER KAPITA-RATA- RATA PDRB PER KAPITA) ² * PROPORSI PENDUDUK
Kabupaten Pandeglang	23.125	1.288.314	11%	258.351.864
Kabupaten Lebak	21.781	1.407.857	12%	297.965.835
Kabupaten Tangerang	44089	3.293.533	27%	217.408.029
Kabupaten Serang	48.832	1.647.790	14%	75.277.709
Kota Tangerang	78.628	1.911.914	16%	6.335.943
Kota Cilegon	250.327	441.761	4%	1.160.728.488
Kota Serang	47.327	704.618	6%	36.449.764
Kota Tangerang Selatan	64.337	1.365.688	11%	7.190.043
Rata- Rata/Jumlah	72.306	12.061.475	100%	42.001.469
INDEKS WILLIAMSON				0,62

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dalam analisis Indeks Williamson di Provinsi Banten, distribusi pendapatan atau ketimpangan yang diperhitungkan adalah pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Banten, didapatkan rata-rata PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp72,3 juta per tahun. Nilai ini digunakan sebagai pembanding PDRB di masing-masing Kabupaten/Kota untuk dihitung proporsinya dengan penduduk agar dapat menghasilkan

Indeks Williamson Provinsi Banten. Nilai indeks untuk Provinsi Banten dihitung sebesar 0,62 di Tahun 2021. Nilai ini menunjukkan adanya indikasi ketimpangan yang cukup tinggi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2021. Meski demikian, Indeks Williamson Provinsi Banten terus menurun dari tahun 2016 yang mencapai 0,72. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan dari distribusi pendapatan di Provinsi Banten dari tahun ke tahun sebagai hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.



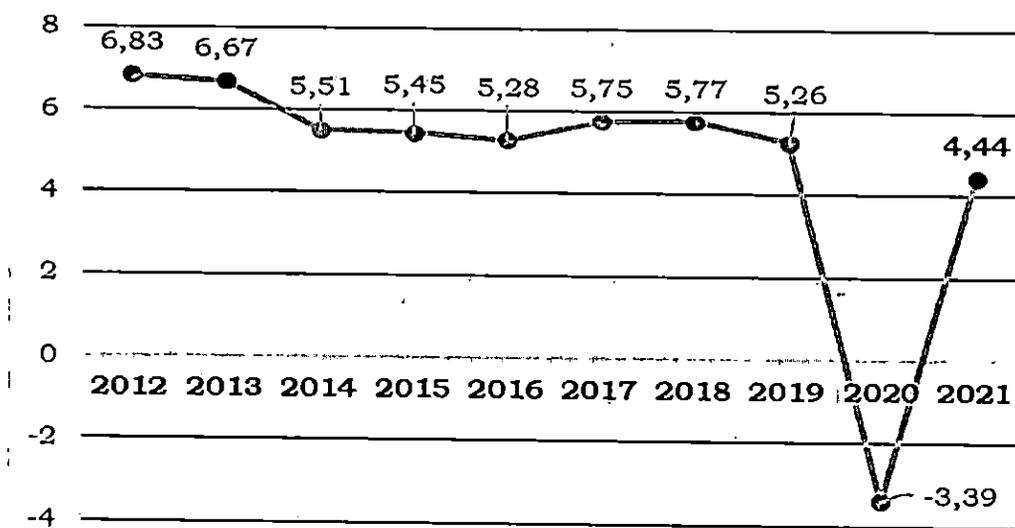
Gambar 2. 9
Indeks Williamson Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Nilai)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

2.1.2.2 Kondisi Perekonomian

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Provinsi Banten pada Tahun 2021 tumbuh 4,44 persen dibandingkan Tahun 2020. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang mencapai 12,76 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen total net ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,28 persen. Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh 5,19 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,65 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen total net ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,79 persen, Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2021 terhadap

triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,68 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mencapai 26,89 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh komponen konsumsi pemerintah sebesar 20,89 persen, struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada 2021 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,70 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 25,01 persen dan 22,51 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,78 persen.



Gambar 2. 10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten Tahun 2012-2021 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Ekonomi Banten triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 tumbuh 5,19 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Total Net Ekspor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 46,79 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2021 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,68 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai 26,89 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 20,89 persen.

Struktur ekonomi provinsi se-Pulau Jawa pada 2021 masih didominasi oleh DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap

PDRB se-Pulau Jawa sebesar 29,70 persen. Kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat dengan kontribusi mencapai 25,01 persen dan 22,51 persen. Sementara Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,78 persen.

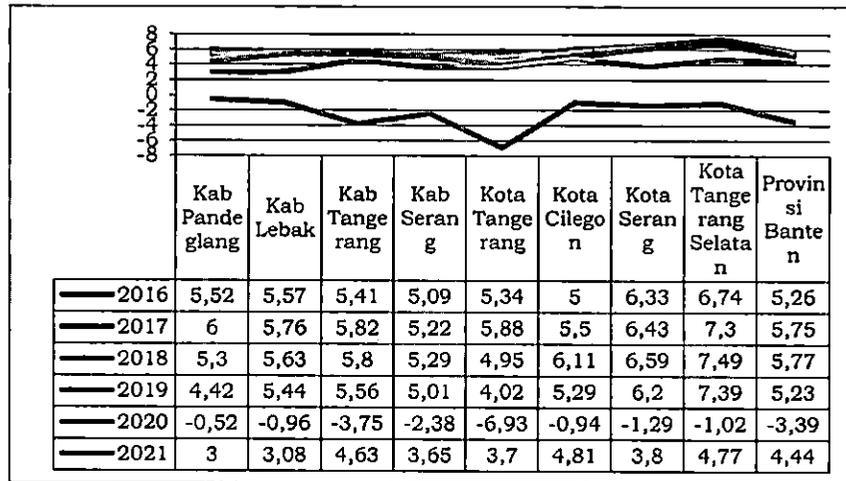
b. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran penting yang dapat menggambarkan kondisi suatu perekonomian. Nilai pertumbuhan ekonomi yang didapatkan dari perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) di satu waktu dibandingkan dengan waktu sebelumnya dapat memberikan gambaran kemajuan pembangunan yang telah berlangsung disuatu wilayah. Dilihat berdasarkan data dari tahun 2016 hingga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten menunjukkan tren cenderung tidak banyak berubah sebelum sedikit menurun di Tahun 2019 dan turun signifikan pada tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, Provinsi Banten berkontraksi hingga 3,38 persen tahun 2020 dengan perlambatan ekonomi paling dalam berlangsung di Kota Tangerang yang mencapai 6,92 persen.

Tabel 2. 20
PDRB Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021
(Persen)

KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Pandeglang	5,52	6,00	5,30	4,42	-0,52	3,00
Kab Lebak	5,57	5,76	5,63	5,44	-0,96	3,08
Kab Tangerang	5,41	5,82	5,80	5,56	-3,75	4,63
Kab Serang	5,09	5,22	5,29	5,01	-2,38	3,65
Kota Tangerang	5,34	5,88	4,95	4,02	-6,93	3,70
Kota Cilegon	5,00	5,50	6,11	5,29	-0,94	4,81
Kota Serang	6,33	6,43	6,59	6,20	-1,29	3,80
Kota Tangerang Selatan	6,74	7,30	7,49	7,39	-1,02	4,77
Provinsi Banten	5,26	5,75	5,77	5,23	-3,39	4,44

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021



Gambar 2. 11
PDRB Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2016-2021 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi COVID-19 berlangsung di seluruh Kabupaten/Kota tahun 2020. Sementara tren pertumbuhan ekonomi disetiap Kabupaten/Kota pada periode sebelum pandemi cukup beragam. Beberapa Kabupaten tercatat masih mengalami tren kenaikan sepanjang Tahun 2016-2019 seperti Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Sementara Kabupaten dan Kota lainnya cenderung mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Secara rata-rata, apabila dibandingkan antara Kabupaten/Kota Provinsi Banten, rata-rata pertumbuhan ekonomi paling tinggi sepanjang tahun 2016-2020 berlangsung di Kota Tangerang Selatan sebesar 5,58 persen. Sementara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah berlangsung di Kota Tangerang sebesar 2,66 persen akibat kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020.

Aktivitas perekonomian Provinsi Banten dapat tercerminkan di dalam komponen PDRB. Analisis PDRB sendiri dapat dilakukan pada dua versi, yaitu atas harga berlaku atau ADHB (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan atau ADHK (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Kedua versi dapat mencerminkan kondisi perekonomian dengan kegunaan spesifik masing-masing. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat komposisi perekonomian berdasarkan jenis kegiatan yang mendukungnya. Berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi

merupakan ketiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian Provinsi Banten. Proporsi kegiatan dari ketiga sektor ini mencapai sekitar 55 persen dari total PDRB Provinsi Banten. Sepanjang tahun 2016-2021, struktur perekonomian cenderung tidak mengalami banyak perubahan.

Tabel 2. 21
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, dan Kehutanan, dan Perikanan	31.185	33.266	35.574	37.022	39.029	40.238
Pertambangan dan Penggalian	4.083	4.146	4.272	4.377	4.275	4.633
Industri Pengolahan	168.697	179.931	191.863	203.360	195.499	209.609
Pengadaan Listrik dan Gas	12.024	11.984	12.770	12.073	10.511	12.153
Pengadaan Air	400	449	482	511	553	585
Konstruksi	52.404	58.182	65.453	73.327	71.587	82.115
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	63.084	69.275	76.661	84.325	83.513	85.904
Transportasi dan Pergudangan	55.421	61.258	67.325	71.245	40.455	41.639
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.299	13.477	14.633	15.849	15.158	15.902
Informasi dan Komunikasi	18.299	20.485	21.696	23.278	25.201	26.575
Jasa Keuangan	15.762	17.064	18.930	19.714	20.300	22.332
Real Estate	37.385	42.104	46.579	52.186	54.278	56.593
Jasa Perusahaan	5.424	6.082	6.674	7.493	7.325	7.329
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.563	11.459	12.301	13.657	14.210	14.458
Jasa Pendidikan	16.738	18.649	21.130	23.716	24.503	24.395
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.980	6.655	7.444	8.369	9.183	10.299
Jasa lainnya	8.151	9.131	10.018	11.150	10.862	11.163
Jumlah PDRB	517.898	563.598	613.804	661.652	626.437	626.437

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

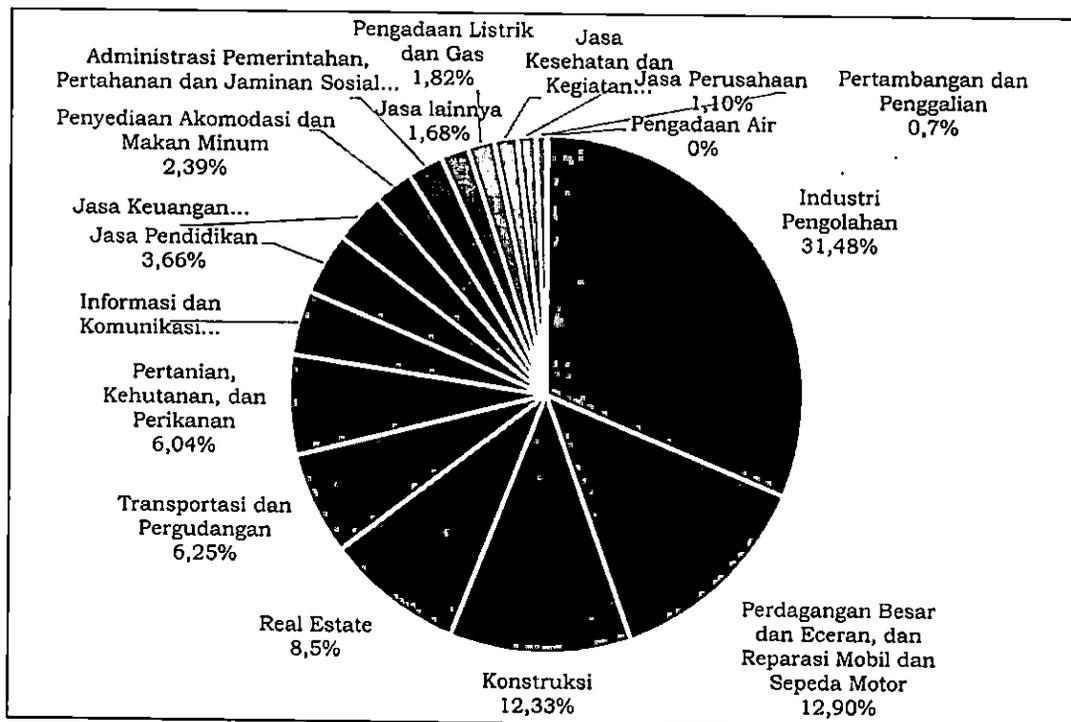
Sementara PDRB ADHK utamanya dapat digunakan untuk melihat laju perkembangan dari masing-masing kegiatan di dalam perekonomian dari waktu ke waktu melalui nilai pertumbuhannya.

Tabel 2. 22
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	PDRB ADHK. MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.109	23.056	23.881	24.408	25.275	25.417
Pertambangan dan Penggalian	2.870	2.851	2.871	2.882	2.643	2.657
Industri Pengolahan	139.074	144.219	149.425	154.850	147.616	154.793
Pengadaan Listrik dan Gas	4.159	4.180	4.480	4.327	3.833	4.321
Pengadaan Air	0.370	0.397	0.420	0.440	0.471	0.494
Konstruksi	36.308	39.314	42.363	46.048	44.748	49.561
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	51.486	54.652	58.614	62.314	60.533	61.595
Transportasi dan Pergudangan	25.134	27.289	29.069	29.264	20.869	22.055
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.166	9.925	10.664	11.446	10.863	11.333
Informasi dan Komunikasi	21.373	23.174	24.98	27.244	29.736	31.371
Jasa Keuangan	11.588	12.038	12.874	13.134	13.492	14.249
Real Estate	32.004	34.539	37.261	40.521	41.392	42.635
Jasa Perusahaan	3.876	4.182	4.459	4.841	4.627	4.565
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.814	7.140	7.518	8.109	8.057	7.990
Jasa Pendidikan	11.355	12.197	13.104	14.112	14.299	14.154
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.543	4.913	5.249	5.698	6.126	6.735
Jasa lainnya	5.609	6.073	6.536	7.102	6.717	6.812
Jumlah PDRB	387.835	410.137	433.783	456.62	441.296	460.739

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Apabila dibandingkan antara lapangan usaha yang terdapat di Provinsi Banten, sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2016-2021. Sektor ini juga merupakan salah satu yang tetap tumbuh positif di tengah kehadiran Pandemi COVID-19 bersama dengan sektor-sektor tidak terdampak negatif lainnya, seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.



Gambar 2. 12
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten Tahun 2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Selain dilihat berdasarkan lapangan usaha, perekonomian PDRB juga dapat menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi Provinsi Banten dari sisi pengeluaran. Berdasarkan PDRB ADHB menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian dengan proporsi mencapai sebesar 55 persen dari total PDRB di tahun 2021. Proporsi ini telah meningkat dibandingkan dengan nilainya yang hanya 53 persen tahun 2016. Sementara komponen pengeluaran terbesar kedua yang menyokong perekonomian Provinsi Banten adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai sekitar 34,52 persen dari keseluruhan perekonomian tahun 2021. Serupa dengan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usahanya, komposisi PDRB berdasarkan

pengeluaran juga tidak mengalami banyak perubahan sepanjang tahun 2016-2021.

Tabel 2. 23
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHB MENURUT PENGELUARAN TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	272.807	294.424	321.788	348.161	345.389	358.093
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	2.385	2.541	2.803	3.064	2.923	3.015
Pengeluaran konsumsi pemerintah	22.898	24.616	27.576	29.745	27.343	28.653
Pembentukan modal tetap bruto	153.742	173.238	192.970	215.084	217.135	229.897
Perubahan Inventori	54	66	101	86	0,01	0,07
Total Ekspor Neto	66.013	68.712	68.566	65.444	33.175	46.262
a. Total Ekspor	377.169	422.953	449.403	448.932	413.564	477.273
b. Total Impor	311.156	354.241	380.837	383.488	380.389	431.010
Jumlah PDRB	517.898	563.598	613.804	661.321	625.979	665.922

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dari tahun ke tahun, nilai dari komponen pengeluaran PDRB mengalami tren kenaikan sebelum terkontraksi tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Namun tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif menjadi 665,922 angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan di 2019.

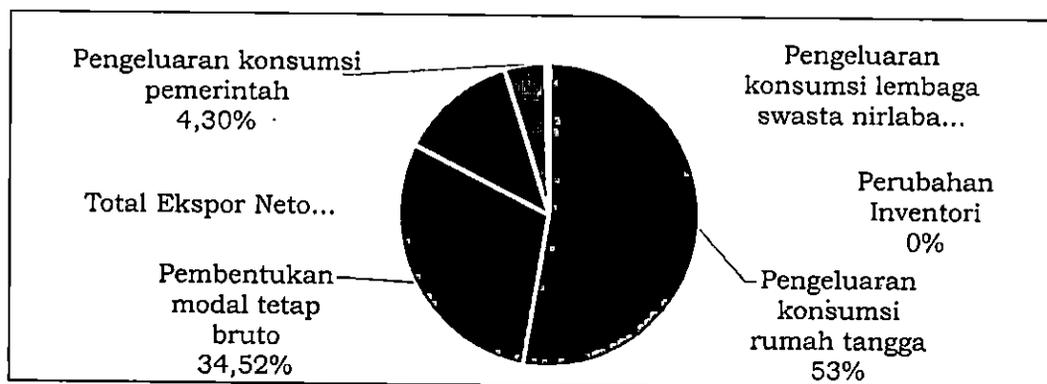
Tabel 2. 24
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

PENGELUARAN	PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	224.112	235.491	247.892	260.151	254.841	260.957
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	1.948	2.012	2.148	2.309	2.118	2.081
Pengeluaran konsumsi pemerintah	16.206	17.075	18.504	19.624	17.759	17.935
Pembentukan modal tetap bruto	115.877	126.304	135.049	143.682	142.617	148.446
Perubahan Inventori	0,09	0,09	0,09	0,08	0,01	0,00
Total Ekspor Neto	29.582	29.158	30.084	30.896	23.498	31.319
a. Total Ekspor	300.741	332.513	340.890	336.833	315.599	345.972

PENGELUARAN	PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
b. Total Impor	271.159	303.355	310.806	305.937	292.101	314.652
Jumlah	387.835	410.137	433.783	456.620	441.139	460.739

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

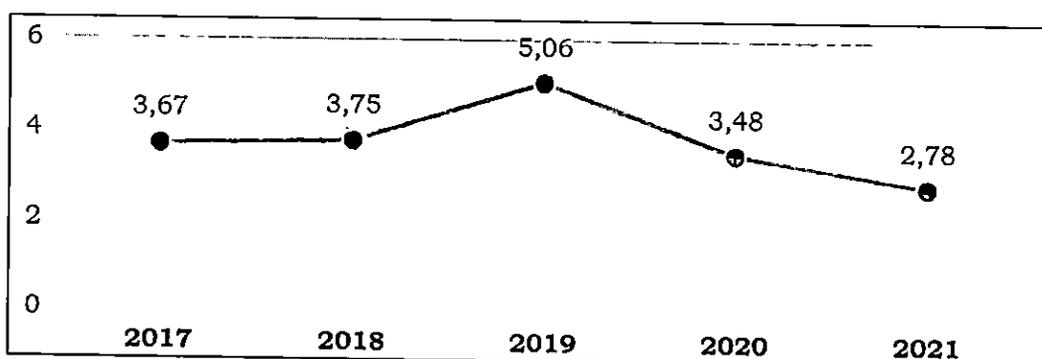
Salah satu komponen pengeluaran yang paling menurun adalah perubahan inventori. Namun sektor lainnya mengalami peningkatan pada total ekspor setelah sebelumnya menurun tahun 2021 kembali berada pada trend positif tercatat 460.739 milyar rupiah, hal ini sejalan dengan tren peningkatan kembali ekspor dan impor nasional menuju pemulihan Pandemi COVID-19.



Gambar 2. 13
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Banten Tahun 2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

c. PDRB per kapita

Indikator makro ekonomi lainnya yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah.



Gambar 2. 14
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Persen)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Adapun nilai dari PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk satu tahun di suatu wilayah. PDRB per kapita Provinsi Banten tidak mengalami banyak perubahan dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata Pandemi COVID-19 telah menurunkan pendapatan masyarakat Provinsi Banten.

Tabel 2. 25
PDRB ADHB dan ADHK Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Ribuan Rupiah)

KABUPATEN/KOTA PDRB	PDRB PER KAPITA	
	ADHB 2021	ADHK 2021
Kabupaten Pandeglang	23.125	15.623
Kabupaten Lebak	21.781	15.090
Kabupaten Tangerang	44.089	29.698
Kabupaten Serang	48.832	33.374
Kota Tangerang	78.628	55.811
Kota Cilegon	250.327	174.464
Kota Serang	47.327	33.173
Kota Tangerang Selatan	64.337	45.665
Provinsi Banten	55.211	38.199

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dilihat berdasarkan PDRB per kapita di masing-masing Kabupaten/Kota, nilai PDRB per kapita tahun 2020 paling tinggi tercatat pada Kota Cilegon. Sementara PDRB per kapita paling rendah tercatat di Kabupaten Lebak. Besaran PDRB per kapita ini sangat bergantung pada jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten/Kota dengan penduduk banyak cenderung memiliki rata-rata pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang relatif lebih banyak.

d. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan laju inflasi Provinsi Banten dipengaruhi pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel 2. 26
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 3 Kota Provinsi Banten Tahun 2020-2021 Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

KODE	KOMODITAS	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		ANDIL INFLASI (%)	TINGKAT INFLASI (%)	ANDIL INFLASI (%)	TINGKAT INFLASI (%)
	Umum	0,21	1,45	0,69	1,91
01	Makanan, minuman dan tembakau	0,25	2,53	0,53	3,65
02	Pakaian dan alas kaki	0,00	2,81	0,00	1,21
03	Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	0,01	0,05	0,01	1,01
04	Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	-0,01	2,03	0,01	2,43
05	Kesehatan	0,00	0,89	0,05	2,41
06	Transportasi	-0,02	-0,96	0,03	1,46
07	Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	0,00	-0,63	0,00	-0,06
08	Rekreasi, olahraga, dan budaya	0,00	0,45	0,00	0,71
09	Pendidikan	0,00	0,65	0,00	0,15
10	Penyediaan makanan dan minuman/restoran	0,01	1,82	0,02	1,57
11	Perawatan pribadi dan jasa lainnya	-0,03	8,23	0,02	2,29

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2021 sama halnya dengan tahun 2020 tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Banten masih didominasi oleh makanan, minuman dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 3,65 persen dengan andil sebesar 0,53, disusul oleh komoditas Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta komoditas kesehatan. Tingginya dominasi komoditas makanan, minuman dan tembakau mengharuskan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota meningkatkan langkah koordinasi dan intervensi untuk menghindarkan gejolak harga khususnya pada komoditas makanan dan minuman penting dan strategis.

e. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk melihat sektor-sektor unggulan di Provinsi Banten, analisis dapat dilakukan menggunakan perhitungan LQ. LQ merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keunggulan dari masing-masing sektor ekonomi di suatu wilayah menggunakan data aktivitas ekonomi per sektor berdasarkan PDRB ADHK menurut lapangan usaha. Rasio PDRB masing-masing

sektor terhadap PDRB keseluruhan dibandingkan dengan rasio yang sama pada tingkat nasional untuk mendapatkan analisis tingkat spesifikasi dari setiap sektor terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hasil perhitungan LQ dapat mengelompokkan sektor unggulan dan sektor non-unggulan di suatu wilayah pada periode tertentu. Nilai LQ yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor yang dianalisis memiliki keunggulan sementara sektor dengan nilai LQ kurang dari 1 tidak memiliki keunggulan di wilayah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai LQ suatu sektor maka semakin unggul sektor tersebut di suatu wilayah dan periode tertentu.

Lebih lanjut, sektor unggulan yang dimaksud dari perhitungan LQ dapat diartikan bahwa sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri serta dapat juga memenuhi kebutuhan daerah di luarnya atau dengan kata lain hasil produksi sektor tersebut dapat diekspor antar daerah. Di sisi lain, hasil output dari sektor tidak unggulan hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Tabel 2. 27
Perhitungan *Location Quotient (LQ)* Provinsi Banten terhadap Nasional
Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA PDB	LQ TAHUN					RERATA
	2017	2018	2019	2020	2021	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,44	0,44	0,43	0,45	0,42	0,44
Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,08	0,07	0,08
Industri Pengolahan	1,66	1,64	1,63	1,62	1,57	1,62
Pengadaan Listrik dan Gas	0,99	1,01	0,93	0,86	0,87	0,93
Pengadaan Air	1,20	1,19	1,17	1,21	1,15	1,18
Konstruksi	0,96	0,97	1,00	1,01	1,04	1,00
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,01	1,02	1,04	1,06	0,98	1,02
Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,60	1,51	1,29	1,26	1,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,80	0,81	0,82	0,88	0,84	0,83
Informasi dan Komunikasi	1,11	1,12	1,11	1,11	1,04	1,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,73	0,74	0,71	0,72	0,71	0,72
Real Estate	2,88	2,99	3,07	3,10	2,96	3,00
Jasa Perusahaan	0,59	0,57	0,56	0,57	0,54	0,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,53	0,52	0,53	0,54	0,51	0,53
Jasa Pendidikan	0,97	0,98	0,99	0,99	0,93	0,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,07	1,05	0,99	1,05
Jasa lainnya	0,86	0,85	0,83	0,83	0,79	0,83

Sumber: Data Olahan Bappeda, 2022

Menggunakan analisis LQ di Provinsi Banten, secara rata-rata sektor-sektor yang dapat dikatakan unggul diantaranya adalah sektor real estate, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor perdagangan besar dan eceran. Sementara sektor-sektor lainnya memiliki nilai LQ rata-rata di bawah satu yang dapat diartikan bahwa sektor-sektor lainnya non-unggul yang hanya dapat memenuhi kebutuhan di daerahnya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, nilai LQ masing-masing sektor tidak mengalami banyak perubahan dan memiliki tren yang beragam. Untuk sektor dengan rerata LQ yang masih kurang dari satu atau belum unggul seperti sektor konstruksi memiliki tren yang terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021 nilai LQ sektor konstruksi sudah lebih dari satu yang berarti mulai masuk sebagai sektor unggulan Provinsi Banten.

Melalui analisis LQ, Pemerintah Provinsi Banten dapat mengetahui kebijakan yang tepat untuk setiap sektor. Sektor-sektor unggulan dapat dipertahankan perkembangannya agar dapat digunakan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara keseluruhan. Sementara sektor-sektor yang belum unggul masih memiliki ruang untuk ditingkatkan sebagai upaya memperluas perkembangan ekonomi Banten relatif terhadap perekonomian nasional.

2.1.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

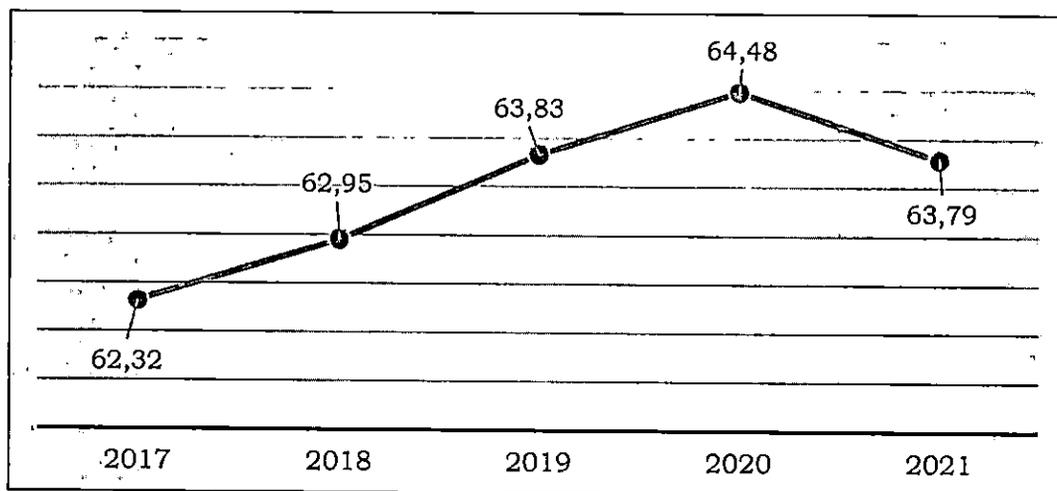
TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja. TPT Provinsi Banten mengalami tren yang cukup fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020. Nilainya meningkat di tahun 2017 sebelum secara konsisten menurun hingga tahun 2019. Namun, meningkat tajam tahun 2020 akibat adanya pandemi. TPT Provinsi Banten tahun 2020 tercatat sebesar 10,64 persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 8,98 persen.

Tabel 2. 28
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (Persen)

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN (PERSEN)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kab Pandeglang	8.30	8.19	8.67	9.15	7.70
Kab Lebak	8.88	7.57	7.96	9.63	7.86
Kab Tangerang	10.57	9.63	8.92	13.06	9.06
Kab Serang	13.00	12.63	10.58	12.22	10.58
Kota Tangerang	7.16	7.39	7.14	8.63	9.07
Kota Cilegon	11.88	9.21	9.64	12.69	10.13
Kota Serang	8.43	8.10	8.07	9.26	9.41
Kota Tangerang Selatan	6.83	4.67	4.78	8.48	8.60
PROVINSI BANTEN	9.28	8.47	8.11	10.64	8.98

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki angka TPT lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi secara keseluruhan adalah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sementara kabupaten dan kota sisanya memiliki angka TPT di bawah rata-rata. TPT di Kabupaten Serang paling tinggi tahun 2021 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di daerah ini masih sangat terbatas.



Gambar 2. 15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten Tahun 2017-
2021 (Persen)

(Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk pada rentang usia penduduk usia kerja yakni 15 tahun dan lebih. Adapun angkatan kerja sendiri dapat diartikan sebagai kelompok

penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sehingga, TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data BPS, tren TPAK Provinsi Banten mengalami kenaikan sejak tahun 2017 hingga 2020, dan menurun di tahun 2021. Angka TPAK sebesar 63,79 persen di tahun 2021 menggambarkan bahwa dari total penduduk Provinsi Banten, sebanyak 63,79 persen merupakan penduduk usia kerja yang dapat melakukan aktivitas ekonomi di dalam perekonomian. Kenaikan TPAK dalam lima tahun terakhir sejalan dengan rata-rata TPAK nasional yang meningkat menjadi 67,80 persen di tahun 2021. Meskipun dengan tren yang serupa, partisipasi angkatan kerja Provinsi Banten saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 6,26 juta orang, naik 47,42 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,69 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 8,98 persen, turun 1,66 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,69 juta orang, naik sebanyak 146,17 ribu orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (0,67 persen). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Jasa Lainnya (1,80 persen poin). Sebanyak 2,78 juta orang (48,87 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,31 persen poin dibanding Agustus 2020: Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,70 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,97 persen poin dibandingkan Agustus 2020. Terdapat 1,22 juta orang (12,45 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (99,85 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (36,01 ribu orang), sementara tidak

bekerja karena COVID-19 (55,33 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (1,03 juta orang).

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berperan penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia. IPM merupakan indikator yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk mencakup kondisi kualitas hidup manusia atau penduduk, IPM dibangun melalui tiga dimensi atau kelompok utama, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Berdasarkan metodologi statistik yang dilakukan oleh BPS, pengukuran IPM aspek kesehatan mengacu pada angka harapan hidup. Sementara untuk melihat capaian pengembangan pengetahuan, digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun aspek hidup layak diukur menggunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang umumnya dilihat dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita yang dinilai dapat mewakili capaian pembangunan hidup layak.

Dalam rentang waktu tahun 2017 s.d 2021 indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten terus melampaui besaran yang ditargetkan dan tergolong kepada level “Tinggi”. Hal ini menunjukkan kualitas penduduk Provinsi Banten dari sisi Pendidikan dan kesehatan terus mengalami peningkatan.

Peningkatan IPM Provinsi Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada Tahun 2021, mencapai 70,02 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun 2 bulan. Sepanjang periode Tahun 2017-2021, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,23 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2021 telah mencapai 13,02 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki peluang untuk bersekolah hingga perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

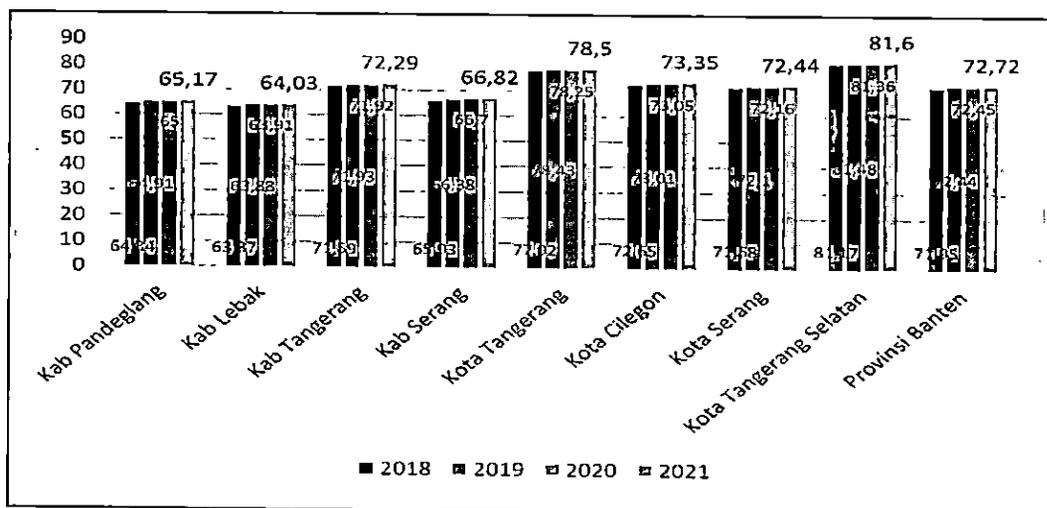
Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2021 telah mencapai 8,93 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada Tahun 2021 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen pembentuknya dari tahun 2017-2021, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 29
Komponen Pembentuk IPM di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

KOMPONEN IPM	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (tahun)	69,49	69,64	69,84	69,96	70,02
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	12,78	12,85	12,88	12,89	13,02
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,53	8,62	8,74	8,89	8,93
Pengeluaran per Kapita (Ribuan Rp/Tahun)	11.659	11.994	12.267	11.986	12.033
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022



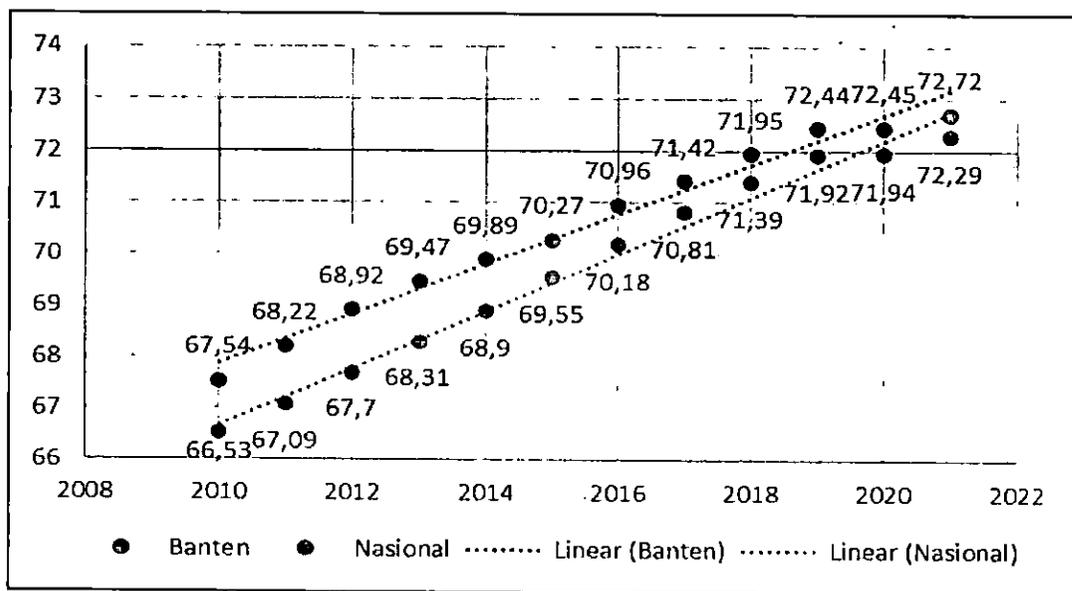
Gambar 2. 16
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Poin)

(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten/Kota pada tahun 2021 cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi dicapai oleh Kota

Tangerang Selatan 81,6 poin dan terendah pada Kabupaten Lebak 64,03 poin . Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar di atas.

Secara Nasional, capaian pembangunan manusia Provinsi Banten sudah cukup baik dimana Provinsi Banten menempati peringkat kedelapan dengan angka IPM tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Kualitas hidup penduduk di Provinsi Banten sudah lebih baik dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa yakni Jawa Barat (10), Jawa Tengah (13), dan Jawa Timur (15).



Gambar 2. 17
 Persandingan IPM Provinsi Banten dan Nasional
 Tahun 2010-2021 (Poin)
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah meliputi.

2.1.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kebutuhan kalori masyarakat dapat dijadikan acuan Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita menurut

Kelompok Barang Pangan/Non Pangan yang dapat menjadi gambaran tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2. 30
Rata-Rata Konsumsi Kelompok Makanan Tahun 2018-2020
(Kalori per Kapita Sehari)

KELOMPOK MAKANAN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Padi-padian	850,90	828,63	839,87	824,95
Umbi-umbian	28,88	32,15	36,09	37,77
Ikan	53,03	53,64	53,78	55,07
Daging	76,48	78,74	80,09	92,81
Telur dan Susu	78,48	71,23	71,23	78,61
Sayur-sayuran	34,41	37,80	37,75	38,35
Kacang-kacangan	58,58	55,84	56,85	59,57
Buah-Buahan	52,58	44,78	41,65	39,83
Minyak dan Lemak	265,54	277,35	282,48	312,40
Bahan Minuman	73,99	77,51	78,00	77,54
Bumbu-bumbuan	13,84	12,79	14,40	12,91
Konsumsi Lainnya	73,21	65,05	63,01	69,14
Makanan dan Minuman Jadi	601,85	613,15	591,81	522,53
JUMLAH	2.261,77	2.248,65	2.250,36	2.221,47

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sumber kalori utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Provinsi Banten masih terlalu bergantung pada kelompok makanan “Padi-Padian” sehingga komposisi pangan yang beragam pun belum dapat dicapai. Hal tersebut juga mengakibatkan tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.

2.1.3.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

Tabel 2. 31
Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2021

BULAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	98,97	101,66	100,28	105,14	101,16
Februari	97,92	101,47	100,64	105,49	100,92
Maret	98,19	101,00	100,14	106,01	99,69
April	98,94	99,68	99,93	106,01	98,07
Mei	98,86	98,66	99,93	103,61	98,19
Juni	100,19	98,73	98,80	101,45	97,71
Juli	99,60	96,65	99,27	99,69	95,87
Agustus	99,83	98,28	100,55	100,32	96,65
September	100,69	99,26	102,11	101,20	97,71
Oktober	101,01	99,83	102,79	101,97	97,90
November	101,29	100,79	102,54	100,82	98,22
Desember	101,54	100,52	103,10	100,82	99,29
Rata-rata (y to y)	99,75	99,71	100,84	102,71	98,45

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di empat kabupaten di Provinsi Banten pada Januari 2022, NTP secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,62 persen dibandingkan NTP Desember 2021. Kenaikan NTP yang terjadi pada Januari 2022 ini dikarenakan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 2,36 persen dan naiknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,74 persen.

Tabel 2. 32
 Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Menurut Sub Sektor di Provinsi Banten
 Januari-Juni 2021

SUBSEKTOR PERTANIAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP) BULANAN MENURUT SUBSEKTOR DI PROVINSI BANTEN					
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Tanaman Pangan	101,15	100,38	98,43	95,37	94,94	94,85
Tanaman Hortikultura	102,37	103,33	103,78	103,96	103,88	102,54
Tanaman Perkebunan Rakyat	111,60	113,64	112,89	115,81	118,45	117,92
Peternakan	94,14	93,93	94,32	96,13	98,27	96,42
Perikanan	98,65	100,02	100,45	100,84	101,39	101,04
NTP Gabungan	101,16	100,92	99,69	98,07	98,19	97,71

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada Januari 2022 ini, kenaikan indeks NTP terjadi pada semua subsektor, yaitu: Subsektor Tanaman Pangan sebesar 2,01 persen, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,55 persen, Subsektor Peternakan sebesar 1,08 persen, Subsektor Hortikultura sebesar 0,43 persen dan Subsektor Perikanan sebesar 0,17 persen.

Tabel 2. 33
 Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Menurut Subsektor di Provinsi Banten
 Juli-Desember 2021

Subsektor Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan Menurut Subsektor di Provinsi Banten					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Tanaman Pangan	92,34	93,82	95,68	96,27	97,14	98,63
Tanaman Hortikultura	101,69	99,46	98,87	97,19	96,27	96,96
Tanaman Perkebunan Rakyat	121,06	121,80	119,73	120,04	117,36	116,82
Peternakan	94,08	94,57	94,49	94,22	94,71	94,91
Perikanan	100,85	100,38	101,80	102,83	102,14	101,94
NTP Gabungan	95,87	96,65	97,71	97,90	98,22	99,29

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Dari sisi analisis secara makro, nilai NTP/NTN di bawah 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Hal tersebut mencerminkan bahwasanya petani dan nelayan di Provinsi Banten belum dapat memiliki gaya hidup yang layak. Akan tetapi apabila kita analisis berdasarkan per sub sektor, maka dapat

ditemukan subsektor mana saja dan pada periode kapan nilai NTP/NTN tersebut tercatat di bawah 100. Untuk menjawab persoalan di atas, dibutuhkan rencana penanganan yang terstruktur dan terprogram guna meringankan salah satu sumber kemiskinan di daerah pedesaan dan pesisir. Peningkatan produksi pangan (pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan) wajib senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan cara produksi yang baik dan benar dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (*sustainable resource*).

2.1.3.3 Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

Secara definisi, Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah kegiatan pengusahaan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan non-listrik yang di dalamnya meliputi kegiatan wisata, agrobisnis, industri dan kegiatan lainnya yang menggunakan panas bumi secara langsung.

Tabel 2. 34
WKP, Lokasi Potensi, Potensi (MW) dan Luas WKP

NO	WKP	LOKASI POTENSI	POTENSI (MW)	LUAS WKP
1	Kaldera Danau Banten	1. Rawa Dano : 85 MW 2. Gunung Karang : 86 MW 3. Gunung Pulosari : 87	115 (possible)	104.200 Ha
2	Gunung Endut	Gunung Endut : 88 MW	80 (Cadangan Terduga)	25.870 Ha

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

- Kaldera Danau Banten: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 0026/K/30/MEM/2009 tanggal 15 Januari 2009;
- Gubung Endut: Surat Keputusan Kementerian ESDM Nomor 1154/K/30/MEM/2011 tanggal 21 April 2011.

Tabel 2. 35
Non WKP, Lokasi Potensi, Potensi (MW) dan Luas WKP

NON WKP	LOKASI POTENSI	POTENSI (MW)	LUAS NON WKP
Pamancalan	Pamancalan : 225 MW	225 (Cadangan Terduga)	N/A

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Pada Tahun 2021, terdapat 2 (dua) WKP Panas Bumi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan diinventarisir 4 (empat) wilayah sumber panas bumi di Banten yang diperkirakan memiliki potensi pemanfaatan langsung (manifestasi) yang jumlahnya belum diketahui (N/A) dan belum ada pengembangan atau rencana pemanfaatannya sampai dengan kondisi 2021, yaitu:

1. Wilayah Rawa Dano;
2. Wilayah Gunung Karang;
3. Wilayah Gunung Pulosari; dan
4. Wilayah Gunung Endut.

2.1.3.4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Kualitas Lingkungan Hidup

Penguatan aspek perencanaan dalam upaya menurunkan emisi dan intensitas emisi GRK telah dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menjadikan Pembangunan Rendah Karbon menjadi salah satu program prioritas di dalam salah satu agenda Prioritas Nasional 6 (PN 6) “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim” di dalam RPJMN 2020-2024. Dalam mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, ditetapkan 5 strategi utama, yaitu:

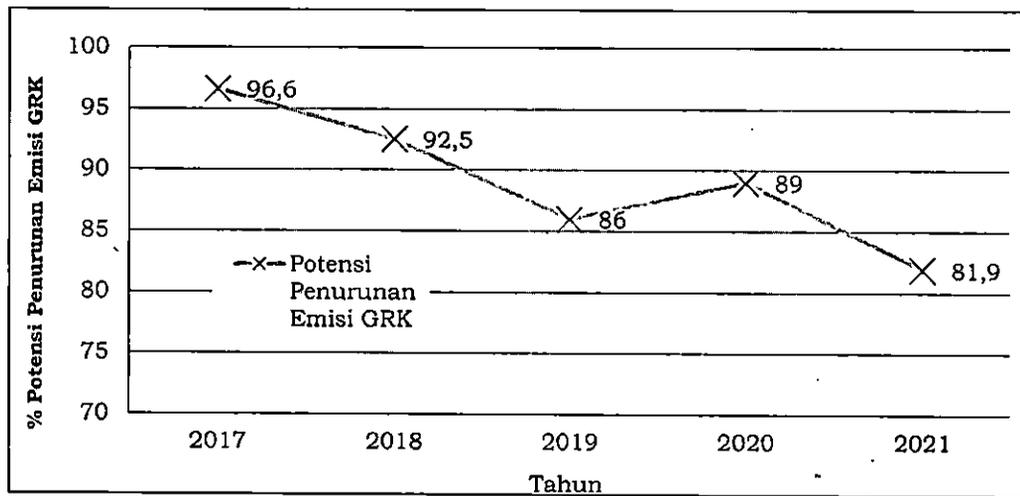
1. Pembangunan energi berkelanjutan;
2. Pemulihan lahan berkelanjutan;
3. Penanganan limbah;
4. Pengembangan industri hijau; dan
5. Inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Implementasi kegiatan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Banten telah dilaksanakan sejak Tahun 2010, dimulai dengan penyusunan dan implementasi RAD-GRK dan dilanjutkan dengan PRK. Kegiatan PRK di Provinsi Banten dikoordinasikan oleh Bappeda dan implementasi dilaksanakan oleh OPD teknis terkait di bidang kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, pertanian, dan pengelolaan limbah.

Tabel 2. 36
 Capaian Penurunan dan Intensitas Emisi GRK Tahun 2017-2021
 (Juta ton CO₂e)

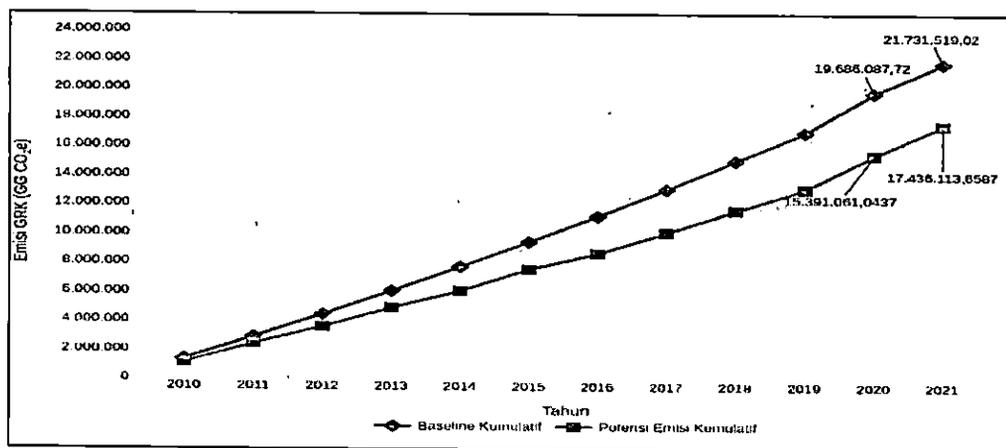
URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta ton CO ₂ e)	660.682,1 juta ton CO ₂ e atau 96,6 %	1.557.812,6 juta ton CO ₂ e atau 92,5 %	3.121.692,9 juta ton CO ₂ e atau 86 %	2.648.382,7 juta ton CO ₂ e atau 89 %	4.734.614 juta ton CO ₂ e atau 81,9 %

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022



Gambar 2. 18
 Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2017-2021 (Persen)
 (Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Pada tabel di atas terlihat Potensi Penurunan Emisi Rumah Kaca di Provinsi Banten cenderung fluktuatif. Secara total kumulatif sampai dengan Februari 2021, telah tercatat terdapat 1.166 kegiatan aksi PRK dalam sistem AKSARA dengan potensi capaian sebagai berikut.



Gambar 2. 19
 Nilai Baseline dan Potensi Emisi Tahunan Kumulatif Tahun 2010-2021
 (Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Potensi Penurunan Emisi GRK 4,734,614.0 juta ton CO₂e atau 81,9 persen dibandingkan dengan *baseline* tahun 2021. Pada tabel di bawah ini, terlihat bahwa terjadi kenaikan Emisi GRK dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2. 37
Realisasi Gas Rumah Kaca Tahun 2018-2020 (Persen)

URAIAN	2018		2019		2020	
	T	R	T	R	T	R
Emisi Gas Rumah Kaca (Persen)	44,17	49,02	44,67	56,86	50,87	62,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Penurunan dan Intensitas Emisi GRK sektoral

1) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Total kegiatan Tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 1.011.

Kegiatan yang paling banyak melakukan kegiatan penanaman (rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, pembagian bibit, dan sebagainya), pembangunan dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm, Hutan Desa, Hutan Kota, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat), serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan (baik dari kebakaran hutan, perambahan, maupun illegal logging).

2) Bidang Pertanian

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 107. Kegiatan yang paling banyak dilaporkan pada bidang pertanian adalah kegiatan Pengelolaan Tanaman Terpadu.

3) Bidang Energi

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 26. Kegiatan mitigasi yang mendominasi pelaporan pada bidang energi adalah kegiatan pembangunan energi terbarukan off grid dalam bentuk pembangunan PLTS dan PLTMH. Selain itu, kegiatan mitigasi berupa substitusi bahan bakar fosil juga banyak dilaporkan. Kegiatan pendukung yang banyak dilaporkan

adalah program sosialisasi ataupun penyusunan *feasibility study* suatu pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

4) Bidang Transportasi

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 8 (delapan). Aksi mitigasi yang mendominasi pelaporan antara lain aksi mitigasi hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), reformasi sistem transit (BRT), dan *Smart Driving (Eco Driving)*.

5) Bidang Pengelolaan Limbah

Total kegiatan tahun 2021 yang dalam sistem AKSARA adalah sebesar 0 (nol) kegiatan, dengan total keseluruhan sampai dengan Februari 2021, sebanyak 14. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh provinsi meliputi:

- a. Sub bidang persampahan domestik: pemanfaatan gas metan di TPA, proses komposting di TPST/TPS 3R, dan proses reuse dan recycle sampah kertas/kardus/karton di Bank Sampah;
- b. Sub-bidang air limbah: operasionalisasi IPAL atau septic tank komunal, baik itu secara *aerobic* dan *anaerobic*.

2.1.3.5 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi antara lain:

- a. Komponen Pengungkit:
 - 1) Pemenuhan;
 - 2) Hasil antara area perubahan; dan
 - 3) Reform.
- b. Komponen Hasil:
 - 1) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
 - 2) Kualitas Pelayanan Publik;
 - 3) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN; dan

4) Kinerja Organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Semula, tahun 2018 Indeks Reformasi Birokrasi tercatat 55,08 (kategori C), lalu 2019 tercatat 60,12 (kategori B), di tahun 2020 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten adalah 61,12 (Kategori B) dan 63,11 (Kategori B) di tahun 2021, walaupun menunjukkan kenaikan namun tingkat perkembangannya masih belum optimal, hanya naik 1,99 poin dari 2020 ke 2021.

Tabel 2. 38
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2020 (Nilai)

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020	2021
A	Komponen Pengungkit			
1	Pemenuhan	20	17,29	17,58
2	Hasil antara area perubahan	10	5,67	6,58
3	Reform	30	8,47	9,52
	Total Komponen Penilaian	60	31,43	41,38
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas kinerja dan Keuangan	10	7,59	7,61
2	Kualitas pelayanan publik	10	8,53	8,47
3	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10	8,93	6,42
4	Kinerja organisasi	10	4,64	6,93
	Total Komponen Hasil	40	29,69	29,43
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100	61,12	63,11

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari dua komponen yaitu pengungkit dan komponen hasil, sehingga diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebesar 63,11 (kategori B). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan Pemprov Banten telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan, hasil antara dan reform, namun belum diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

2.1.3.6 Rasio Ketergantungan

Pada tahun 2021, Penduduk Banten angkatan kerja sebanyak 63,79 persen, dan hanya 36,21 persen penduduk bukan angkatan kerja. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Banten sebesar 56,76 persen.

Tabel 2. 39
Tingkat Ketergantungan/Rasio Ketergantungan Provinsi Banten
Tahun 2018-2021 (persen)

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Jiwa)	8.706.909	8.879.282	8.331.538	6.260.654
2	Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun dan Usia >64 Tahun (Jiwa)	3.982.827	4.048.034	3.573.024	3.553.680
3	Angka Ketergantungan Penduduk	45,74	45,59	42,89	56,76

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib dasar yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Dasar pilihan ini meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- dan
- f. Sosial.

a. Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat amanat agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memiliki beberapa kewajiban diantaranya:

- Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SK Negeri dan Swasta;
- Memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Tabel 2. 40
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)			
		2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	109,5	107,93	107,24	106,91
2	SMP/MTs	91,71	91,61	92,76	94,88
3	SMA/SMK/MA	71,7	72,92	73,35	75,66

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni merepresentasikan dimensi partisipasi pendidikan pada tingkat SD/MI sampai SMA/MA. Selama periode 2018 hingga 2021, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA sebesar 75,66 meningkat sebesar 2,31 dari tahun sebelumnya dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 59,69 poin meningkat 0,63 poin dari tahun sebelumnya.

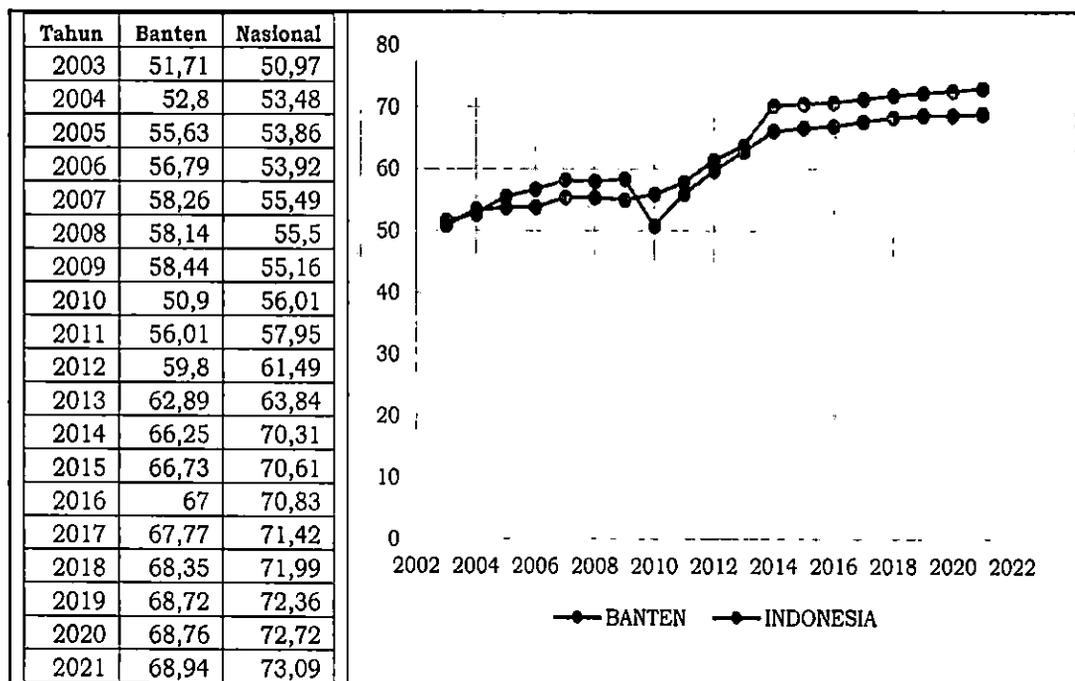
Tabel 2. 41

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	97,56	97,97	97,98	97,95	98,15
2	SMP/MTs	80,59	80,91	81,93	82,73	84,28
3	SMA/SMK/MA	57,88	58,72	58,8	59,06	59,69

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di bawah, terlihat bahwa realisasi APS di Provinsi Banten sering berada di bawah rata-rata realiasi nasional. Bahkan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terlihat bahwa nilai APS Provinsi Banten konsisten di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, realisasi APS Provinsi Banten sebesar 68,94 pada tahun 2021 menduduki peringkat kelima terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan nilai APS tahun 2021, Provinsi Banten hanya lebih baik dibandingkan Provinsi Papua, Kaliman Tengah, Jawa Barat dan Bangka Belitung.



Gambar 2. 20

Perbandingan APS Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2003-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Kualitas SDM yang baik dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata menjadi target pelaksanaan pembangunan

pendidikan di Banten dan sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's). Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian pembangunan pendidikan.

Laporan SPM bidang pendidikan tahun 2021 merupakan laporan yang menggambarkan indikator-indikator keberhasilan SPM pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Banten serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan SPM dalam Sektor Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021.

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi pendidikan menengan dan pendidikan khusus, berikut capaian SPM untuk bidang pendidikan.

Tabel 2. 42
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendidikan Menengah Atas Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	138.205	138.205	100	129.081	129.081	100
2	Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	89.765	89.765	100	84.393	84.393	100
3	Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	1.198	1.198	100	1.282	1.282	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Permendikbud No. 32 Tahun 2018 dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus

dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan di Provinsi Banten dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Berdasarkan data capaian SPM, terdapat 2 (dua) standar yang perlu diperhatikan yaitu standar sarana dan prasarana serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) yang data capaiannya masih di bawah beberapa indikator standar yang lain.

b. Bidang Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator pada Urusan Kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan akses kesehatan bagi masyarakat Banten. Capaian pada indikator menunjukkan capaian urusan kesehatan menunjukkan ketercapaian target kinerja yang tinggi terutama pada penurunan jumlah kematian ibu yang tercatat dari 242 kematian ibu menurun menjadi 198, dan penurunan kematian bayi juga mengalami penurunan dari 1.670 menjadi 1.157 kematian bayi.

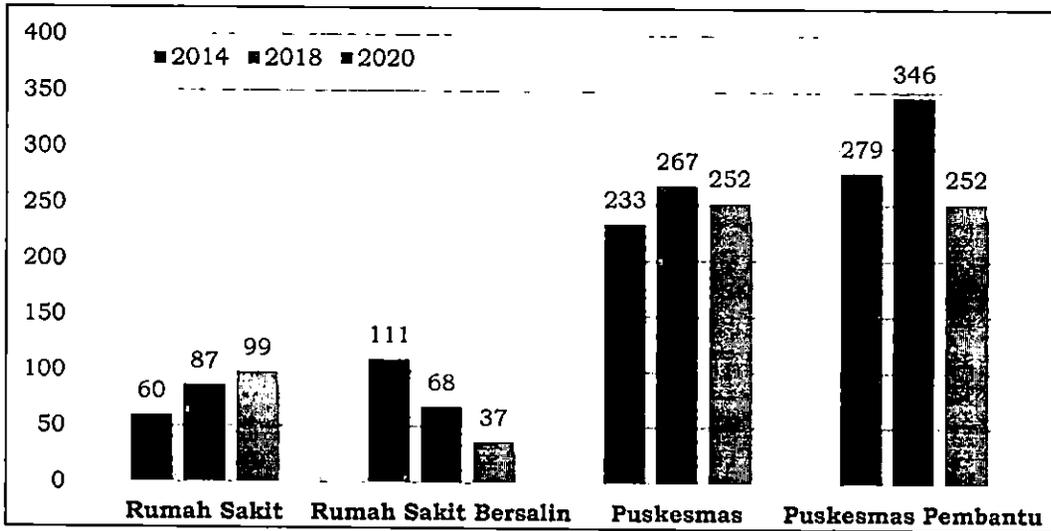
Capaian indikator urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2. 43
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	2018		2019		2020		2021	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	247	257	242	222	237	242	232	198
2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	1149	1158	1144	1299	1139	1670	1134	1157
3	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	90	100	100	100	100	100	100	100
4	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	60	121,67	65	112,75	70	100,66	75	101,87
5	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	60	122,15	65	127,75	65	108,40	70	101,26

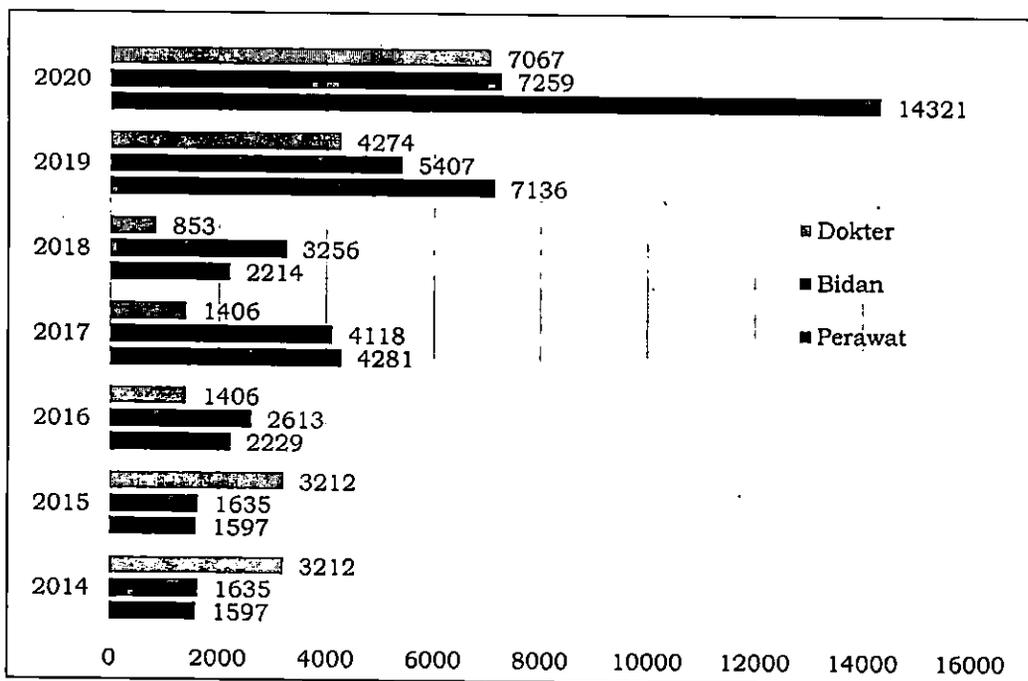
Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Selanjutnya pada fasilitas sarana kesehatan tercatat data terakhir yaitu rumah sakit sebanyak 99 unit, rumah sakit bersalin 37 unit, puskesmas 252 unit, puskesmas pembantu 252 unit dan di tahun mendatang diharapkan ketersediaan infrastruktur kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2. 21
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Unit)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten semakin menunjukkan jumlah yang meningkat apalagi dengan terbangunnya jumlah Rumah Sakit, peningkatan terbanyak adalah tenaga kesehatan perawat yang menunjukkan penambahan lebih dari 100 persen.



Gambar 2. 22
Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Jiwa)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Selanjutnya, berkaitan dengan stunting, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2021, telah terjadi penurunan prevalensi stunting secara nasional dari 27,67 persen pada tahun 2019 (SSGBI 2019) menjadi 24,4 persen tahun 2021 (SSGI 2021) atau turun sekitar 3,27 persen. Prevelensi *Stunting* di Provinsi Banten berada di atas nasional yakni 24.5 persen atau naik 1,1 persen dari tahun 2019 sebesar 23,4 persen (SSGBI 2019). Beberapa Kabupaten/Kota menunjukan kenaikan Prevalensi Stunting yaitu Kabupaten Pandeglang naik sebesar 4,8 persen, Kabupaten Tangerang naik sebesar 6,5 persen, dan Kota Tangerang Selatan naik sebesar 5,5 persen. Adapun kabupaten/kota lainnya berhasil menurunkan angka *stunting* dimana penurunan terbanyak adalah Kabupaten Serang.

Tabel 2. 44
Prevalensi *Stunting* Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2021
1	Kabupaten Pandeglang	39,47	33,00	37,80
2	Kabupaten Lebak	40,19	33,10	27,30
3	Kabupaten Tangerang	23,23	16,80	23,30
4	Kabupaten Serang	32,04	38,60	27,20
5	Kota Tangerang	19,07	16,40	15,30
6	Kota Cilegon	23,32	28,20	20,60
7	Kota Serang	24,62	28,20	23,40
8	Kota Tangerang Selatan	19,85	14,40	19,90
PROVINSI BANTEN		26,58	23,40	24,50
INDONESIA		30,80	27,67	24,40

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Anak bebas gizi buruk merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), dimana pentignya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta pertanian yang berkelanjutan. Balita dengan gizi buruk mempunyai dampak jangka pendek dan panjang berupa gangguan tumbuh kembang termasuk kognitif/ *stunting*, kesakitan, risiko penyakit degeneratif di kemudian hari.

Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan

Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Tabel 2. 45
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Presentase Pelayanan Kesehatan						
	Terdampak Kesehatan Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk						
	Terdampak Kesehatan dan/Potensi Bencana Provinsi	418.873	418.873	100%	115.464	115.464	100%
B	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk						
	Terdampak Beresiko dan Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk						
	Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	19.086	19.086	100%	61.613	61.613	100%

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan antara lain:

- Kurangnya sosialisasi, masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar;
- Penetapan target SPM yang terlalu tinggi;
- Tidak adanya sistem insentif dan disinsentif; dan
- Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya kualitas SDM.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan peninjauan kembali konsep layanan dasar, peningkatan sosialisasi, peninjauan target capaian SPM, serta pemberlakuan *reward* dan

punishment, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, seperti Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, yang perlu diperhatikan adalah layanan irigasi yang dipergunakan untuk pengairan sawah juga mengalami kenaikan luas layanan dari sebelumnya 16.051,13 Ha saat ini 16.411,00 Ha namun dalam 30 tahun terakhir masih belum ada penambahan luasan irigasi. Untuk penyediaan air baku juga mengalami penurunan, jika kita lihat sebelumnya bisa 100 persen namun saat ini hanya 85 persen, untuk lebih rinci digambarkan pada table di bawah ini.

Tabel 2. 46
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	91,4	98,15	94,44	98,00
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	-	-	91,10	93,60
3	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)	20,84	26,89	27,20	27,28
4	Luasan Layanan Irigasi (Ha)	15.312,06	15.826,06	16.051,13	16.411
5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku (%)	-	-	100	85,49
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	88,5	88,7	96,43	90
7	Persentase Tersusunnya Perda rencana Tata Ruang 8 kawasan strategis Provinsi (%)	-	-	20	20
8	Persentase kesesuaian pembinaan Pemanfaatan ruang	-	-	100	90

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Urusan Penataan Ruang di Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Proses Rencana Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Banten yang mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini masih dalam tahap paripurna dan belum disahkan, sehingga masih menunggu dokumen untuk segera disahkan.

Pada tahun 2021, dari 762,03 km Jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 598,44 km dalam kondisi baik (78,53 persen), kemudian 120,99 km dalam kondisi sedang (15,88 persen), 15,83 km dalam kondisi rusak ringan (2,08 persen) dan 26,27 km dalam kondisi rusak berat (3,51 persen). Hal ini menunjukkan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,6 persen. Sedangkan persentase jalan provinsi yang memenuhi standar teknis pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,21 persen. Sementara itu, persentase jalan dan jembatan provinsi yang memenuhi standar teknis (minimal perkerasan 7 m) mengalami kenaikan sebesar 17,12 persen.

Tabel 2. 47
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan Tahun 2013-2021 (Km)

KONDISI JALAN	PANJANG JALAN PROVINSI MENURUT KONDISI JALAN								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	229,65	384,79	384,79	432,13	432,13	549,41	598,44	598,44	614,41
Sedang	380,21	194,32	194,32	170,69	170,69	147,13	120,99	120,99	132,42
Rusak	174,39	60,31	60,31	75,58	75,58	43,19	15,83	15,83	6,14
Rusak Berat	68,64	213,47	213,47	83,62	83,62	22,30	26,77	26,77	9,06
JUMLAH	852,89	852,89	852,89	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 48
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)	TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	800 l/dtk	100,00	100%	400 l/dtk	100,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	2000 jiwa	0%	100%	2000 jiwa	100%

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota dialokasikan untuk wilayah layanan pembangunan WTP Sindang Heula (800 lt/detik) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
 - Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota, melalui pembangunan IPAL komunal.
- d.** Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator luasan kawasan kumuh yang diperbaiki dan penanganan rumah layak huni yang diperbaiki. Dimana terjadi peningkatan kawasan kumuh yang ditangani, meningkat signifikan dari 71,4 Ha menjadi 292 Ha. Hal lain adalah persentase rumah layak huni yang realisasinya semakin menurun dari 86,34 persen menjadi 70,71 persen yang perlu perhatian serius.

Tabel 2. 49
Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	58,22	101,16	71,4	292,04
2	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,01	93,13	86,34	70,71
3	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (%)	36	39	75	88
4	Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (%)	0	0	5	10

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah karena belum 100 persen terakses sumber air minum layak. Tercatat, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan persentase rumah tangga dengan air minum layak dan sanitasi layak setiap tahunnya. Secara rata-rata pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak baru mencapai 66,11 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, dan pada akhir tahun 2021 sudah mencapai 93,51 persen.

Tabel 2. 50
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Persen)

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pandeglang	39,50	41,93	45,96	75,83	82,01
2	Kab. Lebak	35,58	44,09	37,97	73,49	73,72
3	Kab. Tangerang	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97
4	Kab. Serang	59,20	65,73	68,34	89,95	92,33
5	Kota Tangerang	78,93	88,64	89,60	98,37	98,00
6	Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72
7	Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,10	98,38
8	Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22
PROVINSI BANTEN		66,11	72,83	73,17	92,87	93,51

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Untuk sumber air minum yang tersedia sebagian besar diperoleh dari air dalam kemasan lalu pompa, dimana setiap tahun pemanfaatan air dalam kemasan makin meningkat sebesar 3,71 persen dan penggunaan pompa semakin menurun sebesar 3,59 persen. Terlihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 51
Persentase Sumber Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2018-2021
(Persen)

NO	JENIS SUMBER AIR MINUM	2018	2019	2020	2021
1	Leding	3,46	3,11	2,93	2,08
2	Pompa	26,09	26,87	30,16	26,57
3	Air dalam Kemasan	52,81	53,03	52,43	56,14
4	Sumur terlindung	8,20	7,65	6,15	6,38
5	Sumur Tak terlindung	3,59	3,31	2,66	1,77
6	Mata Air Terlindung	2,69	2,36	2,53	3,92
7	Mata Air Tidak Terlindung	2,49	2,81	2,11	2,17
8	Air Permukaan	0,40	0,70	0,57	0,57
9	Air Hujan	0,09	0,16	0,22	0,22
10	Lainnya	0,18	0,00	0,24	0,17
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Tabel 2. 52
Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun (Satuan : Unit)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	140,50	989.328
2	Kabupaten Lebak	293.902,00	293.902,00	296.776,00	1.078.946
3	Kabupaten Tangerang	1.922,00	-	835.328,00	2.958.251
4	Kabupaten Serang	-	-	147.090,00	1.468.840
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.618.244
6	Kota Cilegon	91.046,00	91.046,00	91.046,00	392.195
7	Kota Serang	110.592,00	-	167.731,00	615.853
8	Kota Tangerang Selatan	328.037,00	327.902,00	328.114,00	1.161.039
	Banten	825.499	712.850	1.866.225,5	10.282.696

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah rumah layak huni di Banten tahun 2021 meningkat dengan pesat dari 2020 sebesar 550,99 persen, dengan jumlah rumah layak huni terbanyak berada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 53
Jumlah Rumah Layak Tidak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

NO.	KABUPATEN / KOTA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	7.226,00	60.434,00	16.776,00	298.985
2	Kabupaten Lebak	47.701,00	45.927,00	42.888,00	328.910
3	Kabupaten Tangerang	19.387,00	11.469,00	19.992,00	335.281
4	Kabupaten Serang	3.336,00	-	3.336,00	178.949
5	Kota Tangerang	2.177,00	-	2.177,00	293.669
6	Kota Cilegon	524,00	524,00	545,00	49.565
7	Kota Serang	9.511,00	-	2.862,00	88.764
8	Kota Tangerang Selatan	2.736,00	17.248,00	2.869,00	204.648
	PROVINSI BANTEN	92.598,00	135.602,00	91.445,00	1.778.771,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jumlah rumah layak tidak huni di Banten tahun 2021 meningkat dengan pesat dari 2020, dengan jumlah rumah layak huni terbanyak berada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 54
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Tahun 2018-2021 (unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	2	2	2	2
Kabupaten Lebak	38	38	38	38
Kabupaten Tangerang	35	35	35	35
Kabupaten Serang	172	172	178	172
Kota Tangerang	-	-	35	339
Kota Cilegon	204	204	204	204
Kota Serang	158	158	158	158
Kota Tangerang Selatan	51	51	51	51
PROVINSI BANTEN	660	660	701	999

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di Banten cenderung fluktuatif, mengalami penurunan jumlah pada tahun 2020, lalu meningkat kembali pada tahun 2021.

Tabel 2. 55
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tahun 2018-2021 (unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
Kabupaten Lebak	2,00	2,00	-	-
Kabupaten Tangerang	30,00	30,00	30,00	-
Kabupaten Serang	-	-	3,00	-
Kota Tangerang	-	-	-	-
Kota Cilegon	7,00	7,00	7,00	-
Kota Serang	12,00	12,00	12,00	-
Kota Tangerang Selatan	1,00	1,00	1,00	16
PROVINSI BANTEN	52	52	51	16

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Banten pada tahun 2021 hanya ada di Kota Tangerang Selatan sejumlah 16 unit, sedangkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 13 unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 56
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	483	68.41%	100 %	66	25.78%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak	100 %	0	0,00	100 %	0	0,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung SPM ini adalah:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan target 116 unit;
- Pembangunan rumah bagi korban bencana, dengan target 140 unit.

Namun target tidak tercapai dikarenakan:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak mencapai target, dikarenakan keterbatasan SDM dalam pemasangan struktur teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA);
- Pembangunan rumah bagi korban tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerjasama pelaksanaan;
- Penanganan rumah bagi korban bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2021 tidak terlaksana karena terkendala *refocussing*. Selanjutnya tahun 2022 akan dilaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi relokasi korban program Pemerintah Daerah Provinsi.

e. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terjadi penurunan kasus tidak pidana sebanyak 7.741 kasus, namun penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten juga mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan penegakkan hukum di Provinsi Banten.

Tabel 2. 57
Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten Tahun
2017-2021 (Kasus)

NO	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tindak Pidana	2.413	2.442	2.581	2.631	3.719
2	Penyelesaian Tindak Pidana	1.621	1.511	1.601	1.904	3.463

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

SPM Urusan Ketenteraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Sub Urusan Kebakaran; dan
- Sub Urusan Bencana Daerah.

Sementara itu untuk jenis pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi, berikut hasil capaian terhadap SPM Trantibumlinmas.

Tabel 2. 58
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1	1	100	4	4	100
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	15	15	100	15	12	80
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	-	-	-	0	0	0

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

f. Bidang Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penanganan PMKS, Provinsi Banten sejak Tahun 2016 terus meningkat untuk jumlah PMKS, tercatat pada tahun 2021 terdapat 201.538 orang. Walaupun terdapat penurunan PMKS dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi karena Pandemi COVID-19 Tahun 2020 jumlah PMKS meningkat, dengan anggaran yang ada cakupan penanganannya hanya 2,68

persen, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan dan mengurangi jumlah PMKS di Provinsi Banten.

Tabel 2. 59
Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2021

INDIKATOR	PENANGANAN PMKS			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	4,8	6,46	6,41	2,68

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.

Tabel 2. 60
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	20	20	100	30	30	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	15	15	100	20	20	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	60	60	100	60	60	100
4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10	10	100	40	25	62,50
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1.300	Bencana banjir bandang: 4.195	100	1.300	1.630	125,38

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi; dan
- Pemerintah Provinsi Banten baru memiliki 2 (dua) UPTD yang melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yakni UPTD Perlindungan Sosial dan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Tindak lanjut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah, panti sosial milik masyarakat yang menangani PMKS terlantar;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif panti sosial milik masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan permasalahan sosial; dan
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar menjadi bagian dalam urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan namun tidak termasuk pelayanan dasar di masyarakat. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Non Dasar pilihan ini meliputi 18 bidang urusan:

- Tenaga Kerja;
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pangan;
- Pertanahan;
- Lingkungan Hidup;
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Pengendalian Penduduk dan KB;

- Perhubungan;
- Komunikasi Informatika;
- Koperasi;
- Penanaman Modal;
- Kepemudaan dan olahraga;
- Statistik;
- Persandian;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan; dan
- Kearsipan.

a. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja merupakan hal yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2018-2021 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini hasilnya sangat fluktuatif, terlihat dari capaian Tahun 2021 yang menurun dibandingkan dari tahun 2020, digambarkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 61
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2021 (Nilai)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,27	60,39	64,9	52,84

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Selain itu terlihat bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah penduduk berpendidikan SD, dimana ini mengalami fluktuasi, tahun 2020 tercatat 1.863.695 orang atau 30,49 persen dan di tahun 2021 sebesar 1.850.000 atau tercatat 32,40 persen, rincian seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62
Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2018-2021 (Jiwa)

NO	KABUPATEN/KOTA	BEKERJA			
		2018	2019	2020	2021
1	SD Ke Bawah	1.897.372	1.845.005	1.863.695	1.850.000
2	SMP	925.425	1.016.856	1.008.633	999.000
3	SMA/SMK	1.735.174	1.916.651	1.930.268	1.270.000
4	Universitas	774.525	784.334	744.576	789.000
	TOTAL	5.332.496	5.562.846	4.877.172	4.908.000

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

b. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 91,67, angka ini meningkat menjadi 91,83 pada tahun 2021.

Tabel 2. 63
Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2021 (Nilai)

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN		
		2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	86.68	86.71	86.83
2	Kab Lebak	79.63	79.81	79.87
3	Kab Tangerang	90.97	90.98	91.08
4	Kab Serang	92.40	92.14	91.98
5	Kota Tangerang	94.89	95.06	94.72
6	Kota Cilegon	87.16	87.22	87.25
7	Kota Serang	91.96	92.28	92.47
8	Kota Tangerang Selatan	93.56	93.58	93.80
	PROVINSI BANTEN	91.67	91.74	91.83

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 68,83 menurun menjadi 68,76 tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 69,09. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa upaya pembangunan Gender di Provinsi Banten telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik.

Tabel 2. 64
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN		
		2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	61.58	63.52	63.16
2	Kab Lebak	60.36	58.68	58.24
3	Kab Tangerang	61.54	61.53	62.17
4	Kab Serang	58.87	59.48	59.93
5	Kota Tangerang	65.19	65.03	64.86
6	Kota Cilegon	52.86	52.32	52.81
7	Kota Serang	62.10	61.26	61.66
8	Kota Tangerang Selatan	74.00	73.85	73.08
PROVINSI BANTEN		68.83	68.76	69.09

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Selain itu pada tahun 2021, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan PROVILA yaitu Provinsi pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dikarenakan Provinsi Banten seluruh Kabupaten/Kota nya telah memperoleh peringkat dan penghargaan KLA. Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak yang pengelompokkannya mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak. Menurut peringkatnya dari yang tertinggi hingga terendah, KLA dikelompokkan sebagai berikut: 1) Utama; 2) Nindya; 3) Madya; 4) Pratama.

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

c. Bidang Urusan Pangan

Capaian indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah yang di jabarkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 65
Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2021 (Nilai)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Nilai Indeks Ketahanan Pangan	83,29	81,93	73,48	82,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan Banten mengalami penurunan nilai di tahun 2021 yaitu sebesar 73,48, namun seiring membaiknya produksi dan konsumsi pangan Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 naik menjadi 82,69.

Tabel 2. 66
Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Tahun 2019-2021

NO	KELOMPOK MAKANAN	RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (KKAL)			RATA-RATA KONSUMSI PROTEIN PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (GRAM)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Padi-padian	828,63	839,87	885,34	19,5	19,76	20,83
2	Umbi-umbian	32,15	36,09	42,16	0,34	0,37	0,42
3	Ikan	53,64	53,78	55,80	9,58	9,68	9,91
4	Daging	78,74	80,09	85,26	5,05	5,12	5,41
5	Telur dan susu	71,23	71,23	70,18	3,92	4,11	3,90
6	Sayur-sayuran	37,8	37,75	39,92	2,07	2,05	2,13
7	Kacang-kacangan	55,84	56,85	58,13	5,40	5,52	5,67
8	Buah-buahan	44,78	41,65	40,00	0,51	0,48	0,41
9	Minyak dan Lemak	277,35	282,48	307,54	0,09	0,09	0,08
10	Bahan Minuman	77,51	78,00	82,62	0,72	0,78	0,77
11	Bumbu-bumbuan	12,79	14,40	14,31	0,51	0,56	0,57
12	Konsumsi lainnya	65,05	63,01	65,21	1,35	1,33	1,37
13	Makanan dan Minuman Jadi	613,15	591,81	512,60	18,03	17,54	15,22
	Jumlah	2.248,65	2.250,36	2.259,08	67,07	67,39	66,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini adalah penetapan lokasi dimana pada tahun 2021 terdapat 7 penetapan lokasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan.

Tabel 2. 67
Lokasi-Lokasi Penetapan Lokasi Tahun 2021

KETERANGAN	LOKASI
Surat Keputusan Penetapan Lokasi	1. Jalan Palima-Pasar Baros
	2. Tol kamal-Teluk naga-Rajeg
	3. Pelebaran jalan Pakupatan-Palima
	4. Tanggul Sungai Ciujung
	5. Serpong-Cinere
Tukar menukar tanah kas Desa	6. Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Bayah Malingping PT. PLN (Persero) Unit Indul Interkoneksi Sumatera-Jawa
	7. Pembangunan PSN Jalan Tol Serang - Panimbang II di Desa Sukajaya, Cikulur, Kab. Lebak

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

e. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung, seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri

di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktivitas industri dan pemukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai, dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun), abrasi pantai, hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung, eksploitasi sumber daya alam yang berlebih (*over exploitation*) dan bencana alam.

Tabel 2. 68
Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2021 (Indeks)

NO	INDEKS	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	49,02	56,86	62,94	62,73
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,33	52,07	54,83	54,47
3	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	72,36	72,36	73,35	73,74
4	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	45,46	45,9	45,46	45,99

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, terjadi peningkatan kualitas udara di Provinsi Banten. namun untuk realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Banten di tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0,21, dari posisi 62,94 di tahun 2020 menjadi 62,73 di tahun 2021. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kualitas air dimana aspek tersebut nilainya paling kecil dibanding lainnya, artinya pencemaran air sungai dan air laut perlu penanganan lebih prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan angka jumlah pencemaran dan limbah di bawah ini.

Tabel 2. 69
Jumlah Lokasi Pencemaran dan Banyaknya Perusahaan Memiliki
Pengolahan Limbah dari Tahun 2018-2020

NO	ITEM	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	9	8	8
2	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	21	21	22
3	Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	250	250
4	Tidak Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel 2. 70
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON)	Ton	514.276	584.019	715.661
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	92,46	85,98	89
3	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kasus	0	0	0
4	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung	Dokumen	1	0	0
5	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup	Usaha	0	0	0
6	Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton)	Ton	0	2.336.076	2.236.441

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

f. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase Capaian Tertib Administrasi Kependudukan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 71
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2018-2021

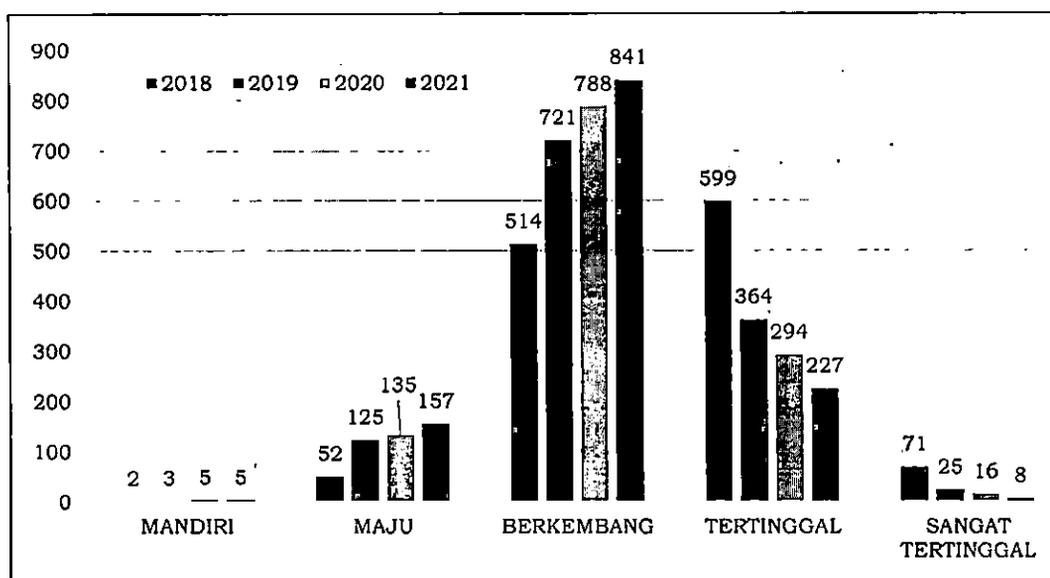
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
Cakupan capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Capaian ini sejalan dengan cakupan pelayanan fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-elektronik, akte kelahiran di Kabupaten/Kota yang sudah terlayani 100 persen oleh pemerintah provinsi.

g. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai tahun 2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan.



Gambar 2. 23
Perkembangan Status Desa Di Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Desa)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah desa sangat tertinggal di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 8 desa menurun 8 desa dibandingkan kondisi tahun 2020 yang mencapai 16 desa. Selain itu terjadi penurunan desa tertinggal dari semula berjumlah 294 desa (tahun 2020) menjadi 227 desa (tahun 2021). Meski demikian, jika dibandingkan penurunan tahun sebelumnya, jumlah penurunan tersebut kurang menggembirakan mengingat perubahan desa sangat tertinggal tahun 2018 (berjumlah 71 desa) menurun sebanyak 46 desa tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi penurunan desa tertinggal atau pun desa sangat

tertinggal pada tahun 2021 mengalami perlambatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020.

Hal lainnya yang harus mendapat perhatian adalah tidak bertambahnya jumlah kategori desa Mandiri. Data tahun 2020 dan 2021 jumlah desa mandiri di Provinsi berjumlah tetap yakni lima desa. Penyebaran desa mandiri tersebar di empat kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 72
Capaian Desa Mandiri Tahun 2018-2021

KABUPATEN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Lebak	Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga			
Pandeglang	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan
Serang		Desa Anyar Kecamatan Ayar, Tambak Kecamatan Kibin	Desa Anyar Kecamatan Ayar, Tambak Kecamatan Kibin, Desa Kragilan Kecamatan Kragilan	Desa Anyar Kecamatan Ayar, Tambak Kecamatan Kibin, Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran
Tangerang			Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua	Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua
Jumlah	Dua Desa	Tiga Desa	Lima Desa	Lima Desa

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan desa mandiri di wilayah Provinsi Banten sangatlah lambat. Selain masih banyaknya Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, capaian nilai IDM Provinsi Banten Tahun 2021 sebesar 0,6445 menempatkan provinsi ini pada peringkat 23 dari 33 provinsi yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan capaian IDM Provinsi Banten berada di bawah rata-rata nasional dan terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 2. 73
Capaian IDM Provinsi Banten Tahun 2020-2021 (Nilai)

NAMA PROVINSI	2019		2020		SELISIH	2021		SELISIH
	NILAI	PERINGKAT	NILAI	PERINGKAT		NILAI	PERINGKAT	
Bali	0,7641	1	0,7879	1	0,0238	0,8037	1	0,0158
Yogyakarta	0,7503	2	0,7684	2	0,0181	0,7837	2	0,0153
Jatim	0,679	5	0,7026	3	0,0236	0,7217	3	0,0191
Jabar	0,6764	6	0,6967	5	0,0203	0,7202	4	0,0235
Jateng	0,6682	7	0,682	8	0,0138	0,693	10	0,011
Banten	0,6273	15	0,6361	22	0,0088	0,6445	23	0,0084

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Gambaran penurunan peringkat nilai IDM Provinsi Banten secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di atas seiring dengan rendahnya peningkatan nilai IDM Tahun 2021 di bandingkan nilai IDM Tahun 2020. Perubahan nilai IDM Provinsi Banten hanya mencapai 0,0084 jauh lebih rendah dibandingkan perubahan capaian IDM provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali. Kondisi ini tentu saja sangat perlu segera diantisipasi agar gap antara capaian IDM Provinsi Banten dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali tidak semakin membesar.

h. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dengan menghitung indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dimana terjadi kenaikan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk urusan ini terjadi perubahan indikator yang sebelumnya laju pertumbuhan penduduk menjadi Angka Kelahiran Total (TFR) dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 74
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	-	-	2,21	2,23
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,14	0,35	5,11	2,01

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

i. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memperhatikan berbagai sarana dan transportasi baik transportasi darat, transportasi kereta api,

transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa sarana dan prasarana transportasi tersebut pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangannya, berikut capaian urusan perhubungan 2018-2021.

Tabel 2. 75
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara (%)	-	-	22,54	98.33
2	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas (%)	100	100	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah kendaraan di Provinsi Banten terus bertambah (mobil dan sepeda motor) sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 namun selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2021 kecuali sepeda motor. Begitu juga jumlah penumpang kereta api, penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, serta penyeberangan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Salah satu penyebab utamanya adanya terjadinya Pandemi COVID-19 yang selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap perekonomian.

Tabel 2. 76
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	732.366	830.678	789.232	801.276
2	Bus	2.197	3.104	2.451	7.734
3	Truk	169.075	187.060	177.563	178.630
4	Sepeda Motor	4.111.154	4.495.518	4.145.180	4.051.244

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Secara keseluruhan infrastruktur terminal tipe A (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah pusat) di Provinsi Banten (Terminal Pakupatan, Terminal Merak, Terminal Labuan, Terminal Lebak) untuk mendukung operasional terminal telah memenuhi syarat selain dari masih adanya terminal dalam pembenahan infrastruktur seperti Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon). Untuk Terminal Tipe-B (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah provinsi), menjadi tantangan tersendiri Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk

membangunnya. Karena terminal tipe B yang ada di kabupaten / kota tidak diserahkan ke pemerintah provinsi. Terminal tipe – C (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah kabupaten / kota) diperlukan koordinasi lebih baik untuk penetapan lokasi di kabupaten/ kota antara pemerintah provinis dengan pemerintah kabupaten / kota.

Tabel 2. 77
Klasifikasi Terminal di Provinsi Banten Tahun 2020

LOKASI	NAMA TERMINAL	KLASIFIKASI
Kab. Pandeglang	Terminal Labuan	Tipe A
	Terminal Anten	Tipe C
	Terminal Lampe Labuan	Tipe C
Kab. Lebak	Terminal Kadu Agung	Tipe A
	Terminal Malingping	Tipe C
	Terminal Sunan Kalijaga	Tipe C
	Terminal Bayah	Tipe C
Kab. Tangerang	Terminal Binuangen	Tipe C
	Terminal Kp. Melayu	Tipe C
	Terminal Balaraja	Tipe C
Kab. Serang	Terminal Anyer	Tipe C
Kota Tangerang	Terminal Porisplawad	Tipe A
	Terminal Cimone	Tipe C
	Terminal Ciledug	Tipe C
	Terminal Cibodasari	Tipe C
	Terminal Pasar Baru	Tipe C
Kota Cilegon	Terminal Merak	Tipe A
	Terminal Seruni	Tipe C
Kota Serang	Terminal Pakupatan	Tipe A
	Terminal Cipocok	Tipe C
	Terminal Kepandean	Tipe C
Kota Tangsel	Terminal Pondok Cabe	Tipe C
	Terminal Bumi Serpong Damai	Tipe C

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan hasil survey lapangan diperoleh adanya potensi pergerakan penumpang yang tidak sesuai dengan fungsi terminal, seperti terminal tipe B yang seharusnya hanya melayani pergerakan penumpang sampai antar kota dalam provinsi (AKDP) tetapi karena tingginya potensi pergerakan penumpang antar provinsi maka terminal tipe B tersebut harus melayani trayek AKAP yang seharusnya dilayani terminal tipe A. Selain itu adanya terminal yang kurang aktif serta ada terminal yang beralih fungsi menyebabkan beberapa terminal tidak berfungsi optimal. Untuk itu perlu dilakukan

pengoptimalan fungsi terminal agar pergerakan penumpang dapat terlayani dengan baik, nyaman dan aman

Eksisting Terminal Tipe-A di Provinsi Banten : Terminal Pakupatan (Kota Serang), Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon), Terminal Labuan (Kab. Pandeglang), Terminal Lebak (Kab. Lebak). Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan terminal Tipe-A diambil alih oleh kementerian perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Daerah Wil. VIII – Banten mulai tahun 2016.

Tabel 2. 78
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi Tahun 2018-2020

NO	PERLENGKAPAN JALAN	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Marka Jalan	M	11.500	70.250	-
2	Guard Rail	M	1.120	1.430	136
3	RPPJ	Unit	-	9	10
4	RPPJ Gantry	Unit	-	-	-
5	Traffic Light	Unit	-	-	-
6	Rambu Standar	Unit	732	385	233
7	Rambu Standar Tiang F	Unit	-	-	-
8	Paku Jalan	Buah	398	778	480
9	Warning Light	Unit	8	8	-
10	Traffic Cone	Unit	398	-	300
11	Canstin/Road Barrier	Buah	57	315	-
12	Delinator	Buah	300	315	100
13	Water Block	Buah	-	-	-
14	Cermin Tikungan	Unit	-	26	-
15	LPJU	Unit	514	305	332

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Banten seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan masih adanya aksi pencurian dan kerusakan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas jalan selain faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

Tabel 2. 79
Kecelakaan pada Ruas Jalan di Banten Tahun 2017-2020 (Kejadian)

NO	Uraian	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan	1.713	1.447	1.484	1.264
2	Korban	4.278	3.575	3.386	2.107
3	Meninggal Dunia	794	754	695	633
4	Luka Berat	338	174	146	118
5	Luka Ringan	3.146	2.647	2.545	1.356

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

j. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pemerintah juga akan mempersiapkan aplikasi yang bersifat umum, agar bisa melayani masyarakat di ruang digital melalui satu sistem. Beberapa aplikasi yang dimaksud antara lain, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-payment*, hingga *e-money* selain itu, penting untuk memperhatikan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya;
2. Kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya; dan
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian PANRB, Banten menduduki predikat baik pada Tahun 2021, predikat ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai predikat cukup.

Tabel 2. 80
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2021 (Nilai)

TAHUN	NILAI SPBE	PREDIKAT
2018	2,01	Cukup
2019	1,83	Cukup
2020	1,83	Cukup
2021	3,15	Baik

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

k. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Struktur ekonomi Provinsi Banten ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, - 108 -ndustry, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonominya dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonominya daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonominya daerah.

Tabel 2. 81
Kinerja Koperasi di Provinsi Banten Menurut Indikator Produksi
Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan Unit	2020	2021
1. Koperasi	unit	7.792	8.076
a. Aktif	unit	3.999	4.225
b. Non Aktif	unit	3.793	3.851
2. Anggota	Orang	953.982	5.182
3. Manajer	Orang	396	7
4. Karyawan	Orang	7.249	31
5. Jumlah Asset	juta rupiah	-	-
6. Modal	juta rupiah	5 239 268	76.636.903.746
a. Modal Sendiri	juta rupiah	2 543 008	50.211.061.241
b. Modal Luar	juta rupiah	2 696 260	26.425.842.505
7. Volume Usaha	juta rupiah	4 805 326	60.430.622.675
8. Jumlah SHU	juta rupiah	329 066	7.202.801.477

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Penguatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Tabel 2. 82
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi (%)	6	6	6	6
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil (%)	1	1	1	1

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Data koperasi aktif dan tidak aktif menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Pandeglang yang jumlah koperasi aktifnya lebih banyak

dari koperasi tidak aktif, sisanya di Kabupaten/Kota lainnya jumlah koperasi tidak aktif lebih banyak. Ini perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 2. 83
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Aktivitas di Provinsi Banten Tahun 2019-2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		AKTIF	TIDAK Aktif	TOTAL	AKTIF	TIDAK Aktif	TOTAL	AKTIF	TIDAK Aktif	TOTAL
1	Kab. Pandeglang	482	100	582	505	99	604	522	99	621
2	Kab. Lebak	528	322	850	530	322	852	538	321	859
3	Kab. Tangerang	1.126	433	1.559	588	1.003	1.591	556	1.021	1.577
4	Kab. Serang	532	814	1346	620	818	1.438	646	818	1.464
5	Kota Cilegon	289	676	965	290	873	1163	289	676	965
6	Kota Serang	298	257	555	301	257	558	285	297	582
7	Kota Tangerang	133	238	371	131	237	368	131	234	365
8	Kota Tangsel	332	303	635	388	301	689	360	300	660
	Binaan Provinsi Banten	-	-	-	329	62	391	412	61	473
	Binaan Nasional	-	-	-	367	21	388	486	24	510
	Jumlah/Total	3.172	2.711	5.309	4.049	3.993	8.042	4.225	3.851	8.076

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil, berikut capaian indikator pada urusan koperasi dan usaha menengah kecil.

Tabel 2. 84
Jumlah Usaha Menengah dan Kecil di Provinsi Banten Tahun 2021 (UMK)

NO	KABUPATEN/KOTA	Usaha Menengah dan Kecil
1	Kabupaten Lebak	32
2	Kabupaten Lebak	59
3	Kabupaten Serang	55
4	Kabupaten Tangerang	72
5	Kota Cilegon	52
6	Kota Serang	94
7	Kota Tangerang	57
8	Kota Tangerang Selatan	84
	Provinsi Banten	505

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

1. Bidang Urusan Penanaman Modal

Iklim investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Banten yang strategis menempatkan Banten menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018 sampai 2021. Masih terjadi fluktuasi dalam realisasi investasi di Provinsi Banten, dimana di tahun 2021 jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 85
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2021 (Triliyun)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Triliyun)	56,52	48,73	62,01	57,96

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di bawah menunjukkan realisasi PMA dan PMDN pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2020. Total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Banten Tahun 2020 mencapai Rp. 30,86 triliun dengan 4.397 proyek.

Tabel 2. 86
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kota Cilegon	390	14.685.571,80	1.019.831,10	2.588	464
2	Kabupaten Tangerang	1.778	6.399.021,85	444.376,40	10.173	242
3	Kabupaten Serang	610	4.531.473,52	314.685,60	4.007	120
4	Kota Tangerang	944	2.323.894,26	161.381,50	6.003	57
5	Kota Serang	51	1.295.458,91	89.962,40	171	-
6	Kabupaten Lebak	59	945.832,63	65.682,80	54	-
7	Kota Tangerang Selatan	548	685.355,26	47.594,10	1.837	12
8	Kabupaten Pandeglang	17	652,32	45,30	-	-
JUMLAH		4.397	30.867.260,55	2.143.559,20	24.833	895

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten mencapai Rp. 31 triliun dengan 5.929 proyek.

Tabel 2. 87
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kabupaten Tangerang	2.173	12.101.112,10	840.354,20	14.718	18
2	Kota Tangerang	1.768	6.029.870,50	418.741,35	21.557	12
3	Kota Cilegon	233	3.458.264,50	240.157,19	830	2
4	Kabupaten Serang	458	3.375.259,30	234.392,98	6.689	1
5	Kota Tangerang Selatan	937	3.248.178,70	225.567,99	3.011	1
6	Kabupaten Lebak	141	2.295.834,20	159.432,70	1.557	-
7	Kabupaten Pandeglang	69	413.026,50	28.682,42	322	-
8	Kota Serang	150	224.116,10	15.563,62	146	-
	JUMLAH	5.929	31.145.661,90	2.162.892,46	48.830	34

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel 2. 88
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

SEKTOR EKONOMI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	
		JUTA RP	RIBU US\$
1. Pertanian			
Perikanan	50	131.149,30	8.982,80
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	59	458.462,40	31.401,44
2. Pertambangan dan Penggalian	41	339.051,40	23.222,62
3. Industri Pengolahan			
- Makanan	464	1.223.065,40	83.771,31
- Tekstil	97	14.009,40	959,54
- Kulit, Barang dari kulit dan sepatu	36	14.095,10	965,41
- Kayu	28	8.951,60	613,12
- Kertas, barang dari kertas dan percetakan	122	244.595,10	16.753,03
- Kimia dasar, barang kimia dan farmasi	387	279.319,40	19.131,40
- Alat angkutan dan transportasi lainnya	64	140.829,50	9.645,82
- Karet, barang dari karet dan plastik	254	331.370,70	22.696,54
- Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	276	2.392.769,50	163.887,76
- Mineral non logam	79	21.608,90	1.480,06
- Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	211	43.592,90	2.985,81
- Lainnya	149	69.952,30	4.791,24
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	70	499.463,20	34.209,69
5. Konstruksi	410	2.393.095,10	163.909,98
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran			
- Perdagangan dan reparasi	3.496	1.060.761,30	72.654,62
- Hotel dan restoran	890	434.441,50	29.756,16
7. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	214	6.733.630,20	461.205,87
8. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	889	6.940.189,60	475.353,72
9. Jasa lainnya	855	2.215.085,70	151.717,71
Jumlah	9.141	25.989.490	1.780.095,65

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

m. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan. Gambaran Indikator kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
Indikator Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2021
(Indeks)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Indeks)	9,73	20,17	30,27	49,17
2	Indeks Pembangunan Olahraga (Indeks)	9,38	20,83	30	40

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas. Gambaran pembangunan olah raga di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 90
Data Jumlah Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2018-2020

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020
Jumlah Pemuda	Orang	3.264.000	3.242.140	3.301.320
Cabang Olahraga yang Medapatkan Pelayanan	Unit	30	30	24
Cabang Olahraga	Unit	43	43	43
Cabang Olahraga Berprestasi	Unit	10	10	10
Cabang Olahraga yang Diikuti	Unit	19	15	3
Atlet Berprestasi Di UPTD	Orang	28	13	1
Atlet yang Dibina Di UPTD	Orang	79	89	99
Atlet yang Ikut Kejuaraan	Orang	96	96	96

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Rendahnya partisipasi olahraga dan tujuan melakukan olahraga prestasi mengindikasikan bahwa atlet, klub, penggemar olahraga dan masyarakat Provinsi Banten memerlukan fasilitas yang representatif dan terpadu, yang mampu mewadahi aktivitas seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan, maupun untuk rekreasi. Lebih daripada itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif dalam lokasi

yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memungkinkan Provinsi Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

Jumlah Atlet Tahun 2021 yaitu 3.241 juta, terdiri dari atlet Laki-Laki sebanyak 1.656 juta dan atlet perempuan sebanyak 1.585 juta, menurun dari jumlah atlet Tahun 2020 yaitu 3.301.320.

n. Bidang Urusan Statistik

Urusan statistik sektoral pada Provinsi Banten dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal lain seperti BPS, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia. Pergub ini dibuat agar mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini ketercapaian pengisian data sektoral masih harus terus didorong seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 91
Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2020-2021 (Persen)

NO	JENIS DATA SEKTORAL	TAHUN	
		2020	2021
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (%)	75	50
2	Aspek Daya Saing Daerah (%)	75	50
3	Aspek Pelayanan Umum (%)	75	50
RERATA (%)		75	50

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

o. Bidang Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan persandian tersebut di Provinsi Banten diserahkan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Provinsi Banten sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumber daya manusia ASN di Provinsi Banten belum ada yang secara khusus menangani hal ini. Indikator kinerja untuk urusan persandian sendiri adalah Persentase Sarana dan Prasarana Persandian yang capaiannya 51,52 persen tahun 2020 dan 100 persen tahun 2021.

p. Bidang Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Untuk mengukur pembangunan kebudayaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penilaian berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen penilaian capaian kinerja pembangunan kebudayaan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pengukuran Indeks Kebudayaan mulai dilakukan tahun 2018 berdasarkan pada 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yakni.

1. Dimensi Ekonomi Budaya;
2. Dimensi Pendidikan;
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
4. Dimensi Warisan Budaya;
5. Dimensi Ekspresi Budaya;
6. Dimensi Budaya Literasi; dan
7. Dimensi Kesetaraan Gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bahwa capaian IPK Provinsi Banten tahun 2019 sebesar 51,43 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 46,69. Meskipun demikian upaya percepatan peningkatan nilai IPK sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPK provinsi berada pada posisi 9 terbawah. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi tahun 2018 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 92
 Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Tahun 2018-
 2019 (Nilai)

NO	DIMENSI	TAHUN	
		2018	2019
1	Ekonomi Budaya	11,1	11,71
2	Pendidikan	68,38	71,65
3	Ketahanan Sosial Budaya	64,35	64,92
4	Warisan Budaya	44,07	45,02
5	Ekspresi Budaya	29	29,53
6	Budaya Literasi	54,93	60,27
7	Kesetaraan Gender	52,44	54,25
8	IPK	46,69	51,43

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah Cagar budaya di Provinsi Banten mengalami penurunan yang signifikan. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Perkembangan kondisi beban kerja serta adanya Kepmendagri 050 Tahun 2021 yang berimplikasi kepada pelaksanaan dua program menuntut adanya penyesuaian desain organisasi UPTD ini. Dalam Kepmendagri 050 Tahun 2021 program Pengelolaan Museum terpisah dari program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk kepentingan cascading dalam penetapan indikator kinerja hal ini menjadi suatu kendala. Berdasarkan hal tersebut perlu diinisiasi reorganisasi bentuk kelembagaan pengelolaan museum dan taman budaya.

Tabel 2. 93
 Jenis Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2020 (Unit)

NO	JENIS KEBUDAYAAN	TAHUN	
		2019	2020
1	Cagar Budaya	1441	60
2	Desa Adat	8	99
3	Museum	7	7
4	Komunitas	0	20

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

q. Bidang Urusan Perpustakaan

Pada bidang urusan perpustakaan pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan akses literasi. Pemerintah Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Indeks Kegemaran Membaca Nasional ada di angka 55,74, artinya Provinsi Banten

berhasil memiliki Indeks Kegemaran Membaca di atas rata-rata nasional, untuk Indeks Pembangunan Literasi (IPL), Pemerintah Provinsi Banten berada di urutan 5 (lima) terbawah nasional dengan angka 8,90. Hal yang mempengaruhi rendahnya IPL tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional dan koleksi buku perpustakaan.

Tabel 2. 94
Data dan Informasi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan yang Menuju SPM Perpustakaan (Perpus)	80	125	152
2	Target yang Direncanakan (Perpus)	146	146	192
3	Capaian Pelayanan Perpustakaan Provinsi Banten (%)	75	80	83
4	Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (%)	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

r. Bidang Urusan Kearsipan

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai 74,89 dengan predikat (sangat baik) hasil pengawaaan/audit Kearsipan Nasional yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2020. Ke depan peningkatan kearsipan perlu dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Adapun beberapa aspek yang menjadi penilaian pengawasan kearsipan dari ANRI meliputi kepatuhan terhadap regulasi kearsipan, sistem pengelolaan arsip sesuai standar yang berlaku, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana kearsipan, program kerja dan anggaran kearsipan daerah. Berikut merupakan indiaktor kinerja urusan kearsipan yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2. 95
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%)	80	85	90	100
2	Jumlah Arsip yang Terdigitalisasi (Unit)	21.096	22.415	23.733	24.33
3	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Pada Depo Arsip (Unit)	26.370	26.370	26.370	27,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

2.1.4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan pilihan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan

konkuren yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah namun dengan mempertimbangkan terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut dalam aturan yang sama, diperjelas pada pasal 12 bahwa yang menjadi bagian dalam urusan pilihan ini meliputi:

- Kelautan dan perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- Kehutanan;
- Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Perdagangan;
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.

a. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan, Provinsi Banten tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan 61 buah pulau-pulau kecil yaitu di Kota Cilegon sebanyak 5 pulau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 33 pulau, Kabupaten Serang sebanyak 17 pulau, Kabupaten Tangerang sebanyak 1 pulau, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 pulau. Di samping itu Banten memiliki garis pantai 499,62 km, terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km. Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk didalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga (*the sunken treasures*).

Pola ruang di Provinsi Banten telah mengatur kawasan peruntukan perikanan yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan lebih kurang seluas 1.620,02 Ha juga telah dikonsepsikan dibentuknya kawasan minapolitan yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak,

Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang (Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten). Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 96
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2021
(Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	2,93	2,63	-	-
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	-	-	4,13	2,5

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Jika berbicara terhadap produksi perikanan laut di Provinsi Banten, pada tahun 2020 produksi perikanan laut mencapai 6.194.568 kg dengan nilai produksi sebesar 95 miliar rupiah. Produksi tertinggi terdapat di Kota Serang dengan jumlah sebesar 2.602.781 kg dan mempunyai persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 42,02 persen. Sedangkan, Kabupaten Serang merupakan Kabupaten yang memiliki produksi ikan terendah yaitu sebesar 268.895 kg dengan persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 4,34 persen. Pada tahun 2020, produksi perikanan laut yang dijual di setiap TPI di Provinsi Banten rata-rata sebesar 166.221 kg per Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setiap triwulannya.

Rata-rata penjualan ikan terbesar terjadi pada triwulan IV yaitu mencapai 198.322 kg. Dilihat berdasarkan tingkat penjualan per TPI menurut Kabupaten/Kota, rata-rata penjualan tertinggi terjadi di Kota Serang yaitu sebesar 686.247 kg per triwulan per TPI, diikuti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dengan rata-rata penjualan sebesar 72.520 kg dan 44.116 kg ikan per triwulan per TPI. Adapun rata-rata penjualan terendah terdapat di Kabupaten Serang dengan rata-rata penjualan sebesar 6.722 kg per triwulan per TPI.

Di bidang Perikanan Budidaya, terdapat peluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 27.562 Ha.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cekdam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Barat dan Pantai Selatan Banten, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 66,80 persen.

Untuk kondisi perikanan tangkap sepanjang Pantai Utara merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan, bila dibandingkan Pantai Barat dan Pantai Selatan. Tercatat jumlah nelayan di Banten pada tahun 2015 mencapai 30.791 orang yang mendiami 61 Desa di Pesisir Utara, 48 Desa di pesisir Barat dan 20 Desa di Pesisir Selatan. Jumlah armada perikanan tangkap tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7.185 buah, didominasi oleh jenis armada kapal motor yang jumlahnya mencapai 6.200 unit.

Tabel 2. 97
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (KG)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)
1	Kab Pandeglang	27.665.965	39,84	458.48.873.971	44,34
2	Kab Lebak	6.740.003	10,01	77.589.955.409	7,50
3	Kab Tangerang	21.088.031	30,01	224.320.334.391	21,69
4	Kab Serang	7.782.031	11,28	123.132.562.361	11,91
5	Kota Serang	5.821.478	8,38	58.955.318.904	5,70
PROVINSI BANTEN		69.097.508	100,00	942.494.806.420	100,00

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tahun 2017, di Provinsi Banten terdapat 9.235 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2017 sebesar 107,36 ribu ton, dimana 106,54 ribu ton atau

99,24 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 98
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor di Provinsi Banten Tahun 2019-2021 (Ton)

NO	KAB/KOTA	PERIKANAN LAUT			PERAIRAN UMUM			JUMLAH		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	130.324	27.496,41	27.665	-	-	-	130.324	27.496,42	27.665
2	Kab Lebak	11.285	9.922,12	6.740	259	260,58	209,91	11.545	10.182,71	6.949
3	Kab Tangerang	20.383	20.784,34	21.088	208	87,93	88,34	20.591	20.872,27	21.176,37
4	Kab Serang	7.542	6.705,98	7.782	1.258	114,33	53,77	8.800	6.820,30	7.835,8
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.530	1.533,83	215,58	1.530	1.533,83	215,58
6	Kota Cilegon	5.320	224,51	238,50	1.233	-	-	6.553	224,51	238,5
7	Kota Seraang	5.200	3.120,39	5.821,47	-	-	-	5.200	3.120,39	5.821,4
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	1.560	461,82	671,464	1.560	461,82	671,46
PROVINSI BANTEN		180.054	68.253,76	69.097,51	6.048	2.458,49	1.239.075	186.102	70.712,25	70.575,08

Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

b. Bidang Urusan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa bagi Provinsi Banten adalah sektor Pariwisata. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Provinsi Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Seperti contohnya Kawasan Pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung, Pantai Utara dan Pantai Selatan, Kawasan Pariwisata Budaya Banten Lama dan Permukiman Baduy, Kawasan Pariwisata Wisata Alam Ujung Kulon, Geopark, dan lain-lain.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Banten ini memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel bahwa adanya peningkatan nilai PDRB yang lebih tinggi daripada tahun 2020, hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata di Provinsi Banten berangsur-angsur telah beradaptasi dimasa Pandemi COVID-19, sebagaimana diketahui bahwa pada sektor pariwisata telah digaungkan penerapan protokol kesehatan dengan istilah CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 2. 99
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	2,88	2,89	-	-
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata (%)	-	-	2,91	2,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

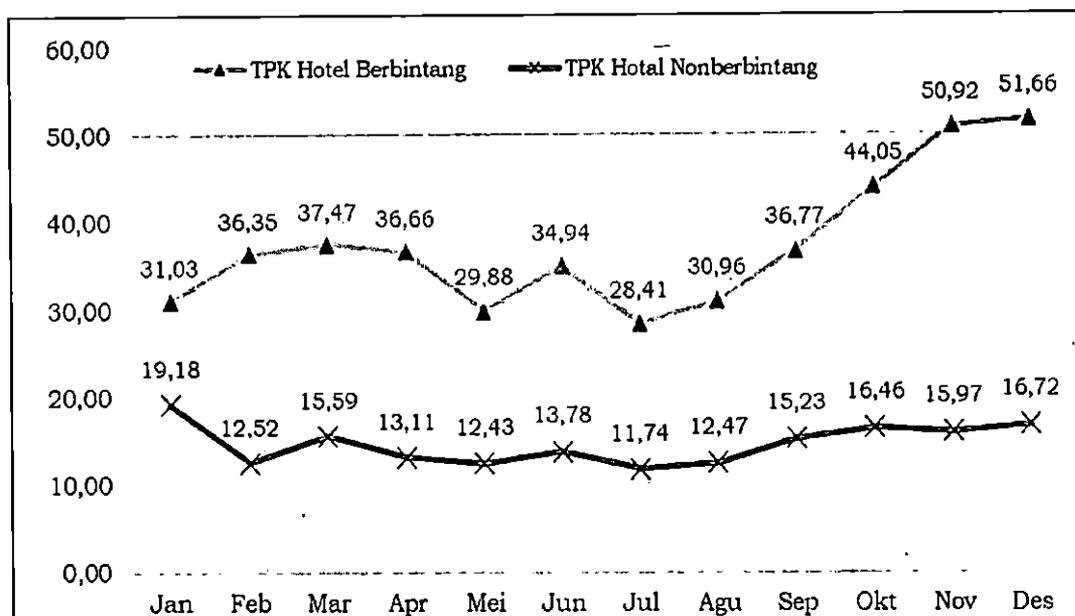
Pada tahun 2021 terdapat 453 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 19.139 kamar dan 27.791 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 1,24 hari untuk tamu asing dan 1,42 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2021 adalah 37,43 persen untuk hotel berbintang dan 14,60 persen untuk hotel non bintang.

Tabel 2. 100
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Banten Tahun 2016-2021 (Jiwa)

TAHUN	WISATAWAN	
	MANCANEGERA	DOMESTIK
2016	176.928	18.418.984
2017	405.198	22.487.256
2018	327.003	17.982.140
2019	311.131	19.353.727
2020	37.926	18.507.170
2021	161.597	10.310.361

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2021 terdapat 10,47 juta wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 10,31 juta wisatawan domestik dan 0,16 juta wisatawan mancanegara.



Gambar 2. 24

Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Provinsi Banten (Hari) Tahun 2021 (Persen)

(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Sebagaimana yang telah disampaikan diawal bahwa secara geografis Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek.

Tabel 2. 101

Jumlah Objek Wisata Tirta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2021 (Unit)

NO	KABUPATEN/KOTA	WISATA TIRTA					JUMLAH
		SITU/ DANAU	AIR PANAS	AIR TERJUN	ARUNG JERAM	KOLAM RENANG	
1	Kab Pandeglang	6	6	37	1	14	64
2	Kab Lebak	3	4	69	5	5	86
3	Kab Tangerang	5	-	-	-	10	15
4	Kab Serang	2	2	2	1	5	12
5	Kota Tangerang	3	-	-	-	4	7
6	Kota Cilegon	2	-	-	-	3	5
7	Kota Serang	1	-	-	-	3	4
8	Kota Tangerang Selatan	24	-	-	-	8	32
PROVINSI BANTEN		46	12	108	7	52	225

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominasi destinasi tertinggi wisatawan khususnya kelompok wisata tirta banyak disinggahi pada obyek air terjun yang terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sejalan dengan hal tersebut pada obyek pantai menjadi tempat favorit dibandingkan obyek wisata lainnya sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 102
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di
Provinsi Banten Tahun 2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	WISATAWAN				JUMLAH
		MARINA PANTAI	WISATA SEJARAH	SUAKA ALAM	OBJEK WISATA LAINNYA	
1	Kab Pandeglang	84	3	1	58	146
2	Kab Lebak	34	-	-	-	34
3	Kab Tangerang	3	5	2	3	13
4	Kab Serang	21	4	12	11	48
5	Kota Tangerang	-	16	-	27	43
6	Kota Cilegon	-	-	-	-	0
7	Kota Seraang	1	60	1	16	78
8	Kota Tangerang Selatan	-	4	-	27	31
PROVINSI BANTEN		143	92	16	142	403

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Sementara pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah restoran terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang, secara keseluruhan jumlah restoran di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah 2.033.

Tabel 2. 103
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2018-2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	118	124	116	116
2	Kab Lebak	56	57	56	56
3	Kab Tangerang	810	878	907	907
4	Kab Serang	18	18	16	16
5	Kota Tangerang	406	418	426	426
6	Kota Cilegon	2	10	2	2
7	Kota Seraang	51	51	46	46
8	Kota Tangerang Selatan	314	477	477	477
PROVINSI BANTEN		1.615	1.775	2.033	2.033

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

c. Bidang Urusan Pertanian

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota. Sektor pertanian di Provinsi Banten ini berkontribusi terhadap sumber pangan, penyerapan tenaga kerja bahkan pendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana pada Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan peruntukan pertanian sebesar 196.000,10 Ha yang terbagi menjadi lebih kurang sebesar

124.263,54 Ha kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas lebih kurang sebesar 71.736,56 Ha. Sementara itu seluas 196.012,28 Ha sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terbagi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan di daerah. Luasan kawasan tersebut dalam rangka mendukung Kawasan Sistem Pertanian Terpadu.

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan pertanian Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Kinerja pertanian ini mengalami penurunan pertumbuhan karena beberapa sector produksi tahun 2021 yang naik signifikan seperti konstruksi dan perindustrian, sehingga di tahun 2020 pertumbuhan sektor pertanian yang sudah tercatat 3,55% namun di tahun 2021 mengalami pelambatan menjadi 0,56%.

Tabel 2. 104
Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR		TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Pertanian (%)	Sektor	3,58	2,21	-	-
2	Pertumbuhan Pertanian yang optimal (%)	Sektor	-	-	3,55	0,56

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi Tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Banten periode Januari-Desember 2020 mencapai 325,33 ribu Ha. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 80,73 ribu Ha, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari dengan luas panen sebesar 2,99 ribu Ha.

Tabel 2. 105
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Ton)

JENIS TANAMAN PANGAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi					
Padi Sawah	2.300.595	2.369.731,00	1.643.046	1.470.503,35	1.643.469,03
Padi Ladang	57.607	43.747,00			
Palawija					
Jagung	19.882	63.518,00	331.865,38	119.206	111.903
Kedelai	4.020	2.126,00	18.093,56	1.202	895
Kacang Tanah	8.419	5.726,67	4.174	3.942	4.544
Kacang Hijau	432	220,7	281,18	736	348
Ubi Kayu	90.629	75.486,00	82.641,95	70.915	60.038
Ubi Jalar	24.255	20.724,00	16.470,53	12.788	15.284

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Bila dilihat dari distribusi luas panen padi di Banten, maka luas panen terbesar di Kabupaten Serang dengan luas panen sebesar 82,39 ribu Ha diikuti Kabupaten Lebak sebesar 81,41 ribu Ha, dan Kabupaten Pandeglang sebesar 82,11 ribu Ha. Luas panen terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 1 Ha. Sekitar 94,96 persen luas panen padi di Provinsi Banten dihasilkan oleh 4 (empat) Kabupaten sentra komoditas padi yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Produksi Padi di Banten dari Januari hingga Desember 2020 sebesar 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 429,75 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 15,83 ribu ton. Produksi padi di Provinsi Banten Tahun 2020 jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG ke beras Tahun 2020 setara dengan 937,82 ribu ton beras.

Tabel 2. 106
Penggunaan Irigasi Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		IRIGAS I	NON IRIGAS II	JUMLA H	IRIGAS I	NON IRIGAS II	JUMLA H	IRIGAS I	NON IRIGAS II	JUMLA H
1	Kab. Pandeglang	22.746	32.022	54.768	22.746	32.022	54.768	20.491	32.149	52.640
2	Kab. Lebak	22.747	25.006	47.753	22.747	25.006	47.753	23.095	24.651	47.746
3	Kab. Tangerang	23.744	12.487	36.231	23.744	12.487	36.231	23.745	12.350	36.095
4	Kab. Serang	23.887	23.687	47.574	23.887	23.687	47.574	26.154	21.419	47.573
5	Kota Tangerang	316	147	463	316	147	463	237	115	351
6	Kota Cilegon	-	1.503	1.503	-	1.503	1.503	-	1.445	1.445
7	Kota Serang	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939
8	Kota Tangerang Selatan	-	54	54	-	54	54	-	21	21
PROVINSI BANTEN		98.228	98.058	196.285	98.227	98.058	196.285	98.508	95.302	193.810

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Penambahan luas tanam dan panen harus diusahakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan pompanisasi secara merata di semua sentra produksi. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa sistem pengairan berupa irigasi dari tahun ke tahun menjadi paling diandalkan, walaupun perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Lebih lanjut penggunaan lahan tanaman pangan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah, dengan dominasi tertinggi penggunaan tegal/kebun sebesar 155.922 Ha di tahun 2020 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 107
Penggunaan Lahan Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN
1	Kab. Pandeglang	63.331	31.408	4.990	63.331	31.408	4.990	85.502	42.631	23.675
2	Kab. Lebak	19.062	28.131	2.772	19.062	28.131	2.772	31.753	28.266	42.390
3	Kab. Tangerang	9.241	-	1.202	9.241	-	1.202	9.498	-	1.366
4	Kab. Serang	19.266	7.296	631	19.266	7.296	631	19.335	5.901	2.291
5	Kota Tangerang	546	36	246	546	36	246	514	-	229
6	Kota Cilegon	2.715	1.871	1.133	2.715	1.871	1.133	2.678	1.859	1.883
7	Kota Serang	7.279	1.723	-	7.279	1.723	-	6.054	2.805	-
8	Kota Tangerang Selatan	478	375	23	478	375	23	588	137	340
JUMLAH		121.918	70.839	10.997	121.918	70.840	10.997	155.922	81.599	72.174

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Berikut Status Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021.

Tabel 2. 108
Status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Hektar)

NO	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Perda LP2B Provinsi Banten	BPS	Perda RTRW Hasil Revisi	Keterangan	
			2014	2020	2020	Perda LP2B	Perda RTRW
			Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)		
1	Kab. Pandeglang	277.000	53.951	22.746		Diatur Perda tersendiri	Perda No. 2 Tahun 2014
2	Kab. Lebak	330.507,20	4.017	22.747		Belum ada data	Perda No. 2 Tahun 2014 Perda No. 3 Tahun 2016
3	Kab. Tangerang	103.454	29.295	23.744	12.628		Perda Nomor 9 Tahun 2020
4	Kab. Serang	147.214	41.098	23.887	28.084,29		Perda Nomor 5 Tahun 2020
5	Kota Tangerang	17.835	93	316	-		Perda Nomor 6 Tahun 2019
6	Kota Cilegon	16.259	1.736	-		Diatur Perda tersendiri	Perda Nomor 1 Tahun 2020
7	Kota Serang	26.618	3.022	4.787	3.022		Perda Nomor 8 Tahun 2020
8	Kota Tangerang Selatan	16.485,47	29.295	-			Perda Nomor 9 Tahun 2019
Provinsi Banten		935.372,67	128.604	93.440	40.712,29		

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Jika mencermati pada tabel di bawah terlihat bahwa produksi jagung mengalami penurunan dari 111.903 ton di tahun 2019 menjadi 58.662 ton pada tahun 2020, hal ini berbanding lurus dengan luas panen yang mengalami penurunan lebih kurang sebesar 53 persen dari 16.676 Ha di tahun 2020 menjadi 8.891,90 Ha pada tahun 2021. Dari 2 (dua) tahun berturut-turut Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mengungguli Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten lainnya.

Tabel 2. 109
 Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2021

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		PADI		JAGUNG		PADI		JAGUNG	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)						
1	Kab. Pandeglang	82.104,95	444.025,80	9.581	60.626	85.803,82	437.039,60	5.829,70	37.182
2	Kab. Lebak	81.413,36	402.870,63	5.763	42.560	75.274,36	381.865,96	1.310,90	9.792
3	Kab. Tangerang	63.037,16	328.825,23	72	471	65.604,63	344.358,35	61,8	415
4	Kab. Serang	82.397,42	391.973,23	1.227	8.027	79.139,26	388.165,31	1647	11.025
5	Kota Tangerang	822,73	4.747,24	-	-	594,57	3.501,39	-	-
6	Kota Cilegon	1.895,05	9.714,09	14	97	1.699,83	9.187,08	18	126
7	Kota Serang	13.662,57	73.013,87	15	93	11.441,96	65.530,58	21,5	100
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	4	28	-	-	3	21
PROVINSI BANTEN		325.333,24	1.655.170,09	16.676	111.903	319.558,43	1.629.648,27	8.891,90	58.662

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Hal demikianpun terjadi untuk produksi padi di wilayah Provinsi Banten. Sementara itu untuk jenis tanaman lainnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel bahwa produksi terhadap komoditas padi dan ubi jalar mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Pada tahun 2020, padi masih menjadi tanaman pangan dengan produksi tertinggi sebesar 1.655.170 ton, diikuti dengan jagung dan ubi kayu berturut-turut sebesar 113.045 ton dan 59.543 ton.

Tabel 2. 110
Statistik Tanaman Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2020

JENIS TANAMAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
PADI				
Luas Panen (Ha)	415.687	334.839	303.732	325.333
Produksi (Ton)	2.369.731	1.643.046	1.470.503	1.655.170
Produktivitas (Kw/Ha)	56,31	49,07	48,41	50,88
JAGUNG				
Luas Panen (Ha)	16.018	66.356	22.346	16.676
Produksi (Ton)	63.518	331.865	119.206	113.045
KEDELAI				
Luas Panen (Ha)	1.646	23.594	1803	578
Produksi (Ton)	2.126	18.094	1202	911
KACANG TANAH				
Luas Panen (Ha)	5.423	4.174	3.399	3.757
Produksi (Ton)	5.727	5.042	3.941	4.528
KACANG HIJAU				
Luas Panen (Ha)	296	347	958	289
Produksi (Ton)	221	281	736	401
UBI KAYU				
Luas Panen (Ha)	3.694	3.187	3.165	2.172
Produksi (Ton)	75.486	82.642	70.916	59.543
UBI JALAR				
Luas Panen (Ha)	1.222	1.160	915	967
Produksi (Ton)	20.724	16.471	12.788	15.945

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Sedangkan komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Untuk produksi sayur-sayuran, buah-buahan dan jenis biofarmaka di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan produksi dengan komoditas andalannya jamur, berbagai jenis cabai, berbagai ragam komoditas rimpang (jahe, kunyit, laos dan kencur) serta buah-buahan (rambutan, nangka, dll) sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 111
Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Hektar)

NO	KAB/ KOTA	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		BAWANG	CABAI	KENTANG	KUBIS	PETAI	BAWANG	CABAI	KENTANG	KUBIS	PETAI
1	Kab. Pandeglang	44	473	1	3	73	15	491	-	-	73
2	Kab. Lebak	1	263	1	-	32	1	228	-	2	41
3	Kab. Tangerang	13	68	-	-	355	9	65	-	-	366
4	Kab. Serang	175	483	-	-	282	192	375	-	-	326
5	Kota Tangerang	-	2	-	-	215	-	-	-	-	199
6	Kota Cilegon	-	26	-	-	2	3	39	-	-	9
7	Kota Serang	3	45	-	-	-	3	26	-	-	1
8	Kota Tangerang Selatan	2	35	-	-	21	6	20	-	-	15
PROVINSI BANTEN		238	1.395	2	3	980	229	1.243	-	2	1.030

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (*commodity flows*) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Tabel 2. 112
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
1	Bawang Daun	78	4.138	43	2.744	49	2.584
2	Bawang Merah	238	15.446	229	14.041	357	11.896
3	Bawang Putih	-	-	-	-	4	6
4	Bayam	1.496	80.183	1.586	90.354	1.677	89.722
5	Blewah	-	-	1	20	-	-
6	Buncis	23	999	20	633	12	551
7	Cabai Besar	851	71.035	717	69.469	745	63.856
8	Cabai Rawit	544	50.194	528	58.610	456	39.931
9	Jamur	24.683	163.258	63.818	235.686	14.581	17.589
10	Kacang Merah	-	-	-	-	-	-
11	Kacang Panjang	1.188	119.475	1.386	160.558	1.142	143.659
12	Kangkung	1.729	107.011	1.976	132.435	1.918	123.883
13	Kembang Kol	1	10	3	44	5	870
14	Kentang	2	130	-	-	1	40
15	Ketimun	1.343	137.122	1.482	193.246	1.292	178.576
16	Kubis	3	206	2	25	6	510
17	Labu Siem	21	908	15	2.250	14	329
18	Lobak	-	-	-	-	-	-
19	Melon	47	3.683	76	5.162	24	1.692

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
20	Paprika	-	-	-	-	-	-
21	Petsai/Sawi	980	74.028	1.030	70.539	986	67.858
22	Semangka	91	13.595	172	34.376	124	8.374
23	Stroberi	-	-	-	-	1	64
24	Terung	535	50.422	592	70.211	484	53.866
25	Tomat	153	8.298	220	18.935	178	11.901
26	Wortel	37	3.001	17	1.242	16	2.156

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Hubungan keterkaitan aliran komoditas pertanian unggulan antar daerah/wilayah di Provinsi Banten, terjadi baik antar daerah internal maupun dengan daerah luar (*external region*). Interaksi antar wilayah ini terjadi karena adanya saling melengkapi kebutuhan. Pada satu daerah ada yang kelebihan produksi (*surplus*) suatu komoditas, sedangkan daerah lainnya kekurangan (*minus*) produksi komoditas tersebut.

Tabel 2. 113
Produksi Tanaman Buah buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN		
		2019	2020	2021*
1	Alpukat	20.468	20.192	14.444
2	Anggur	-	7	80
3	Apel	1	-	-
4	Belimbing	15.627	17.590	14.493
5	Duku	18.564	32.592	20.233
6	Durian	464.360	324.882	294.561
7	Jambu Air	28.062	72.785	48.573
8	Jambu Biji	40.675	66.893	51.637
9	Jengköl	63.565	122.021	86.051
10	Jeruk Besar	1.186	3.789	688
11	Jeruk Siam	-	-	-
12	Mangga	5.995	7.116	9.747
13	Manggis	385.710	287.191	227.133
14	Markisa	102.692	127.935	49.339
15	Melinjo	271	696	-
16	Nangka	545.292	495.665	476.802
17	Nenas	48.524	62.898	59.296
18	Pepaya	5.055	3.691	3.883
19	Petai	137.454	207.982	198.398
20	Pisang	107.406	119.965	106.575
21	Rambutan	2.573.421	2.902.658	2.846.834
22	Salak	172.180	223.209	313.960
23	Sawo	4.000	9.237	13.717
24	Sirsak	16.943	39.101	22.954
25	Sukun	31.368	48.232	39.477

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi pola ruang aliran komoditas pertanian unggulan di Provinsi Banten. Hal ini cepat atau lambat akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan Provinsi Banten.

Tabel 2. 114
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	2019		2020		2021*	
		LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)
1	Dlingo	900	670	2.350	1.320	-	-
2	Jahe	401.218	847.959	613.898	1.176.816	1.112.030	1.926.635
3	Kapulaga	66.832	59.115	116.613	94.912	82.732	76.704
4	Keji Beling	8.272	22.262	8.602	9.439	-	-
5	Kencur	332.640	538.215	739.931	1.004.477	1.081.566	1.748.971
6	Kunyit	428.478	1.004.713	324.448	1.185.735	303.993	667.836
7	Laos	436.717	1.708.473	692.600	2.092.990	928.490	2.635.336
8	Lempuyang	8.219	9.281	32.772	133.957	28.349	37.451
9	Lidah Buaya	1.928	4.359	4.744	5.685	2.229	1.556
10	Mahkota Dewa	5.058	124.577	2.687	63.169	2.205	64.578
11	Mengkudu	100.520	141.251	22.611	50.524	47.941	51.692
12	Sambiloto	1.275	4.585	20.960	9.040	1.833	3.549
13	Temuireng	5.201	5.724	3.117	6.033	6.597	7.329
14	Temukunci	10.218	5.980	22.688	86.247	18.795	60.235
15	Temulawak	2.131	3.975	36.261	52.058	22.846	24.867

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Salah satu parameter penting pada subsektor peternakan adalah parameter pemotongan ternak. Dengan parameter pemotongan ternak yang dikaitkan dengan jumlah ternak pada RPH/TPH, dapat diketahui berapa besar produksi daging hasil pemotongan di suatu wilayah. Jumlah unit pemotongan ternak atau RPH/TPH pada Tahun 2020 ada sebanyak 21 unit yang tersebar di Provinsi Banten.

Tabel 2. 115
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten Tahun 2020-2021 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020			TAHUN 2021*		
		SAPI	KAMBING	DOMBA	SAPI	KAMBING	DOMBA
1	Kab. Pandeglang	265.170	26.819	14.766	276.725	29.229	15.857
2	Kab. Lebak	1.039.855	316.085	446.533	1.048.697	317.338	449.285
3	Kab. Tangerang	1.622.813	558.825	1.529.967	2.015.602	596.500	922.900
4	Kab. Serang	1.059.770	716.898	900.213	1.065.890	358.890	922.900
5	Kota Tangerang	8.610.379	1.177.849	77.876	8.634.868	589.795	79.286
6	Kota Cilegon	742.951	49.271	-	743.688	25.053	-
7	Kota Serang	2.324.133	96.081	60.525	2.334.182	98.124	61.667
8	Kota Tangerang Selatan	4.697.820	26.938	32.570	4.442.499	13.576	33.778
PROVINSI BANTEN		20.362.891	2.968.766	3.062.450	20.562.151	2.028.505	2.485.673

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Produksi daging ternak seperti sapi, kambing dan domba di Provinsi Banten masih menjadi 3 jenis hewan yang primadona bagi masyarakat. Terdata bahwa pada tahun 2021 adanya peningkatan produksi daging ternak sapi sebesar 199.260 kg, yaitu dari produksi sebesar 20.362.891 kg di tahun 2020 menjadi 20.562.151 kg pada tahun 2021. Sementara itu untuk tahun 2021 disusul oleh produksi daging jenis domba dan kambing, dengan besaran secara berturut-turut yaitu 2.485.673 kg dan 2.028.505 kg, walaupun jenis daging tersebut mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 ke tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di atas.

Tabel 2. 116
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Kg)

KAB/KOTA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
Kab. Pandeglang	335.560	137.845	8.393.321	22.847	583.799	14.198	9.311.482	22.098
Kab. Lebak	1.734.384	23.888	8.174.694	24.565	1.714.448	24.082	8.174.694	24.565
Kab. Tangerang	826.904	2.317.883	31.079.980	73.886	890.031	2.363.032	30.956.563	81.325
Kab. Serang	387.929	195.848	20.959.292	686.830	179.001	138.258	13.243.606	854.574
Kota Tangerang	458.571	328.109	65.430.584	218.764	380.704	47.623	67.555.377	46.610
Kota Cilegon	114.113	-	404.387	1.590	257.718	-	2.284.673	7.801
Kota Serang	-	21.173	512.779	22.471	59.117	16.085	9.684.970	5.522
Kota Tangerang Selatan	69.513	61.562	24.046.786	145.015	144.962	88.343	17.752.520	283.046
PROV BANTEN	3.926.973	3.086.307	159.001.823	1.195.968	4.209.781	2.691.621	158.963.884	1.325.542

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Lebih lanjut di tabel di atas menginformasikan terhadap produksi daging dan telur yang dihasilkan dari hewan ternak jenis unggas Tahun 2019-2020 di Provinsi Banten. menggambarkan produksi daging unggas di Provinsi Banten pada tahun 2020 jenis ayam pedaging mencatatkan produksi daging yang lebih besar daripada jenis ternak lainnya seperti ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Besaran produksi ayam pedaging di tahun 2020 mengalami penurunan lebih kurang sekitar 37.939 kg yaitu dari 159.001.823 kg (tahun 2019) menjadi 158.963.884 kg (tahun 2020), walaupun demikian produksi daging unggas tahun 2020 tersebut lebih besar daripada tahun 2018 yang hanya menghasilkan produksi sebesar 124.529.829 kg. Sementara itu untuk komoditas telur di tahun 2020 produksi tertinggi tentunya dihasilkan dari jenis ternak ayam telur sebesar 59.356.052.541 kg dibandingkan ayam kampung dan itik, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 117
Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK
1	Kab. Pandeglang	340.053.000	1.781.894.000	346.470.000	657.498.848	193.685.872	445.079.637
2	Kab. Lebak	781.890.000	1.196.331.000	560.194.000	816.410.000	1.045.629.000	640.594.000
3	Kab. Tangerang	4.170.155.000	35.867.704.000	3.251.991.000	4.128.453.450	35.509.026.960	3.219.758.859
4	Kab. Serang	1.560.000.000	13.878.274.000	7.673.486.000	2.329.877.000	15.472.188.000	7.772.529.000
5	Kota Tangerang	113.416.680	-	224.944.996	113.417.000	-	224.945.000
6	Kota Cilegon	100.498.000	5.834.000	76.451.000	5.373.266	261.803	4.104.320
7	Kota Serang	816.001.000	7.386.011.000	192.975.000	525.256.215	6.273.253.027	334.060.594
8	Kota Tangerang Selatan	59.177.000	887.545.000	16.490.000	82.399.000	862.007.879	16.401.963
PROVINSI BANTEN		7.941.190.680	61.003.593.000	12.343.001.996	8.658.684.779	59.356.052.541	12.657.473.373

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Kehutanan

Berbicara urusan kehutanan di Provinsi Banten, sebagaimana dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pada pola ruang di Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung yang memiliki luas lebih kurang sebesar 10.387,29 Ha yang tersebar berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Juga terdapat kawasan Taman Hutan Raya Banten dengan luas lebih kurang sebesar 1.595,90 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang (Gunung Asepun) dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan luas lebih kurang sebesar 1.505,65 Ha.

Tabel 2. 118
Capaian Terkait Kehutanan Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1417,33	1431,23	1841
2	Pengembangan Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0
3	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	1	1	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Lebih daripada itu pada pola ruang di Provinsi Banten dalam aturan yang sama juga terdapat kawasan dengan peruntukan hutan produksi lebih kurang 84.217,45 Ha yang terbagi menjadi 39.008,40 Ha hutan produksi terbatas dan 45.209,04 Ha sebagai hutan produksi tetap.

Tabel 2. 119
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Cakupan Tutupan Hutan (%)	32,41	39,53	45,46	45,99

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan kehutanan Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal positif ditunjukkan dengan rasio cakupan tutupan hutan yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2. 120
Indikator Pelayanan Umum Bidang Urusan Kehutanan
Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Luas Sempadan Pantai	Ha	3.202,73	3.202,73	3.202,73
2	Luas Sempadan Sungai	Ha	27.195,73	27.195,73	27.195,73
3	Luas Kawasan Sekitar Danau/ Waduk	Ha	493,31	493,31	493,31
4	Luas Kawasan Suaka Alam	Ha	5.095,05	5.095,05	5.095,05
5	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Ha	2.992,32	2.992,32	2.992,32
6	Luas Taman Nasional	Ha	137.708,46	137.708,46	137.708,46
7	Luas Taman Hutan Raya	Ha	1.595,90	1.595,90	1.595,90
8	Luas Taman Wisata Alam	Ha	1.248,15	1.248,15	1.248,15
9	Luas Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan	Ha	6.069,78	6.069,78	6.069,78
10	Luas Kawasan Hutan Suaka Alam	Ha	3.542,70	3.542,70	3.542,70
11	Luas Kawasan Hutan Pelestarian Alam	Ha	140.552,51	140.552,51	140.552,51
12	Luas Hutan Lindung	Ha	10.396,78	10.396,78	10.396,78
13	Luas Hutan Produksi	Ha	25.639,88	25.639,88	25.639,88
14	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Ha	58.647,67	58.647,67	58.647,67
15	Luas Hutan Ulayat/Adat	Ha	5.587,00	5.587,00	5.587,00
16	Perusahaan yang Memiliki HPH	Perusahaan/Ha	1	1	1
17	Kawasan Hutan yang dikelola Rakyat	Kel/Ha	0	0	841/195.27 4,87
18	Kayu Dicuri	m3/Rp/Kasus	0	3,60 / 7.200.000 / 2	0
19	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	0	100,30	0
20	Luas Kawasan Reklamasi Hutan	Ha	0	0	0
21	Luas Kawasan Reboisasi Hutan	Ha	234,76	100,35	329,50
22	Kebakaran Hutan	Ha/Org/Rp	0	100,30	0
23	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Kayu	Rp/m3	21.542,562	31.580,987	10.315,147
24	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Non Kayu	Rp/Batang /Kg/Ton	14.079.738. 741	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2021 berupa kayu bulat sebanyak 16,10 ribu m³ yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Produksi kayu jati pada tahun 2021 lebih kurang sebesar 6,36 ribu m³, dengan nilai produksi 11,09 miliar rupiah, sedangkan di tahun yang sama produksi kayu rimba sebesar 9,75 ribu m³ dengan nilai 2,13 miliar rupiah sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 121
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Tahun 2016-2021

TAHUN	KAYU JATI		KAYU RIMBA	
	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)
2016	2.192,24	4.671,00	3.131,88	1.855,00
2017	11.694,52	27.886,79	5.865,35	1.951,57
2018	14.178,38	22.963,48	7.364,19	2.272,87
2019	17.033,71	26.438,44	13.711,34	3.772,52
2020	14.543,84	19.066,40	5.370,50	1.129,78
2021	6.357,37	11.098,87	9.751,19	2.128,87

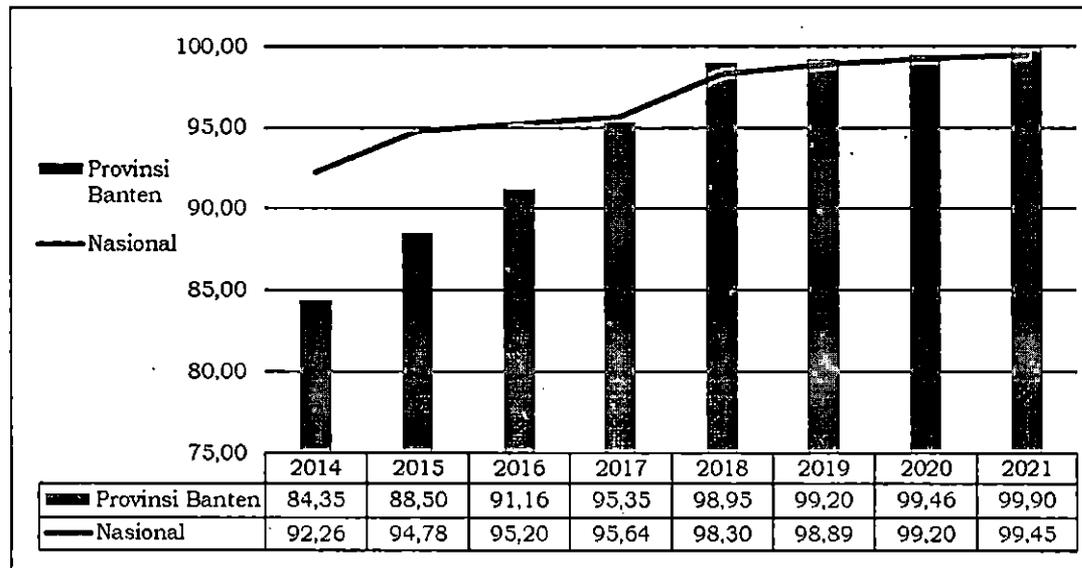
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

e. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk wilayah Provinsi Banten tapi juga untuk wilayah Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Provinsi Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Provinsi Banten dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Gambar di bawah menunjukkan realisasi rasio elektrifikasi antara Provinsi Banten dengan Nasional, diketahui bahwa di Tahun 2021 Provinsi Banten telah mencatatkan realisasi rasio elektrifikasi lebih kurang sebesar 99,90 persen. Sementara itu dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26.Pers/04/SJJI/2022 tanggal 18 januari 2022 menginformasikan bahwa realisasi rasio elektrifikasi nasional di tahun 2021 sebesar 99,45 persen. Meskipun capaian rasio elektrifikasi Provinsi Banten sudah tinggi, namun berdasarkan survey ulang di semua wilayah

Kabupaten/Kota terhadap jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah dan belum mendapatkan akses energi listrik, dihasilkan bahwa data rasio elektrifikasi Provinsi Banten justru mengalami penurunan, sehingga capaian rasio elektrifikasi hanya sebesar 97,41 persen. Keberadaan data mutakhir baseline Rasio Elektrifikasi tahun 2021 tersebut membuat data-data hasil pengukuran di tahun 2018-2020 tidak digunakan lagi sebagai acuan.



Gambar 2. 25
Perkembangan Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten dengan Nasional Tahun 2014-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut di tahun 2021 sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah distribusi penerangan rumah tangga antara listrik dan bukan listrik di wilayah Provinsi Banten belum merata, masih ada sebesar 0,45 persen rumah tangga belum teraliri listrik yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kedepannya Pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya serta berakselerasi mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar, seperti energi biomasa, energi mikro hidro, energi gelombang, energi angin, dan energi surya, yang kesemuanya apabila dikembangkan sebagai energi primer untuk membangkitkan tenaga listrik juga dapat mendatangkan devisa serta hilir dari cita-cita tersebut membantu Pemerintah Pusat dalam Program Diversifikasi Energi.

Tabel 2. 122
Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga Tahun 2020-2021 (Persen)

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020			2021		
		LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH	LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH
1	Kab. Pandeglang	100	0	100	100	0	100
2	Kab. Lebak	98,54	1,46	100	99,55	0,45	100
3	Kab. Tangerang	100	0	100	100	0	100
4	Kab. Serang	99,75	0,25	100	100	0	100
5	Kota Tangerang	100	0	100	100	0	100
6	Kota Cilegon	100	0	100	100	0	100
7	Kota Serang	100	0	100	100	0	100
8	Kota Tangerang Selatan	100	0	100	100	0	100
PROVINSI BANTEN		99,82	0,18	100	99,55	0,45	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pada tahun 2021 indikator Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan realisasi sebesar 0,07 persen dari 0,68 persen (tahun 2020) menjadi 0,61 persen, hal ini dimungkinkan terjadi akibat ketidakpastian hukum terkait kewenangan provinsi di sub sektor mineral dan batubara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menghapus semua kewenangan provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara, hal tersebut berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait mineral dan batubara di tahun 2021.

Tabel 2. 123
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,50	18,43	-	-
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	-	-	0,68	0,61

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada Tahun 2020, jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten sebanyak 182 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit (65 perusahaan), pasir

darat (48 perusahaan), dan pasir kuarsa (18 perusahaan). Dilihat dari luas wilayah penambangannya, bahan tambang jenis pasir laut memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 26,88 ribu Ha. Sementara itu, dari jumlah produksinya, andesit memiliki produksi terbesar yaitu 2,04 juta m³.

Tabel 2. 124
Luas Wilayah Pertambangan Menurut Jenis Bahan Tambang di Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	JENIS BAHAN TAMBANG	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Batu Bara	5.611,00	5.611,00	5.616,00
2	Emas	12.672,20	12.672,20	12.673,20
3	Perak	-	-	-
4	Andesit	1.860,15	2.243,74	2.530,03
5	Zeolit	101,2	101,2	101,2
6	Galena	518	518	518
7	Pasir Darat	313,4	323,4	399,24
8	Pasir Kuarsa	805,4	854,8	1.066,16
9	Pasir Kali	-	-	-
	(sungai)	56,8	56,8	66,8
10	Bentonit	237,9	237,9	237,9
11	Tanah Liat	0,9	5,9	5,9
12	Tanah Urug	6.994,20	6.994,20	6.994,20
13	Batu Gamping	384	384	428
14	Tras	10	10	10
15	Pasir Besi	24.013,59	24.013,59	26.886,99
16	Pasir Laut	-	-	-
17	Makadam	5	5	5
18	Feidspar	-	-	-
19	Breksi Tufaan	-	-	-
20	Seng/Zn	-	-	-
21	Mangan	272	272	272

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Pada tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis- jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan

penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

Tabel 2. 125
Realisasi Penjualan Gas Kota Triwulanan Pada Tahun 2015-2020
(Meter Kubik)

TAHUN	TRIWULAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
2015	410.337.224	386.537.692	403.030.991	419.104.492	1.619.010.401
2016	394.256.619	385.010.685	339.414.335	347.059.780	1.465.741.419
2017	332.449.891	349.581.054	351.726.889	358.445.347	1.329.203.181
2018	386.633.999	397.717.618	466.648.379	490.462.732	1.741.462.728
2019	384.822.277	353.683.006	408.897.530	388.269.863	1.535.672.677
2020	400.751.805	374.815.046	400.653.703	373.870.877	1.550.091.430

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

f. Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor potensial besar untuk dikembangkan dikemudian hari dan tentunya dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tabel di bawah menunjukkan realisasi indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 126
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	LPE Sektor Perdagangan (%)	10,90	11,27	-2,86	1,84
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis (%)	4,00	2,47	-	-
3	Tingkat Inflasi Bahan Pokok (%)	-	-	-2,86	2,43

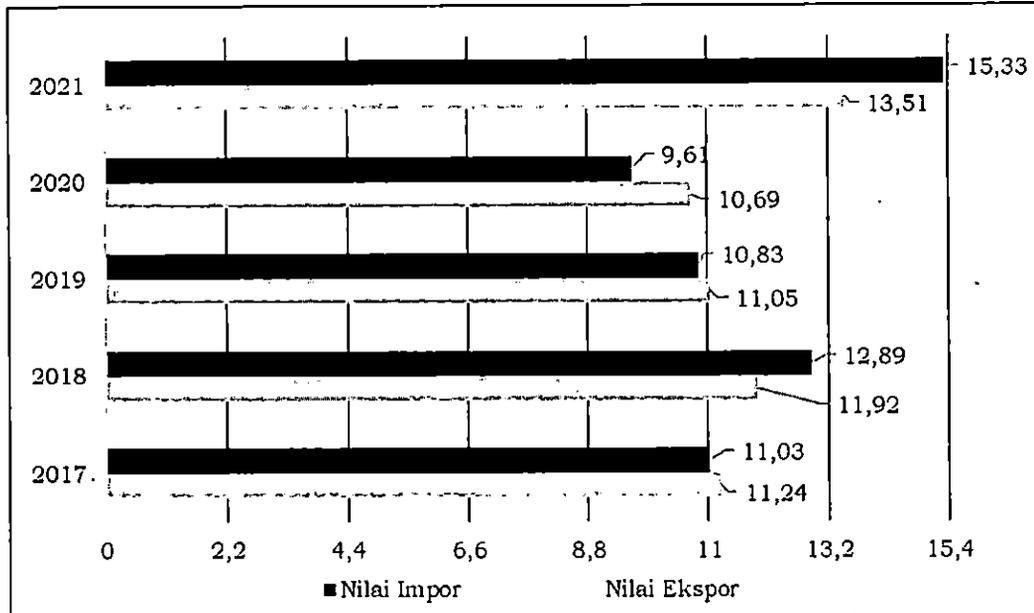
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Nilai ekspor Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah yaitu lebih kurang sebesar US\$ 13,51 miliar, naik 26,44 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 10,69 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$ 1.285,36 Juta (99,29 persen), sementara sisanya berasal dari sektor pertanian US\$ 8,12 juta (0,63 persen), migas US\$ 0,87 juta (0,07 persen), serta pertambangan dan lainnya US\$ 0,12 juta (0,01 persen).

Tabel 2. 127
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (US\$)

TAHUN	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	EKSPOR NETO
2017	11.238.385.909,72	11.025.951.471,00	212.434.438,72
2018	11.920.744.392,20	12.893.944.591,00	-973.200.198,81
2019	11.045.600.314,12	10.828.507.370,00	217.092.944,12
2020	10.687.431.834,75	9.608.770.455,00	1.078.661.379,74
2021	13.511.511.921,74	15.326.297.768,00	-1.814.785.846,26

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021



Gambar 2. 26
Nilai Ekspor (FOB) dan Nilai Impor (CIF) Provinsi Banten Tahun 2017-2021
(miliar US\$)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022)

Nilai impor Provinsi Banten tahun 2021 sebesar US\$ 15,33 miliar, naik 59,50 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 9,61 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong sebesar US\$ 1.484,35 Juta (97,39 persen), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$ 286,57 juta (1,87 persen) dan barang konsumsi US\$ 113,24 juta (0,74 persen).

Perkembangan nilai ekspor Provinsi Banten pada Bulan November 2021 naik lebih kurang sebesar 19,33 persen dibanding Bulan Oktober 2021, yaitu dari sebelumnya sebesar US\$ 1.117,69 juta menjadi US\$ 1.333,70 juta. Ekspor nonmigas Bulan November 2021 mengalami peningkatan 19,63 persen menjadi US\$ 1.331,78 juta dibanding bulan sebelumnya, berasal dari golongan barang alas kaki (HS 64) yaitu mencapai US\$ 257,73 juta dengan Negara Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor dengan nilai ekspor US\$ 237,25 juta. Selain itu ekspor nonmigas dibulan yang sama juga terjadi

peningkatan pada sektor pertanian, sektor industri, serta sektor pertambangan dan lainnya bila dibandingkan bulan sebelumnya dengan nilai ekspor Provinsi Banten di Bulan November 2021 tertinggi melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai US\$ 1.074,12 juta.

Tabel 2. 128
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk
 Tahun 2018-2021 (US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI EKSPOR			
		2018	2019	2020	2021
1	Migas	56,38	8,61	2,73	15,45
2	Pertanian	22,55	33,35	71,21	74,36
3	Industri Pengolahan	11.841,25	11.003,04	10.602,49	13.420,15
4	Pertambangan dan lainnya	0,57	0,59	11	15

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Lebih lanjut untuk perkembangan impor di Provinsi Banten pada Bulan November 2021 naik lebih kurang sebesar 21,26 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari US\$ 1.281,70 juta menjadi US\$ 1.554,24 juta. Di bulan yang sama impor migas naik sebesar 66,16 persen dari US\$ 464,60 juta pada bulan sebelumnya menjadi US\$ 771,97 juta di Bulan November 2021. Sedangkan, pada komoditi nonmigas penurunan nilai impor sebesar 4,26 persen menjadi US\$ 782,27 juta, dibanding bulan sebelumnya yakni US\$ 817,10 juta. Sebagai informasi tambahan bahwa nilai impor nonmigas terbesar berasal dari golongan bahan kimia organik (HS 29) yang mencapai US\$ 264,27 juta. Dilihat dari pelabuhan bongkar, nilai impor terbesar berasal dari Pelabuhan Merak yang mencapai US\$ 875,76 juta.

Tabel 2. 129
 Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk Barang
 Tahun 2018-2021 (juta US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI IMPOR			
		2018	2019	2020	2021
1	Barang Konsumsi	311,19	208,18	186,80	286,56
2	Bahan Baku dan Bahan Penolong	11.870,45	10.334,75	9.173,30	14.926,49
3	Barang Modal	712,30	285,60	248,50	113,23
JUMLAH TOTAL		12.893,64	10.828,51	9.608,77	15.326,97

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

g. Bidang Urusan Perindustrian

Sektor urusan perindustrian merupakan bagian penting yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian bagi wilayah Provinsi Banten, yaitu berada pada kawasan di wilayah utara Provinsi Banten. Sebagaimana yang tertuang dalam pola ruang Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan RTRW, lebih

kurang sebesar 54.459,93 Ha diperuntukan sebagai kawasan industri yang tersebar 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

Tabel 2. 130
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018*	2019*	2020**	2021**
LPE Sektor Perindustrian (%)	6,63	6,02	-4,67	4,93

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Terinformasikan bahwa LPE Sektor Perindustrian mengalami penurunan di tahun 2019 hingga Tahun 2020 pun demikian hal ini berbanding lurus dengan LPE Sektor Perdagangan yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini dimungkinkan akibat masih berlanjutnya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas sektor perindustrian dan dunia usaha lainnya yang berdampak kepada terganggunya pencapaian indikator makro Provinsi Banten. Namun demikian di tahun 2021 mulai adanya pertumbuhan positif pada sektor perindustrian yang berimplikasi kepada meningkatnya presentase LPE Sektor Perindustrian.

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebanyak 3.429 perusahaan, jumlah terbanyak berlokasi di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 1.860 perusahaan (46,22 persen), kemudian di Kota Tangerang sebanyak 824 perusahaan (32,15 persen), dan Kabupaten Serang sebanyak 381 perusahaan (10,56 persen), Kota Tangerang Selatan 196 perusahaan (4,95 persen), Kota Cilegon sebanyak 127 perusahaan (3,52 persen). Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masing-masing hanya terdapat 6 perusahaan, 28 perusahaan dan 7 perusahaan.

Tabel 2. 131
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PERUSAHAAN (Unit)	TENAGA KERJA (Jiwa)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)
1	Kab Pandeglang	6	201	376.377.911
2	Kab Lebak	28	6.236	7.321.353.453
3	Kab Tangerang	1.860	339.615	246.285.358.501
4	Kab Serang	381	295.310	112.628.890.875
5	Kota Tangerang	824	176.598	166.019.743.150
6	Kota Cilegon	127	31.380	134.939.619.394
7	Kota Serang	7	273	786.280.915
8	Kota Tangerang Selatan	196	44.153	30.152.414.467
PROVINSI BANTEN		3.429	893.766	698.510.038.666

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

h. Bidang Urusan Transmigrasi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan transmigrasi merupakan salah satu pada urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah, singkatnya adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat kepada wilayah yang masih jarang sehingga diperolehnya pemerataan penduduk. Namun demikian sebagai informasi bahwa Provinsi Banten adalah daerah yang bukan termasuk kepada tujuan transmigrasi.

2.1.4.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- Perencanaan;
- Keuangan;
- Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- Penelitian dan pengembangan; dan
- Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Bidang Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dimana untuk Bappeda selama beberapa tahun terakhir menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yaitu: a) Dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; b) Dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022; c) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022.

Bappeda juga setiap tahunnya menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pengesahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Setiap tahunnya Bappeda konsisten mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas dan juga sekaligus menjadi indikator kinerja Bappeda.

Tabel 2. 132
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	54.17	58.33	83.33	70,83
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja (Nilai)	B	B	B	B

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Pada tahun 2020 Provinsi Banten berhasil masuk dalam 10 besar nominasi dari Bappenas untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan mendapatkan Dana Insentif Daerah. Untuk

selanjutnya terjadi penurunan kesesuaian kriteria yang disebabkan kualitas dokumen perencanaan yang masih perlu banyak perbaikan.

b. Bidang Urusan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 133
Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada BPKAD Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem aplikasi terpadu antara e-planning, e-budgeting dan e-monev. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya pendapatan daerah yang optimal dengan Indikator kinerja rasio PAD terhadap pendapatan daerah, yang pada tabel di bawah menunjukkan bahwa di tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat Covid19 dan pada tahun 2021 rasio PAD sudah di angka 62,69 persen namun sebenarnya masih belum mencapai target tahunan yang menargetkan 63,19 persen.

Tabel 2. 134
Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada Bapenda
Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	61,25	62,65	56,67	62,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

c. Bidang Urusan Kepegawaian

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota dipindahkan ke provinsi. Dengan demikian berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi sejumlah 5.909 Orang. Pemerintah Provinsi Banten mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yakni 9.588. Hal ini merupakan potensi human capital yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

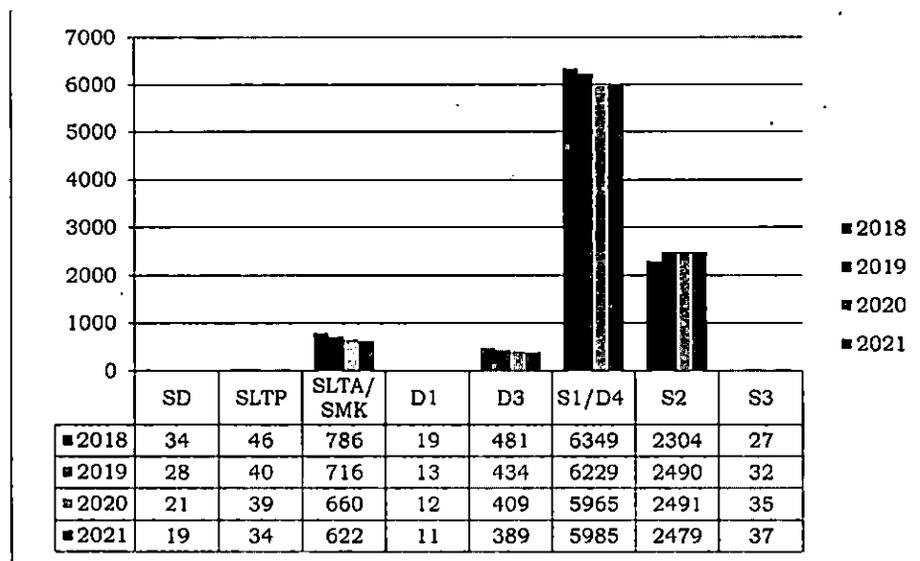
Tabel 2. 135
Jumlah PNS menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2018-2021

NO	GOLONGAN/JABATAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	Golongan IV	Jiwa	2.563	2.632	2.670	2.846
2	Golongan III	Jiwa	6.652	6.558	6.208	5.990
3	Golongan II	Jiwa	794	735	697	685
4	Golongan I	Jiwa	73	74	71	67
5	Fungsional Umum	Jiwa	3.077	2.839	2.805	2.496
6	Fungsional Tertentu	Jiwa	7.005	6.335	6.070	6.163
7	Struktural	Jiwa	883	825	771	929
8	Eselon II	Jiwa	1	1	1	0
9	Eselon III	Jiwa	41	41	37	41
10	Eselon IV	Jiwa	221	200	198	232
JUMLAH			21.310	20.240	19.528	19.449

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten terbesar pada fungsional tertentu, hal ini diperlukan strategi

yang tepat sehingga potensi tersebut dapat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.



Gambar 2.35
ASN Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018-2020 (Jiwa)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut tabel dibawah, Tingkat pendidikan ASN Banten jumlahnya besar pada tingkat S1 dan S2, hal ini merupakan potensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Provinsi belum menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), yang mana hal tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan kualitas kompetensi ASN Provinsi Banten sehingga dapat mendukung secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2. 136
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	SD	Jiwa	34	28	21	19
2	SLTP	Jiwa	46	40	39	34
3	SLTA/SMK	Jiwa	786	716	660	622
4	D1	Jiwa	19	13	12	11
5	D3	Jiwa	481	434	409	389
6	S1/D4	Jiwa	6349	6229	5965	5985
7	S2	Jiwa	2304	2490	2491	2479
8	S3	Jiwa	27	32	35	37
Jumlah		Jiwa	10.046	9.982	9.632	9.576

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pengukuran profesionalitas ASN diukur dari Indeks Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 30,77 kategori

rendah dimana komponen terendah adalah kinerja, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 137
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Banten Tahun 2021

INDIKATOR	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI TOTAL
Nilai Indeks Profesionalitas ASN	15,29	9,23	1,28	4,98	30,77 (Rendah)

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Dari capaian indikator kinerja kepegawaian, masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu peta jalan pengembangan ASN yang belum tersusun. Hal ini digunakan dalam merencanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, memetakan pola pengembangan kapasitas ASN dan merencanakan promosi ASN secara tersistem.

Tabel 2. 138
Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2021

NO.	INDIKATOR	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN Yang Profesional (orang)	950	3000	6400	7816
2	Jumlah ASN Yang Dibutuhkan Berdasarkan Anjab ABK (orang)	289	21368	28190	28866
3	Jumlah ASN Yang Tidak Melanggar Disiplin Dan Kode Etik (orang)	10055	9843	9593	9570
4	Jumlah ASN Provinsi Banten (orang)	10082	9999	9646	9588
5	Jumlah ASN Yang Update Database (orang)	10082	9999	9500	9588
6	Jumlah Nilai Capaian SKP Tahunan Dengan Kategori Baik (%)	90,64	90,00	95,38	92,75
7	Jumlah Capaian Tingkat Pendidikan ASN (%)	79,82	92,16	87,41	88,05
8	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	44	75	4242	8662
9	Jumlah ASN Yang Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10082	9999	9646	9588

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Provinsi Banten sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BPSDM Provinsi Banten dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

Tabel 2. 139
Rekapitulasi Diklat Provinsi Banten pada Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2020 (Jiwa)

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA DIKLAT		
		2018	2019	2020
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	0	52	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	81	0	0
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas I	313	0	156
4	Diklat Prajabatan Gol III	837	1410	0
5	Diklat Prajabatan Gol II	0	294	0
6	Diklat Teknis Penatausahaan	0	0	0
7	Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	0	0	0
8	Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	0	0	0
9	Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Daerah	0	0	0
10	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	40	155	193
11	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	110	142	255
12	Diklat Pengembangan Kompetensi Fungsional	104	60	0
13	Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	2936	3775	2020
14	Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen	102	139	373
15	Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintah	130	536	124

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Pada tabel di bawah menunjukkan bahwa ASN Provinsi Banten yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi atau STTPL mengalami kenaikan dari sebelumnya 1095 orang di tahun 2020 pada 2021 meningkat menjadi 2616. Namun dari total jumlah 9588 ASN angka ini masih belum mencapai setengah dari jumlah ASN Provinsi Banten.

Tabel 2. 140
Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Atau STTPL Tahun 2017-2021 (Jiwa)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta pengembangan kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	2.026	1.717	2.788	1.095	2.616
2	Jumlah ASN Provinsi Banten	10.082	10.082	10.001	9.644	9.588

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Berikut ini tabel capaian indikator BPSDM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun masih perlu fokus untuk

mengejar kenaikan maksimal pada Indeks Profesionalitas ASN komponen kompetensi.

Tabel 2. 141
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	17,3	27,88	11,35	24,69

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

e. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja fungsi Penelitian dan Pengembangan menunjukkan pengembangan. Bidang penelitian dan Pengembangan di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengampu indikator sasaran daerah Indeks Daya Saing Daerah yang menunjukkan peningkatan dalam hasilnya seperti tabel berikut:.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diikuti mulai tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 yang dinilai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menunjukkan kenaikan baik nilai maupun leveling. Hal ini akan terus dipertahankan dan dinaikan baik dari segi nilai maupun peringkat nasional.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatnya inovasi daerah, dimana Indeks Inovasi daerah ini dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak tahun 2019.

Tabel 2. 142
Indeks daya Saing Daerah di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Peringkat IDSD	17	5	5
Nilai IDSD	4.0032	3.4263	3.4610
Level	Rendah	Tinggi	Tinggi

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tercatat pada tahun 2020 nilai indeks inovasi daerah sebesar 8.191 dan di 2021 sebesar 6.052, hal ini menunjukkan penurunan nilai walaupun masih dalam kategori level Inovasi sangat tinggi.

Tabel 2. 143
Peringkat dan Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten
Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Peringkat Inovasi Daerah	6	5	8
Nilai Indeks Inovasi	14.230	8.191	6.052
Jumlah Inovasi yang diajukan	70	173	182
Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

f. Bidang Urusan Pengelolaan Penghubung

Indikator kinerja Badan Penghubung diantaranya adalah Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung dalam rangka mengukur kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penghubung daerah yang pada Tahun 2017 sampai 2021 mencapai realisasi sebesar 100 persen.

2.1.4.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Bidang Urusan Sekretaris Daerah

Hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kualitas SAKIP Provinsi Banten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Berikut ini data terkait capaian SAKIP Provinsi Banten yang saat ini masih tercatat B atau 65,88.

Tabel 2. 144
Capaian SAKIP Provinsi Banten 2018 - 2021

KOMPONEN SAKIP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Perencanaan Kinerja	18,56	19,97	20,19	20,29
Pengukuran Kinerja	14,09	15,4	15,92	16,07
Pelaporan Kinerja	9,54	9,76	9,87	9,88
Evaluasi Kinerja	6,33	6,48	7,18	7,34
Capaian Kinerja	11,69	13,95	12,72	12,87
Total	60,2	65,56	65,88	66,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 66,45 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Capaian SAKIP dari Tahun 2018-2021 walaupun menunjukkan perbaikan, namun hal ini belum mencapai target RPJMD Provinsi Banten. Dalam dokumen Perubahan RPJMD Banten Tahun 2017-2022 target SAKIP pada tahun 2020 adalah BB.

Hal lainnya terkait Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan, dalam hal ini Provinsi Banten terus mengalami perbaikan. Pada Tahun 2016 capaiannya adalah 2,83 dengan status tinggi dan pada peringkat 16. Adapun pada tahun 2017 capaiannya adalah 2,86 dengan status tinggi dan berada pada peringkat 13. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan nilai 3,05 dengan status sangat tinggi.

1. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat memainkan peranan yang penting bagi pembangunan daerah khususnya dan nasional pada umumnya. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD disamping pajak dan retribusi, sehingga pengelolaan BUMD membutuhkan penanganan yang serius dan profesional berdasarkan prinsip *Good Corporate Government (GCG)* yang meliputi: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*.

Secara regulasi, keberadaan BUMD diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang kehadirannya didasarkan melalui analisa kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha

Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki 3 (tiga) BUMD, yaitu: PT. Banten Global Development, PT Jamkrida Banten, dan PT Agrobisnis Banten Mandiri.

a. PT. Banten Global Development

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Tujuan pembentukan PT. Banten Global Development adalah untuk:

1. Pengembangan usaha baru yang diawali dengan pembentukan anak perusahaan dalam bentuk *sub holding*;
2. Menjalin kerjasama dengan mitra penyandang dana yang mempunyai keahlian tertentu untuk pengembangan usaha; dan
3. Mendapat penugasan khusus.

b. Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten)

PT. Jamkrida Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Jamkrida Banten hadir sebagai implementasi atas regulasi dan apresiasi Pemerintah untuk para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Merespon regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mendukung pembangunan ekonomi di bidang Koperasi dan UMKM. Pembentukan Jamkrida Banten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha sehingga Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan

pertumbuhan ekonomi inklusif. Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

1. Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
2. Memberdayakan Koperasi dan UMKM;
3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing; dan
5. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 persen (Lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 persen. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

Sejak Oktober 2014-2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar yang ada, pada Tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

c. PT. Agrobisnis Banten Mandiri

PT. Agrobisnis Banten Mandiri (perseroda), berkedudukan di Kota Serang Banten, dengan akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Agrobisnis Banten Mandiri No. 13 tanggal 20 November 2020, dibuat dihadapan Arjamalis Roswar, S.H., SpN., MH yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0063115.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 27 November 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Agribisnis dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 297 Tahun 2019 tentang Penetapan PT. Agrobisnis (Perseroda).

- a. Kegiatan usaha utama bidang agrobisnis pangan, pertanian, perternakan, perikanan, perkebunan, pasar, hulu maupun hilir agrobisnis dengan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Melakukan usaha pertanian meliputi kegiatan usaha industri penggilingan beras, kemitraan bersama petani komoditi pangan serta pengolahan dan perdagangan hasil perkebunan;
 - Melakukan usaha bidang pertanian (tanaman pangan, tanaman industri, tanaman hortikultura, perikanan dan peternakan) serta kehutanan meliputi kegiatan antara lain pembukaan/penyiapan lahan, pembibitan, pengolahan dan perdagangan hasil pertanian dan kehutanan;
 - Melakukan usaha dalam bidang-bidang lainnya dan kemitraan yang terkait dengan agrobisnis, agroindustri, pusat distribusi (Pasar Induk) dan menghadirkan tataniaga baru dibidang agrobisnis;
 - Melakukan usaha peternakan sapi perah, sapi potong, domba, kambing, unggas dalam sebuah kawasan usaha ternak dan peternakan rakyat, industri pengolahan susu dan rumah potong unggas; dan
 - Mengembangkan *e-Commerce*, *start-up* agrobisnis, komoditi pangan, pergudangan dan kebutuhan retail pangan.
- b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung usaha perseroan:
- Melakukan kegiatan pengiriman, distribusi dan transportasi sehubungan dengan pembelian hasil pertanian, perkebunan, pelabuhan ternak dan penjualan hasil pertanian dan perkebunan;
 - Melakukan kegiatan pembelian dan penjualan hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, membangun kawasan usaha tani dan ternak yang terpadu;
 - Melakukan kerjasama bersama petani dan peternak plasma dalam membangun kebun dan kandang plasma (kemitraan) yang menunjang kegiatan kebun dan kandang utama;
 - Menyediakan jasa kepada pihak lain dengan memanfaatkan aset yang dimiliki Perseroan;
 - Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir di atas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. Kegiatan usaha yang dijalankan: Moderen Rice Milling Unit, Industri Pengolahan Susu, Rumah Potong Unggas, Perdagangan

telur ber-NKV, Pusat Distribusi Pangan, pergudangan dan rantai pasok dingin.

Selain tiga BUMD tersebut yang langsung dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten, melalui PT.BGD Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Bank Daerah yaitu PT.Bank Banten, Tbk. Keberadaan Bank Banten didasarkan pada Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang RPJMD 2012-2017 Misi ke 5 item 29 yaitu peningkatan rasio kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembentukan Bank Banten yang ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham PT.Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten disingkat Bank Banten sebesar RP 950 Milyar.

Pada perjalanannya, Bank Banten mengalami pasang surut kondisi keuangan dimana pada tanggal 22 April 2020 pernah mengalami penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus, namun setelah dilakukan penyertaan modal, Status Bank Banten dipulihkan oleh OJK sebagai Bank Sehat sejak tanggal 6 Mei 2021. Terakhir komposisi kepemilikan saham Bank Banten setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI, sebesar 78,21 persen dimiliki oleh PT.BGD dan sebesar 21,79 persen dimiliki oleh publik. Saat ini sedang dipersiapkan rencana perubahan status kepemilikan saham di Bank Banten dari PT.Banten Global Development ke Pemerintah Provinsi Banten selambatnya pada tahun 2023 atau setelah Penawaran Umum Terbatas (PUT) VIII terlaksana, sehingga status Bank Banten menjadi BUMD Pemerintah Provinsi Banten.

Selain PT BGD, PT Jamkrida, PT ABM, dan PT Bank Banten, Pemerintah Provinsi Banten juga memiliki saham pada beberapa lembaga seperti Bank BJB, PT LKM, dan BPR. Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2007 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 145
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dari Tahun 2007-2020

NO	NAMA BADAN /LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	JUMLAH PENYERTAAN (Rp.)
1	BANK PEMBANGUNAN JAWA BARAT (BJB)	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	130.147.464.173
2	PT.BGD	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	1.500.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.16 TAHUN 2008	10.500.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2009	1.500.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.7 TAHUN 2010	9.500.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2012	11.961.227.000
		PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2013	314.600.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.5 TAHUN 2013	300.000.000.000
		PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2020	1.550.000.000.000
3	PT.LKM ARTHA KERTARAHARJA TGR	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	1.975.377.208
	PT.LKM BERKAH PANDEGLANG	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	642.612.000
	PT.LKM RANGKASBITUNG	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	470.000.000
4	JAMKRIDA BANTEN	PERATURAN DAERAH NO.4 TAHUN 2013	27.500.000.000
		SK GUBERNUR NO. 576/KEP-434-HUK/2014	22.000.000.000
		SK GUBERNUR NO.573/KEP-133- HUK/2014	1.500.000.000
5	PD.BPR-LPK WARUNGGUNUNG	PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2007	900.000.000
6	BPR KERTARAHARJA	PERATURAN DAERAH NO.4 TAHUN 2009	9.402.000.000
		SK GUBERNUR NO.576/KEP-437- HUK/2014	5.598.000.000
7	BPR SERANG	PERATURAN DAERAH NO.4 TAHUN 2009	10.010.000.000
		SK GUBERNUR NO.576/KEP-475- HUK/2014	4.990.000.000
8	PT ABM	PERATURAN DAERAH NO..4 TAHUN 2020	75.000.000.000
TOTAL			2.490.969.680.381

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten dan juga potensi ekonomi daerah yang begitu pesat, sudah seharusnya diantisipasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselaraskan pada potensi dan karakteristik daerah meliputi bidang infrastruktur, transportasi, air minum, pariwisata, keuangan, pertambangan dan bidang aneka usaha.

2. Kerjasama Daerah

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2. 146
Daftar Kerjasama Antar Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	TEMA KERJASAMA
1	BAPPEDA	PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMETAAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI JAWA BANTEN
2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PERLINDUNGAN DALAM ANTISIPASI MEREBAKNYA HAMA, PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA PERTANIAN DI WILAYAH PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI JAWA BARAT
3	SATPOL PP	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI BANTEN
4	SATPOL PP	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI DKI JAKARTA
5	PEMKSM	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PILAR BATAS DAERAH PADA SEGMENT BATAS DAERAH ANTARA PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PROVINSI BANTEN
6	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
7	DKP	KERJA SAMA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	DPMDes	PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI WILAYAH PERBATASAN
9	BANTEN - LAMPUNG	KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH WILAYAH PERBATASAN PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI LAMPUNG (KELAUTAN DAN PARIWISATA)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Secara regulasi, kerjasama daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri. Sampai saat ini ada lebih kurang ada 9 (sembilan) tema kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

Tabel 2. 147
Perusahaan Yang Memberikan Bantuan CSR di Provinsi Banten
Tahun 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS BARANG	NILAI BANTUAN (Rp)	KET
1	Bank BJB	Berns 50 Ton	575.000,000	Penyerahan ke 70 Ponpes dan Yayasan se Provinsi Banten
2	Bank BJB	2.000 Paket Sembako untuk Karang Taruna	239.000,000	Karang Taruna Kab. Lebak dan Pandeglang Korban Bencana Banjir
3	PT. Chandra Asri	Pembangunan Jembatan	300.000,000	Desa Sukamulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak (kerjasama dengan Yayasan Relawan Kampung)
4	PT. Chandra Asri	Pembangunan PAUD Cahaya Bintang	363.330,000	Bekerjasama dengan Yayasan happy hearts Indonesia
5	PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Banten	Bea Siswa untuk 32 Mahasiswa (@ 12.000.000 x 32)	384.000,000	Penyerahan di Rumdin Gubernur Banten untuk 16 Mahasiswa Untirta dan 16 Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin
6	Bank BJB	25.000 sembako	3.151.250,000	Penyerahan sembako diberikan kepada 8 Kab/Kota
7	PT. Angkasa Pura II	Ambulance Isuzu D-Max 4x4 (1 Spk Ambulance AP II Terlampir)	1.192.111,000	Dinkes Provinsi Banten (penyerahan secara simbolis di Rumdin)
8	PT. Angkasa Pura II	56 Kaki Palsu	154.000,000	Penyerahan 56 Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten (penyerahan secara simbolis di Rumdin)
9	PT. Chandra Asri	Pembangunan Jembatan	300.000,000	Kp. Ciparahu Girang, Desa Tangkaisari, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang (kerjasama dengan Yayasan Relawan Kampung)
10	PT. Chandra Asri	120 Ton Oksigen	750.000,000	Penyerahan bantuan oksigen diberikan kepada 8 Kab/Kota
11	PT. Angkasa Pura II	1000 Paket Tambahan Nutrisi	200.000,000	Kegiatan berbagi Paket Vitamin dan Nutrisi kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 (yang menjalankan isolasi mandiri)
12	PT. Krakatau Steel	1. 8.600 Sembako 2. Beasiswa untuk 10 Orang 3. 25.086 Tubung Oksigen 4. Pinjaman dana bergulir untuk 145 UKM	4.914.300,000	Penyerahan sembako diberikan kepada Masyarakat di wilayah Kota Cilegon
13	PT. Angkasa Pura II	1. 100 paket nutrisi dan vitamin 2. 25 paket alat masak, pacul dan Golok 3. 84 set pakaian adat 4. 1 unit genset (2800 watt) 5. 5 unit senter	50.000,000	Penyerahan bantuan dilakukan oleh Tim Relawan berkolaborasi dengan Relawan Banten Berakhlak. Bantuan diberikan oleh PT. Angkasa Pura dan Wika
J U M L A H			12.572,991,000	

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Untuk skema pembiayaan pembangunan Non-APBD, Pemerintah Provinsi Banten memformulasikan bagaimana konsep pembangunan yang direncanakan tidak serta merta mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL/CSR) Perusahaan ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dukungan kerjasama dengan pihak ketiga terasa efektif manfaatnya khususnya saat Banten mengalami musibah bencana alam maupun pada saat penanggulangan COVID-19 pada Tahun 2021 melalui Forum CSR yang dasar pembentukannya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan Kemitraan Bina Lingkungan/ *Corporate Social Responsibility* (TJSKBL/CSR). Pada tahun 2021 telah

tersalurkan bantuan senilai Rp12.572.991.000.- dengan rincian terlampir pada tabel di atas.

Kedepan, pengoptimalan kerjasama daerah akan dirasakan bertambah penting, seiring dengan makin kompleksnya dinamika pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang bersumber tidak hanya dari APBD dan APBN tapi juga yang bersumber dari pihak ketiga. Saat ini yang belum terlaksana diantaranya adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri yang masih bersifat sporadis.

b. Sekretariat DPRD

Sasaran DPRD adalah terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja Evaluasi kinerja capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD dimana target realisasinya sudah mencapai 100 persen.

2.1.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen resiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata

kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 2. 148
Indikator Kinerja Urusan Pengawasan 2018-2021

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	3
2	Nilai Kapabilitas APIP	2	3	3	4

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Berdasarkan Tabel di atas Kinerja pengawasan Provinsi Banten dari tahun ke tahun meningkat kualitasnya. Hal ini perlu menjadi komitmen antar pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasannya dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Pemerintah Provinsi Banten.

2.1.4.7 Unsur Pemerintahan Umum

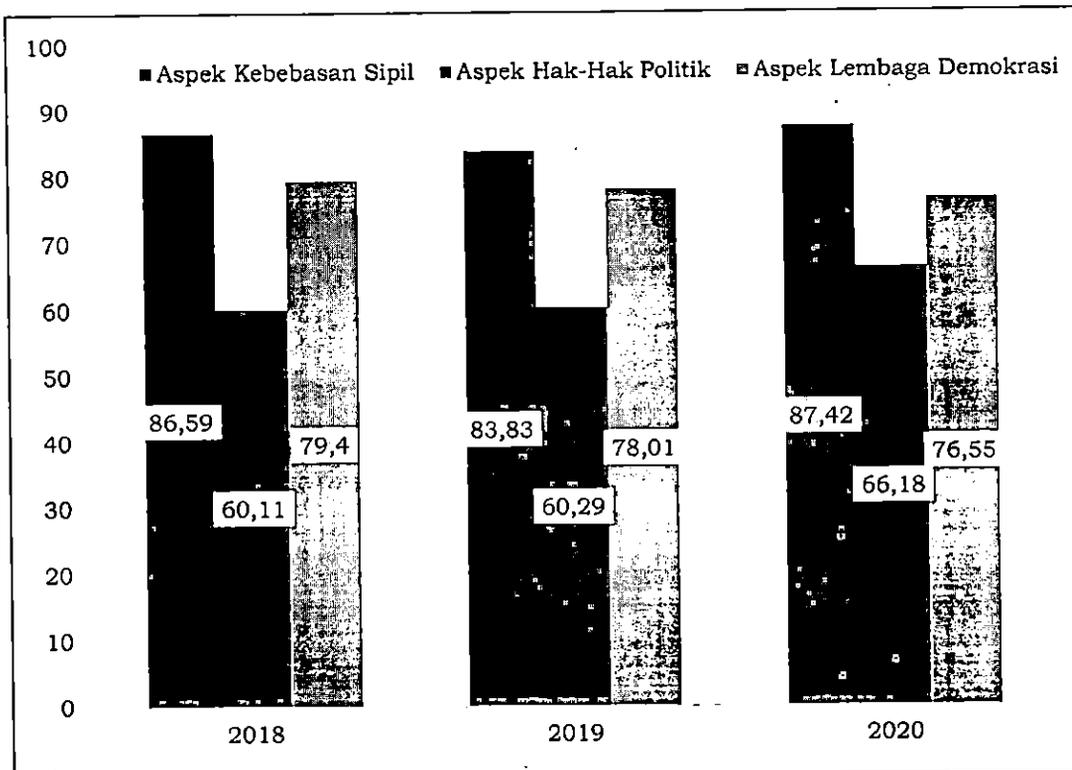
Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten dan Angka Kriminalitas. Capaian IDI Banten dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten Tahun 2020 mencapai angka 75,82 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang capaiannya sebesar 72,60. Meskipun mengalami peningkatan, namun tingkat demokrasi di Banten masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Tabel 2. 149
Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2018-2020

INDIKATOR	TAHUN		
	2018	2019	2020
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten	73,78	72,60	75,82

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Selain itu dilihat dari aspek terkecil adalah aspek hak-hak politik dimana capaiannya 66,18 namun dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan 6 poin.



Gambar 2. 27
IDI Provinsi Banten Menurut Aspek 2018-2020
(Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021)

Penurunan angka kriminalitas yang melihat bahwa salah satu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan angka kriminalitas di Tahun 2021 dimana angka penurunannya hampir 71 persen, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 150
Jumlah Kriminalitas Provinsi Banten Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Angka Kriminalitas	3.369	4.111	2.944

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPd 2021 dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Evaluasi SDG's

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2021 bermuara pada sasaran pembangunan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan cascading kinerja Pemerintah Daerah Daerah

Provinsi Banten, dimana evaluasi atas capaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat dilihat dari capaian kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemerintah Daerah, sampai dengan Program Perangkat Daerah.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintah Daerah yang merupakan program untuk menaungi sasaran serta program perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Berikut adalah capaian dari sasaran pembangunan selama tahun 2021 yang diukur dari pencapaian indikator sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada evaluasi Program Kegiatan tahun 2021 dimana terdapat 521 indikator kinerja Program dengan penjelasan sesuai Permendagri 86/2017 bahwa terdapat 5 kriteria kinerja, Kinerja sangat tinggi sebesar 473 indikator, Kinerja Tinggi 14 indikator, Kinerja Sedang 9 indikator dan Kinerja rendah sebesar 25 indikator. Adapun capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dari 23 Indikator kinerja utama terdapat 10 (sepuluh) indikator yang mencapai dan melampaui target, 12 (dua belas) indikator yang belum mencapai target, 1 (satu) indikator tidak dapat dihitung pencapaiannya. Untuk lebih rinci capaian program kegiatan tahun 2021 dan pencapaian RPJMD 2017-2022 lebih lanjut pada buku II. Tabel dibawah menjelaskan hasil IKU daerah tahun 2021 dan hasil IKK perangkat daerah tahun 2021 dengan dibagi menjadi 5 misi.

Tabel 2. 151
Target dan Capaian IKU Daerah Tahun 2021 dan Perbandingan dengan
Target Akhir RPJMD 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN 2021	TARGET RPJMD 2022
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)						
1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,40	3,45	101,47	3,5
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	B	76,00	A
3	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	A	BB*	98,00	A
Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur						
4	Capaian kinerja infrastruktur daerah	persen	100	98,33	98,33	100
5	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	Persen	85	86,80	102,12	90
Misi 3 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas						
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,21	72,75	99,37	72,60-73,60
7	Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,365	0,363	100,55	0,370
8	Kemiskinan	Persen	5,06	6,50	77,85	4,99-5,4
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,03	8,98	89,42	9,7-9,2
10	Harapan lama sekolah	Tahun	14,50	13,02	92,67	15
11	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,10	8,93	98,13	9.3
12	Daya beli	persen	100,00			
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	100,00	63,79	63,79	100
14	Indeks pembangunan gender (IPG)	Poin	92,51	91,67*	99,09	92,79
Misi 4 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas						
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,66	70,02	99,09	70,96
16	Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup)	Poin	290,00	100,39	289,22	285

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN 2021	TARGET RPJMD 2022
17	Angka Kematian Bayi (Per kelahiran hidup)	Poin	28,00	4,8	583,30	26
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi						
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,5-3,5	4,44	177,60	5-5,6
19	Tingkat Inflasi	Persen	4,00	1,91	209,42	3,4-4
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persen	6,00	8,00	133,33	6,4
21	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	2,90	**	**	3
22	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Peringkat	6,00	5,00	120,00	5
23	Emisi Rumah Kaca	Persen	100,00	81,90	81,90	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Keterangan:

** : data belum rilis

* : data capaian tahun sebelumnya

Terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, dari 23 (dua puluh tiga) IKU terdapat 18 (delapan) indikator yang mencapai dan/atau melampaui target, selanjutnya 13 (tiga belas) indikator yang belum mencapai target, 1 (satu) indikator yang tidak dapat dihitung karena perbedaan antara target yaitu daya beli, dan terakhir 1 (satu) indikator tidak ada rilis dalam 3 tahun terakhir yaitu Nilai indeks keuangan inklusif.

Pencapaian indikator pada Misi pertama ditunjukkan dengan ketercapaian Nilai IKM, Nilai Reformasi Birokrasi, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada capaian SAKIP Perangkat Daerah ini masih menunjukkan nilai BB ditahun 2020 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan upaya Perangkat daerah untuk terus meningkatkan nilai SAKIP yang dievaluasi secara internal oleh inspektorat. Capaian Nilai Reformasi Birokrasi banten sebesar 61 kategori B (baik) pada tahun 2020, menunjukkan tingkat capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami kemajuan dibanding awal tahun 2018 yang saat itu masih pada kategori C, kedua komponen indikator ini memang diperlukan

kerja keras oleh seluruh ASN karena Pemerintah Provinsi Banten menargetkan A (sangat baik) pada tahun 2022. Adapun permasalahannya adalah pada area reform terutama area manajemen SDM dan Pengawasan masih belum mencapai nilai maksimal dan area hasil pada nilai Indeks Pelayanan Publik, SAKIP dan Persepsi korupsi yang masih belum mencapai nilai optimal dari target kinerja yang ditetapkan, sehingga hasil penilaian Reformasi Birokrasi belum tercapai secara signifikan.

Pencapaian indikator pada Misi II ditunjukkan oleh ketercapaian kinerja infrastruktur daerah dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah ini merupakan Realisasi kinerja infrastruktur pada tahun 2021 dibandingkan target tahunannya dimana realisasinya mencapai 90%. Kedua, Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur. Capaian kinerja infrastruktur daerah realisasinya mencapai 100%, beberapa kendala ini dikarenakan tidak terealisasinya Sumber Pendanaan dari PT SMI yang rencana awalnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Pencapaian indikator pada Misi Ketiga ditunjukkan oleh ketercapaian 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yakni indeks Pembangunan Manusia, indeks gini, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Daya Beli dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kesatu capaian IPM tercatat sebesar 72,72 yang menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya. Kedua, Indeks gini yang mencapai 0,363 di tahun 2021 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,365. Ketiga Angka Kemiskinan tercatat sebesar 6,5 menunjukkan trend kenaikan sebesar 0,6% dibanding tahun sebelumnya, kenaikan ini diakibatkan dari dampak pandemic covid yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, sebenarnya angka kemiskinan di Provinsi banten pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan trend menurun, di tahun 2019 angka kemiskinan tercatat 5,09 hingga di tahun 2021 melonjak di angka 6,5. Keempat, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada September 2021 sebesar 8,98 menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,64, kondisi ini dimaknai selain memag TPT di Provinsi Banten

menunjukkan masalah daerah yang paling krusial namun dampak covid 19 ikut mempengaruhi signifikan terkait naiknya angka pengangguran. Kelima, harapan lama sekolah (HLS) tercatat mencapai 13,02 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 14,05 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Keenam, capaian RLS tercatat mencapai 8,93 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 9,1 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Ketujuh, capaian IPG tercatat sebesar 91,67 poin pada tahun 2020. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedelapan, daya beli menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih cukup tinggi sebesar. Kesembilan, capaian TPAK tercatat sebesar 63,79 dimana menunjukkan partisipasi Angkatan kerja dibandingkan dengan Jumlah penduduk pada usia kerja.

Pencapaian indikator pada Misi Keempat ditopang oleh 3 (tiga) indikator yaitu berupa Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup). Kesatu capaian Angka Harapan Hidup tercatat 70,02 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 70,06. Angka harapan hidup menggambarkan usia hidup rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Kedua, Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup), tercatat 82,04 menunjukkan kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak melahirkan, jika dibandingkan dengan target RPJMD 290 maka sudah sangat melampaui target. Ketiga, Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) mencapai angka 4,8 dibandingkan target sebesar 28. Kondisi ini dimaknai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 2,66

menunjukkan trend meningkat yang berarti semakin banyaknya kematian bayi pada tahun 2021.

Pencapaian indikator pada Misi Kelima ditunjukkan oleh (6 enam) indikator yaitu LPE, Inflasi, Laju pertumbuhan Ekonomi Sector Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi, Emisi Rumah Kaca. Kesatu capai Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar 4,44 di tahun 2021 dibanding target RPJMD sebesar 5,95 capaian ini masih belum melampaui target yang diharapkan. Kedua Laju pertumbuhan ekonomi sector unggulan tercatat 8,06, sector unggulan Provinsi Banten terdiri dari LPE sector Industri pengolahan, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat -3,38 maka telah terjadi perbaikan signifikan dalam pertumbuhan LPE sector unggulan di Provinsi Banten. Ketiga, Indeks keuangan Inklusif tercatat 84,29 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan tidak ada rilis lanjutan setelahnya. Keempat, Peringkat daya saing tercatat berada di peringkat 5 besar, dengan tahun sebelumnya di peringkat 6 besar, melihat hal tersebut menunjukkan semakin baiknya peringkat daya saing Provinsi Banten dimana tiap tahun telah mencapai target sesuai yang diharapkan. Keenam, emisi rumah kaca merupakan target yang ada setelah RPJMD Perubahan tercatat, Emisi Rumah kaca tahun 2021 tercatat sebesar 81,9.

Tabel 2. 152
Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2021

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
BAPPEDA	Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	80	70,83	88,54
		Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	A (80-90)	65,8	82,35
	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	100	100	100

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	75	75	100
BPKAD	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP*	100
BAPPENDA	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	63,19	62,69	99,21
BKD	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	90	81,52	90,5
BPSDM	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	25	24,69*	98
BADAN PENGHUBUNG	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung	100	90	90
INSPEKTORAT	Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	4	3	100
		Capaian Kapabilitas APIP	3	3	100
SEKRETARIAT DPRD	Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	100	100	100
BADAN KESBANGPOL	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	78	78	100
		Penanganan konflik masyarakat	100	100	100
SATUAN POL-PP	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan daerah	80	80	100
BPBD	Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	115	149,08	74

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
DP3AKKB	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	100	100	100
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	95	100	105,26
BIRO PEMKESRA	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	100	100	100
		Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (LPPD)	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100
BIRO ORGANISASI DAN RB	Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	100	100	100
BIRO UMUM	Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	100	100	100
BIRO ADPEM DAN PEREKONOMIAN	Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	100	100	100
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	100	100	100
Misi 2 : Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur					
DINAS PUPR	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	100	98,00	98
		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap. Satuan (%)	95,9	93,6	97,6

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi. Satuan (%)	37,09	27,28	73,5
		Luasan layanan irigasi. Satuan (Ha)	19.387,46	16.441,00	84,8
		Persentase penyediaan prasarana air baku (%)	100	85,46	85,46
DINAS PRKP	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (hektar)	333,3	292,04	87,62
		Persentase Rumah Layak Huni	87,5	70,71	80,81
		cakupan penyediaan pengelolaan sampah	20	10	50
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis provinsi	88	88	100
DINAS PERHUBUNGAN	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	100	98,33	98,33
	Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	20	19,99	99,95
DINAS ENERGI, SUMBERDAYA MINERAL	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	100	97,41	97
	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	0,63	0,63*	100
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,9	3,15	80,76

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Komunikasi yang Memadai					
Misi 3 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas					
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Murni(APM) Sekolah Menengah. Satuan (%)	63,44	62,89	99,13
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah. Satuan (%)	78,22	84,33	107
		Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Satuan (%)	100	93,4	93,4
	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah. Satuan (%)	100	100	100
DP3AKKB	Meningkatnya Pengarustamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94	72,75	101,13
	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	77,27	100	129,42
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks minat baca masyarakat	45	58,77	130,60
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	40	49,17	122,93
		Indeks Pembangunan Olahraga	40	40	100
DINAS SOSIAL	Menurunnya PMKS	presentase penanganan jumlah PMKS	2,68	2,68	100
Misi 4 : Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas					
DINAS KESEHATAN	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	232	194	119
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	1.134	1.157	98
	Meningkatkan Jaminan Kesehatan	Persentase penduduk yang	100	100	100

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	memiliki Jaminan Kesehatan			
	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Banten	75	76,4	101,87
		BOR (Bed Occupancy Ratio) RSUD Malingping	70	70,88	101,26
DP3AKKB	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,23	2,23	100
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi					
DINAS PMPTSP	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA+ PMDN)	51,30	45,60	88,89
		Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	85,72	89,40	104,29
DINAS KOPERASI DAN UMKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	6	6	100
	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	1	1	100
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	4,8	2,5*	52
DINAS PARIWISATA	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	3,04	2,94*	96,71
DINAS PERTANIAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	6	6	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	4,45	4,9*	110,11
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan	LPE Sektor Perdagangan	6,4	0,89*	13,91

PERANGKAT DAERAH	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Inflasi yang terkendali				
		Tingkat Inflasi Bahan Pokok	4	2,43	164
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	5,72	5,28	92,38
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	45	41,9	93,11
DINAS KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	84,5	73,48*	86,95
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,83	62,73	121
	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	32,71	45,99	140
DINAS PEMDES	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	33,33	33,33	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel 2. 153
Hasil Evaluasi SDG's Tahun 2021 (Persen)

NO	INDIKATOR CAPAIAN	PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL (TUJUAN 1,2,3,4,5)	PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI (TUJUAN 7, 8, 9, 10,17)	PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN (TUJUAN 6, 11, 12, 13, 14, 15)	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA (TUJUAN 16)
1	Indikator Tercapai	18,4%	7,6%	12,3%	1,08%
2	Indikator Akan Tercapai	9,4%	11,5%	7,6%	9,05%
3	Indikator Belum Tercapai	8,3%	3,2%	2,5%	1,8%

Total Indikator dapat di hitung secara keseluruhan (257 Indikator), dimana dari hasil penghitungan tersebut sebesar 39,5%

atau 109 indikator tercapai, 37,7% atau 104 indikator akan tercapai dan 15,9% atau 44 indikator belum tercapai dan perlu perhatian khusus.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Melalui analisis permasalahan pembangunan, akan dapat ditemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh suatu wilayah sebagai bahan untuk kemudian mendalami pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021, di masa pandemi COVID-19, membawa beberapa konsekuensi yang mengandung resiko. Di satu sisi, kewajiban untuk menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan supaya wabah ini tidak semakin parah dan meluas, namun di sisi lain terdapat tuntutan agar aktivitas perekonomian, pendidikan dan pariwisata tetap harus

berjalan dan di tahun 2023 diharapkan semua kondisi dapat pulih seperti sedia kala sehingga perencanaan pembangunan di tahun 2023 adalah Langkah antisipasi dan Langkah perencanaan untuk adaptasi pada era endemik. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan di Banten sebagai dasar pijakan dalam perencanaan ke depan, yang terangkum sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan yang disebabkan oleh:
 - a) Masih rendahnya daya beli masyarakat setelah adanya Pandemi Covid19;
 - b) Kontribusi sektor unggulan masih belum maksimal di tingkatkan yaitu pada sektor Pariwisata, pertanian, Industri dan Perdagangan;
 - c) Investasi yang belum merata;
 - d) Ketersediaan infrastruktur yang belum merata.
2. Belum Optimalnya Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia yang disebabkan oleh :
 - a) Disparitas IPM antar wilayah;
 - b) Jumlah pengangguran dengan kontribusi lulusan SMK masih banyak ;
 - c) Kualitas pendidikan belum merata;
 - d) Kualitas pelayanan kesehatan belum merata.
3. Belum optimalnya penguatan pada aspek Lingkungan Hidup dan Penanganan kebencanaan disebabkan oleh:
 - a) Masih rendahnya aksi pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup air, udara dan tutupan lahan;
 - b) Kurangnya kapasitas kebencanaan.
4. Belum optimalnya agenda reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan, yang disebabkan oleh:
 - a) Masih kurangnya penguatan pada 8 area Implementasi reformasi Birokrasi;
 - b) masih belum optimalnya penguatan stabilitas keamanan di wilayah Banten.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan utama pada Pendidikan adalah:

- Layanan Pendidikan masih terkendala pada angka rasio murid-guru yang belum ideal untuk jenjang pendidikan SMK karena melebihi batas ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio jumlah peserta didik terhadap guru di jenjang SMK adalah 15:1 dimana seorang guru seharusnya mengajar 15 murid. Rasio murid-guru yang rendah dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih kondusif, guru pun dapat memberi perhatian dan pengawasan kepada siswa dengan mudah.
- Masih terkendala pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun di Provinsi Banten masih di bawah rata-rata APS nasional yang menandakan bahwa masih terdapat banyak penduduk yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan terutama pada pendidikan sekolah menengah. Selain itu, Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Banten belum mencapai target standar wajib belajar 12 tahun. Pandemi Covid-19 juga dianggap menjadi salah satu penyebab menurunnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Perguruan Tinggi di Provinsi Banten. Kondisi ini tentu perlu diantisipasi Pemerintah Daerah dengan memberikan perhatian untuk dapat meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi serta menjaga tingkat keberlanjutan studi.
- Persentase guru bersertifikat untuk sekolah SMA, SMK dan SKH belum memenuhi target, dan capaiannya tidak menyentuh 50 persen.

b. Kesehatan

Permasalahan utama pada urusan Kesehatan adalah:

- Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) juga menandakan masih rendahnya status kesehatan masyarakat;
- Prevalensi stunting di Provinsi Banten juga belum mencapai target. Selain itu, persentase penduduk yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang mudah diakses belum mencapai 100% (target);

- Permasalahan persentase penduduk Banten yang sudah divaksin dosis 1 baru 36,71% sedangkan yang sudah divaksin dosis 2 baru mencapai 20,96% per September 2021, dimana hal ini masih jauh dari target herd immunity pemerintah yaitu 75%;
- Permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah belum meratanya sumber daya kesehatan baik dilihat dari sumber daya manusia tenaga kesehatan ataupun sarana fasilitas kesehatan. Keterlibatan peran swasta dalam pemenuhan dua hal tersebut menjadi faktor penting yang harus dilakukan sehingga akselerasi peningkatan angka harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud;
- Adanya perubahan Kebijakan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan baru disosialisasikan pada bulan April 2019 juga menjadi salah satu isu di bidang kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun strategi untuk melaksanakan pelayanan mengikuti peraturan SPM yang terbaru.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pada urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah;

- Proporsi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang memenuhi kualifikasi kondisi mantap belum mencapai 100 persen (data 2021). Sampai dengan tahun 2021, dari total 761,53 km Jalan Provinsi sepanjang 588,44 km dalam kondisi baik (79 persen), kemudian 120,99 km dalam kondisi sedang (16 persen), 15,83 km dalam kondisi rusak ringan (2 persen) dan 26,27 km dalam kondisi rusak berat selain itu, adanya rencana pelimpahan ruas jalan kewenangan kabupaten/kota yang ingin dialihkan statusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- Penatagunaan sumber daya air yang baru mencapai 75 persen serta belum optimalnya ketersediaan sarana irigasi yang dapat menjamin kebutuhan air bagi usaha pertanian sawah di Provinsi. Kecukupan pemenuhan kebutuhan air bagi usaha pertanian sawah perlu diarahkan pada sistem penyediaan air yang memiliki

ketahanan akan kondisi musim yang ada baik kemarau maupun penghujan;

- Pemenuhan SPM di bidang ini belum mencapai seratus persen. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengupayakan peningkatan cakupan Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:
 - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman antara lain:

- Pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami penurunan (di bawah rata-rata nasional) dimana di tahun-tahun sebelumnya selalu di atas rata-rata nasional.
- Belum optimalnya program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk pengentasan kawasan kumuh.

SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan urusan ini perlu memperhatikan dokumen mitigasi bencana serta rencana pembangunan yang memerlukan realokasi tempat tinggal masyarakat.

e. Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang

harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- Standar operasional prosedur Satpol PP;
- Standar sarana prasarana Satpol PP;
- Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Permasalahan selanjutnya terkait dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dimana pada tahun 2020, IDI Provinsi Banten, aspek hal-hal politik menjadi yang terendah yaitu 66,18 dibandingkan dengan aspek lainnya. Aspek lembaga demokrasi juga mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2020 menjadi 76,55. Perlu adanya peran pemerintah untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi agar IDI Provinsi Banten di setiap aspek terus meningkat dan hak-hak masyarakat dalam hal politik semakin terjamin.

Bencana daerah merupakan bagian dari urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain;

- Masih belum optimalnya kebijakan kebencanaan daerah
- SOP kebencanaan masih belum semua dibuat dan dilaksanakan
- Data kebencanaan yang masih belum optimal

f. Sosial

- Permasalahan utama terkait bidang sosial yaitu masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) rumah tangga miskin (>600.000 KK) dan anak terlantar (>97.000 jiwa) di Provinsi Banten.
- Isu lainnya yaitu cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial belum mencapai target. Cakupan PSKS yang meningkat partisipasi sosialnya juga baru terealisasi 15,71 persen. Belum

tercapainya target PMKS dan PSKS ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi COVID-19.

- Validitas data masyarakat miskin dalam program bantuan sosial JAMSOSRATU untuk warga Banten dan penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH)
- Permasalahan lainnya di Bidang Sosial adalah upaya pemenuhan kecukupan SPM Sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten jenis pelayanan SPM yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi adalah:
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
 - Berdasarkan rujukan tersebut, maka permasalahan di bidang sosial yang harus mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Banten adalah upaya pemenuhan sarana dan prasarana panti sosial dalam bentuk kuantitas dan kualitas mutu pelayanan. Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya mitigasi bencana di daerah sehingga upaya pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sosial dapat dilakukan secara optimal.

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan utama pada urusan Tenaga Kerja terutama pada tahun 2021 adalah:

- Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian relatif terhadap jumlah penduduk Banten

secara keseluruhan masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata pasokan nasional.

- Masih belum optimalnya penciptaan kewirausahaan baru
- Belum optimalnya Kerjasama antara pelaku usaha, Akademisi dan pihak lain terkait
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja
- Belum optimalnya BLKI Provinsi Banten

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terkait upaya pembangunan gender di Provinsi Banten telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik. Selain itu, belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga ditandai dengan masih terdapat PMKS anak terlantar pada tahun 2020 sebanyak 97.416 orang dimana hal ini kemudian membutuhkan upaya optimalisasi pengelolaan sistem data gender dan anak.

c. Pangan

Permasalahan utama pada urusan Pangan adalah masih rendahnya ketersediaan pangan strategis dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan dimana hal ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan dengan beberapa rincian permasalahan sebagai berikut:

- Rata-rata konsumsi kalori penduduk di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, namun untuk konsumsi protein terjadi sebaliknya;
- Kurang memadainya sarana dan prasarana UPTD sertifikasi mutu dan keamanan pangan;
- Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan.

d. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pada urusan Lingkungan Hidup adalah:

- kondisi lingkungan hidup yang belum baik dan masih rendahnya kualitas air, udara dan air laut
- belum optimalnya pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah.

- Masih banyaknya pencemaran Daerah Air sungai
- Belum optimalnya pengendalian lingkungan dan penegakan hukum

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimana pelayanan kependudukan yang berbasis teknologi dan informasi masih perlu ditingkatkan.

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pelayanan Pemerintah Provinsi ke Masyarakat Desa masih belum optimal ditandai dengan masih terdapat 227 Desa Tertinggal dan 8 Desa Sangat Tertinggal. Selain itu pemerataan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan desa juga masih belum optimal.

Ketertinggalan pembangunan desa di wilayah Provinsi Banten dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya juga dapat dilihat dari capaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data IDM tahun 2021 yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, nilai IDM Provinsi Banten hanya mencapai 0,645 dan menempati peringkat ke 23 dari 33 provinsi di Indonesia (Keterangan; DKI Jakarta tidak dihitung karena tidak memiliki desa). Peringkat tersebut mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yakni peringkat 22 di tahun 2020. Kondisi ini tentu harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan akselerasi pembangunan desa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka kelahiran dimana belum optimalnya pengendalian penduduk dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan beberapa permasalahan antara lain:

- Angka Kelahiran Total (TFR) Provinsi Banten masih di atas 2 (dua), angka ini lebih tinggi jika dibandingkan Jawa Timur yang sudah mencapai angka 1 (satu);
- Adanya penurunan persentase pemakaian kontrasepsi modern dan kenaikan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 2018- 2020;
- Pembangunan berwawasan kependudukan belum menjadi arus utama pembangunan daerah;
- Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) masih rendah;
- Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi (kesadaran masyarakat yang masih rendah);
- Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Ratio) masih tinggi;
- Tingkat putus pakai (DO) pemakaian kontrasepsi masih tinggi; dan
- Pengembangan kampung KB yang belum optimal.

h. Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan jasa perhubungan, kinerja pelayanan angkutan umum dan sistem keselamatan serta kelancaran transportasi antara lain:

- Penataan jaringan pelayanan angkutan umum yang belum optimal;
- Masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum terpenuhinya standar perlengkapan jalan;
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan dan penyelenggaraan perhubungan; dan
- Perubahan regulasi terkait kewenangan.

i. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah dimana kinerja pelayanan publik belum optimal yang ditandai dengan belum optimalnya capaian SPBE dan belum optimalnya pelayanan informasi publik yang terinformasikan ke masyarakat antara lain:

- Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;

- Belum optimalnya Penerapan Manajemen SPBE;
- Infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi belum memadai;
- Belum optimalnya penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas;
- Rendahnya SDM di bidang informasi dan komunikasi publik;

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utama pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

- Koperasi aktif di beberapa Kabupaten/Kota di Banten hanya mencapai 50 persen pada tahun 2018;
- Perlunya meningkatkan upaya pendataan UMKM sebagai dasar kebijakan;
- Kurangnya upaya pemerintah dalam memwadahi dukungan untuk UMKM (pelatihan peningkatan keahlian, memperluas supply produk, membantu dalam kesempatan ekspor);
- Kurangnya bantuan dalam integrasi ekonomi digital untuk membantu UMKM;
- Kurangnya promosi mengenai UMKM;
- Upah tenaga kerja yang dinilai terlalu tinggi;
- Pengelolaan sistem teknologi informasi di PTSP yang masih belum optimal; dan
- Kegiatan pelatihan, pembinaan dan pameran untuk UKM belum tepat sasaran dan efektif.

k. Penanaman Modal

Permasalahan utama pada urusan Penanaman Modal adalah belum optimalnya peningkatan realisasi penanaman modal dan kemudahan berusaha antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Ketimpangan sebaran penanaman modal (terkonsentrasi di Banten Utara);
- Penanaman modal didominasi oleh investasi padat modal;
- Belum tersedianya Investment Project Ready to Offer (IPRO);
- Belum optimalnya strategi promosi dan branding penanaman modal;
- Rendahnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- Rendahnya pengawasan kepada pelaku usaha;

- Masih adanya tumpang tindih kewenangan perizinan;
- Sistem perizinan yang mudah perlu untuk terus dikembangkan;
- Promosi investasi yang belum efektif; dan
- Belum optimalnya pelayanan perizinan.

l. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pada urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah belum optimalnya pelayanan kepemudaan, masih rendahnya pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan kualitas sarana prasarana keolahragaan, masih kurangnya lembaga olahraga dan standarisasi yang mengikuti POPNAS dan masih kurangnya pembinaan dan pelatihan olahraga antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Belum optimalnya peningkatan kapasitas daya saing pemuda;
- Belum berkualitasnya perencanaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- Belum optimalnya advokasi terhadap pemuda;
- Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan;
- Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan olahraga;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana keolahragaan;
- Kurangnya event kejuaraan olahraga;
- Masih rendahnya prestasi olahraga;
- Belum seluruhnya lembaga olahraga yang terstandarisasi serta pengembangan dan kerjasama organisasi keolahragaan;
- Masih kurangnya SDM Olahraga berkualitas.

m. Statistik

Permasalahan utama pada urusan statistik adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral serta pencatatan data statistik daerah yang terintegrasi serta dukungan ketersediaan SDM statistisi yang belum tersedia.

n. Persandian

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum optimalnya sarana dan prasarana persandian serta belum optimalnya cakupan pengelolaan persandian, keamanan informasi dan keterbatasan infrastruktur dan SDM pemerintah yang dapat memanfaatkan persandian.

o. Kebudayaan

Permasalahan utama pada bidang Kebudayaan adalah masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan antara lain:

- Belum optimalnya pengembangan kebudayaan di daerah;
- Masih belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan kebudayaan;
- Belum optimalnya pengembangan cagar budaya dan museum;
- Belum optimalnya usaha pelestarian arsip nilai budaya dan sejarah;
- Belum optimalnya pelayanan museum dan pemberdayaan masyarakat adat.

p. Perpustakaan

Permasalahan utama pada bidang perpustakaan adalah belum optimalnya nilai kegemaran membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat dimana Provinsi Banten ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Angka ini masih perlu ditingkatkan.

q. Kearsipan

Permasalahan utama pada urusan Kearsipan adalah belum optimalnya peningkatan ketersediaan, keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban yang disebabkan antara lain:

- Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis provinsi;
- Belum optimalnya pengelolaan arsip statis daerah provinsi;
- Belum optimalnya pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi;
- Belum optimalnya autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
- Persentase pengelolaan arsip OPD sesuai standar masih belum optimal;
- Belum optimalnya fungsi arsiparis; dan
- Kebutuhan penggunaan aplikasi TIK dalam dokumentasi arsip daerah.

2.3.2.3 Urusan Pilihan

a. Pariwisata

Permasalahan utama pada urusan pariwisata adalah belum optimalnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif yang disebabkan antara lain oleh:

- Terbatasnya perkembangan destinasi wisata;
- Rendahnya daya saing destinasi wisata;
- Rendahnya daya saing produk ekonomi kreatif;
- Rendahnya kompetensi SDM pariwisata dan ekraf;
- Rendahnya kunjungan wisatawan;
- Belum optimalnya sosialisasi dan promosi tentang pariwisata di Provinsi Banten. Apalagi di tengah terjadinya pandemi COVID-19 membuat kegiatan pariwisata terpaksa berhenti untuk sementara waktu. Promosi akan sangat diperlukan untuk upaya bangkit kembali;
- Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana wisata Anyer;
- Belum optimalnya penataan destinasi wisata milik Provinsi Banten;
- Belum optimalnya peningkatan ekonomi kreatif;
- Kurangnya pelaku pariwisata dan ekraf yang memiliki sertifikat tingkat lanjut.

b. Pertanian

Permasalahan utama pada urusan Pertanian adalah belum optimalnya PDRB Sektor Unggulan (Pertanian) yang antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya produksi pertanian;
- Terbatasnya pengembangan pertanian di daerah perkotaan;
- Ketahanan pangan di perkotaan masih perlu ditingkatkan;
- Kurangnya ketersediaan air, benih padi bermutu, sistem tanam modern dan penggunaan pupuk yang sesuai di beberapa kabupaten;
- Sarpras penunjang kawasan pertanian belum memadai;
- Alih fungsi lahan pertanian;
- Belum optimalnya pengelolaan pasca panen/off farm produktif; dan
- Menurunnya jumlah populasi ternak besar.

c. Kehutanan

Permasalahan utama pada urusan kehutanan adalah masih rendahnya kualitas tutupan hutan serta pemanfaatan sumberdaya hutan yang disebabkan oleh antara lain :

- Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi;
- Belum optimalnya perencanaan, penyediaan data serta koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu diluar kawasan hutan;
- Penurunan tutupan lahan dan hutan;
- Masih luasnya lahan kritis;
- Terbatasnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan dan produktif bagi masyarakat;
- Belum optimalnya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi; dan
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan penguatan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan;
- Belum optimalnya penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial;
- Belum optimalnya rencana, fungsi daya dukung DAS dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- Belum optimalnya penanganan catchment area.

d. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan utama pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah belum optimalnya ketersediaan pelayanan dan pengendalian berbagai aspek di sektor energi dan sumber daya mineral antara lain:

- Belum optimalnya ketersediaan pelayanan informasi untuk pengembangan geowisata (geopark dan geodiversity) Banten dan pengendalian air tanah di CAT kewenangan Provinsi (CAT Malingping, Labuan dan Rawa Dano) dan batubara;
- Belum optimalnya pengendalian teknis kebencanaan geologi, pengembangan geowisata dan penggunaan air di CAT kewenangan Propinsi (CAT Malingping, Labuan dan Rawa Dano);

- Belum optimalnya pelayanan rekomendasi teknis (REKOMTEK) pada sumber daya mineral kewenangan provinsi;
- Masih adanya 85.313 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Banten yang belum memiliki akses terhadap energi listrik (mayoritas terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak);
- Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energy baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil;

e. Perdagangan

Permasalahan utama pada urusan perdagangan adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya daya saing komoditi, produk, perdagangan, daerah;
- Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional;
- Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga;
- Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar;
- Kurangnya pemasaran bagi produk Industri Kecil dan Menengah;
- Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemi COVID-19;
- Belum berjalannya Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan Provinsi;
- Kurang terbinanya pelaku ekspor dari calon eksportir menjadi eksportir; dan
- Belum optimalnya pengembangan UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

f. Perindustrian

Permasalahan utama pada urusan perindustrian adalah belum optimalnya pertumbuhan sektor industri disebabkan antara lain oleh:

- Pertumbuhan dan daya saing industri yang belum optimal;
- Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah;
- Perlunya peningkatan dukungan terhadap peranan industri kreatif dan industri kecil dan menengah (IKM) dalam sektor perekonomian;

- Masih terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar;
- Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan;
- Kondisi pandemi COVID-19 juga mengganggu jalannya kegiatan perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan meningkatnya fenomena Putus Hubungan Kerja (PHK);
- Belum optimalnya perencanaan pembangunan industri provinsi;
- Okupansi kawasan yang tidak merata;
- Belum terintegrasinya antara industri hulu dengan hilir; dan
- Minimnya SDM yang memiliki kompetensi.

g. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pada urusan kelautan dan perikanan adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh:

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para nelayan masih menggunakan sistem produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional;
- Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal;
- Laju pertumbuhan sektor perikanan di Provinsi Banten masih belum mencapai target;
- Sarpras pelabuhan belum memenuhi standar pokok dan fungsional;
- Minimnya sarana dan prasarana UPTD Penetapan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (PPHMP); dan
- Belum optimalnya UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PPBAPL).

2.3.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Perencanaan

Permasalahan utama pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
- Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal;
- Pemerintah Provinsi Banten perlu menerapkan e-government dan SIPD yang terintegrasi;
- Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui anggaran berbasis kinerja perlu ditingkatkan;
- Perencanaan kinerja Perangkat Daerah masih belum efektif dikarenakan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya komponen pengukuran kinerja disebabkan kurang efektifnya koordinasi perencanaan dengan Bappeda Kabupaten/Kota, keselarasan antar Kementerian dan kebijakan Kementerian yang kurang konsisten serta kurangnya SDM terhadap urusan perencanaan;
- Tingkat ketersediaan data dan kepatuhan penyerahan data.

b. Keuangan

Permasalahan utama pada urusan keuangan adalah belum optimalnya pendapatan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rendahnya optimasi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Belum optimalnya ketercapaian pendapatan lain-lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak; dan
- Belum optimalnya manajemen aset daerah.

c. Kepegawaian

Permasalahan utama pada urusan kepegawaian adalah pelaksanaan manajemen ASN belum optimal antara lain disebabkan oleh:

- Kualitas ASN yang perlu ditingkatkan dapat dilihat dari persentase ASN yang profesional yang masih kurang; dan
- Kualitas pelaksanaan Manajemen ASN perlu ditingkatkan.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan utama pada urusan pendidikan dan pelatihan adalah adanya kesenjangan kompetensi ASN antara kondisi saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain disebabkan oleh:

- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang teknis umum, substantif dan pemerintahan;
- Belum optimalnya kompetensi ASN dalam bidang kompetensi dasar, kepemimpinan, manajemen dan kompetensi fungsional;
- Belum optimalnya penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pengendalian mutu serta penunjang kediklatan; dan
- Belum tersedianya analisis kebutuhan diklat jabatan dan fungsional.

e. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan utama pada urusan penelitian dan pengembangan adalah kebijakan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya didasari hasil penelitian kemudian, belum optimalnya penerapan inovasi pada perangkat daerah antara lain disebabkan oleh:

- Rencana kerja litbang yang belum tuntas;
- Kurangnya komitmen OPD dalam berinovasi;
- Kebutuhan akan pengembangan triple helix dengan pihak swasta dan universitas; dan
- Kebutuhan koordinasi dengan BRIN.

2.3.2.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Masih belum Optimalnya Pengimplementasian SAKIP Daerah, dimana kurangnya koordinasi dan tindaklanjut hasil SAKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB belum sepenuhnya dijalankan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Pemberlakuan atas UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih harus ditindaklanjuti dengan pendataan dan pengkajian terhadap produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah) yang terdampak. Kemudian atas tindaklanjut tersebut dilakukan penyederhanaan produk hukum daerah.

Dalam menjalankan Kerjasama daerah pemerintah Provinsi Banten belum maksimal dilakukan hanya sebatas Kerjasama dalam negeri saja. Rumusan bahan kebijakan yang dihasilkan dari beberapa kajian, koordinasi, dan harmonisasi pada tahun sebelumnya tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan paket kebijakan berupa peraturan daerah, peraturan Gubernur, atau berbagai pedoman yang dibutuhkan pada bidang terkait. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan peta permasalahan, isu strategis, serta skala prioritas daerah, sehingga konstelasi permasalahan dan agenda kebijakan yang semula dijadikan pijakan sudah tidak relevan.

Optimailsasi kinerja BUMD yang dimiliki Pemprov Banten masih belum maksimal dan ini perlu kolaborasi antara Biro ekonomi dan Administrasi pembangunan dengan BUMD.

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan pada Sekretariat DPRD adalah masih belum optimalnya fasilitasi dukungan peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.2.6 Unsur Pengawasan

Permasalahan utama pada urusan pengawasan adalah belum optimalnya maturitas SPIP dan belum optimalnya pencegahan korupsi disebabkan antara lain oleh:

- Belum optimalnya pelaksanaan audit, reviu, pendampingan monitoring dan tindak lanjut;
- Masih rendahnya tingkat penyelesaian kerugian negara;
- Belum terimplementasikannya Zona Integritas (ZI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Unit Kerja yang bersentuhan dengan pelayanan publik;
- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan serta objek lainnya); dan
- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai.

2.3.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan pada Badan Kesatuan bangsa dan politik adalah masih kurangnya Kegiatan dalam mendukung IDI pada tingkat capaian Aspek Kebebasan belum dilaksanakan secara optimal dari angka capaian Aspek Kebebasan di Provinsi Banten yaitu sebesar 74,28 poin, lebih rendah dari angka capaian Aspek Kebebasan Nasional yaitu sebesar 80,30 poin; Kegiatan dalam mendukung tingkat capaian Aspek Kesetaraan juga belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan dilihat dari angka capaian Aspek Kesetaraan di Provinsi Banten yaitu sebesar 63,72 poin.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan kondisi terkini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi di Banten tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dimana setelah mengalami kontraksi cukup dalam -3,38 di tahun 2020 saat ini Laju pertumbuhan ekonomi banten tercatat 4,4. Beberapa isu harus diselesaikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten utamanya perlu menciptakan iklim usaha industri yang kondusif untuk mereka tetap menjadikan Banten sebagai wilayah investasi. Sebelum pandemi, terdapat indikasi hilangnya daya saing Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir.

Tak lupa pula akan fokus dan dukungan pemerintah lebih serius terhadap sektor unggulan lain seperti pertanian, perikanan dan perdagangan khususnya Usaha kecil menengah untuk turut menjadi perhatian dalam rangka peningkatan kontribusi perekonomian di Banten selain dari sektor industri.

Hal lain pula, terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi yang masih berkutat pada wilayah Banten utara karena ketersediaan dan kualitas

infrastruktur penunjang investasi belum merata. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Pemerataan pembangunan perlu diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan layak huni, penataan wilayah kumuh peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal lain adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata.

2. Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Tahun 2021 IPM Banten mengalami peningkatan menjadi 72,75, dibandingkan tahun 2020 sebesar 72,45. Namun demikian terjadi perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Isu strategis lain yang berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

Angka pengangguran di Provinsi Banten masih cukup tinggi sebesar 8,98 walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 10,98 namun kompetensinya masih perlu ditingkatkan terutama pada lulusan SMK. Hal lain juga perlu terobosan lain dengan meningkatkan skill masyarakat bekerja pada aspek non formal misalnya penguatan pada UMKM dan UKM khususnya di wilayah Banten selatan.

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (zero poverty). Angka kemiskinan di Banten sebesar 6.5 persen atau terdapat 852.280 jumlah penduduk miskin. Masih terjadi kesenjangan persentase penduduk miskin antar kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki persentase jumlah penduduk miskin yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten secara keseluruhan.

Kondisi saat ini yang dihadapi penduduk miskin di Banten adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan validasi data kemiskinan yang masih belum sesuai antara kondisi di masyarakat dengan yang tertera di data kemiskinan kementerian Sosial. Adapun fokus di 2023 Pemerintah pusat juga ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, di Banten terdapat 2 daerah tertinggi yang menghadapi kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Tangerang sebesar 106,67ribu dan Kota Tangerang sebesar 34,56ribu, diperlukan juga kolaborasi dan kerja keras dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

3. Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah

berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengolahan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air. Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Pencemaran sungai dan rehabilitasi lahan kritis juga menjadi masalah pada aspek lingkungan saat ini.

4. Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan

Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga menjadi satu kriteria pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Banten akan lebih meningkatkan kinerja dengan mengaktifkan budaya kinerja yang tinggi melalui perbaikan proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kinerja organisasi agar lebih selaras dengan pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja.

Hal lain Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang kompeten, progresif, dan adaptif, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, penerapan sistem merit dan manajemen talenta ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

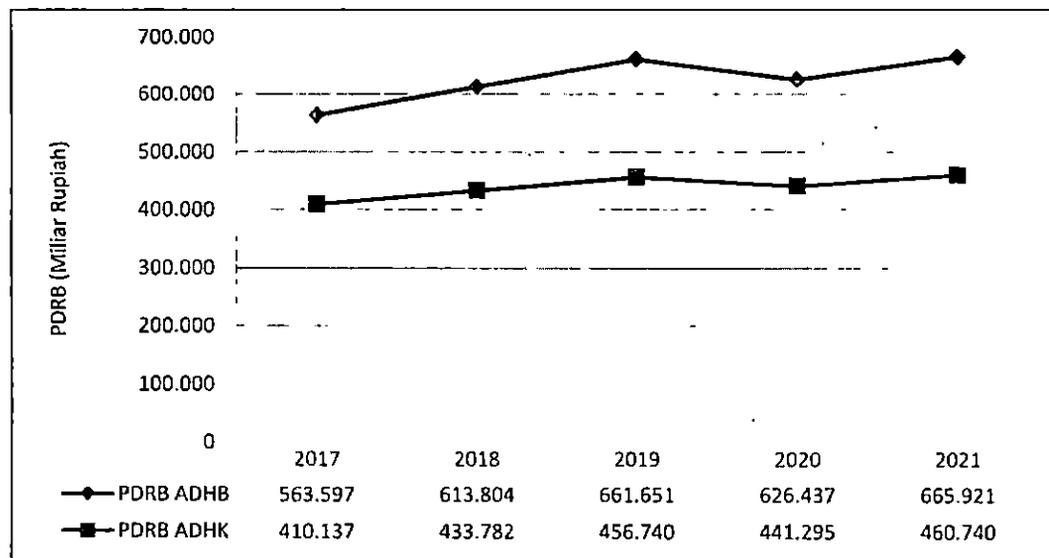
Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi berbagai perkembangan indikator makro pembangunan seperti laju pertumbuhan ekonomi, persentase pengangguran, tingkat kemiskinan penduduk, gini rasio serta Indeks Pembangunan Manusia. Agar langkah kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah Daerah dalam menyikapi perkembangan yang terjadi, maka analisis indikator lainnya seperti Indeks ketimpangan regional (williamsons) dan laju inflasi di masukan sebagai komplementer dalam dokumen perencanaan ini.

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2017-2021

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), perekonomian Banten selalu tumbuh dari tahun ke tahun terkecuali pada tahun 2020 di mana Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Banten tidak tumbuh bahkan mengalami perlambatan atau kontraksi. Kontraksi tersebut berdampak pada dari terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta terhambatnya kegiatan ekspor impor ke berbagai negara tujuan yang menutup arus barang dan jasa. Akan tetapi, tahun 2021 menandai kebangkitan atau *recovery* perekonomian Banten terlihat dari nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 atau meningkat 4,4% dan kembali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%. Momentum ini diharapkan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

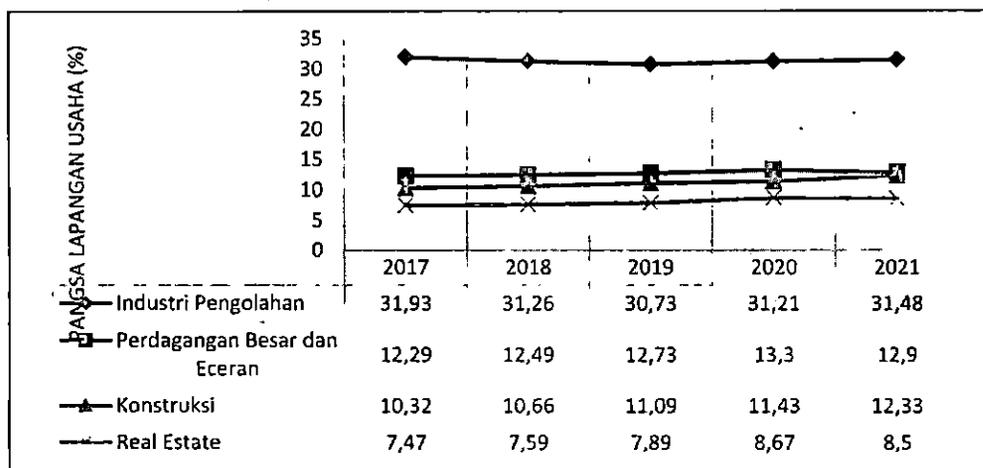
Trend positif pertumbuhan ekonomi akibat penurunan yang signifikan kejadian kasus positif covid-19 serta mulai kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat berlanjut pada periode triwulan I tahun 2022. Menurut rilis BPS Provinsi Banten, Perekonomian Banten yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp177,29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar

Rp119,27 triliun. Ekonomi Banten triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh 4,97 persen.



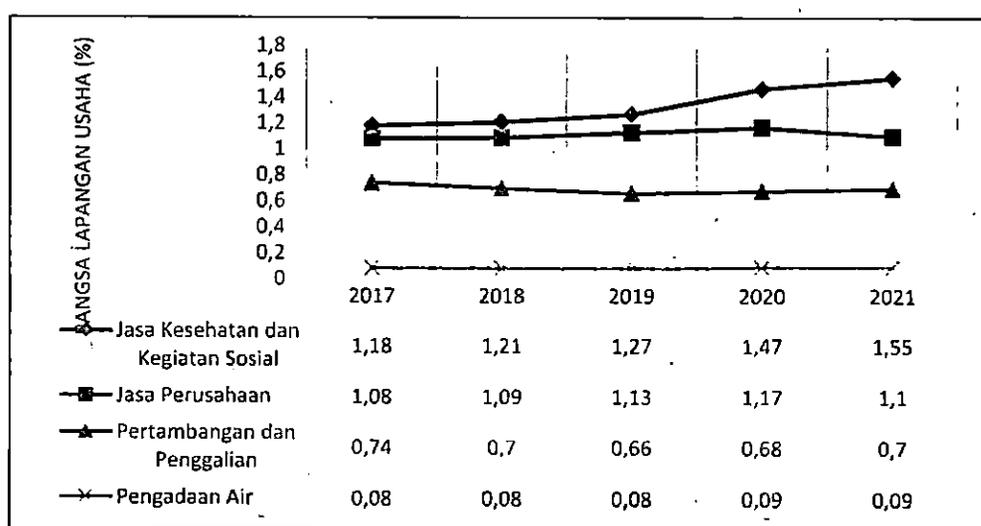
Gambar 3. 1
PDRB ADHB dan ADHK (Miliar Rupiah) , 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Ada empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Banten pada tahun 2021 yaitu industri pengolahan (31,48%), perdagangan (12,9%), konstruksi (12,33%), dan *real estate* (8,5%). Dari tahun ke tahun empat sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Banten. Diharapkan sektor-sektor tersebut dapat terus tumbuh dan meningkatkan perekonomian Banten. Pada tahun 2020, salah satu penyebab dalamnya kontraksi ekonomi di Provinsi Banten salah satunya adalah karena industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Banten terpuak karena industri pengolahan di Banten mayoritas berorientasi ekspor sedangkan di saat yang sama negara-negara tujuan menutup laju barang dan jasa atau pun terbatasnya bahan baku industri yang berasal dari impor.



Gambar 3. 2
Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Banten di Tahun 2021 menurut sektor (%) Tahun 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

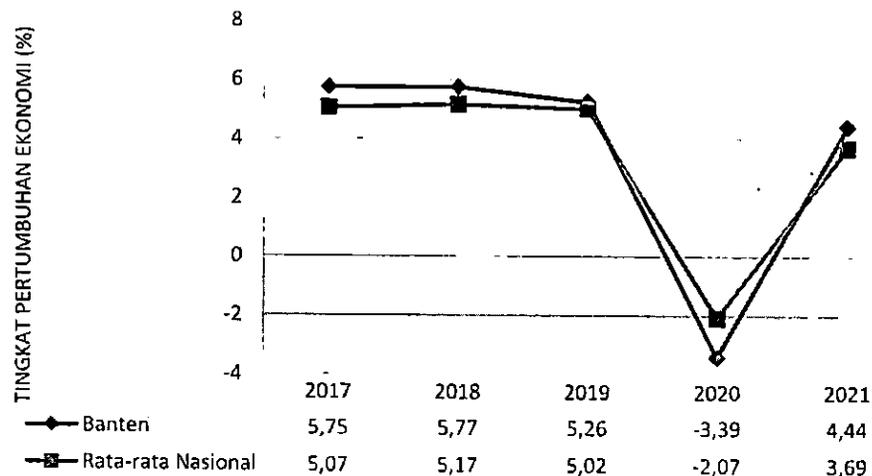
Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah bagi perekonomian Banten pada tahun 2021 yaitu jasa kesehatan (1,55%), jasa perusahaan (1,1%), pertambangan (0,7%) dan pengadaan air (0,09%). Empat sektor tersebut diharapkan kedepannya mampu tumbuh sehingga memiliki kontribusi lebih signifikan bagi perekonomian Banten. Jasa kesehatan mempunyai peluang untuk tumbuh lebih pesat mengingat dampak Pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang yang lebih memberikan perhatian terhadap kesehatan. Selain itu kemajuan teknologi pun memungkinkan adanya berbagai inovasi antara kesehatan dan teknologi.



Gambar 3. 3
Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHB Banten di Tahun 2021 menurut sektor (%), 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

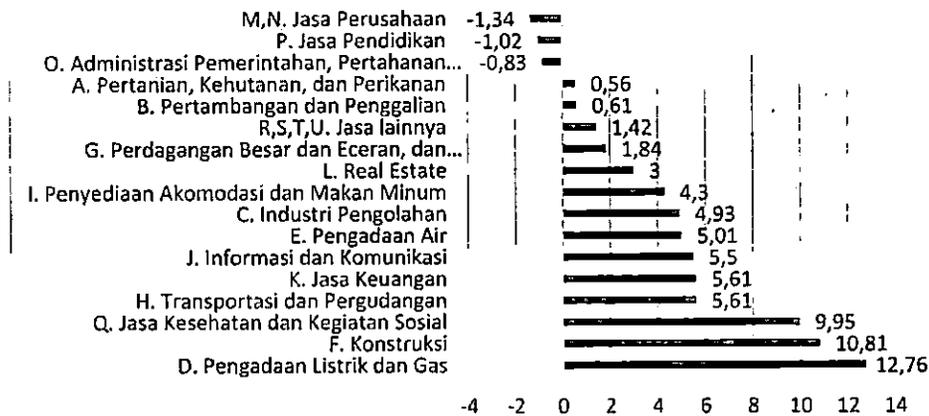
Dalam lima tahun terakhir, LPE Provinsi Banten selalu di atas rata-rata nasional terkecuali pada tahun 2020. Catatan tersebut cukup menggembirakan mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk keluar dari *middle-income trap*. Pertumbuhan ekonomi Banten yang selalu di atas rata-rata nasional juga mengindikasikan daya saing Provinsi Banten yang cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akan tetapi, ada catatan khusus di mana pada tahun 2020 LPE Banten tidak hanya berkontraksi melainkan juga berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini sedikit banyaknya menunjukkan bagaimana ketahanan ekonomi Banten pada saat Pandemi Covid-19 berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena Banten sangat bergantung pada industri pengolahan dan industri pengolahan di Banten berorientasi ekspor atau pun bahan baku industri yang berasal dari negara lain sehingga pada saat pandemi sangat terdampak.



Gambar 3. 4
Pertumbuhan Ekonomi Banten, 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jika dilihat berdasarkan Lapangan Usaha (LU), maka sektor pengadaan listrik dan gas (12,7%), konstruksi (10,81%), dan jasa kesehatan (9,95%) adalah tiga sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi tersebut merupakan sinyal yang sangat positif mengingat Pandemi Covid-19 belum juga usai. Diharapkan perangkat daerah di Provinsi Banten mampu melihat momentum pertumbuhan tersebut sehingga

kedepannya Banten tidak hanya bergantung terhadap sektor industri pengolahan yang secara pertumbuhan memang sangat sulit untuk bisa di atas 5%. Banten perlu sektor-sektor lain yang mampu tumbuh secara akseleratif sehingga diversifikasi sektor pun tercipta di Provinsi Banten guna meningkatkan ketahanan ekonomi Banten.



Gambar 3. 5
Pertumbuhan Sektor dalam PDRB menurut Sektor (%), 2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Melihat perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan wilayah sekitar, nampaknya pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Banten (kecuali DI Yogyakarta) pasca covid-19 relatif lebih cepat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten tahun 2021 dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa menempati peringkat kedua setelah provinsi DI Yogyakarta.

Tabel 3. 1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sekitar

Provinsi	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (q-to-q)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2021	Laju Pertumbuhan TW I 2022
DKI Jakarta	3,76	3,64	3,56	4,63
Jawa Barat	2,76	6,21	3,74	5,61
Jawa Tengah	0,67	5,42	3,32	5,16
DI Yogyakarta	3,68	2,82	5,53	2,91
Jawa Timur	0,14	4,59	3,57	5,20
Banten	3,68	5,19	4,44	4,97
Pulau Jawa	2,13	4,82	3,66	5,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

Kondisi optimisme pertumbuhan ekonomi Banten yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa nampaknya tidak

berlanjut di periode Triwulan I tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Banten, laju pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yang mencapai 5,07 persen. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan kinerja perekonomian melalui program dan kegiatan yang dapat berkontribusi bagi peningkatan lapangan usaha yang menjadi kontributor utama perekonomian Banten.

3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Dilihat dari sisi pengeluaran, maka PDRB ADHB Provinsi Banten selalu didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Hal ini menunjukkan besarnya peran masyarakat di dalam menumbuhkan ekonomi di Provinsi Banten juga peran investor baik dalam maupun luar negeri dalam menggerakkan roda perekonomian di Banten. Pemerintah Provinsi Banten harus menjaga daya beli masyarakat serta mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Perlu inovasi untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten juga harus mampu menjamin iklim investasi yang baik sehingga investor dalam negeri maupun luar negeri terus masuk dan menanamkan modalnya di Provinsi Banten.

Tabel 3. 2
PDRB ADHB Banten menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Tahun 2017-2021

Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	294.423.894	321.788.260	348.161.125	345.389.383	358.092.732
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.541.389	2.803.268	3.063.810	2.922.919	3.015.585
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.616.489	27.576.242	29.744.841	27.343.037	28.653.303
Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.238.150	192.969.560	215.058.258	217.134.782	229.896.995
Perubahan Inventori	65.744	101.164	85.598	13.861	725
Total Ekspor Neto	68.712.034	68.565.920	65.207.708	33.175.363	46.262.577
A. Total Ekspor	422.952.763	449.403.062	449.088.586	413.564.342	477.272.877
B. Total Impor	354.240.729	380.837.142	383.880.878	380.388.979	431.010.300
Jumlah	563.597.700	613.804.414	661.321.341	625.979.345	665.921.915

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Meskipun total ekspor netto memiliki kontribusi yang tidak sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga maupun PMTB, total ekspor dan total impor Provinsi Banten memiliki angka yang cukup besar. Besarnya angka tersebut menggambarkan betapa besarnya aktivitas ekspor impor di Provinsi Banten. Impor di Banten terutama untuk kebutuhan bahan baku industri pengolahan yang nantinya output atau produksi industri pengolahan tersebut akan diekspor dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Pemerintah Provinsi Banten harus memberikan perhatian terhadap kegiatan ekspor impor dengan mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ekspor impor di Provinsi Banten juga mendorong sektor lain di luar industri pengolahan untuk terlibat dalam kegiatan ekspor impor karena pasar internasional masih sangat terbuka dengan berbagai peluangnya.

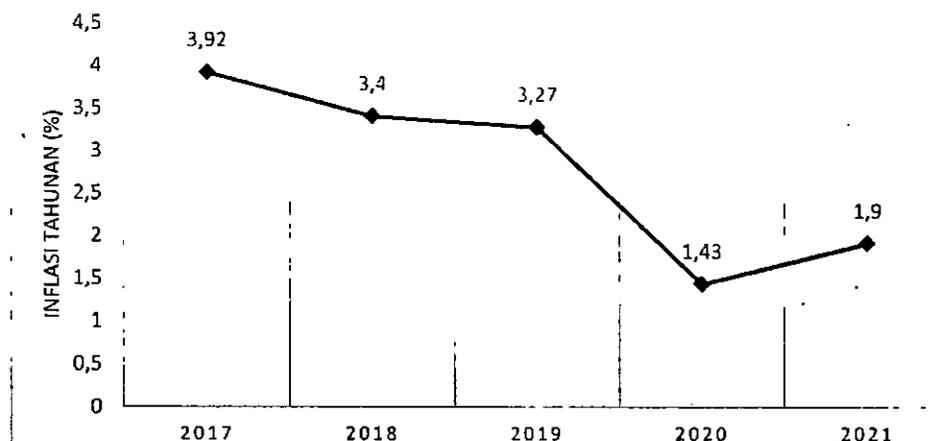
Tabel 3. 3
Struktur PDRB Banten menurut Pengeluaran (%) Tahun 2017-2021

Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	52,24	52,43	52,65	55,18	53,77
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	0,45	0,46	0,46	0,47	0,45
Pengeluaran konsumsi pemerintah	4,37	4,49	4,5	4,37	4,3
Pembentukan modal tetap bruto	30,74	31,44	32,52	34,69	34,52
Perubahan Inventori	0,01	0,02	0,01	0	0
Total Ekspor Neto	12,19	11,17	9,86	5,3	6,95
a. Total Ekspor	75,05	73,22	67,91	66,07	71,67
b. Total Impor	62,85	62,05	58,05	60,77	64,72

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi yang rendah terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak Pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

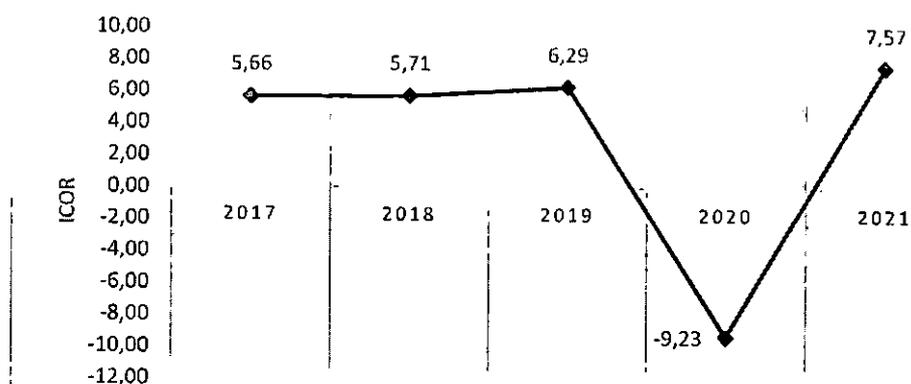


Gambar 3. 6
Laju Inflasi IHK Banten (%) Tahun 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tingkat inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,9% atau meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang hanya mencapai 1,43%. Meskipun mengalami peningkatan, namun tingkat inflasi yang masih tergolong rendah tersebut akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah berupa peningkatan daya beli masyarakat baik dalam bentuk stimulus langsung seperti Bantuan Langsung Tunai atau pun insentif bagi peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

3.1.5 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu. Dari gambar dapat dilihat bahwa secara umum, dalam lima tahun terakhir, ICOR Banten memiliki kecenderungan terus meningkat. Ada sejumlah faktor yang menjadi pemicu tingginya ICOR, antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tingginya biaya logistik, reformasi birokrasi berjalan belum optimal. Pada tahun 2020, ICOR Banten negatif terjadi karena output pada tahun 2020 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya.



Gambar 3. 7
Perkembangan ICOR Banten, 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.1.6 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengangguran terbuka, terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Banten dalam lima tahun terakhir selalu tinggi bahkan salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Tabel 3. 4
Perbandingan Persentase dan Jumlah Pengangguran di Provinsi Banten dengan Wilayah Sekitar

Provinsi	2020		2021	
	%	Jumlah	%	Jumlah
Banten	10,64	661.000	8,98	562.310
DKI Jakarta	10,95	572.780	8,50	439.899
Jawa Barat	10,46	2,53 juta	9,82	2,43 juta

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab tingginya angka TPT di Banten diantaranya adalah kurangnya minat masyarakat Banten bekerja di bidang usaha non formal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, belum optimalnya program vokasi Sekolah Menengah Kejuruan, belum *match* antara karakteristik industri di Banten (*high tech*) dengan karakteristik angkatan kerja (*low education*) serta hal lainnya yang membutuhkan perhatian lebih dalam.

Tabel 3. 5
Kondisi Ketenagakerjaan di Banten Tahun 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Angkatan Kerja	5.596.963	5.845.978	6.042.279	6.213.233	6.260.650
Jumlah Pengangguran Terbuka	519.563	494.868	489.825	661.061	562.310
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,28	8,47	8,11	10,64	8,98

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.1.7 Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Jumlah penduduk miskin di Banten dari tahun 2017 hingga tahun 2019 memiliki *trend* yang baik di mana persentase penduduk miskin terus menurun. Akan tetapi, Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa tidak terkecuali terhadap persentase penduduk miskin di Banten yang mencapai angka 6,66% pada Maret 2021. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan nasional, persentase kemiskinan Banten masih lebih baik.

Tabel 3. 6
Kemiskinan di Banten Tahun 2017-2021 (posisi September)

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	2017		2018		2019		2020		2021	
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	675	699,83	661,4	668,74	654,5	641,42	776	857,64	867,2	852,28
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,45	5,59	5,24	5,25	5,09	4,94	5,92	6,63	6,66	6,5

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Meskipun capaian persentase penduduk miskin di Provinsi Banten lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional namun dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi sekitar nilai masih tinggi. Persentase kemiskinan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 lebih rendah yakni mencapai 4,67% atau berjumlah 498.290. Meski demikian, dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, capaian kemiskinan di Provinsi Banten jauh lebih rendah baik dalam hal persentase atau pun jumlah penduduk miskin.

Tabel 3. 7
Perbandingan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi
Banten dengan Wilayah Sekitar

Provinsi	2020		2021	
	%	Jumlah	%	Jumlah
Banten	6,63	857.640	6,5	852.280 jiwa
DKI Jakarta	4,69	496.840 Jiwa	4,67	498.290 jiwa
Jawa Barat	8,43	4,19 juta jiwa	7,97	4,0 juta jiwa

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

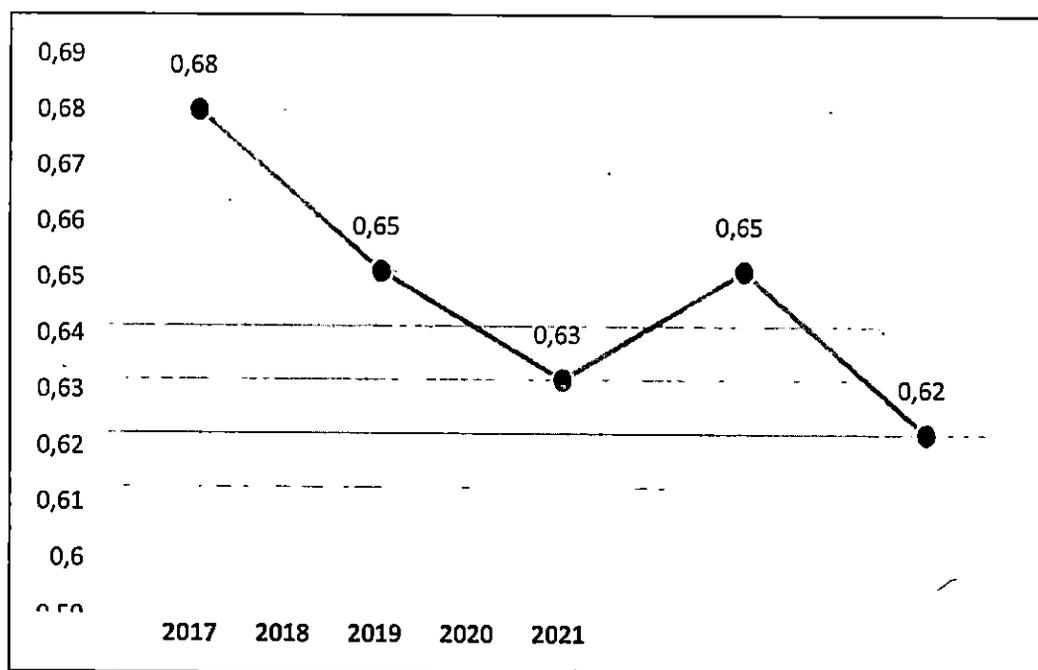
Kebijakan penganggaran yang dialokasikan pada tahun 2023 akan diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan sehingga persentasenya dapat kembali pada posisi sebelum kejadian Pandemi Covid-19 yang mendekati angka lima persen. Untuk itu program dan kegiatan pengentasan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta Dana Desa perlu dikelola secara baik agar efektivitasnya dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Banten melakukan revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Daerah) untuk menumbuhkan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan.

Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar lembaga. Mengacu kepada data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021, di wilayah Provinsi Banten masih terdapat 344.867 jiwa atau 2,7% penduduk yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Untuk itu, langkah kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja yang terkait dalam pengentasan kemiskinan ekstrem perlu menysasar kelompok tersebut.

3.1.8 Ketimpangan Regional

Indeks Williamson merupakan satu instrumen dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa

kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Dalam penghitungan ini, ketimpangan dilihat berdasarkan perbandingan PDRB sebagai *proxy* produksi yang dihasilkan suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Angka Indeks Williamson dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun yang artinya ketimpangan berkurang dari tahun ke tahunnya walaupun memang belum begitu signifikan. Pada tahun 2020 angka Indeks Williamson bahkan sempat meningkat akibat dari dampak Pandemi Covid-19.

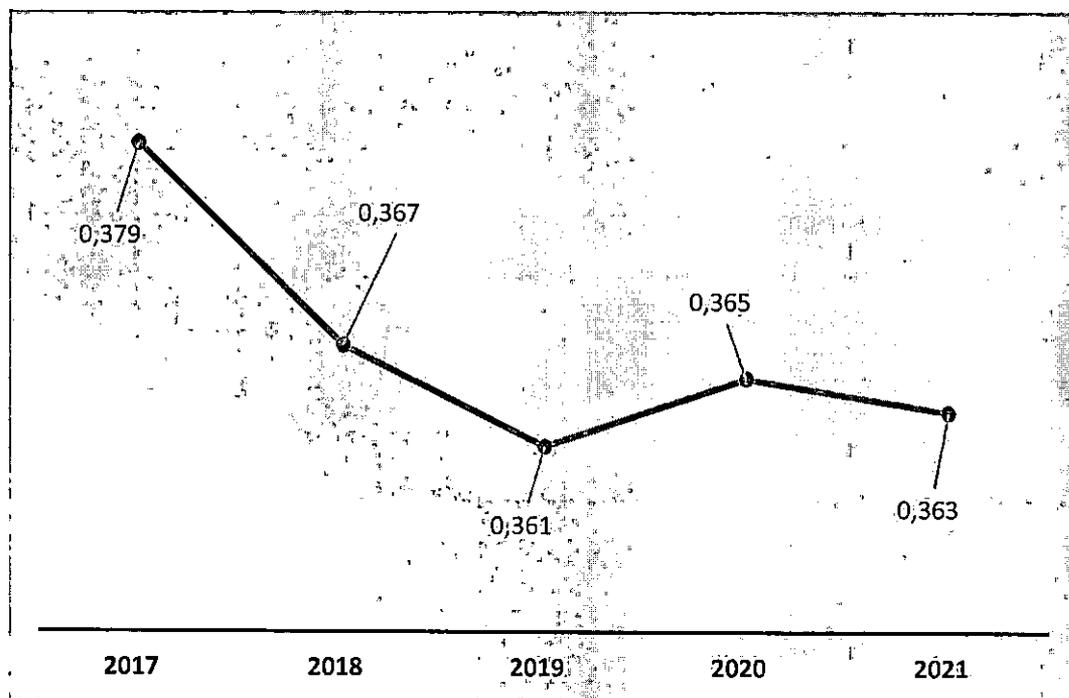


Gambar 3. 8
Indeks Williamson Banten, Tahun 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Mulai beroperasinya jalan Tol Serang-Panimbang seksi 1 yakni Serang-Rangkasbitung serta mulai dibangunnya seksi 2 (Rangkasbitung-Cileles) diharapkan mampu menumbuhkan minat investor menanamkan modalnya untuk membuka usaha ekonomi di wilayah Rangkasbitung dan Pandeglang. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi dikedua wilayah tersebut, diharapkan kontribusi PDRB meningkat sehingga dapat menurunkan indeks williamson di Provinsi Banten.

3.1.9 Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks atau rasio ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Rasio Gini Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun yang menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan. Akan tetapi, lagi-lagi Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif tidak terkecuali terhadap ketimpangan di Provinsi Banten pada tahun 2020 dan tahun 2021.



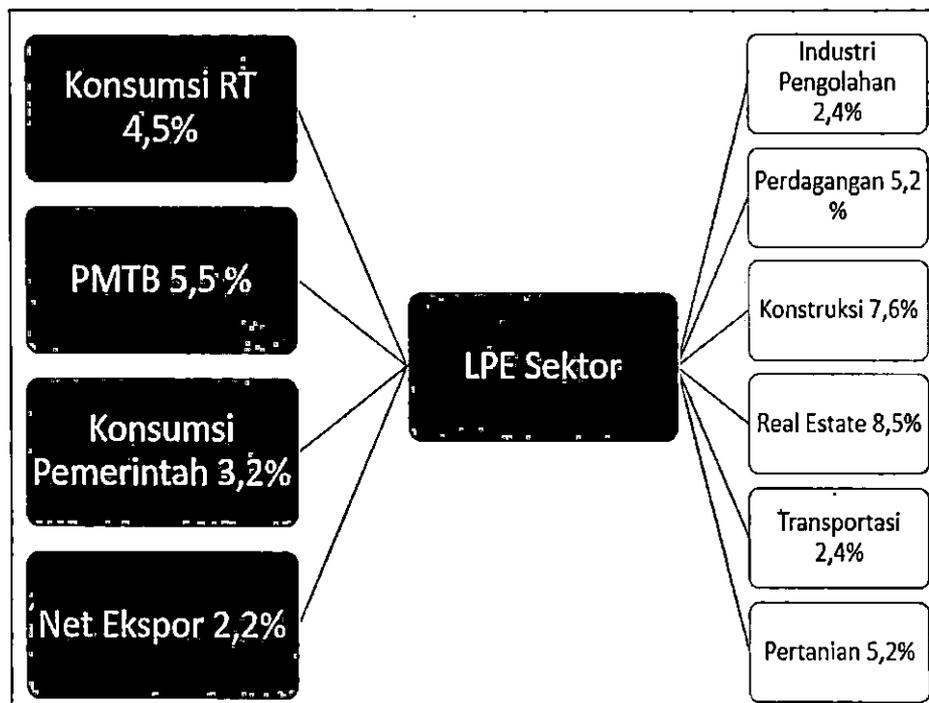
Gambar 3. 9
Perkembangan Rasio Gini, Tahun 2017 -2021 (September)
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Penanganan Pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi yang tinggi terbukti mampu mengendalikan pandemi covid-19 baik di tingkat lokal

maupun nasional. Dengan berangsur membaiknya kondisi perekonomian, diharapkan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat dapat terwujud.

3.1.10 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2022 dan 2023

Kondisi perekonomian tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2021 meskipun angkanya belum mencapai 5%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* memperkirakan ekonomi global pada 2022 akan tumbuh pada kisaran 4,1% hingga 4,5%. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional serta nasional dan melihat perkembangan Pandemi Covid-19 maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,02-5,15. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi pertumbuhan positif sektor industri pengolahan yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai 4,5%.



Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

1. Perluasan tingkat vaksinasi di Provinsi Banten menjadi faktor pemulihan utama yang mendorong optimisme dan mobilitas masyarakat. Daya beli masyarakat diperkirakan terus menguat sering perbaikan prospek pendapatan masyarakat pada tahun 2022. Berbagai stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah salah satunya melalui Bantuan Sosial yang diperkirakan dapat menjadi pendorong pertumbuhan komponen ini akan berlanjut pada tahun 2022;
2. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), empat sektor utama PDRB Provinsi Banten yaitu industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan *real estate* diproyeksikan tumbuh dengan baik dan berangsur pulih tumbuh seperti pada masa sebelum adanya Covid-19. Industri pengolahan di Provinsi Banten yang mayoritasnya berorientasi ekspor akan tumbuh seiring dengan normal kembalinya perdagangan nasional maupun internasional. Begitu pun dengan perdagangan, berbagai peraturan pembatasan yang semakin melonggar akan memungkinkan tumbuhnya sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun perdagangan eceran;
3. Dari sisi pengeluaran, PDRB Provinsi Banten diproyeksikan dapat tumbuh dengan baik karena semakin normalnya aktivitas masyarakat sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga pun akan berangsur pulih bahkan tumbuh dengan baik. Dari sisi investasi, pulihnya ekonomi dunia secara berangsur akan membuat para investor kembali menanamkan modalnya di Banten baik PMDN maupun PMA. Selain itu kegiatan ekspor impor juga akan menjadi salah satu penyumbang tumbuhnya perekonomian Banten karena perdagangan internasional sudah berangsur pulih. Untuk proyeksi indikator makro lainnya disajikan tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3. 8
Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun
2022 dan Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1. Pertumbuhan Ekonomi				
a.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,0-5,6**	5,02 - 5,15
b.	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	401.089.500	421.224.192
c.	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	579.715.500	608.817.200
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7-9,2**	8,67
b.	Jumlah Penganggur	Orang	552.291	542.898
3. Kemiskinan				
a.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,99 – 5,4**	5,58
b.	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	819.000	731.000
4. Indeks Pembangunan Manusia				
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,0	73,27
b.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,20	70,40
c.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,00	9,11
d.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,50	13,75
e.	Pengeluaran per Kapita	Rp	12.100.000	12.168.000
5. Ketimpangan				
a.	Rasio Gini	Indeks	0,370**	0,354
b.	Indeks Ketimpangan Regional	Indeks	0,623	0,622

Sumber: Analisis Bappeda, 2022** RKPD 2022

3.2. Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui

mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023;
- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19 dalam 4 (empat) tahun ke depan;

- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
- d. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Kebijakan arah belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun 2022 juga memperhatikan ketercapaian berbagai indikator pembangunan dan kondisi kekinian yang terjadi di masyarakat. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar bagi perwujudan Indonesia Emas tahun 2045 menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan akselerasi peningkatan capaian tingkat partisipasi sekolah melalui skema pendidikan khusus dalam bentuk sekolah terbuka. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi kemacetan kendaraan yang kerap terjadi pada hari raya keagamaan, Pemerintah Daerah menganggap perlu mencari solusi dalam bentuk penyediaan rest area khusus sebagai kantong parkir sementara sebelum masuk ke terminal pelabuhan.

Antisipasi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Untuk mensukseskan berbagai tahapan Pemilu tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana cadangan sehingga pada saatnya nanti (tahun anggaran 2024) kebutuhan dana yang harus disediakan pemerintah daerah dapat tercukupi.

Kondisi lingkungan eksternal lainnya yang mempengaruhi kebijakan belanja daerah adalah antisipasi pemindahan ibu kota baru Nusantara (IKN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Mengantisipasi dinamika kebijakan dan lokasi terkait pembangunan IKN, anggaran yang telah teralokasikan untuk pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten pada lokasi IKN, bila tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan pembangunannya pada Tahun Anggaran 2023, akan dialokasikan pada pendanaan prioritas lainnya, diutamakan untuk mendukung

kesuksesan pelaksanaan pemilu dan pemilukada serentak Tahun 2024.

3.2.3. Pembiayaan

Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan SILPA tahun 2023-2026 dicadangkan dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
- b. Penerimaan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi BUMD, BUMN dan/atau perusahaan lainnya yang penyalurannya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- c. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembentukan BUMD baru jika diperlukan.

Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 9
Proyeksi Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (Rupiah) Tahun 2023

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	10.679.096.035.708
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.871.365.932.445
4.1.01	Pajak Daerah	7.407.428.957.604
4.1.02	Retribusi Daerah	120.886.373.105
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	67.712.793.358
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	275.337.808.378
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.793.884.665.952
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.788.789.565.009
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.095.100.943
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.845.437.311
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.845.437.311
4.3.02	Pendapatan Lainnya	0
5	BELANJA	10.958.287.302.672
5.1	BELANJA OPERASI	4.769.791.262.827
5.1.01	Belanja Pegawai	2.360.288.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.823.770.744.423
5.1.03	Belanja Bunga	1.285.894.000

KODE	URAIAN	PROYEKSI 2023
5.1.05	Belanja Hibah	535.442.654.533
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	49.003.969.871
5.2	BELANJA MODAL	3.011.905.517.504
5.2.01	Belanja Modal Tanah	657.765.998.617
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	443.401.400.746
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.205.803.147
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.040.730.456.863
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	42.862.464.590
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.939.393.541
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	96.480.175.746
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	96.480.175.746
5.4	BELANJA TRANSFER	3.080.110.346.595
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.769.836.725.595
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	310.273.621.000
	Total Surplus/(Defisit)	(279.191.266.964)
6	PEMBIAYAAN	279.191.266.964
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	437.689.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	437.689.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	158.497.733.036
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	138.497.733.036
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	158.497.733.036
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	279.191.266.964
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Sumber: Perencanaan Pembangunan Teknokratik Provinsi Banten Tahun 2023-2026, diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN 2023

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena RKPD Tahun 2023 bukan merupakan pelaksanaan RPJMD. Hal ini disebabkan oleh telah berakhirnya RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, karena Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Bulan Februari 2024, sesuai amanat Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Pemerintah Provinsi Banten belum mempunyai dokumen RPJMD yang baru.

Bagi daerah yang belum mempunyai RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah memberikan panduan. Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan, serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, dengan mengacu pada RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. Untuk memperjelas Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022.

Dalam periode RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, tahun 2023 merupakan tahun pertama dari RPJMD ke-5, Tahun 2023-2025, yang merupakan tahap modernisasi. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005–2025, adalah “*Banten yang Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa*”. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005–2025, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD, dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2017-2022 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”									
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)	
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan menjadi 6,50% (2021) menjadi 5,37% (2026)	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	52,83	58,13	71,06	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,665	0,695	
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,74	7,79	
				Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,19	66,24
				Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,11	9,40

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,75	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,40	70,83
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,50	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,07	93,91
				Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	55,03	58,63
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	48,67	49,42	51,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	3,97	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	4,99	5,69
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	2,44	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,39	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,68	1,04
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	Tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun	12.033	12.168	12.573

VISI: "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA"

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
			menjadi 0,336 (2026)		yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)			
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	62,99	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	147,37	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	69,77	80,00
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	82,20	87,60
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai)	3,45	3,47	3,53
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Banten untuk tahun 2023 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2023.

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi Banten Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	
Visi : BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA				
Misi I : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas				
1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia	1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.1.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	▪ Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa	
	1.2. Meningkatnya pelayanan sosial	1.2.1. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar sosial bagi penerima layanan dasar sosial	▪ Peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan SPM bidang sosial	
	1.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	1.3.1. Meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa	▪ Peningkatan kelembagaan pemerintah desa dan pelayanan publik bagi masyarakat desa	
	1.4. Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1.4.1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing pelatihan calon tenaga kerja	a. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan Balai Latihan Kerja	
			b. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan penyandang disabilitas	
	1.5. Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1.5.1. Mengembangkan kebijakan pendidikan vokasi	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan vokasi	
			1.5.2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	▪ Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
			1.5.3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah
			1.5.4. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus	▪ Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Khusus
			1.5.5. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	▪ Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
	1.6. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.6.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengoptimalkan	a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		ketersediaan tenaga medis, sarana, dan prasarana kesehatan	b. Peningkatan upaya penanggulangan pandemi covid-19
		1.6.2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	▪ Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat
		1.6.3. Menurunkan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor	▪ Peningkatan upaya preventif stunting dengan pendekatan lintas sektor
	1.7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	1.7.1. Meningkatkan kesetaraan gender	▪ Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Provinsi
		1.7.2. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi. c. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota
		1.7.3. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	▪ Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Provinsi.
		1.7.4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan	▪ Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
	1.8. Terbentuknya karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	1.8.1. Mengembangkan kebudayaan, kesenian, dan sejarah daerah melalui sarana pendidikan dan festival budaya	▪ Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		1.8.2. Memperkuat karakter pemuda melalui prestasi olahraga dan non-olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga Tingkat Nasional
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan			
2. Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	2.1. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	2.1.1. Meningkatkan Cadangan Pangan dan Perlindungan Pangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi b. Penyediaan lumbung pangan melalui BUMD yang bergerak di sektor pangan
		2.1.2. Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
		2.1.3. Meningkatkan Akses UMKM terhadap Pemasaran Digital	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital
		2.1.4. Meningkatkan Omset UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
	2.2. Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	2.2.1. Meningkatkan Nilai Investasi dengan Promosi Potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO
		2.2.2. Meningkatkan Pelayanan dengan Optimal	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan investasi dengan Kemudahan Perijinan sesuai UU Cipta Kerja Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
	2.3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	2.3.1. Meningkatkan Pangsa Pasar Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah (Luar daerah dan Luar negeri)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Jumlah Eksportir Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
		2.3.2. Meningkatkan Stabilitas Barang Pokok	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Manajemen Pusat Distribusi Perdagangan

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		2.3.3. Mengembangkan sektor industri	▪ Peningkatan kualitas produk industri
	2.4. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.4.1. Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dan Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif	▪ Peningkatan destinasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
	2.5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	2.5.1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	▪ Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
		2.5.2. Meningkatkan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	▪ Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (<i>off farm</i>)
	2.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	2.6.1. Meningkatkan kualitas jalan provinsi	▪ Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan
		2.6.2. Meningkatkan ketersediaan jaringan jalan Provinsi	▪ Pembangunan jalan untuk mendukung pusat kegiatan Provinsi
		2.6.3. Percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindung	▪ Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
		2.6.4. Meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	▪ Pemanfaatan bendungan dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi
		2.6.5. Meningkatkan prasarana sistem drainase dalam WS Provinsi dan pecegahan bencana tsunami di wilayah Provinsi	▪ Pengelolaan prasarana pengendalian banjir
		2.6.6. Meningkatkan profesionalisma badan usaha jasa konstruksi	▪ Peningkatan sumber daya badan usaha jasa konstruksi
		2.6.7. Meningkatkan prasarana akses air bersih	▪ Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum.
		2.6.8. Membangun TPA Regional	▪ Perencanaan pembangunan TPA

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
			Regional yang berkualitas
		2.6.9. Penangan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	▪ Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik
		2.6.10. Penanganan kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara yang terlokasi program pemerintah	▪ Penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh
		2.6.11. Membangun SPAL-D Regional	▪ Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
		2.6.12. Meningkatkan pembangunan dan pengelola gedung sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi	▪ Pembangunan dan peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan Strategis Provinsi
		2.6.13. Meningkatkan sarana, prasarana, dan Penyelenggaraan Perhubungan	▪ Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan
		2.6.14. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, koordinasi dan pelayanan sub sektor energi dan ketenagalistrikan	▪ Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
Misi 3: Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;			
3. Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.1.1. Meningkatkan Fungsi Hutan dan lahan bagi masyarakat	▪ Mendorong peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan dan peningkatan pengelolaan Tahura Banten serta perhutanan sosial

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
		3.1.2. Meningkatkan kualitas air, udara, dan air laut akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas air dan udara serta malakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan
		3.1.3. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi, Pembinaan dan pengawasan
		3.1.4. Meningkatkan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
	3.2. Meningkatnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana	3.1.5. Meningkatkan mitigasi dan pengurangan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana, dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan

Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	4.1. Meningkatnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	4.1.1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan	a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan
			b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan
			c. Peningkatan kualitas informasi kinerja Perangkat Daerah
			d. Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah
			e. Peningkatan kualitas hubungan lintas

Tujuan	Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
			fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
		4.1.2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendapatan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah ▪ Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
		4.1.3. Meningkatkan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i> b. Peningkatan manajemen dan profesionalisme aparatur c. Peningkatan kualitas kajian dan implementasi kebijakan, serta inovasi pelayanan publik berdasarkan prinsip Organisasi Perangkat Kerja Daerah hemat struktur kaya fungsi
		4.1.4. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal
	4.3. Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	4.3.1. Meningkatkan ketahanan sosial budaya ideologi dan kerukunan sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan budaya politik yg demokratis, jujur dan bertanggung jawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa b. Penurunan kerawanan konflik masyarakat c. Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023.

4.2. Tema RKPD 2023

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Tahun 2023 dan tema RKP Tahun 2023, adalah “*Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi*”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 disajikan dalam diagram berikut.



Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Pada Bab II, telah dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan yang merupakan analisis kesenjangan kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hasil evaluasi RKPD,

analisis arah kebijakan RPJPD, serta analisis arah kebijakan RPJMN. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan;
3. Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
4. Implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal.

Dari permasalahan pembangunan tersebut, dirumuskan isu-isu strategis daerah yang akan menjadi prioritas pada tahun rencana. Isu-isu strategis daerah tahun 2023 adalah:

1. Daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Daya saing perekonomian;
3. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan isu-isu strategis daerah tersebut, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023.

Untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas, dilakukan pembobotan melalui diskusi kelompok terpumpun. Hasil dari diskusi tersebut dianalisis dengan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) untuk menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi. Variabel yang digunakan untuk menilai prioritas adalah: ketersediaan anggaran dan SDM, keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, akselerasi pencapaian indikator makro daerah, kondisi lingkungan strategis untuk menunjang pencapaian kinerja, sinergitas dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota, keterlibatan aktor pembangunan, serta keterkaitan dengan RPJPD.

Partisipan dalam diskusi kelompok memilih isu pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, disusul oleh peningkatan daya saing SDM, diikuti oleh isu lingkungan dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, hierarki prioritas pembangunan daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis adalah:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan antara permasalahan pembangunan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis dan Prioritas Daerah

No	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Daerah Tahun 2023
1	Pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan berkeadilan	Daya saing perekonomian	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
2	Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Daya saing SDM	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
3	Terbatasnya daya dukung lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
4	Implementasi Reformasi Birokrasi yang belum optimal	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Selanjutnya, rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2023 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 sehingga menghasilkan program prioritas tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Prioritas Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan : nilai)	58,13	Prioritas 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	Peningkatan kualitas keluarga sejahtera	Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan	Peningkatan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik bagi Masyarakat Desa
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74		Peningkatan Pelayanan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan dan Pemenuhan SPM Bidang Sosial
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19		Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Balai Latihan Kerja
		Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11		Peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan khusus • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi • Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah • Peningkatan kualitas dan ketersediaan alat praktek
			Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75			Peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,40		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat • Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,50		Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan peran lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07		Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi • Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak • Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus • Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi.
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Kolaborasi program-program pemajuan kebudayaan
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42		Pembentukan karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	Peningkatan Pengembangan potensi Pemuda dan pengembangan prestasi olahraga tingkat nasional
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahunan yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	Prioritas 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan UMKM terhadap pemasaran digital • Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu • Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							Layanan Usaha Terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Ketersediaan Pangan yang didukung oleh Infrastruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah dan Keamanan Pangan yang Tersertifikasi
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97		Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Promosi investasi berbasis potensi unggulan dan kajian I-PRO • Peningkatan layanan investasi dengan Kemudahan Perijinan sesuai UU Cipta Kerja • Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha di Provinsi Banten
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99		Peningkatan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas produk industri
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44			<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Manajemen Pusat Distribusi • Peningkatan Jumlah Ekspor Non Migas Komoditas Unggulan Daerah
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39		Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan destinisasi pariwisata Provinsi dan Ekonomi Kreatif melalui Optimalisasi Aset
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68		Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Infrastruktur Penunjang dan optimalisasi pengelolaan Pasca Panen (off farm) • Peningkatan Infrastruktur Pokok Pelabuhan Perikanan Provinsi dan Produk turunannya
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi		Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, dan kelengkapan jalan • Pembangunan jalan untuk

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakann Pembangunan Daerah
							mendukung pusat kegiatan provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan • Pemanfaatan Bendung dan embung untuk berbagai keperluan secara terpadu untuk irigasi • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Perencanaan pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional • Perencanaan pembangunan TPA Regional yang berkualitas • Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi • Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, • Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi • Penataan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik • penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh • Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan • Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur,

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							peningkatan pelayanan rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data energi dan ketenagalistrikan
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	Prioritas 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung melalui perencanaan dan penatagunaan hutan, pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan, pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan serta peningkatan pengelolaan tahura banten • Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi • Peningkatan kualitas air dan udara serta melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Peningkatan Kapasitas serta Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan • Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perbenihan tanaman hutan • Pengembangan dan pemetaan, peningkatan pelayanan

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
							rekomendasi perjinan, pengendalian pemanfaatan, penataan regulasi dan penyediaan sumber data aspek kegeologian dan sumber daya mineral
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37		Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana • Penurunan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja pemerintahan • Peningkatan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan • Peningkatan kualitas pelaporan kinerja Perangkat Daerah • Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP Perangkat Daerah • Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung pencapaian kinerja
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,20			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan pemerintah daerah • Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana insentif daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Peningkatan Kinerja BUMD
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan manajemen dan profesionalisme Aparatur • Peningkatan pengawasan dan pembinaan internal

No	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (satuan: nilai)	3,47			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan publik berbasis e-government • Peningkatan kualitas dan implementasi kebijakan, Kajian dan Inovasi pelayanan publik
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh		Peningkatan Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya politik yang demokratis, jujur dan bertanggungjawab berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa • Penurunan kerawanan konflik masyarakat

Prioritas Daerah tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rancangan RKP 2023 sebagai berikut.

1. *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;*

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. *Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;*

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat

pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. *Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;*

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;*

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. *Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;*

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. *Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim;*

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. *Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.*

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Hasil penyelarasan Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Interkoneksi Prioritas Daerah Provinsi Banten
dengan Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Memenuhkan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program pengelolaan energi terbarukan
Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
	Program pengelolaan hutan
	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Program penanganan kerawanan pangan
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
	Program pengawasan keamanan pangan
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Program perizinan usaha pertanian
	Program penyuluhan pertanian
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
	Program pengelolaan perikanan tangkap
	Program pengelolaan perikanan budidaya
Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
	Program pengembangan umkm
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program perencanaan dan pembangunan industri
	Program pengendalian izin usaha industri
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
	Program pemasaran pariwisata
	Program pemasaran pariwisata
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Program pelayanan penanaman modal
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
	Program pengembangan iklim penanaman modal
	Program promosi penanaman modal
	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
PN-2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pembangunan wilayah Jawa Bali	Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
	Program penataan desa
	Program peningkatan kerja sama desa
	Program administrasi pemerintahan desa
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Prioritas 2 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
	Program pengendalian penduduk
	Program pembinaan keluarga berencana (kb)
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)
	Program pendaftaran penduduk
	Program pencatatan sipil

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
	Program pengelolaan profil kependudukan
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program pemberdayaan sosial
	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
	Program rehabilitasi sosial
	Program perlindungan dan jaminan sosial
	Program penanganan bencana
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman
Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program pengelolaan pendidikan
	Program pengembangan kurikulum
	Program pengembangan kurikulum
	Program pendidik dan tenaga kependidikan
	Program pengendalian perizinan pendidikan
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program pemenuhan hak anak (pha)
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
	Program peningkatan kualitas keluarga
	Program perlindungan perempuan
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
	Program perlindungan khusus anak
	Program pengembangan daya saing keolahragaan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan
Pengentasan Kemiskinan	Program perlindungan dan jaminan sosial
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
	Program penelitian dan pengembangan daerah
	Program perencanaan tenaga kerja
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
	Program penempatan tenaga kerja
	Program hubungan industrial
	Program pengawasan ketenagakerjaan
PN-4	Prioritas 2
Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program pengembangan kebudayaan
	Program pengelolaan permuseuman
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Program kesejahteraan rakyat
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Program pembinaan perpustakaan
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program pengelolaan arsip
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip
PN-5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Prioritas-1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program pengembangan perumahan
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
	Program pengembangan permukiman
	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum
	Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
	Program penatagunaan tanah
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
Infrastruktur Ekonomi	Program penyelenggaraan jalan
	Program penyelenggaraan jalan
	Program pengembangan jasa konstruksi
	Program pengelolaan pelayaran
	Program pengelolaan perkeretaapian
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
	Program kawasan permukiman
	Program penataan bangunan gedung
	Program penataan bangunan dan lingkungannya
Energi dan ketenagalistrikan	Program pengelolaan ketenagalistrikan
Transformasi Digital	Program pengelolaan aplikasi informatika
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas 3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati
	Program perencanaan lingkungan hidup
	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
	Program pengelolaan persampahan
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
	Program pengelolaan hutan
	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM
	Program penyelenggaraan penataan ruang
	Program pengelolaan aspek kegeologian
	Program pengelolaan mineral dan batubara
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program penanggulangan bencana
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Konsolidasi Demokrasi	Prioritas 4 Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
	Program penyelenggaraan statistik sektoral
	Program penataan organisasi
	Program penyelenggaraan pengawasan
	Program pengelolaan keuangan daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah
	Program pengelolaan pendapatan daerah
	Program kepegawaian daerah
	Program pengembangan sumber daya manusia
	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa
	Program fasilitasi dan koordinasi hukum
	Program pengelolaan arsip
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
	Program pengelolaan aplikasi informatika
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Banten dalam lingkup Kewilayahan Nasional Tahun 2023

RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian integral dari pembangunan nasional, diarahkan untuk mendukung 7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sesuai urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Secara lebih spesifik, Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 juga memperhatikan Target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

Target Pembangunan Wilayah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Target Pembangunan Provinsi Banten
dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024				
		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)*	5,40	5,50	5,60	5,7	5,8
2	Tingkat Pengangguran Terbuka*	8,00	7,80	7,70	7,30	7,00
3	Tingkat Kemiskinan*	4,80	4,50	4,00	3,65	3,48
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54
5	Indeks Gini**	0,385	0,377 - 0,382	0,376 - 0,378	0,375 - 0,377	0,374 - 0,376

Prioritas Pembangunan Wilayah

Lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan untuk Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah:

Koridor Pertumbuhan	Koridor Pemerataan
Kota Cilegon* Kabupaten Serang Kota Serang* Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Pandeglang

Kota Cilegon dan Kota Serang termasuk dalam Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW.

Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN Tahun 2020-2024, akan mencakup kegiatan prioritas: (1) pengembangan sektor unggulan; (2) pengembangan kawasan strategis; (3) pengembangan kawasan perkotaan; (4) pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Adapun untuk Provinsi Banten adalah:

1. Pengembangan Sektor Unggulan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Kegiatan Prioritas Pengembangan Sektor Unggulan pada tahun 2020-2024 adalah pengembangan komoditas unggulan, yang untuk Provinsi Banten adalah kopi, lada, pala, dan perikanan budidaya. Sedangkan untuk sentra produksi pertanian dan perkebunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) adalah komoditas jagung.

2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang untuk Provinsi Banten, di KEK Tanjung Lesung;
- 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, yang untuk Provinsi Banten, adalah Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang, Jalur Ganda KA Rangkasbitung– Merak, Reaktivasi KA Rangkasbitung-Labuan/Bayah;
- 3) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, yang meliputi:
 - a. Pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri

kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;

- b. Pengembangan BLK yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, petani terlatih, buruh konstruksi gedung, manajer umum perdagangan dan manajer perusahaan (gedung);
- c. Penanganan anak tidak sekolah.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan, untuk Provinsi Banten, di Kota Cilegon dan Kota Serang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, dan Daerah Tertinggal

- 1) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah entas, di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- 2) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
- 3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama, yang untuk Provinsi Banten, di KPPN Pandeglang;
- 4) Penanganan stunting;
- 5) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat;
- 6) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang untuk Provinsi Banten ditujukan pada Pemantapan pemulihan pascabencana di Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya.

5. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;

- 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi.
- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak.
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas yang untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas untuk Provinsi Banten meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
- 13) Penataan Ruang dan Lahan
 - a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;

- f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral;
 - g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - h. Pembentukan bank tanah;
 - i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan
 - c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
 - d. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon, yang meliputi: a. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; b. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; c. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi; d. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air.
 - e. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
 - f. Pengembangan energi baru terbarukan;
 - g. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Sedangkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) di Provinsi Banten untuk mendorong percepatan pembangunan Wilayah, adalah Pembangunan Kota Baru Maja, dan Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda.

4.5. Pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif, dan Spasial

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi

pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Pendekatan tematik pada RKPD Provinsi Banten 2023 dilaksanakan dalam rangka untuk lebih memprioritaskan (baik fokus maupun lokus) kegiatan, sehingga akan dapat mengakselerasi upaya-upaya penanganan agar permasalahan-permasalahan daerah dan target-target pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tematik pembangunan dalam RKPD 2023 adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan Daerah

Tematik ketahanan pangan daerah di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Peningkatan produksi pangan
 - Irigasi Primer dan Sekunder
 - Irigasi Tersier
 - Jalan Usaha Tani

- Revitalisasi Pelabuhan
 - Sentra Produksi Pertanian
 - Sentra Produksi Peternakan
 - Komoditas perikanan budidaya
 - Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan
- b. Ketersediaan dan distribusi pangan
- Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi
 - Pusat Distribusi Provinsi (PDP)
- c. Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
- Akses Pangan Masyarakat
 - Keamanan Pangan

Strategi dan fokus penanganan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.7
Integrasi Program pada Tematik Ketahanan Pangan Daerah

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Peningkatan Produksi Pangan	Irigasi Primer dan Sekunder	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	▪ Malingping, Cibadak Cimenteng jaya dan Wanasalam (Kab Lebak) ▪ Kadujajar, Bojong, Cisata dan Kondang Jaya (Kab. Pdg)	DPUPR
	Irigasi Tersier	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kab Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kab. Tangerang	Dinas Pertanian
	Jalan Usaha Tani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kab Pandeglang Kab. Lebak	Dinas Pertanian
	Revitalisasi Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Binuangeun/Cikeusik (Kab. Lebak/Kab.Pdg) dan Labuan (Kab. Pdg)	DKP
	Sentra Produksi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida,	Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kota. Serang, Kota Cilegon	Dinas Pertanian

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
		Sarana Pertanian	Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
	Sentra Produksi Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kab Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kab. Tangerang	Dinas Pertanian
	Komoditas perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	<p>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut • Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut 	Cimanuk, Cigarondong (Kab. Pdg)	DKP
	Infrastruktur dan Pendukung Kemandirian Pangan		<p>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur • Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya • Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 	Rangkasbitung (Kab. Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Pontang (Kab. Srg) Jayanti (Kab. Tgr), Kasemen (Kota Srg)	Dinas Ketapang
Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Pemenuhan Cadangan Pangan Provinsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan <p>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan 	Curug (Kota Serang)	Dinas Ketapang

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Pangan Pemerintah Provinsi		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	Kosambi, Pagedangan, (Kab Tgr)	Curug, Cisauk Dinas Ketapang
	Pusat Distribusi Provinsi (PDP)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pasar Lelang Komoditas <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 	Kopo (Kab . Srg)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
eterjangkauan dan Keamanan Pangan	Akses Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 	Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa (Kab. Tgr), Serang (Kota Srg), Civedus (Kota Clgn), Batu Ceper (Kota Tgr), Serpong (Kota Tangsel)	Dinas Ketahanan Pangan
	Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 	Rangkasbitung (Kab Lebak), Pandeglang (Kab. Pdg), Cikande (Kab. Srg) Tigaraksa (Kab. Tgr), Serang (Kota Srg), Bandungan (Kota Clgn), Cikokol (Kota Tgr), Pamulang Barat (Kota Tangsel)	

2. Pengurangan Pengangguran melalui pendidikan vokasi dan Kewirausahaan

Tematik pengurangan pengangguran di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
 - Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta;
 - Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru;
 - Penempatan Tenaga Kerja;
 - Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja
 - Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam MoU SMK/Vokasi;
 - Implementasi Super Deductive Tax;
 - Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerja;
 - Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha;
 - Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri.
- c. Penciptaan Wirausaha
 - Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
 - Pembinaan dan pengembangan UKM;
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - Kewirausahaan Pemuda;
 - Kewirausahaan Perempuan;
 - Pembinaan dan Pengembangan IKM.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Pengurangan Pengangguran dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.8
Integrasi Program pada Tematik Pengurangan Pengangguran melalui
Penguatan Pendidikan Vokasi dan Kewirausahaan

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja	Revitalisasi SMK melalui penguatan kelembagaan SMK, Penguatan pengelolaan keuangan SMK dan Penguatan Manajerial SMK Negeri dan SMK Swasta	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Menengah Kejuruan	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dindukbud
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Teknis ▪ Pelatihan Keuangan Bagi Guru SMK; ▪ Pelatihan Pengelolaan Dana BOS Bagi Bendahara SMA/SMK dan SKh	Kab. Pandeglang	BPSDM
	Modernisasi BLKI Serpong dan Pembangunan BLKI Baru	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ▪ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi ▪ Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang Kota Serang	Disnaker
	Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot ▪ Pelayanan Antar Kerja ▪ Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnaker
	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ▪ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan ▪ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata ▪ Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata ▪ Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif ▪ Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif ▪ Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispar
Peningkatan Kuantitas Permintaan Tenaga Kerja	Keterlibatan Dunia Usaha dan Industri dalam MoU SMK/Vokasi	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi ▪ Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang	

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPU IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 	Kota Tangsel Kota Serang	
	Implementasi Super Deductive Tax	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 	Kota Serang	DPMPPTSP
	Keterlibatan UKM dalam menyerap angkatan kerja	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dinkop KUKM
	Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 	Kota Serang	Dindik
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disnaker
	Peningkatan Investasi Industri dan Dunia Usaha	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DPMPPTSP
	Intensifikasi Utilitas Kawasan Industri dan Ekstensifikasi Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disperindag
Penciptaan wirausaha	Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DinkopKUK M
	Pembinaan dan pengembangan UKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah)	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak	DinkopKUK M

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 	Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	
	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispar
	Kewirausahaan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Dispora
	Kewirausahaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	DP3AKKB
	Pembinaan dan Pengembangan IKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 	Kab. Serang Kab. Tangerang Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kota Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Tangsel	Disperindag

3. Percepatan Penurunan Stunting

Tematik Percepatan Penurunan Stunting di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

a. penguatan perencanaan dan penganggaran

- Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS);
- Verifikasi dan Evaluasi Renstra dan Renja 2023 Perangkat Daerah terkait.

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan

- Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK;
- Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan;

- Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak.
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
 - Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten;
 - Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten;
 - Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS;
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik Percepatan Penurunan Stunting dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.9
Integrasi Program pada Tematik Percepatan Penurunan Stunting

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan perencanaan dan penganggaran	Pembentukan Surat Keputusan Gubernur Tentang Percepatan Penurunan Stunting (SK TPPS)	Tim	?		Dindikbud
	Verifikasi dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah terkait	Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi Pemerintahan dan • Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Serang	BAPPEDA
peningkatan kualitas pelaksanaan;	Intervensi kelompok sasaran 1000 HPK	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lebak, Pandeglang dan Kab. Tangerang	DPMD
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Keluarga Melalui	Kab. Lebak, Kab Pandeglang	DP3AKKB

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
		Keluarga Sejahtera	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan kebijakan dalam rangka penyiapan pengasuhan 1.000 HPK • Pelaksanaan Fasilitas Pembimbingan Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1.000 HPK 		
		Program Pengelolaan pendidikan	Kegiatan Pengelolaan pendidikan Menengah Atas <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah • Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Kegiatan Pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 	SMA 17 Pandeglang Semua Kab/kota	Dindikbud
	Peningkatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan penyediaan PSU Permukiman • Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman • Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman 	Semua kab/kota	Dinas PRKP
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Premajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) ha • Perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima Belas) Ha • Pelaksanaan Pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) Ha sampa dengan dibawah 15 (lima belas) Ha 	Semua kab/kota	Dinas PRKP
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 	Semua kab/kota	Dinkes
	Peningkatan Akses dan Kualitas Gizi dan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 	Semua kab/kota	Dinkes

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 	Kota Serang	RSUD Banten
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 	Semua kab/kota	Dinsos
	Peningkatan Akses Pangan dan Gizi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan /berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 	Semua kab/kota Kab Lebak, Pandeglang, Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel	Dnas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 	Semua Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman "Pengawasan Mutu, <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hortikultura 	Kab. Pandeglang dan Lebak	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penyediaan dan penyeluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi <ul style="list-style-type: none"> pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/ Distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 	Semua kab/kota	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 	Semua kab/kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Pengelolaan pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua kab/kota	DP3AKKB

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
		Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Pembinaan Remaja Tentang Generasi Berencana 		
peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan	Penilaian Kinerja Intervensi Konvergensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Provinsi Banten	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pemerintahan dan Manusia Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 	Kota Serang	BAPPEDA
	Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi di Provinsi Banten	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pemerintahan dan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	Kota Serang	BAPPEDA
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Peningkatan Kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten	Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rapat Koordinasi teknis bidang pembangunan manusia Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		
	Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan di Puskesmas dan RS	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 	Semua kab/kota	Dinkes
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 	Kab. Tangerang	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Pengelolaan pelayanan kesehatan khusus 	Kab. Lebak	RSUD Malingping
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 	Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang	DPMD
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam percepatan penurunan stunting.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 	Kab. Pandeglang, Lebak dan Kab. Tangerang	DPMD

4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Cibanten

Tematik pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cibanten di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi
 - Penanganan Lahan Kritis
- b. Pengelolaan limbah
 - Penanganan Limbah Industri dan Limbah Medis;
 - Penanganan Air Limbah Domestik;
 - Pengelolaan Sampah.
- c. Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Penertiban Pemanfaatan Ruang
 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Cibanten;
 - Penegakan Hukum;
 - Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air;
 - Pemberian atau Perpanjangan Perizinan.
- d. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Normalisasi DAS Cibanten;
 - Pembangunan Tembok Penahan Tanah;
 - Pengendalian Banjir Sungai Cibanten;
 - Pengelolaan Sumber Daya Air.
- e. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi
 - Edukasi dan sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Cibanten;
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi;
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Cibanten dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.10
Integrasi Program pada Tematik Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
DAS Cibanten

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penurunan Sedimentasi di DAS Cibanten dengan Pengurangan erosi	Penanganan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 	Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas/Gunung Sari)	DLHK
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS • Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 	DAS Cibanten Lokasi Hulu DAS Cibanten (Ciomas/Gunung Sari)	DLHK
Pengelolaan Limbah	Penanganan Limbah Industri dan Limbah Medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 	Kota Serang	DLHK
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan • Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 	Kab. Serang	DLH Kab Serang
	Penanganan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 	Kab. Serang	DPKPTB Kab Serang
	Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah Yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah • Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 	Kab. Serang, Kota Serang	DLHK Kab. Serang DLHK Kota Serang

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<p>Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota • Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota • Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 		
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Cibanten	Program Pengembangan Perumahan	<p>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Pemerintah 	Kota Serang	Dinas PRKP
	Penegakan Hukum	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang • Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang • Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 	Kab. Serang, Kota Serang	Dinas PUPR Kab. Serang Dinas PUPR Kota Serang
	Pemantauan Kualitas Air dan Pengujian Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<p>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut <p>Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 		
	Pemberian atau Perpanjangan Perizinan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<p>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan • Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 	DAS Cibanten	DLHK Provinsi Banten
	Normalisasi DAS Cibanten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai <p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah</p>	Kota Serang	DPUPR Prov Banten
				Kab. Serang	

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Normalisasi/Restorasi Sungai		DPUPR Kab. Serang
	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Serang	PUPR Kab Serang
	Pengendalian Banjir Sungai Cibanten.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten. • Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten; • Penyusunan Dokumen Lingkungan Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten; • Pengadaan Tanah Pembangunan Pengendali Banjir Sungai Cibanten.	Kota Serang	Kemeterian PUPR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Kota Serang	Dinas PUPR Prov. Banten
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya • Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai • Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Serang	Dinas PUPR Kab. Serang
Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi	Edukasi dan sosialisasi Kepada industri, institusi pendidikan dan masyarakat sekitar DAS Cibanten	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas • Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan • Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengelolaan Pendidikan Khusus • Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota dan Kab. Serang	Dindikbud
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Provinsi	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi • Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana • Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kota Serang dan Kabupaten Serang	BPBD Provinsi Banten

5. Manajemen Kinerja Pemerintahan

Tematik manajemen kinerja pemerintah di arahkan melalui strategi dan fokus penanganan :

- a. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan;
 - Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP.
- b. Penguatan Akuntabilitas Keuangan
 - Penguatan inventarisasi aset daerah;
 - Peningkatan Kualitas Penatausahaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Peningkatan Pendapatan Daerah.
- c. Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
 - Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa;
 - Penguatan zona integritas.
- d. Penguatan kualitas pelayanan publik
 - Peningkatan manajemen aparatur melalui penerapan sistem merit;
 - Peningkatan profesionalisme aparatur dalam komponen kompetensi;
 - Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov;
 - Penguatan inovasi daerah.

Adapun program, indikator kinerja dan lokasi serta perangkat daerah pelaksana pada tematik manajemen kinerja pemerintahan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 4.11
Integrasi Program pada Tematik Manajemen Kinerja Pemerintahan

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Pendanaan ▪ Koordinasi Penetapan Perencanaan Daerah Provinsi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	KP3B Serang	Kota Bappeda

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah <p>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) <p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 	KP3B Serang	Kota Bappeda
	Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	<p>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	KP3B Serang	Kota Biro Organisasi dan RB
	Peningkatan kualitas evaluasi internal SAKIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	<p>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 	KP3B Serang	Kota Inspektorat
Penguatan Akuntabilitas Keuangan	Penguatan inventarisasi aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 	KP3B Serang	Kota BPKAD

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi <p>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 	KP3B Serang	Kota BPKAD
	Peningkatan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Penagihan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah <p>Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 	KP3B Serang	Kota Bapenda
Penguatan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Penguatan indeks pengelolaan barang dan jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa <p>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik <p>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 	KP3B Serang	Kota Biro Barjas
	Penguatan zona integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<p>Pendampingan dan Asistensi</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 	KP3B Serang	Kota Inspektorat
Penguatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan manajemen aparatur melalui penerapan sistem merit	Program Kepegawaian Daerah	<p>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Disiplin ASN Pembinaan Disiplin ASN <p>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 	KP3B Serang	Kota BKD
	Peningkatan profesionalisme aparatur dalam	Program Pengembangan	Pengembangan Kompetensi Teknis	KP3B Serang	Kota BPSDM

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
	komponen kompetensi	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kompetensi Pemerintahan • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan • Pengembangan Kompetensi Manajemen 		
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Publik berbasis e-Gov	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	<p>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah • Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi • Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik • Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah • Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah • Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik • Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik • Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah • Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<p>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Informasi Publik • Manajemen Komunikasi Krisis • Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik • Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas 	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	<p>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral • Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi • Membangun Metadata Statistik Sektoral • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 	KP3B Serang	Kota Diskominfo

Strategi	Fokus Penanganan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Infrastruktur • Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 		
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik • Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 	KP3B Serang	Kota Diskominfo
		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja • Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja • Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 	KP3B Serang	Kota Biro organisasi dan RB
		Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 	KP3B Serang	Kota Biro Hukum
		Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Otonomi Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 	KP3B Serang	Kota Biro Pemkesra
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 	KP3B Serang	Kota Biro Ekbang
		Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 	KP3B Serang	Kota DPAD
Penguatan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 	KP3B Serang	Kota Bappeda	

4.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom

up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2023, disajikan sebagaimana tabel 4.12

Tabel 4.12
Rumusan Usulan Program/kegiatan Hasil Penelaahan
Pokok-pokok Pikiran DPRD

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Al-gina	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan As-saadah	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 2 RKB Anggaran : 800000000
			Belum Optimalnya Sarana Pendidikan, Sehingga dibutuhkan Ruang Kelas Baru	Rekomendasi : Diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 3 RKB Anggaran : 1200000000
			masih banyaknya anak putus sekolah tingkat SLTA di Kota Serang	Rekomendasi : Pembiayaan SMA Negeri Gratis, SMA Swasta dibatu dengan Hibah BOSDA Swasta Koefisien : 202979 Siswa Anggaran : 250000000000
			Pengelola Sekolah Swasta Atas kekurangan mebeler meja kursi sehingga membutuhkan bantuan	Rekomendasi : Agar diusulkan melalui E-Hibah Koefisien : 50 Set Meja Kursi Anggaran : 2000000000
		Perlunya pengembangan lahan di SMAN 2 Muncang	Rekomendasi : Pengadaan Lahan Sudah dianggarkan di tahun 2022 Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 1000000000	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meminta Pembangunan Sekolah SMK Negeri	Rekomendasi : Usulan diproses untuk dilanjutkan pada verifikasi selanjutnya Koefisien : 1 Unit Anggaran : 50000000
Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS kesehatan atau Jamsostek	Rekomendasi : setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing pernanjian kerja sama antara RS dgn BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 987 orang Anggaran : 0
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum optimalnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan alat kesehatan.	Rekomendasi : telah dianggarkan pengadaan alat kesehatan dan penunjang medik untuk RS Labuan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan diwilayah Banten Selatan Koefisien : 1 unit Rumah Sakit Anggaran : 0
			Ketersediaan alat kesehatan/medis kurang memadai	Rekomendasi : kekurangan alat kesehatan/medis di kabupaten/kota dapat dbantu melalui mekanisme bantuan keuanagn Koefisien : 7 Unit Anggaran : 0
			Masyarakat kesulitan unuk mendapatkan layanan kesehatan terutama kepada balita	Rekomendasi : pelayanan kesehatan UKM mulai dari Puskesmas/Klinik lalu ke UKM dan UKM Rujukan yaitu RS baik RSUD maupun RS Swasta Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	masyarakat kurang mampu belum memiliki kartu kesehatan dan merasakan manfaatnya (program KIS)	Rekomendasi : Dinas Kesehatan sudah menganggarkan untuk pembayaran premi BPJS, SKTM untuk warga Miskin di Provinsi Banten Koefisien : 400 Orang Anggaran : 0
	Dinas Kesehatan	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	kurang optimalnya pelayanan terhadap pengguna bpjs	Rekomendasi : setiap tahun Dinas Kesehatan dan BPJS telah melaksanakan kegiatan rekredensialing pernanjian kerja sama antara RS dgn BPJS dalam rangka meningkatkan pelayanan Koefisien : 1 Orang Anggaran : 0
	UPT RSUD Banten	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya.	Rekomendasi : Akan di kordinasikan dengan Dinsos melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1
	UPT RSUD Malingping	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Belum adanya Pembangunan Rumah Singgah Bagi Penunggu Pasien dari Keluarga Tidak Mampu mengakibatkan teras rumah sakit sering dijadikan tempat tidur sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten perlu menyediakan pembangunannya	Rekomendasi : Akan dikoordinasikan dengan dinas sosial melalui bappeda Koefisien : 15 Meter persegi Anggaran : 1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Belum Opyimalnya/Pemerataan di Desa	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Belum Optimalnya kondisi irigasi yang ada sehingga kurang efektif untuk mengalir pesawahan warga untuk itu diperlukan untuk pembangunan dan perbaikan irigasi	Rekomendasi : Perlu dilakukan survey untuk lebih memastikan lokasi Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kerusakan jembatan penghubung antar desa mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat	
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	kemacetan jalan karena adanya lintasan kereta api. Masyarakat mengharapkan di bangun Flyover di Porsi Stasion untuk dapat	Rekomendasi : Jalan Jalan Provinsi Jalan Sudirman Kota Tangerang Koefisien : 1 km Anggaran : 0
			Rusaknya jalan akses utama masyarakat, yang sudah lama tidak adanya perbaikan, yang diketahui jalan tersebut sudah dilimpahkan / menjadi jalan provinsi dan perlu adanya pembangunan/perbaikan jalan	Rekomendasi : Jalan dalam Proses Menjadi Jalan Provinsi Rencana Akan dibuatkan DED nya dulu Koefisien : 10 Km Anggaran : 0
			sering terjadi kerusakan jalan yang menghambat aktivitas warga (pemeliharaan jalan)	Rekomendasi : Jalan adalah Jalan Provinsi Koefisien : 7 km Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kerusakan jembatan gantung mengganggu aktivitas masyarakat	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	belum adanya SPAL masyarakat menyebabkan membuang air limbah rumah tangga ke saluran dainese	
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik/regional	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		
			Belum optimalnya Pengelolaan Drainase, Sehingga Masyarakat Membutuhkan Drainase	
			diubutuhkan perbaikan dan perawatan Drainase di Pertigaan Papanggo Cijoro Pasir	
			Masyarakat meminta pemasangan SPAL U-Dith agar sistem keamanan dan kecelakaan di jalan dapat teratasi.	
			Masyarakat meminta pemasangan U-Dith agar sistem irigasi, saluran saluran dan genangan air dapat teratasi,	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Perbaiki Drainase/saluran air di sepanjang aliran sungai, agar tidak terjadi banjir ketika musim hujan tiba, karena jika musim hujan sering terjadi banjir	
			saluran air kotor / gorong-gorong di jalan raya (jln provinsi) kondisinya sudah kurang layak	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	perlu nya peningkatan dan pembangunan prasarana (jalan) pariwisata	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Belum terpasangnya jaringan pipanisasi menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan layanan air bersih	
			Masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan	
			permohonan bantuan pengembangan pamsimas (penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat)	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat mengharapkan Pemerintah Provinsi Banten meninjau tanah di desa pengarengan karena tanah tidak subur lagi, air tercemar oleh polusi adanya petani tidak kebagian air sehingga masyarakat mengharapkan sarana air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Irigasi. Selain itu warga berharap agar jalan lingkungan juga ditingkatkan	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan di lingkungan kelurahan sekecamatan cipocok jaya	
			kondisi jalan desa gunung kencana rusak, kurang layak di lalui kendaraan	
			Terjadinya pendangkalan dan penyempitan pada saluran air mengakibatkan kawasan permukiman strategis sering mengalami banjir	
			warga mengharapkan pengaspalan di lingkungan komplek maupun lingkungan kampung	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	belum optimalnya pelaksanaan program rumah tidak layak huni	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Masyarakat mengharapkan perbaikan jalan lingkungan agar lebih baik di Kelurahan Poris Gaga	
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	belum optimalnya pemeliharaan aliran saluran air (normalisasi saluran air)	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Belum optimalnya/pemerataan jalan Poros Desa	
			Belum adanya pembangunan Turap Dinding Penahan Tanah menyebabkan kawasan permukiman sering terjadi longsor dan banjir	
			belum optimalnya penerangan Jalan di lingkungan desa Sukasari.(PJU)	
			Belum Optimalnya pengelolaan normalisasi saluran air, sarana dan irigasi	
			Infrastruktur jalur Kec. Cimarga - Kec. Leuwidamar	
			Kondisi penerangan jalan umum (PJU) kurang memadai sehingga berpotensi pada rawan tindak kejahatan	
			perbaiki jembatan	
			rawan longsor, sering terjadi banjir meminta agar dibangun TPT	
			Revitalisasi/Perbaiki jalan poros	
			Tidak adanya tembok penahan tanah kawasan permukiman terancam longsor	
			Belum Optimalnya Penyelenggaraan PSU sehingga Masyarakat Membutuhkan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) didepan Hypermaket/Jiant Pasar Kreo, Larangan	Rekomendasi : Perlu dilakukan Feasibility Study (FS) pembangunan JPO Koefisien : 1 Dokumen Anggaran : 100000000
			Belum Optimalnya penyelenggaraan PSU, sehingga Masyarakat butuh Jembatan penyebrangan Orang (JPO) didepan SMP PGRI dan Depan CBD Pasar Ciledug Kec. Ciledug	Rekomendasi : Akan dilakukan kajian kelayakan (FS) fasilitas penyebrangan orang Koefisien : 2 unit Anggaran : 100000000
			kondisi jalan di Kp Cirendeu sampai Kp Cilograng kondisinya kurang layak dilalui kendaraan diharapkan adanya pengaspalan/betonisasi jalan tersebut	
			Bangunan MCK yang kondisinya kurang layak serta fasilitas yang sudah rusak terutama untuk penyedota air (jetpam)	
			bantuan pembangun (SPAL) Karena merusak lingkungan.	
			Belum adanya balai warga pembinaan masyarakat tingkat RT dan RW tidak optimal	
			belum adanya MCK untuk warga	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Belum optimal nya saluran air yang berdampak banjir di saat musim hujan tiba agar kiranya pemerintah provinsi banten membantunya.(Saluran Air Uditch)	
Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Masyarakat lanjut usia kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membutuhkan santunan dari Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Sudah dianggarkan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti untuk Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU), sejumlah Rp. 500.000,- x 75 Orang per-Kabupaten/Kota (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 600 Orang Anggaran : 300000000
			pelaku usaha kecil kesulitan mengembangkan usahanya (bantuan modal usaha)	Rekomendasi : Sudah dianggarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat untuk Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), sejumlah Rp. 2.500.000,- x 90 Orang (8 Kabupaten/Kota) Koefisien : 720 Orang Anggaran : 180000000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	belum maksimalnya pemeliharaan fasilitas bagi panti jompo di Kota Serang	Rekomendasi : Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial yang Belum Memadai bagi Panti Jompo Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti pada UPTD Perlindungan Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Koefisien : 60 Orang Anggaran : 500000000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU permukiman sehingga masyarakat membutuhkan pembangunan jalan	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BELUM OPTIMALNYA KEGIATAN IPSI BANTEN SEHINGGA MEMBUTUHKAN UNTUK KEGIATAN FESTIVAL SENI	Rekomendasi : Usulan diproses dengan kegiatan mengaktifkan ruang publik berkreas secara berkelanjutan kepada IPSI dengan tujuan berdampak secara ekonomi pada pelaku seni/ pedepokan dan masyarakat sekitar. Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : 500000000
Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Kurangnya pengetahuan menyebabkan sebagai pemuda kesulitan mengembangkan bakat kewirausahaan	Rekomendasi : 0 Koefisien : 1 Lembaga Anggaran : 50000000
administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	pelayanan kependudukan diberikan supot dan pelayanan yang jauh lebih baik lagi, seperti pembuatan KTP, KK, akte lahir dan lain-lain nya	Rekomendasi : pelaksanaan fasilitasi pendaftaran kependudukan sesuai lokasi Koefisien : 1 laporan Anggaran : 30000000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Minimnya pengetahuan menyebabkan Ibu-ibu rumah tangga kesulitan meningkatkan pendapatan keluarga	Rekomendasi : BinteK peningkatan pendapatan keluarga di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	MENGUSULKAN AGAR PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN BISA MAJU DAN BERKEMBANG	Rekomendasi : pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 40000000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	belum optimalnya bantuan untuk kaum perempuan	Rekomendasi : pelaksanaan peningkatan industri rumahan perempuan di lokasi usulan Koefisien : 40 orang Anggaran : 30000000
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	warga mengharapkan bantuan subsidi modal usaha kecil menengah serta bantuan alat-alat produksi dan akses pemasaran produk	Rekomendasi : Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitasi Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000
		Pendidikan dan Latihan-UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	belum optimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM	Rekomendasi : Dngn Cttan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rnckn u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dgn PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 50 orang Anggaran : 100000000
		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Lebih Mengoptimalkan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Agar Bisa Maju Dan Berkembang	Rekomendasi : Dngn Cttan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rnckn u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dgn PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 200 JUTA Anggaran : 200000000
			Perlu Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan bagi masyarakat prakerja dan UMKM serta membangun pelatihan dan pembiayaan kemitraan bersama dinas terkait, Koperasi, dan dari Per-bankkan	Rekomendasi : Dngn Cttan UKM Mengacu Pada PP No 7 Tahun 2021 Dlm Renja 2023 tih di rnckn u/ Keg. pelatihan dan pemberdayaan sesuai dgn PP No 7 tahun 2021 Kewenangan Provinsi adalah Usaha Kecil yang Omsetnya 2 M s.d 15 M dan Modal Usaha 1 M s.d 10 M Koefisien : 70 Orang Anggaran : 100000000
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	warga membutuhkan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah dan bantuan alat-alat produksi	Rekomendasi : Dalam renja 2023 telah direncanakan untuk kegiatan sosialisasi Fasilitasi Akses permodalan melalui perbankan dan non perbankan dan terkait dengan permodalan mengacu pada Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koefisien : 250 orang Anggaran : 100000000
Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terjadi pendangkalan dan penyempitan menyebabkan fungsi drainase lingkungan tidak optimal	

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	banyaknya polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor, dan mulai punahnya pepohonan, masyarakat menginginkan adanya ruang terbuka hijau	Rekomendasi : Lokasi akan di survey untuk menentukan jenis dan jumlah pohon untuk penghijauan lingkungan Koefisien : 1000 meter Anggaran : 20000000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan hidup menyebabkan kondisi lingkungan tidak terjaga dengan baik	Rekomendasi : Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 2 Lembaga bank sampah Anggaran : 50000000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	bantuan pemerintah tidak tepat sasaran	Rekomendasi : Jumlah SDM dan lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Koefisien : 25 Orang Anggaran : 50000000
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat meminta alat kebersihan berupa Tong Sampah karena lingkungan yang padat penduduk	Rekomendasi : diakomodir pada program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk masyarakat Koefisien : 30 buah tong sampah Anggaran : 40000000
Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Semakin langka dan mahalnya harga kebutuhan pokok	Rekomendasi : Bisa, Untuk pemberian bantuan pangan langsung kepada masyarakat dengan beberapa kriteria yang diatur dalam Pergub No 13 Tahun 2020 Koefisien : 300 orang Anggaran : 37500000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Harga Padi yang tidak menentu, Menghambat Perekonomian Petani	Rekomendasi : Bisa, Masuk kegiatan GPM (Gerakan Pangan Murah) Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 9000000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	belum Optimalnya Penyediaan Prasarana Program Ketahanan Pangan	Rekomendasi : Sudah diakomodir untuk pembuatan lantai jemur untuk Kabupaten Pandeglang Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 49532000
			terganggunya lalu lintas jalan warga. Masyarakat mengharapkan penataan tiang listrik yang berdiri yang mengganggu aktivitas warga	Rekomendasi : Tiang listrik dan jaringannya merupakan kewenangan PT. PLN, jadi PT. PLN yang akan menanganinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. PLN. Koefisien : 5 tiang Anggaran : 2500000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	petani kurang mampu membutuhkan rumah ketahanan pangan	Rekomendasi : Bisa, Masuk dalam kegiatan Pemanfaatan Lahan Perkarangan untuk KWT atau Kelompok Tani Koefisien : 2 Unit Anggaran : 32500000
Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	keterbatasan modal bagi pelaku usaha kecil sangat mengharapkan subsidi dari pemerintah provinsi baik langsung melalui data desa maupun bantuan melalui pinjaman Bank	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti berupa kegiatan fasilitasi mempertemukan usaha kecil dengan pelaku usaha/BUMD Banten (Jamkrida) Koefisien : 120 orang Anggaran : 250000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Usuran Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	kesulitan mengurus dokumen perizinan bagi pelaku usaha	Rekomendasi : Dapat ditindaklanjuti, kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan Koefisien : 50 orang Anggaran : 150000000
Perhubungan	Dinas Perhubungan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Belum optimalnya sarana dan prasarana penerangan jalan umum	Rekomendasi : Akan dilakukan survei pendahuluan kebutuhan PJU pada ruas jalan Provinsi yang berdekatan dengan lokasi yang diusulkan (jika dimungkinkan dapat dilakukan pemasangan PJU pada lokasi dimaksud) Koefisien : 5 titik Anggaran : 200000000
	Dinas Perhubungan	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	belum optimalnya pembangunan lampu penerangan jalan	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 15 unit Anggaran : 60000000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000
			Belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 5 Meter Anggaran : 30000000
			belum adanya PJU di kawasan permukiman rawan kecelakaan dan kriminal (PJU)	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 260 titik Anggaran : 338000000
			Belum Optimalnya Penyediaan Perlengkapan Penerangan Jalan, Sehingga masyarakat Membutuhkan Penerangan Jalan Umum	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 unit Anggaran : 260000000
			Dengan minimnya fasilitas Penerangan jalan khususnya pada malam hari, Warga masyarakat berharap adanya bantuan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayahnya untuk menunjang kegiatan warga pada malam hari serta meminimalisir tindak kejahatan dan juga untuk terhindar dari kecelakaan.	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan. jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 105 Titik Anggaran : 1470000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
			Dengan minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), yang menyulitkan warga untuk beraktifitas terutama pada malam hari yang juga rawan akan kegiatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut	Rekomendasi : Jalan provinsi terletak pada lokasi yang diusulkan, sehingga akan dilakukan survei pendahuluan ke lokasi usulan, jika memungkinkan secara teknis, usulan dapat direalisasikan pada lokasi dimaksud Koefisien : 20 Titik Anggaran : 260000000
			Pembuatan Zona selamat sekolah (ZOSS) di SD 1 Warunggunung	Rekomendasi : Usulan sedang dalam proses pelaksanaan pada APBD tahun 2022 Koefisien : 300 meter Anggaran : 268299680
	Dinas Perhubungan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	warga meminta dipasang PJU sepanjang jalan lingkungan kelurahan cigoong	
Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	belum optimalnya pembinaan dan pelatihan	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0
		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Banyaknya pengangguran sehingga salah satu cara mengatasinya perlu diadakan pelatihan – pelatihan dan pembinaan	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			belum optimalnya lapangan Pekerjaan Sehingga Masyarakat Masih Banyak yang membutuhkan Pekerjaan.	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			Belum Optimalnya Pelatihan Kerja sehingga Warga meminta ada pelatihan khusus ibu-ibu	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 0 Anggaran : 0
			Belum Optimalnya Pembinaan dan Pelatihan kepada sehingga masyarakat membutuhkan Platihan pelatihan khusus	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 Peserta Anggaran : 0
				Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 50 Orang Anggaran : 0
			pembangunan / penambahan Balai Latihan Kerja	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 5 UNIT Anggaran : 0
		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	belum optimalnya penanganan penambahan pengangguran	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 250 jiwa Anggaran : 0
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	belum optimalnya pembinaan pemuda yang masih produktif	Rekomendasi : Akan disesuaikan dengan anggaran di tahun 2023 Koefisien : 100 orang Anggaran : 0
		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	banyaknya orang pribumi yang masih menganggur sehingga warga meminta lapangan pekerjaan	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 0
			Kurang optimalnya penanganan Calo yang semakin banyak di lingkungan pabrik.	Rekomendasi : Direncanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Koefisien : 10 TITIK Anggaran : 0
			masalah pengangguran yang semakin meningkat di tengah pandemi covid-19 dan menyediakan lapangan kerja secara luas dan sistematis.	Rekomendasi : Akan Disesuaikan dengan Kegiatan dan Anggaran di Tahun 2023 Koefisien : 50 orang Anggaran : 0
Urusan Pilihan				
Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	belum optimalnya pembinaan dan bantuan alat untuk mempermudah nelayan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		dan Pulau-Pulau Kecil		Banten Koefisien : 50 buah Anggaran : 250000000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan hasil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000
		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kurangnya alat tangkap ikan menyebabkan para nelayan mengalami kesulitan meningkatkan hasil tangkapan ikan laut sehingga membutuhkan bantuan Pemerintah Provinsi Banten	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 Nelayan Anggaran : 175000000
			Masyarakat meminta mempermudah pelayanan terhadap penerbitan surat izin kapal pengangkut ikan, izin usaha pembudidayaan ikan, dan surat izin penangkapan ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 Paket Anggaran : 180000000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	belum optimalnya pasokan ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1 kelompok Anggaran : 155000000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan budidaya ikan lele	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 1500 Bibit Lele Anggaran : 100000000
			permohonan bantuan budidaya ikan	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 50 kg Anggaran : 100000000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	permohonan pengembangan peningkatan produksi home industri	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten Koefisien : 20 unit Anggaran : 175000000
	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi Pelelangan Ikan	Nelayan mengeluhkan kondisi tempat pelelangan ikan yang sudah rusak	Rekomendasi : Bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan DKP Provinsi Banten [Sub Kegiatan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan] Koefisien : 100 meter Anggaran : 150000000
Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Pengutan pemebudayaan ekonomi khususnya perempuan pada desa wisata	Rekomendasi : Program dan Kegiatan yang diusulkan akan diakomodir sesuai kebutuhan Koefisien : 50 orang Anggaran : 50000000
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Belum tertata dengan baik, destinasi belum secara optimal dimanfaatkan perlu adanya revitalisasi Situ Hiang Cikamunding	Rekomendasi : Dalam Rencana Kerja TA. 2023 dapat diakomodir dalam Rancangan Pengembangan Tematik Siteplan Kec. Cilograng Kab. Lebak Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	tempat yang bagus dan strategis tetapi sarana dan prasarana tidak memadai sehingga kurangnya daya tarik masyarakat	Rekomendasi : Program dan Kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Koefisien : 1 lokasi Anggaran : 200000000
Perdagangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Belum Optimalnya Pengelenggaraan PSU Pemukiman sehingga masyarakat membutuhkan Pelebaran Jembatan	
			Tidak adanya taman bermain, Masyarakat mengharapkan adanya taman yang asri di wilayah Kelurahan Poris Gaga	
Pertanian	Dinas Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Irigasi yang sudah rusak menyebabkan sistem pengairan belum optimal sehingga perlu diperbaiki untuk mengaliri pesawahan yang mayoritas penduduknya bertani	
			Masyarakat masih menggunakan alat tradisional dalam bertani	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000
			Masyarakat mengharapkan bantuan untuk kelompok Tani berupa Traktor untuk meninjau kegiatan pertanian	Rekomendasi : - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 buah Anggaran : 30000000
			Para petani belum mampu menyediakan prasarana pertanian sehingga membutuhkan bantuan mesin potong rumput	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 3 unit Anggaran : 6600000
			pesawahan yang datarannya lebih tinggi / tak terjangkau oleh aliran air (kering) membutuhkan Alkon penyedot air	Rekomendasi : - perlu verifikasi lapangan ulang - Perlu ditambahkan kelompok tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 29200000
			petani masih menggunakan alat seadanya untuk membajak sawah sehingga membutuhkan waktu yang sedikit lama (bantuan hand tractor)	Rekomendasi : - perlu di Verifikasi Kembali - Perlu ditambahkan Data Kelompok Tani Koefisien : 1 unit Anggaran : 30000000
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Sulitnya untuk mendapatkan bibit yang kualitasnya baik, agar petani mendapatkan hasil panen yang baik agar para petani tidak merasa kecewa dalam hasil panennya yang kurang baik juga ditambah dengan kurangnya benih padi di pesawahan	Rekomendasi : bantuan berbasis Kelompok Tani dengan volume 7.500 Kg dengan kebutuhan benih 25 kg per ha maka luasan yang dibutuhkan sekitar 300 ha lahan padi sawah dengan format Demfarm Padi sawah disesuaikan dengan alokasi anggaran Koefisien : 7500 Kg Anggaran : 112500000
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Ketersediaan Jalan Usaha Tani (JUT) kurang memadai	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga mengusulkan bantuan dari pemerintah untuk memberikan bibit ternak bebek telur (Bibit ternak bebek telur)	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 150 Bibit Anggaran : 20000000
			masyarakat mengharapkan adanya pemberdayaan peternak bebek	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 50 ekor Anggaran : 30000000

Urusan	Perangkat Daerah	Usulan	Permasalahan	Keterangan
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ketersediaan Bibit jeruk serat madu kurang memadai	Rekomendasi : dikembalikan, komoditi tidak sesuai Koefisien : 4000 bibit Anggaran : 1
			Masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan bantuan bibit ternak kambing, ayam, bebek	Rekomendasi : ditindaklanjuti Koefisien : 14 Bibit Kambing Anggaran : 40000000
			Masyarakat Membutuhkan Bibit Palawija, Bibit anggis, Bibit Petai, dan Bibit Durian	Rekomendasi : 500 bibit petai 500 bibit durian Koefisien : 1000 bibit Anggaran : 150000000
Urusan Penunjang Pemerintahan				
	Sekretariat Daerah	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Majlis Ta'lim kurang memadai	
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Bantuan Dana Hibah untuk Sarana dan Prasarana tempat ibadah, baik Mesjid, Mushola, maupun Majelis Ta'lim, terkait bantuan anggaran dari Pemkab mengenai pengajuan proposal dapat dipermudah secara pengadministrasiannya, oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Pemerintah Provinsi Banten	
			bantuan rehabilitasi mushola	
			belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan pondok pesantren dan kesejahteraan guru pesantren	
			kurangnya insentif untuk para guru madrasah dan ponpes (bantuan kesejahteraan guru madrasah)	
			mengharapkan bantuan berupa keranda dan tenda serta tempat pemandian jenazah	
			tidak adanya sarana pendidikan baik majlis maupun madrasah ibtidaiyah	
			tidak layaknya bangunan majelis taklim (renovasi majelis taklim)	

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Daerah provinsi tersebut.

Pada prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2023 memperhatikan Target Pembangunan Wilayah, Prioritas Pembangunan Wilayah, dan Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP 2023 maupun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026.

Dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap target dan sasaran pembangunan pemerintah maupun pemerintah provinsi diimplementasikan berdasarkan RPJMD kabupaten/kota melalui arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, target pembangunan yang ditetapkan untuk

wilayah Provinsi Banten dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta RKP Tahun 2023, untuk tahun 2023 kemudian diturunkan ke dalam target pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2023.

Sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota, maka arahan Kebijakan Pembangunan Pemerintah kabupaten/kota untuk tahun 2023, dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini, adalah sebagai berikut:

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Pandeglang	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	4,65 - 4,78	4,46
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	9,80	9,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	8,39	8,32

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026

²⁾ RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021- 2026

Berdasarkan prioritas nasional tahun 2023, lokus pada Kabupaten Pandeglang adalah :

Program Prioritas

- Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada lima KP diantaranya KEK Tanjung Lesung, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon–Halimun–Bandung–Pangandaran;
- Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 termasuk KPPN Pandeglang.

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Pemulihan Pasca Bencana (termasuk Kawasan Pesisir Selat Sunda) (lokus Provinsi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang);
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Pandeglang yaitu :

- Peningkatan Kapasitas Jalan berupa pelebaran ruas Jalan Mengger – Caringin;
- Penanganan banjir pada Sungai Cilemer dan Sungai Cibama;
- Pembangunan Gedung pada Kawasan Strategis Provinsi berupa Revitalisasi Makam Syekh Manshur – Cikadueun;
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- Pembangunan USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKh;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Labuan;
- Optimalisasi Pelabuhan Perikanan (PP) di Cikeusik dan Labuan;
- Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT);
- Pembangunan Irigasi Tersier dan Perpipaan;
- Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Aset Provinsi di Cikoncang.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Pandeglang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pandeglang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya ▪ Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya ▪ Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Pemantapan kualitas kinerja layanan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ▪ Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan ▪ Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ▪ Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta ▪ Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat ▪ Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Pemantapan kualitas kinerja layanan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan ▪ Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Pemantapan kualitas kinerja layanan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan ▪ Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan ▪ Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan ▪ Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat ▪ Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	Pemantapan kualitas kinerja layanan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan kesehatan lingkungan ▪ Pencegahan dan penanggulangan penyakit ▪ Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	▪ Pemantapan kualitas kinerja layanan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p>	▪ Percepatan pemulihan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial ▪ Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial ▪ Pelayanan dan rehabilitasi sosial ▪ Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan ▪ Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan ▪ Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha ▪ Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial ▪ Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha ▪ Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya ▪ Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak ▪ Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan ▪ Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa ▪ Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa ▪ Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan ▪ Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana ▪ Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana ▪ Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p>	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
	<i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Peningkatan prasarana dan sarana olahraga Pembinaan manajemen keolahragaan 	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Misi 2	<i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i> <ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi Pemberian insentif pajak bagi investor Jaminan kepastian hukum berusaha Promosi investasi 	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM Pembinaan manajemen usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah
	<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan manajemen usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i>	Peningkatan sarana dan prasarana

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	fasilitas investasi daerah.
	<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi aksesibilitas pasar ▪ Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi kerjasama perdagangan ▪ Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas investasi daerah.
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata ▪ Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata ▪ Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata ▪ Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata ▪ Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan ▪ Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	Peningkatan kualitas sarana prasarana sumber- sumber PAD potensial
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan ▪ Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan ▪ Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan ▪ Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan ▪ Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan ▪ Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan 	Pemantapan pengelolaan potensi sektor unggulan ekonomi daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	
	<i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan pelabuhan Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP Revitalisasi jaringan kereta api Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan bandar udara yang ada Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Pengelolaan pengendalian banjir</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan prasarana pengendalian banjir Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik Peningkatan pemanfaatan energi alternatif Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i>	Pemantapan kualitas infrastruktur

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	Pemantapan kualitas infrastruktur
Misi 3	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i> <ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	Pemantapan kualitas infrastruktur
	<i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i> <ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	Pemantapan kualitas infrastruktur
Misi 4	<i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kompetensi sesuai bidang keahlian Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur 	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah ▪ Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah ▪ Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain ▪ Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik ▪ Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik ▪ Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik ▪ Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah ▪ Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah ▪ Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik ▪ Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat ▪ Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pandeglang
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	
	<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum Penegakan dan penataan produk hukum daerah Penegakan supremasi hukum 	
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	

5.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Lebak untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Lebak	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	4,95 - 5,08	4,0
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	8,88	9,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	8,14	9,4

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026
²⁾ RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten Lebak adalah :

Program Prioritas

- Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada lima KP diantaranya KEK Tanjung Lesung, Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon–Halimun–Bandung–Pangandaran;
- Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan, Kota Baru Maja, 3 kota besar (diantaranya Serang) dan 11 kota sedang (diantaranya Cilegon).

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) diantaranya SPAM Regional Karian Serpong;
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Lebak yaitu :

- Penanganan banjir pada Sungai Cimadur;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi);
- Pengelolaan Situ/Waduk Cikoncang;
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Regional berupa IPAL Regional WKP III;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Cilograng;
- Optimalisasi Pelabuhan Perikanan (PP) di Binuangeun;
- Pembangunan Gedung Panti Terpadu.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Lebak, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak, sebagai berikut :

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lebak

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan Bagi Masyarakat, pemeliharaan desa adat
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan Partisipasi Pendidikan dan Menurunkan angka Putus Sekolah
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata, meningkatkan Partisipasi Pendidikan dan Menurunkan angka Putus Sekolah
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan 	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	<p>Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang terjangkau dan merata peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan</p>
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<p>Optimalisasi Penanganan PMKS, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat serta Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</p>
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<p>Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan, peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>
	<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	<p>Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan, peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit dalam Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>
	<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak • Meningkatkan Pemenuhan hak anak • Meningkatkan Keberdayaan dan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	Pengendalian Kelahiran, Menurunkan TFR dan pelayanan Kesehatan Reproduksi
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan pelayanan publik secara prima
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Meningkatkan Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda, peran serta Kepemudaan, kewirausahaan dan kecakapan hidup, prestasi pemuda
	<p><i>Peningkatan pasyarakat dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pasyarakat olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Meningkatkan prestasi keolahragaan, jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik kabupaten Lebak
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Investasi, peningkatan Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Meningkatkan Produktivitas sektor UMKM, Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan, produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing
	<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pembinaan manajemen usaha ● Fasilitasi modal usaha ● Fasilitasi aksesibilitas pasar ● Fasilitasi kerjasama perdagangan ● Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Pertanian dan Perkebunan serta Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengelolaan Hasil Produksi ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah subsektor Peternakan ● Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah sub sektor perikanan, produksi usaha Perikanan yang mandiri dan berdaya saing
	<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	
	<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitasi aksesibilitas pasar 	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	<p>Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dan peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan</p>
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	<p>Tumbuhnya Industri Pariwisata unggulan Daerah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan Daya Tarik Wisata</p>
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	<p>Terjaminnya Ketersediaan, Distribusi dan Pemanfaatan Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Konsumsi Pangan</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	Meningkatkan ketaatan pengguna jalan, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
		pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Peningkatan pelayanan air bersih</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, sanitasi, gedung pemerintah dan penataan ruang, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pembangunan jalan perdesaan, pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir
	<i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	Terjagakan Kualitas Lingkungan Hidup
	<i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	
	<i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Meningkatkan pengguna teknologi Informasi Pemerintah Daerah, komunikasi informasi pemerintah daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses dalam rangka optimalisasi pelayanan publik
	<i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
	<i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
Misi 3	<i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i>	Persentase Penggunaan lahan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	Persentase Penggunaan lahan berdasarkan RTRW, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hunian, rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, serta penanganan fungsi PSU lingkungan perumahan
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	Mewujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Lebak
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah
	<p><i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	<p><i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	Meningkatkan Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

5.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang dalam RKPd 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kabupaten Tangerang	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	4,66 - 4,79	5.9
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,49	N/a
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	9,71	8.80

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026
²⁾ RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten Tangerang adalah :

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) diantaranya SPAM Regional Karian Serpong;
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota;
- Pemulihan 4 DAS Kritis diantaranya DAS Cisadane.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Tangerang yaitu :

- Pembangunan USB, RKB dan Bangunan Pendukung SMA, SMK, SKh;
- Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Aset Provinsi di Situ Gede.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
	<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	
	<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p>	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelebagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
	<p><i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintis wilayah selatan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
Misi 3	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pemaduan serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<p><i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i></p>	Penguatan dan pemantapan kualitas tata

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel

5.1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kabupaten Serang untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kabupaten Serang dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	RPD ¹⁾	Kabupaten Serang RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) ^o	5,02 - 5,15	4,46 - 4,59	2,42
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	4,60	4,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	12,07	11,55

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026
²⁾ RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kabupaten Serang adalah :

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

Pemulihan Pasca Bencana (termasuk Kawasan Pesisir Selat Sunda)
(lokus Provinsi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang):

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kabupaten Serang yaitu :

- Pembangunan Jalan Baru pada ruas jalan Cikeusal-Boru, Jalan (Baru) Lingkar Baros, ruas Jalan Tonjong-Banten Lama, Jalan Lingkar Selatan Serang (ruas Palima - Kramat Watu), serta Jalan Baru Penopang Industri WKP II;
- Peningkatan Kapasitas Jalan pada ruas jalan Palima – Untirta, ruas jalan Palima – Cinangka, ruas jalan Pakupatan – Palima, ruas jalan Sempu – Dukuh Kawung, Pelebaran ruas jalan Mancak – Anyer, serta pelebaran ruas jalan Palima - Baros (Palima - Sport Centre);
- Penanganan banjir pada Sungai Cibanten;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi);
- Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional JDU Sindangheula;
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) berupa Busines plan koridor 3;
- Terminal Barang/Pusat Distribusi/Rest Area.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kabupaten Serang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang, sebagai berikut :

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal • Penguatan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan seni budaya, kearifan lokal dan nilai budaya tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan</p>
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	<p>Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar</p>
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat</p>
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan 	<p>Mengendalikan penyakit menular langsung dan penyakit bersumber</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	binatang serta penyehatan lingkungan
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul • Peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
	<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	Peningkatan Kerjasama Pengembangan, pengerahan dan fasilitasi penempatan pada wilayah Transmigrasi
	<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan • Pelindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi <p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil • Peningkatan Kapasitas Sistem, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
	<p><i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Memperbaharui dan mensosialisasikan kebijakan penanaman modal dan perijinan-perijinan serta meningkatkan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses pasar UMKM dan koperasi ke daerah daerah yang potensial • Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi UKM dan Koperasi
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komoditas unggulan pertanian • Peningkatan produksi perikanan tangkap

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
<i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha pertanian (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil pertanian) • Pengembangan sistem pemasaran produk agro • Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha perikanan (SDM, kelembagaan dan manajemen, modal, teknologi dan sarana produksi, pemasaran hasil perikanan)
<i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	
<i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	Roadmap pengembangan potensi sektor Industri
<i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata
<i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata 	Pengembangan Desa Wisata dan Roadmap Pemulihan Destinasi Wisata

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	Peningkatan keamanan pangan
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	Pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan daya dukung dan kualitas Jalan dan Jembatan yang menghubungkan kawasan strategis, sentra produksi dan pemasaran
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Laut
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan bandar udara yang ada Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan 	
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah sentra produksi pertanian
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan prasarana pengendalian banjir Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan dan sarana produksi lainnya di wilayah sentra produksi pertanian
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan masyarakat
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional <i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i> Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik Peningkatan pemanfaatan energi alternatif Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu big data Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Layak Huni • Penataan kawasan perumahan dan pemukiman • Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan pemukiman • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	<p>Penataan kawasan kumuh perkotaan</p>
Misi 3	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	<p>Penataan kawasan guna mendukung harmonisasi dan keberlanjutan wilayah</p>
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	<p>Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan</p>
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan di perkotaan • Meningkatkan perlindungan, konservasi, rehabilitasi dan pemulihan SDA LH
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	<p>Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arah Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	<p>Peningkatan kualitas SDM, disiplin kerja dan kesejahteraan aparatur</p>
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan system Perencanaan Pembangunan Daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah • Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	<p>Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik</p>
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	<p>Peningkatan Pendapatan dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	Penguatan tugas-tugas kewilayahan
	<p><i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	Penguatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	<p><i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	Penguatan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Tangerang untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang
dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Tangerang	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	4,1 - 4,23	4,86
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	4,89	4,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	7,23	7,54

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026
 ²⁾ RPJMD Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota Tangerang adalah :

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) diantaranya SPAM Regional Karian Serpong;
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota;
- Pemulihan 4 DAS Kritis diantaranya DAS Cisadane.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kota Tangerang yaitu :

- Peningkatan Kapasitas Jalan berupa pelebaran Jalan Hasyim Ashari;
- Pengelolaan Situ Cipondoh;
- Optimalisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Tangerang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang, sebagai berikut :

Tabel 5.10.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Meningkatkan kualitas sumber daya (fasilitas, peralatan, sanggar, SDM) kebudayaan serta mengembangkan festival budaya dan pagelaran kesenian daerah, taman budaya, museum kota dan kawasan cagar budaya
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kurikulum, manajemen kelembagaan, sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, minat, bakat, prestasi peserta didik, serta penguatan pendidikan karakter akhlak mulia, kesusilaan, budaya, kreatif dan inovatif serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan non formal
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p>	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>memenuhi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat</p>
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pengendalian dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, produksi pangan (makanan minuman), serta kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat • Meningkatkan pengendalian dan penanganan Pandemi Covid 19 (protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru (AKB), pola hidup bersih dan sehat) dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<p>Meningkatkan perlindungan, jaminan dan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberdayaan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial serta memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin sebagai dampak resesi ekonomi Pandemi Covid 19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi dan sosial</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
<i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<p>Memperluas bursa tenaga kerja dan wirausaha serta mengembangkan kelembagaan, pelatihan, serifikasi kompetensi, produktivitas, penempatan dan perlindungan tenaga kerja sebagai dampak resesi ekonomi Pandemi Covid 19 sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi</p>
<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	
<i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Meningkatkan pelayanan paten kecamatan dan kelurahan serta koordinasi & pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan
<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	<p>Meningkatkan advokasi dan pendayagunaan PLKB dan kader KB serta memperkuat kesertaan KB dan ketahanan kesejahteraan keluarga</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	Mengembangkan dan meningkatkan sistem online dan mobile dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Mengembangkan, meningkatkan dan membina kualitas SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana kepemudaan
	<p><i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Mengembangkan dan mengelola sarana, prasarana dan fasilitas olah raga serta meningkatkan pemasyarakatan dan prestasi olahraga
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Menyederhanakan sistem dan mempermudah pelayanan investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta mengembangkan insentif dan disinsentif investasi
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19 Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana prasarana produksi, kualitas produk yang kreatif dan inovatif, promosi dan pemasaran usaha mikro sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<p>Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan serta kesehatan hewan sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19</p>	
<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	<p>Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19</p>	
<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	<p>Meningkatkan fasilitasi pemberdayaan IKM sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19</p>	
<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	<p>Mengembangkan dan meningkatkan pasar tradisional yang bersih dan modern serta tata niaga perdagangan serta membina pelaku usaha perdagangan</p>	
<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	<p>Mengembangkan potensi, destinasi, promosi, sumber daya manusia, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19</p>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	<p>Mengendalikan stabilitas ketersediaan bahan pangan strategis yang berkualitas dan terjangkau serta mengembangkan kerjasama penyediaan bahan pangan strategis</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	<p>Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	<p>Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem transportasi umum, meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana angkutan umum dan penerangan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan penertiban angkutan jalan</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	Mengembangkan kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	Mengembangkan kapasitas dan merehabilitasi sistem jaringan drainase dan sumber daya air
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pengembangan jaringan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pengelolaan persampahan berbasis 3R dan kapasitas TPA • Pengembangan jaringan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik
	<p><i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur data center, layanan internet/intra net, standarisasi dan integrasi aplikasi sistem informasi pelayanan publik dan pemerintahan serta meningkatkan desiminasi dan kemitraan komunikasi publik untuk mendukung smart city
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p>	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas parasana sarana dasar

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas sarana dasar permukiman serta mengembangkan rumah susun layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Misi 3	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi, harmonisasi dan pepadu serasian rencana tata ruang wilayah Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ruang terbuka hijau, taman, tempat bermain anak dan keluarga serta dekorasi kota Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	Menyusun dan mensosialisasikan rencana tata ruang serta mengendalikan pemanfaatan ruang
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	Meningkatkan penataan dan kapasitas lingkungan hidup serta pemantauan kualitas, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasankawasan rawan bencana alam Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	Mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah serta mendayagunakan penelitian dan pengembangan pembangunan yang inovatif
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	Membangun dan memelihara gedung pemerintah daerah dan pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	Meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dan akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan pemanfaatan aset daerah

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang
<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	
<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat
<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	
<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban masyarakat

5.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Tangerang Selatan untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan
dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Tangerang Selatan	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	6,68 - 6,81	6,25 - 7,06
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	1,80	1,89
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	5,43	7,58
Keterangan :	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 ²⁾ RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026		

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota Tangerang Selatan adalah :

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting; yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten / kota
- Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta SR) diantaranya SPAM Regional Karian Serpong;
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota;
- Pemulihan 4 DAS Kritis diantaranya DAS Cisadane.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Tangerang Selatan, yang

diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut :

Tabel 5.12
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	<p>Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan</p>	
<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<p>Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan</p>	
<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<p>Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif</p>	
<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	<p>Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif</p>	
<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa 	<p>Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan</p>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
	<p><i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p>	Mendorong pertumbuhan investasi

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan manajemen usaha Fasilitasi modal usaha Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kerjasama perdagangan Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi aksesibilitas pasar Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kerjasama perdagangan Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	Mendorong pertumbuhan investasi sektor perdagangan dan jasa terutama ekonomi kreatif
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	Pengembangan sistem jaringan transportasi publik masal perkotaan
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p>	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	Pengembangan sistem jaringan transportasi publik masal perkotaan
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
Misi 3	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	
	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan.
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p>	Penguatan tatakelola pemerintahan dan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<p><i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i></p>	Penguatan tatakelola pemerintahan dan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Tangerang Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
	<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	Penguatan tatakelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

5.1.7 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten sehingga arah kebijakan pembangunan di Kota Serang dapat mencerminkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten (Kota Serang sebagai etalase Provinsi Banten).

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Serang untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.13
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Serang
dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	5,74 - 5,87	5,5
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	5,69	5,76
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	8,20	8,96
Keterangan :	¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 ²⁾ RPJMD Kota Serang Tahun 2018 - 2023		

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota Serang adalah :

Program Prioritas

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan, Kota Baru Maja, 3 kota besar (diantaranya Serang) dan 11 kota sedang (diantaranya Cilegon).

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kota Serang yaitu :

- Pembangunan Jalan Baru pada ruas jalan Cikeusal-Boru, ruas Jalan Tonjong-Banten Lama, serta Jalan Lingkar Selatan Serang (ruas Palima - Kramat Watu);
- Peningkatan Kapasitas Jalan pada ruas Jalan Pakupatan – Palima, serta ruas Jalan Sempu – Dukuh Kawung;
- Pembangunan Fly Over pada Fly Over Sudirman;
- Penanganan banjir pada Sungai Cibanten;
- Rehabilitasi Daerah Irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi);
- Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional JDU Sindangheula;
- Pembangunan Gedung pada Kawasan Strategis Provinsi KP3B dan Banten Islamic Center (Baitul Quran);
- Pembangunan Land Mark Provinsi Banten;
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) berupa Busines plan koridor 2 dan 3;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSJKO di Walantaka;

- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur: Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di KP3B.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Serang, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Serang, sebagai berikut :

Tabel 5.14
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Serang

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
Misi 1	<i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah; Penyelenggaraan dan partisipasi pada event dan festival budaya daerah; Peningkatan implementasi seni budaya daerah; Kerja Sama Pengembangan Budaya Daerah
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan, pengembangan kurikulum, kompetensi pendidik dan ketenagapendidikan; pengendalian perijinan Pendidikan; pengembangan bahasa dan sastra
	<i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan, pengembangan kurikulum, kompetensi pendidik dan ketenagapendidikan; pengendalian perijinan Pendidikan; pengembangan bahasa dan sastra
	<i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i>	Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, penguatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan, serta Penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah (BLUD)</p>
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan kesehatan masyarakat 	<p>Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan, pemberdayaan masyarakat kesehatan, penguatan jaminan dan pembiayaan Kesehatan, serta Penguatan kelembagaan badan layanan umum daerah (BLUD)</p>
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<p>Peningkatan pelayanan dasar sosial dan perlindungan sosial yang komprehensif melalui peningkatan akses pelayanan, Penanganan fakir miskin, peningkatan kualitas PSKS dan peningkatan Akses pemeliharaan TMPN</p>
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; Penyusunan Data Base Tenaga Kerja; Pembinaan Kelembagaan Penyedia Tenaga Kerja, Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Masyarakat; Peningkatan Hubungan Industrial; Pembinaan dan penempatan transmigrasi</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
<i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain 	
<i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; Pembinaan, pemberdayaan organisasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perempuan • Penyelenggaraan pelayanan PATEN yang prima; Peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; Peningkatan infrastruktur kecamatan dan kelurahan; pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan
<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
<i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan implementasi inovasi pelayanan kependudukan dan catatan sipil
<i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui pembinaan dan Pengembangan Pemuda
<i>Peningkatan pemyarakatan dan prestasi olah raga</i>		Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	melalui pembinaan olah raga berprestasi dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kerjasama strategis dan promosi penanaman modal
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	Peningkatan kelembagaan, pengembangan usaha, fasilitasi dan kemitraan koperasi; pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan usaha mikro melalui pembinaan kreativitas, pemberdayaan dan promosi
	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan
	<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	Peningkatan Produksi dan pengembangan produk pertanian unggul berdsarkan permintaan pasar dan dukungan sumber daya melalui perbaikan infrastruktur pertanian dan penguatan kelembagaan
	<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan 	Penataan dan peningkatankerjasama promosi dan kemitraan; mutual relationship; Pengembangan teknologi dan inovasi industri kecil

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 	<p>Penataan dan peningkatan kerjasama promosi dan kemitraan; mutual relationship; Pengembangan teknologi dan inovasi industri kecil</p>
	<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	<p>Peningkatan Kontribusi kinerja perdagangan Ekspor; pembangunan, penataan dan pengelolaan pasar; dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting</p>
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	<p>Pengembangan dan penataan destinasi/objek wisata; Pembinaan dan fasilitasi usaha jasa wisata; Pembangunan sarana, jaringan informasi pariwisata; pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</p>
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	<p>Peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui Perumusan Kebijakan dan Penyusunan APBD serta Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD, Penataan pengelolaan BMD, dan peningkatan pendapatan daerah melalui PBB dan BPHTB, PAD Bukan Pajak</p>
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan 	<p>Peningkatan Ketersediaan dan cadangan pangan; pengendalian kerawanan pangan; penganekaragaman konsumsi pangan; peningkatan keamanan pangan</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan Perumusan kebijakan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan pelabuhan Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	<p>Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan Terminal type C; pengelolaan pelayaran</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	<p>Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP Revitalisasi jaringan kereta api Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	<p>Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan Terminal type C; pengelolaan pelayaran</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan bandar udara yang ada Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	<p>Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan; pengelolaan perparkiran; penataan dan pengendalian potensi titik kemacetan; pengelolaan Terminal type C; pengelolaan pelayaran</p>
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	<p>Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air</p>
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan prasarana pengendalian banjir 	<p>Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air
	<p><i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik Peningkatan pemanfaatan energi alternatif Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembangunan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik; peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung e-government dan transformasi infrastruktur IT era digital
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu 	Penataan dan pengembangan perumahan, Kawasan permukiman, dan peningkatan sarana,

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	<p>prasarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p>
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	<p>Penataan dan pengembangan perumahan, Kawasan permukiman, dan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas umum (PSU), serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p>
Misi 3	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	<p>Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air</p>
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III 	<p>Pembangunan fasilitas umum dan pelayanan publik, Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan dan pengembangan sumber daya air; Pembanguan dan penataan drainase yang berwawasan lingkungan; Penanganan area genangan air</p>
	<p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	<p>Peningkatan kualitas Perencanaan dan pengawasan lingkungan hidup; pengendalian pencemaran lingkungan hidup; pengelolaan RTH; Pengendalian dan pengelolaan Limbah B3; dan pegelolaan persampahan</p>
	<p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Penataan kawasankawasan rawan bencana alam Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	<p>Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tanggap darurat dan logistik bencana penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi; pencegahan, penanganan</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
		dan penanggulangan kebakaran
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	Pengembangan aparatur melalui Pembinaan pegawai, penempatan dan kemahiran kerja aparatur; peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan penyediaan data dan informasi; Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kepegawaian
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia, serta infrastruktur kewilayahan; Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	Peningkatan kerjasama Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait yang berkapasitas pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; Pengembangan dan penerapan hasil inovasi dan teknologi
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertical 	Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-government; evaluasi saki dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur
	<p><i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah 	Penyediaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik; serta kebijakan pembinaan pemerintahan umum; pengembangan e-

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Serang
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	<p>government; evaluasi saking dan penataan kelembagaan; peningkatan aparatur</p>
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
	<p><i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	
	<p><i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	<p>Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS</p>
	<p><i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; pengendalian dan penanganan pelanggaran peraturan daerah; pembinaan penyidik PNS

5.1.8 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon

Target pembangunan yang ditetapkan untuk Kota Cilegon untuk Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15
Target Pembangunan Provinsi Banten dan Kota Cilegon
dalam RKPD 2023

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2023		
	Provinsi Banten ¹⁾	Kota Cilegon	
		RPD ¹⁾	RPJMD ²⁾
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,02 - 5,15	4,92 - 5,05	4,91
Tingkat Kemiskinan (%)	5,58	3,53	3,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,67	10,24	10,46

Keterangan : ¹⁾ RPD Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026

²⁾ RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026

Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, lokus pada Kota Cilegon adalah :

Program Prioritas

Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan, Kota Baru Maja, 3 kota besar (diantaranya Serang) dan 11 kota sedang (diantaranya Cilegon).

Proyek Prioritas Strategis (Major Project)

- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting yaitu percepatan penurunan stunting di 514 kabupaten/kota (ditambah dengan penanganan balita stunting) serta percepatan penurunan kematian ibu tahun 2023 di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, dengan lokus penghapusan kemiskinan ekstrem di 514 kabupaten/kota;
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; yaitu pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia (34 provinsi dan 514 kabupaten/kota);
- Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% RT) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam RPD Provinsi Banten Tahun 2023, lokus pada Kota Cilegon yaitu :

- Pembangunan Jalan Baru pada Jalan Baru Penopang Industri WKP II;
- Pembangunan Banten Jawa Sumatera (BJS) Rest Area.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi RKPD Provinsi Banten memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Cilegon, yang diterjemahkan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon, sebagai berikut :

Tabel 5.16
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cilegon

Misi RPJPD:	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
Misi 1	<p><i>Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya • Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya • Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota • Pengembangan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota • Peningkatan fasilitasi program lembaga- lembaga keagamaan dan penggerak kegiatan keagamaan di tingkat wilayah
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan • Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan • Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta • Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat • Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 	<p>Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah</p>
	<p><i>Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan Iptek dan berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan • Fasilitasi Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha 	<p>Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah serta peningkatan akreditasi sekolah</p>
	<p><i>Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal • Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan beresiko
	<p><i>Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal • Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal • Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan, perluasan cakupan dan kualitas pengawasan obat dan pangan beresiko
	<p><i>Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitasi bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS 	<p>Rehabilitasi sosial dasar PMKS dengan prioritas pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti</p>
	<p><i>Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitasi kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitasi penumbuhan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan • Peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi serta fasilitasi pemagangan pada perusahaan • Pembinaan lembaga pelatihan kerja
	<p><i>Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha 	

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan penyelenggaraan kerjasama transmigrasi dengan daerah lain 	
	<p><i>Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitasi manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan • Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui program-program di bidang ekonomi dan sosial, dalam upaya mendukung pencapaian sasaran program pembangunan • Peningkatan peran kelembagaan perempuan dalam pemberdayaan perempuan • Peningkatan perlindungan perempuan melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan • Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemenuhan hak anak • Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak
	<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi kapasitas kelembagaankeluarga berencana • Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan Keluarga Berencana • Peningkatan kualitas keluarga melalui peningkatan peran serta ormas dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta usaha lainnya melalui penguatan kebijakan daerah
	<p><i>Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil • Peningkatan edukasi masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan • Peningkatan penerapan regulasi tentang sanksi/insentif

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
		kepemilikan dokumen kependudukan
	<p><i>Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor • Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan • Peningkatan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
	<p><i>Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan 	Peningkatan kualitas pembinaan dan penghargaan atlet olahraga prestasi, penyelenggaraan event olahraga prestasi, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan organisasi olahraga prestasi
Misi 2	<p><i>Peningkatan iklim investasi yang kondusif</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha • Promosi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan perijinan dan non perijinan serta pengelolaan data dan informasi secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal • Pemberian insentif/fasilitasi kemudahan berusaha penanaman modal • Peningkatan investasi daerah dengan prioritas pada sektor pengelolaan limbah industri, perdagangan dan keuangan
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fasilitasi usaha pelaku usaha mikro kecil meliputi konsultasi bisnis, pendampingan atau inkubasi usaha, promosi, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, jaringan kerjasama usaha serta layanan informasi usaha

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk 	<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan UMK dengan usaha retail modern serta pengembangan kampung UMK • Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya • Peningkatan nilai tambah produk perikanan • Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
<p><i>Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<p><i>Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya • Peningkatan nilai tambah produk perikanan • Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan 	<p><i>Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) • Peningkatan pengendalian dan evaluasi kepatuhan industri dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional • Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan prioritas pada pemutakhiran data
<p><i>Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar 		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) • Peningkatan pengendalian dan evaluasi kepatuhan industri dalam penyampaian data ke sistem informasi industri nasional • Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
		nasional dengan prioritas pada pemutakhiran data
	<p><i>Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan menuju pasar rakyat ber-SNI
	<p><i>Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata • Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata • Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan event kreatif dengan prioritas pada penyelenggaraan festival seni budaya dan fasilitasi pelaku seni budaya • Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	<p><i>Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan jasa keuangan • Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan 	<p>Peningkatan investasi daerah dengan prioritas pada sektor pengelolaan limbah industri, perdagangan dan keuangan</p>
	<p><i>Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan • Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan • Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan • Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan • Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan • Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan • Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan diversifikasi pangan • Peningkatan pengawasan keamanan pangan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<p><i>Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan pelabuhan • Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan • Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perelengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
	<p><i>Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas • Pengembangan kerjasama pengelolaan sistem transportasi Jawa Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dengan prioritas pada pembangunan JLU, peningkatan jalan penghubung tingkat kecamatan dan kelurahan, jalan akses ke lokasi wisata, KPT serta jalur evakuasi dan mitigasi bencana
	<p><i>Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung dan kualitas sarana terminal dan ASDP • Revitalisasi jaringan kereta api • Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perelengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)</p>
	<p><i>Peningkatan pelayanan bandar udara</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bandar udara yang ada • Pengembangan bandar udara perintidi wilayah selatan 	<p>Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perelengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)</p>
	<p><i>Peningkatan pengelolaan sumberdaya air</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) • Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi 	<p>Pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan dan sungai</p>
	<p><i>Pengelolaan pengendalian banjir</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan prasarana pengendalian banjir 	<p>Pembangunan dan peningkatan sistem</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase 	drainase perkotaan dan sungai
	<p><i>Peningkatan pelayanan air bersih</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih 	Pengelolaan dan pengembangan SPAM melalui jaringan perpipaan
	<p><i>Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) • Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan dan pengurangan persampahan • Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik
	<p><i>Peningkatan pelayanan energi dan listrik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik • Peningkatan pemanfaatan energi alternatif • Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan 	
	<p><i>Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu • Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan 	Integrasi sistem informasi layanan pemerintahan, integrasi layanan aduan, peningkatan layanan jaringan SPBE, peningkatan layanan pusat data
	<p><i>Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu • Fasilitasi usaha pengembangan perumahan 	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
	<p><i>Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman • Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh 	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penyediaan PSU
Misi 3	<p><i>Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinkronisasi, harmonisasi dan pemadu serasian rencana tata ruang wilayah • Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang • Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada penyusunan RRTR serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang • Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan prioritas

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<p><i>Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I • Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II • Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III <p><i>Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya • Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup • Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup <p><i>Mitigasi dan penanggulangan bencana alam</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan rawan bencana alam • Fasilitasi penanggulangan bencana alam 	<p>pada penyediaan ruang terbuka publik yang representatif dan ramah difabel serta penyediaan fasilitas hobi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dengan fokus pada penyusunan RRTR serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang • Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan prioritas pada penyediaan ruang terbuka publik yang representatif dan ramah difabel serta penyediaan fasilitas hobi <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta penyediaan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana • Peningkatan sarana prasara penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi dan mitigasi bencana, pemasangan rambu dan sistem peringatan dini serta penyediaan tempat evakuasi bencana sementara dengan fasilitas pendukungnya
Misi 4	<p><i>Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan • Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur 	<p>Peningkatan Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan pegawai, promosi dan mutasi berdasarkan prestasi dan kompetensi (hasil</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi sesuai bidang keahlian • Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur • Peningkatan kualitas kearsipan daerah 	assessment), integrasi sistem informasi kepegawaian, pemberian TPP berdasarkan kinerja
	<p><i>Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah • Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah • Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas pengendalian pembangunan, serta pembangunan Satu Data Pembangunan Daerah
	<p><i>Peningkatan kerjasama pembangunan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain • Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong percepatan Kerjasama Pemerintah Swasta dalam pembangunan Pelabuhan Warnasari melalui pendekatan politis, dukungan regulasi dan perijinan serta peningkatan tata kelola manajemen • Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam optimalisasi pemanfaatan asset daerah • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung perhubungan (perelengkapan jalan, halte, pju dsb nya) serta melakukan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam pengelolaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)
	<p><i>Peningkatan kualitas pelayanan publik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan publik • Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah • Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu yang ditunja oleh penguatan regulasi, tata kelola, sarana prasarana pelayanan • Pengelolaan pengaduan secara terpadu, tindaklanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh serta mendorong peningkatan inovasi pelayanan • Peningkatan inovasi pelayanan publik di tingkat kewilayahan, pengelolaan

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
<i>Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah • Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik • Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah 	<p>pengaduan secara terpadu, serta tindak lanjut hasil penilaian kepuasan masyarakat secara menyeluruh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sdm, aset, keuangan, perencanaan; informasi dan kearsipan di tingkat perangkat daerah • Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset daerah • Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta dalam optimalisasi pemanfaatan aset daerah
<i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat • Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah 	
<i>Fasilitasi Pembinaan daerah otonom baru</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan • Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru 	
<i>Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan peraturan perundang-undangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai hukum • Penegakan dan penataan produk hukum daerah • Penegakan supremasi hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah • Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan
<i>Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi • Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik 	<p>Perumusan, pelaksanaan dan Pemantauan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemilu serta situasi politik</p>

Misi RPJPD	Fokus Kebijakan	Arahan Kebijakan Pembangunan pada RPJMD Kota Cilegon
<p><i>Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib • Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban daerah • Peningkatan sinergitas dengan instansi vertikal, tomas dan toga dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kewilayahan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil valuasi pembangunan tahun 2021, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2023 serta pagu indikatifnya. Rencana Kerja dan Pembangunan tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2023. Musrenbang merupakan akumulasi dari tahapan perencanaan, melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, *top down* dan *bottom up*. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Banten. Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2023 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Daerah.

6.2. Pendanaan Daerah

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, serta sumber pendanaan lainnya.

6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk memastikan dukungan masing-masing dalam pencapaian target pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi teknis merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional yang hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana kegiatan yang di danai dari APBN dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana kegiatan tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (RAKORTEKRENBANG), Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS).

6.2.2 Rencana Program Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat effect multiplier (efek pengganda).

Bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh

ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSKBL Perusahaan meliputi :

- a. Sosial, yang di fokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial;
- b. Pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan;
- c. Kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata;
- d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- f. Pemberdayaan Masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan UMKM/IKM;
- g. Infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih;
- h. Lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah.

6.2.3 Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBD Provinsi Banten Tahun 2023 ditujukan untuk melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka

Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang.

Rekapitulasi Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Provinsi Banten Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.985.411.968.000
2	Dinas Kesehatan	1.132.196.950.657
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	604.910.000.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	591.700.000.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	44.900.000.000
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.000.000.000
7	Dinas Sosial	107.950.000.000
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	84.300.000.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	33.888.200.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	48.260.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	68.440.000.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.030.000.000
13	Dinas Perhubungan	65.850.000.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	60.800.000.000
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.347.036.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.457.244.000
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	84.200.000.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.060.000.000
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	96.500.000.000
20	Dinas Pariwisata	39.260.000.000
21	Dinas Pertanian	115.800.000.000
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	45.400.000.000
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	54.300.000.000
24	Sekretariat Daerah	266.075.000.000
25	Sekretariat DPRD	377.700.000.000
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.425.000.000
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.230.652.283.015
28	Badan Pendapatan Daerah	310.500.000.000
29	Badan Kepegawaian Daerah	66.700.000.000
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	55.700.000.000
31	Badan Penghubung	12.640.000.000
32	Inspektorat	74.700.000.000
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91.233.621.000
	JUMLAH	10.958.287.302.672

Rekapitulasi Pagu Indikatif berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNANDAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	358.568.181.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.800.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.750.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	50.750.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	40.700.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	600.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	5.000.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	129.800.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	176.500.000.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	76.950.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	52.556.950.000
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	21.672.579.300
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	427.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	24.799.305.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.580.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	1.050.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.332.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	352.480.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	900.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.250.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	628.200.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	6.400.000.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.707.244.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	550.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	950.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	350.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.050.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	17.349.340.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.008.500.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	800.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.670.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14.492.355.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.915.855.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.600.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.200.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.539.438.916
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20.868.562.673
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.323.542.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	900.000.000
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.900.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	330.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGA LISTRIK	17.796.244.000
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.100.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.100.000.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.531.600.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	710.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.260.393.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000
2	MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.560.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.800.000.000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.520.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	41.000.000.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.650.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	280.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	589.350.416.810.594
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	88.892.214.700
		PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	245.540.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.206.606.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.949.750.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.118.414.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	49.054.802.500
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.434.816.000
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.839.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	10.300.000.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.400.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.600.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGA KERJAAN	950.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.268.424.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.165.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.494.955.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	630.000.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	365.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	565.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	324.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.894.400.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	462.930.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	450.986.000
		PROGRAM PENATAAN DESA	500.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1.535.000.000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.424.040.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.330.888.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.950.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	56.482.239.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.781.902.250
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.870.000.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.550.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.332.165.000
3	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	18.600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	120.170.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	15.909.969.200
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	624.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	975.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI (KEHATI)	351.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.419.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	646.000.000
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHAYANG TERKAIT DENGAN PPLH	384.546.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	584.000.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	585.000.000
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	468.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.174.885.000
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.380.470.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	32.144.544.212
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN	403.650.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	958.788.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	507.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.340.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000
4	MENINGKATKAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.632.901.278.560
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.352.396.000
		PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.675.000.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.419.915.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	580.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	190.512.000

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	74.488.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.779.573.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.513.812.358
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.400.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.800.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.483.915.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	594.500.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000
		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.377.423
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.849.583.000
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.971.519.285
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	93.754.553.000
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.400.000.000
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.470.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	12.478.074.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.180.430.137.341
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	21.885.851.650
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.869.552.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	734.013.500
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.534.215.655
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	32.078.070.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.360.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	1.500.000.000

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	28.995.138.828
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.406.969.262
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.665.866.000

Rekapitulasi Pagu Indikatif berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.3
Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Prioritas Nasional Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH Mendukung PRIORITAS NASIONAL
PN-1	Prioritas-1		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	187.841.383.516	3,78
Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program pengelolaan energi terbarukan	330.000.000	
Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	39.000.000.000	
	Program pengelolaan hutan	1.307.700.000	
	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	1.917.576.000	
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	21.672.579.300	
	Program penanganan kerawanan pangan	2.727.000.000	
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	1.320.000.000	
	Program pengawasan keamanan pangan	427.000.000	
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	13.950.815.916	
	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	200.000.000	
	Program perizinan usaha pertanian	500.000.000	
	Program penyuluhan pertanian	6.100.000.000	
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	803.542.000	
	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	2.100.000.000	
Peningkatan pengelolaan	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	900.000.000	

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITY (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
kemaritiman, perikanan dan kelautan	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	550.000.000	
	Program pengelolaan perikanan tangkap	14.939.340.000	
	Program pengelolaan perikanan budidaya	4.941.300.000	
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	750.000.000	
Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	3.066.000.000	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	1.100.000.000	
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1.200.000.000	
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	2.919.074.300	
	Program pengembangan umkm	628.200.000	
	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	760.000.000	
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	21.367.046.000	
	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	1.800.000.000	
	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	710.000.000	
	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Program perencanaan dan pembangunan industri	6.640.000.000
Program pengendalian izin usaha industri		600.000.000	
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional		300.000.000	
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata		14.492.355.000	
Program pemasaran pariwisata		1.915.855.000	
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		1.600.000.000	
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif		1.200.000.000	
Program pelayanan penanaman modal		550.000.000	
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		1.600.000.000	
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		350.000.000	
Program pengembangan iklim penanaman modal		6.400.000.000	
Program promosi penanaman modal		3.000.000.000	
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		Program pengembangan ekspor	1.206.000.000
PN-2	Prioritas-1		
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	7.814.928.000	0,16

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
Pembangunan wilayah Jawa Bali	Program penataan desa	500.000.000	
	Program peningkatan kerja sama desa	1.535.000.000	
	Program administrasi pemerintahan desa	2.424.040.000	
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	3.355.888.000	
PN-3	Prioritas 2		
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	784.890.402.738	16
Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Program pengendalian penduduk	565.000.000	
	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	324.000.000	
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	1.894.400.000	
	Program pendaftaran penduduk	1.419.915.000	
	Program pencatatan sipil	580.000.000	
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	190.512.000	
	Program pengelolaan profil kependudukan	74.488.000	
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program pemberdayaan sosial	1.949.750.000	
	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	75.000.000	
	Program rehabilitasi sosial	3.630.044.000	
	Program perlindungan dan jaminan sosial	50.631.868.500	
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program penanganan bencana	3.434.816.000	
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	573.545.230.088	
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.206.606.900	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.677.502.000	
Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	245.540.000	
	Program pengelolaan pendidikan	4.920.000.000	
	Program pengembangan kurikulum	2.800.000.000	
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	109.520.000.000	
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program pengendalian perizinan pendidikan	200.000.000	
	Program pemenuhan hak anak (pha)	630.000.000	
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	1.268.424.000	
	Program peningkatan kualitas keluarga	2.494.955.000	
	Program perlindungan perempuan	462.930.000	

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH Mendukung PRIORITAS NASIONAL
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	200.000.000	
	Program perlindungan khusus anak	365.000.000	
	Program pengembangan daya saing keolahragaan	48,593,239,000	
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	3.950.000.000	
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	1.781.902.250	
Pengentasan Kemiskinan	Program perlindungan dan jaminan sosial	49,054,802,500	
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	3.950.000.000	
	Program penelitian dan pengembangan daerah	3.550.000.000	
	Program perencanaan tenaga kerja	92.839.000	
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	3,000,000,000	
	Program penempatan tenaga kerja	3.400.000.000	
	Program hubungan industrial	2.600.000.000	
	Program pengawasan ketenagakerjaan	259.680.000	
PN-4	Prioritas 2		
Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	35.755.130.655	0,72
Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	4.534.215.655	
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program pengembangan kebudayaan	4,100,000,000	
	Program pengelolaan permuseuman	3.492.500.000	
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1.650.000.000	
Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	Program kesejahteraan rakyat	19.480.000.000	
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Program pembinaan perpustakaan	2.870.000.000	
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.650.000.000	
	Program pengelolaan arsip	1.483.915.000	

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	594.500.000	
PN-5	Prioritas-1		
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	522.146.744.719	11
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Program pengembangan perumahan	18,600,000,000	
	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	52.556.950.000	
	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	300.000.000	
	Program pengembangan permukiman	5.000.000.000	
	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100.000.000	
	Program redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	200.000.000	
	Program penatagunaan tanah	200.000.000	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	50.750.000.000	
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	1.000.000.000	
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	500.000.000	
Infrastruktur Ekonomi	Program penyelenggaraan jalan	278,247,461,600	
	Program pengembangan jasa konstruksi	2.800.000.000	
	Program pengelolaan pelayaran	1,480,000,000	
	Program pengelolaan perkeretaapian	1.050.000.000	
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	245,000,000	
	Program kawasan permukiman	76.950.000.000	
	Program penataan bangunan gedung	129.800.000.000	
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	176.500.000.000	
Energi dan ketenagalistrikan	Program pengelolaan ketenagalistrikan	17.796.244.000	
Transformasi Digital	Program pengelolaan aplikasi informatika	6.643.550.719	
PN-6	Prioritas 3		
Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	38.520.299.400	1
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	975.000.000	507.000.000
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	646.000.000	
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	128.419.200	
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	585.000.000	

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	351.000.000	
	Program perencanaan lingkungan hidup	624.000.000	
	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	384.546.000	
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	468.000.000	
	Program pengelolaan persampahan	1.174.885.000	
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	584.000.000	
	Program pengelolaan hutan	3745590000	
	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	2.028.427.000	
	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	403.650.000	
	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	1.917.576.000	
	Program penyelenggaraan penataan ruang	3.750.000.000	
	Program pengelolaan aspek kegeologian	2.340.000.000	
	Program pengelolaan mineral dan batubara	579.237.000	
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program penanggulangan bencana	15.909.969.200	
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.925.000.000	
PN-7	Prioritas 4		
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	3.387.264.793.832	68
Konsolidasi Demokrasi	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23.704.449.000	
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	1.275.000.000	
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.431.470.000	
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.431.470.000	
	Program perencanaan pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	8.400.000.000	
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	1.400.000.000	
	Program penataan organisasi	2.954.766.000	
	Program penyelenggaraan pengawasan	7.869.552.000	
	Program pengelolaan keuangan daerah	3.182.385.911.746	
	Program pengelolaan barang milik daerah	12.478.074.000	
	Program pengelolaan pendapatan daerah	21.485.897.550	
	Program kepegawaian daerah	9.665.866.000	
	Program pengembangan sumber daya manusia	20.332.165.000	

PRIORITAS NASIONAL (PN)/ PROGRAM PRIORITAS (PP)	PRIORITAS DAERAH/PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERSENTASE PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	1.971.519.285	
	Program fasilitasi dan koordinasi hukum	3.265.377.423	
	Program pengelolaan arsip	1.483.915.000	
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10.779.573.000	
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	2.800.000.000	
	Program pengelolaan aplikasi informatika	23.643.826.000	
	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	10.779.573.000	
Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	5.371.250.000	
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1.360.000.000	
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	28.995.138.828	
JUMLAH		4.964.233.682.860	

Selanjutnya pagu indikatif pada Perangkat Daerah yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dalam rangka pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Banten diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6.4
Pagu Indikatif Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
A. BIDANG PENDIDIKAN		1.687.606.109.122
1. Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	42.500.000.000
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	5.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.000.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	1.000.000.000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.500.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	6.325.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	266.409.527.450
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20.350.000.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	250.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.200.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	400.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	325.859.532.550
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	80.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	400.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.100.000.000
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.250.000.000
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	520.000.000
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	109.000.000.000
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.000.000
2. Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	75.000.000.000
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	37.500.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.000.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.000.000.000
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3.500.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.340.000.000
	Pembangunan Fasilitas Parkir	1.000.000.000
	Pembangunan Kantin Sekolah	1.000.000.000
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	1.000.000.000
	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	1.000.000.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2.000.000.000
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	480.000.000
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	480.000.000
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	480.000.000
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	480.000.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	500.000.000
	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	500.000.000
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	8.000.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	247.156.265.742
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	2.450.000.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	400.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.240.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	400.000.000
	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	10.000.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	407.396.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	400.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	80.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	400.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000
3. Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	11.000.000.000
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	400.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.177.000.000
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	157.244.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.500.000.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	400.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	400.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	12.700.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	460.000.000
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	100.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.300.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	400.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	27.792.580.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	82.959.380
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	80.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	80.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	400.000.000
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	400.000.000
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	130.000.000
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	320.000.000
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	40.000.000
B. BIDANG KESEHATAN		689.690.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	586.020.000
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	103.670.000
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM		51.350.000.000
1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.000.000.000
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	200.000.000
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	500.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	3.000.000.000
	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	46.050.000.000
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	300.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	300.000.000
D. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		11.450.000.000
1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	500.000.000
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	500.000.000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	9.000.000.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	200.000.000
2. Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	250.000.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	250.000.000
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	250.000.000
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000
E. BIDANG TRANTIBUMLINMAS		925.000.000
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	525.000.000
2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	400.000.000
F. BIDANG SOSIAL		4.172.971.500
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	398.292.000
	Penyediaan Sandang	70.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	157.300.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	6.100.000

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	537.892.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	384.622.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	45.500.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.247.000
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial	Penyediaan Makanan	635.355.000
	Penyediaan Sandang	57.678.200
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	42.783.800
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	290.746.000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	14.300.000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	151.195.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.730.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	33.926.000
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	44.640.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	92.358.000
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial	Penyediaan Sandang	182.749.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	78.010.000
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	39.756.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	21.087.500

JENIS SPM	SUB KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp)
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi	Penyediaan Permakanan	213.640.800
	Penyediaan Sandang	111.100.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	152.025.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	266.359.200
	Pelayanan Dukungan Psikososial	115.579.000
JUMLAH		1.756.193.770.622

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan tahun 2023 untuk mendukung terwujudnya sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan prioritas nasional. Rencana pendanaan indikatif dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 kedalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2023. Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pendanaan Program Kegiatan dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara rinci dapat dilihat pada buku III.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah

mempunyai indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJA pada akhir RKPD (TAHUN 2026)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,27	74,1
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,58	5,37
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,02 - 5,15	5,27 - 5,41
4	Indeks Gini	Nilai	0,354	0,339
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,67	8,2
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66	81
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	17	20
8	Indeks Williamson	Nilai	0,622	0,618
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	65,19	66,24
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,40	70,83
11	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,50	22,00
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	93,07	93,91
13	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,75	14,30
14	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,11	9,40
15	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	55,03	58,63
16	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Nilai	49,42	51,67
17	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,13	71,06
18	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Sosial	Persen	7,74	7,79
19	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,665	0,695
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	62,99	63,14
21	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Nilai	147,37	140,02
22	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168	12.573
23	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Level	Tinggi	Sangat Tinggi
24	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	3,97	6,82
25	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	4,39	4,66
26	LPE Sektor Industri	Persen	4,99	5,69
27	LPE Sektor Perdagangan	Persen	2,44	4,24
28	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan	Persen	0,68	1,04
29	Indeks Persepsi Anti-Korups (IPAK)	Nilai	2-3	2-3
30	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	3,47	3,53
31	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi	Nilai	69,77	80,00
32	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	82,20	87,60
33	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten	Level	Cukup Tangguh	Tangguh

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

7.1. Indikator Kinerja Kunci

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah / Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Provinsi Banten

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN, 2023	TARGET KINERJApada akhir RKPD (TAHUN 2026)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
BIDANG PENDIDIKAN				
1	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	71,34	74
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	63,04	66
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,7	10,7
BIDANG KESEHATAN				
5	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	40	70
6	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	100
7	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	81	78
8	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,7	4,4
9	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
10	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	40	70
11	Meningkatnya kualitas rumah dan penataan kawasan permukiman yang layak	Persen	32,42	100
12	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	277,63	0
BIDANG SOSIAL				
13	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,4	5,51
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
14	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100
15	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76	100
16	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	10,1

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJApada akhir RKPD (TAHUN 2026)
1	2	3	4	5
17	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	100
18	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,81	78,75
19	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	43,86	53,21
20	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	100	100
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
21	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,61
22	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100
23	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
BIDANG KEBUDAYAAN				
24	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,2	3,5
25	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5	5
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)		74,18	74,3
26	b. b. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,44	54,5
	c. c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,1	80,4
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
27	Angka Kelahiran Tota TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,38	2,17
BIDANG PENANAMAN MODAL				
28	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Trilyun Rupiah	60	65
29	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,22	86,97
BIDANG KEARSIPAN				
30	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	A
BIDANG PERSANDIAN				
31	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273	583
BIDANG PANGAN				
32	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	70,73	72,23
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
33	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,8	93,05
34	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,25	3,55
BIDANG TENAGA KERJA				
35	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	68,26	76,04
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
36	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,5	0,58
37	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	50	55
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
38	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,26	70,76
39	Indek Perlindungan Anak	Nilai	74,55	79,31

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJA pada akhir RKPD (TAHUN 2026)
1	2	3	4	5
BIDANG PERPUSTAKAAN				
40	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	16
41	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	67,3	75,3
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
42	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100
BIDANG STATISTIK				
43	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
44	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	35
45	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai klaster	Persen	5	5
BIDANG PERHUBUNGAN				
46	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,7	19,1
47	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72	0,75
48	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82	85
BIDANG PERTANAHAN				
49	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
50	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	14,22	0
51	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	13,49	15,91
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
52	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Gegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25	96,02
53	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5	40
54	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2	99
BIDANG KEHUTANAN				
55	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,1	35,4
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
56	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	102	108
57	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.569	246.942
BIDANG PARIWISATA				
58	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922	23.223.025
BIDANG PERDAGANGAN				
59	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,48	13,64
BIDANG PERINDUSTRIAN				
60	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,43	6,46
BIDANG PERTANIAN				
61	Produksi Peternakan	Ton	225.907	261.855
62	Produksi Hortikultura	Ton	23.714	28.508
63	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2051611	2.374.997
64	Produksi Perkebunan	Ton	50.855	54.835
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
65	Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60	41 - 60

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	TARGET KINERJA pada akhir RKPd (TAHUN 2026)
1	2	3	4	5
66	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60	81
67	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,8	100
68	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	85
69	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	12
70	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100
71	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100
72	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100
73	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100
74	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100
75	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SEKRETARIAT DPRD	Skor/ Nilai	4,24	4,39
76	Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	Persen	100	100
77	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	1
78	Maturitas SPIP	Nilai	3,14	3,44
79	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	17
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
KEUANGAN				
80	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
81	Kemandirian Keuangan	Persen	63,55	65,44
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
82	Indeks Inovasi Daerah KEPEGAWAIAN	Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
83	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5	357
84	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	24,48	35
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
85	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	10,23	13,23
PERENCANAAN				
86	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	45	51
PENGHUBUNG				
87	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3	4
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
88	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	77,55	80,05
89	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100
NON URUSAN				
90	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari Tahapan dan Skala Prioritas RPJMD KE-5 (Tahun 2023-2025) / Tahap Modernisasi pada RPJPD Provinsi Tahun 2023-2025. RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten Tahun 2023-2025, serta Program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, maka indikator dan target kinerja mengacu pada indikator dan target kinerja pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, maka dalam rangka mencapai target kinerja pada Tahap ke-5 RPJPD, mengusung tema pembangunan Tahun 2023 adalah “Memperkuat Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Fondasi Tahap Modernisasi”. Prioritas Pembangunan Tahun 2023 diarahkan pada Peningkatan kualitas dan daya saing SDM, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Peningkatan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk tahun 2023.

Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi, daerah kabupaten/kota

dan antar kabupaten/kota, RKPD Provinsi Banten Tahun 2023 ini menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, kabupaten/kota melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi pada tahun 2023.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19670619 199403 1 002